

MOHAMMAD AMIEN RAIS



AGENDA-MENDESAK BANGSA

SELAMATKAN INDONESIA!

Indonesia di Tengah Pusaran Globalisasi

Dalam 30 tahun terakhir, dunia menyaksikan bangkitnya imperialisme ekonomi yang dilancarkan negara-negara Barat, negara-negara eks kolonialis, lewat apa yang dinamakan globalisasi. IMF, Bank Dunia, dan WTO adalah tiga institusi pilar globalisasi.

Mereka membangun sistem korporatokrasi yang berunsurkan korporasi besar, kekuatan politik pemerintah, lingkaran militer, perbankan dan keuangan internasional, media massa dan kelompok intelektual prokemapanan. Unsur-unsur korporatokrasi itu dapat menerobos ke negara-negara berkembang dengan bantuan elite nasionalnya yang bersedia menjadi komprador atau pelayan kepentingan korporatokrasi. Sementara itu *Pax Americana* yang memimpin supremasi atau hegemoni Amerika Serikat telah membonceng proses globalisasi itu.

Sayang sekali, pemerintahan Yudhoyono membawa Indonesia ke posisi subordinasi di bawah korporatokrasi internasional itu. Indonesia tidak mungkin memelihara kemerdekaan, kedaulatan, dan kemandiriannya apabila Indonesia tetap menjadi subordinat kepentingan kapitalis dunia. Buku ini menawarkan agenda yang perlu kita kerjakan bersama.

MOHAMMAD AMIEN RAIS dilahirkan di Solo, Jawa Tengah, 26 April 1944. M. Amien Rais menyelesaikan SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah dan SMA Muhammadiyah di kota kelahirannya. Ia juga belajar di Madrasah Mamba'ul Ulum dan Madrasah Al-Islam Surakarta. Tahun 1962-1968 berkuliah di FISIPOL UGM dan Fakultas Tarbiyah IAIN Jogjakarta. Studi S2 diselesaikan di Universitas Notre Dome (1974), sedangkan S3 diselesaikan di Universitas Chicago (1981), keduanya di Amerika Serikat. Pernah menjadi mahasiswa luar biasa di Universitas Al-Azhar, Cairo, Mesir pada 1978-1979. Kedua orang tuanya, Sudalmiyah binti Soekiman Wiryosudarmo dan Syuhud Rais bin Umar Rais mengharapakan Amien kecil menjadi ulama.

M. Amien Rais pernah menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah (1995-1998), Ketua Dewan Pakar ICMI (1995-1998), Ketua Umum DPP PAN (1999-2005), Ketua MPR-RI (1999-2004) dan kini Ketua MWA UGM (2006 -) dan Ketua MPP DPP PAN (2004 -). Falsafah hidupnya : hidup adalah ibadah. Salah satu pengalaman penting dalam hidupnya adalah ketika menggerakkan reformasi 1998-1999 bersama mahasiswa Indonesia.



ISBN 978-979-17617-1-0



9 789791 176171 0

Mohammad Amien Rais

Agenda Mendesak Bangsa

Selamatkan Indonesia!

Koleksi Pribadi
A. Mudjahid Chudari
emceha184@yahoo.com

A g e n d a - M e n d e s a k B a n g s a
S e l a m a t k a n I n d o n e s i a !
Hak Cipta © M. Amien Rais

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
M. Amien Rais,
Agenda Mendesak Bangsa
Selamatkan Indonesia!
Yogyakarta: PPSK Press, 2008
298 + xvi pp, 16 x 24 cm
ISBN (paper back): 978-979-17617-1-0
ISBN (hard cover): 978-979-17617-0-3

Cetakan Kedua, April 2008
Penerbit PPSK Press
Jl Blimbingsari GK V 27, Yogyakarta, 55223
Tel/Fax: +62 274 560191
E-mail : contact@cspis-indonesia.org
Dicetak oleh: PT Mizan Publika
Distribusikan oleh: PPSK Press dan PT Mizan Publika
Desain Sampul oleh: A. Noor Arief

Risalah ini dipersembahkan untuk:

Angkatan muda dan mahasiswa Indonesia

Para intelektual dan politisi yang punya hati nurani

Para ulama, zu'ama dan rohaniwan

Para prajurit yang selalu mengingat Sumpah Sapta Marga
dan para bhayangkara yang senantiasa memegang
Sumpah Tri Brata

Para penegak hukum dan keadilan

Segenap tokoh tiga pilar bangsa: buruh, tani dan nelayan

Para pengasuh media massa sebagai *estate* ke empat demo-
krasi

Para penggiat LSM yang tetap mengunggulkan
kepentingan bangsa

Segenap pendidik yang sedang mengukir generasi muda

Semua anak bangsa yang masih peduli dengan martabat
dan harga diri bangsa

Ucapan Terima Kasih

Saya ingin mengucapkan terima kasih pada hamba-hamba Allah yang membantu saya sehingga risalah sederhana ini bisa menjadi kenyataan. Pertama, pada sahabat-sahabat saya yang sering mendorong saya agar saya menulis buku, bukan sekedar artikel di koran atau majalah, atau makalah untuk sebuah seminar.

Mereka itu antara lain adalah Soetrisno Bachir, Yahya A. Muhaimin, Zaim Ukhrowi, Dradjad H. Wibowo, Marwoto Mitrohardjono, Sabri Saiman, Zulkifli Hasan, Asman Abnur, Tjatur Sapto Edy, Alvin Lie, Mohammad Nadjib, Djoko Susilo, dan teman-teman junior di PPSK, Nanang Pamuji, Riza N. Arfani, Rizal Panggabean dan Ilien Halina.

Kedua, mereka yang memberikan bantuan teknis dan fasilitas, dan selalu bertanya, kurang lebih: "Sudah sampai di mana Pak bukunya, *kok* sepertinya belum ada kemajuan?". Siti Nurnisa dan Awan S. Dewanta mengetik, mengoreksi, mengedit, *me-layout*, dan mendiskusikan rencana penerbitan buku dengan Penerbit Mizan. Marthia Adelheida mencari ruang kerja di Gedung Pusat Antar Universitas UGM. Tutiek Masria menyediakan seluruh keperluan stasioner, kertas, *highliter* dan *printer*. Novy Chrystiana, keponakan saya, dengan tekun mengetik sebagian naskah. Terima kasih juga pada Ismail dan A. Noor Arief. Yang pertama membantu memperoleh informasi apa pun yang diperlukan, dan yang kedua merancang penampilan buku ini.

Ketiga, hamba Allah bernama Kusnasriyati Sri Rahayu, istri saya tercinta yang tidak pernah berhenti mengingatkan saya, “kalau punya niat baik, lakukan sampai menjadi kenyataan dengan ikhlas”. Di tengah berbagai kesibukan yang saya jalani, selalu saja istri saya mengingatkan nasib risalah atau monograf atau buku atau apa pun namanya yang sering saya ceritakan padanya, tetapi tidak kunjung selesai.

Tanpa dorongan istri saya, rasanya beberapa pemikiran saya hanya berputar-putar di kepala dan keluar sepotong-sepotong dalam berbagai ceramah atau pengajian saya. Terima kasih saya sepanjang masa untuk hamba Allah yang satu ini. Saya pernah setengah berkelakar mengatakan pada anak-anak saya, “kemungkinan besar ibumu lebih dulu masuk surga daripada bapakmu”.

Keempat, lima anak saya, Hanafi, Hanum, Mumtaz, Tasniem dan Baihaqi. Hanafi, Hanum dan Mumtaz sering “berdebat” dengan saya mengenai banyak hal, di meja makan atau mushola keluarga. Lewat mereka saya dapat memahami bagaimana generasi muda, generasi anak saya melihat persoalan bangsa. Sedangkan Tasniem dan Haqi mengajari saya bagaimana menggunakan internet secara efektif, sehingga mengurangi kegagapan teknologi yang saya derita.

Kelima, teman-teman dosen di FISIPOL UGM, terutama di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, yaitu Ichlasul Amal, Mohtar Mas’oed dan Budi Winarno, yang seringkali saya ajak diskusi rentang berbagai masalah bangsa. Mungkin tidak mereka sadari, bahwa dalam setiap diskusi saya selalu “menyadap” pikiran-pikiran segar mereka.

Keenam, Penerbit Mizan, khususnya sahabat saya Abdillah Toha. Politikus dan intelektual PAN yang disegani banyak kalangan ini langsung atau tidak juga terus mendorong saya untuk menulis sebuah buku.

Akhirnya, dengan selesai diterbitkannya tulisan ini saya mengucapkan *Alhamdulillah Rabbil ‘Alamien*. Segala puji syukur bagi Tuhan seru sekalian alam.

Daftar Isi

Indonesia di Tengah Pusaran Globalisasi	i
Agenda Mendesak Bangsa	ii
Ucapan Terima Kasih	v
Daftar Isi	ix
Kata Pengantar	xi
BAB I. SEJARAH BERULANG	1
BAB II. GLOBALISASI MAKIN LAYU	11
Tidak Ada Pilihan Lain?	15
Globalisasi dan Imperialisme Ekonomi	18
BAB III. KRITIK TAJAM DARI DALAM	29
Posisi Indonesia	47
BAB IV. PAX AMERICANA	55
Pax Americana	58
Doktrin Bush	66
Kritik Terhadap Pax Americana	74
BAB V. KORPORATOKRASI	81
1. Korporasi Besar	83
2. Pemerintah	89
3. Perbankan & Lembaga Keuangan Internasional	94
4. Militer	105
5. Media Massa	115

6. Intelektual Pengabdian Kekuasaan	127
7. Elite Nasional Bermental <i>Inlander</i>	138
BAB VI. KORUPSI PALING BERBAHAYA:	
STATE CAPTURE CORRUPTION	175
Zaman Habibie	185
Zaman Megawati	187
Zaman Yudhoyono	192
BAB VII. KESIMPULAN DAN SARAN: Apa Yang	
Harus Kita Kerjakan?	217
LAMPIRAN	247
SURAT KETUA LIPI	249
BERANIKAH INDONESIA MENGHENTIKAN	
PENJAJAHAN FREEPORT? TIDAK	255
KATA PENGANTAR pada buku: <i>Freeport: Bagaimana</i> <i>Pertambangan Emas dan Tembaga Raksasa "Menjajah"</i> <i>Indonesia</i> , Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indo- nesia (WALHI) dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)	263
ANALISIS KONTRAK KARYA II FREEPORT	266
BEBERAPA KETENTUAN DALAM KONTRAK BAGI	
HASIL YANG CENDERUNG PRO-ASING	270
COST RECOVERY PT PERTAMINA EP	272
DAFTAR PUSTAKA	283
INDEKS	291

Kata Pengantar

Masalah besar Indonesia yang senantiasa bergejolak dalam pikiran saya adalah mengapa kita terus saja miskin, terbelakang dan tercecce dalam derap kemajuan bangsa-bangsa lain. Setiap pengamat atau tokoh barangkali akan menemukan jawaban yang berlainan sesuai latar belakang pengetahuan dan pengalaman masing-masing. Setiap jawaban yang ditemukan pasti mengandung unsur-unsur kebenaran dan semuanya harus diapresiasi, agar kita dapat melihat permasalahan besar bangsa kita secara lebih utuh dan menyeluruh.

Risalah atau monograf atau buku tipis ini mencoba mencari jawaban atas masalah besar di atas. Sebagian pembaca mungkin setuju dengan isi risalah ini, sebagian lainnya mungkin tidak, bahkan mungkin ada yang cenderung marah.

Terus terang bangsa yang kita cintai bersama, bangsa besar Indonesia, bangsa nomor empat terbesar di muka bumi, agaknya sedang mengalami krisis jati diri atau krisis identitas. Banyak hal yang menggembirakan, tetapi juga banyak hal yang menyedihkan, bahkan menyakitkan.

Kita dapat mengambil satu masalah penting, misalnya nasionalisme kita. Dalam kaitan ini kita boleh bangga melihat betapa bangsa kita, lepas dari perbedaan latar belakang,

menganggap olah raga sebagai taruhan prestasi dan prestise nasional. Ketika PSSI berlaga melawan kesebelasan asing di Kejuaraan Piala Asia tahun 2007, Stadion ISTORA Bung Karno seolah-olah mau runtuh. Teriakan dan tepuk tangan membahana, di dalam dan di luar stadion, yang mendukung kesebelasan merah putih sulit disaingi oleh bangsa Asia lainnya.

Ruaar biasa. Juga sebagian besar mata rakyat tertuju ke Thailand mengikuti pesta olah raga ASEAN 2007. Setiap kali tim merah putih memperoleh medali emas, kita bangga bukan main, tetapi setiap kalah kita kecewa luar biasa. Ketika akhirnya Indonesia memperoleh urutan keempat di bawah Thailand, Vietnam dan Malaysia, kita sedih berhari-hari.

Adakah yang salah bila kita memuja, bahkan mengidentifikasikan diri kita dengan tim merah putih ketika bertarung di gelanggang olah raga regional atau internasional? Sama sekali tidak ada yang salah. Memang sudah seharusnya demikian. Akan tetapi mengapa nasionalisme olah raga kita seperti tidak ada kaitan sama sekali dengan nasionalisme ekonomi, nasionalisme politik, nasionalisme pertahanan-keamanan, nasionalisme pendidikan dan nasionalisme bidang kehidupan lainnya?

Nasionalisme olah raga adalah nasionalisme simbolik, karena bersifat kasat mata dan merupakan pajangan *window show* sebuah bangsa. Bila bangsa kita diibaratkan sebuah rumah di pinggir jalan raya, olah raga itu bagaikan pagar depan yang langsung dilihat oleh setiap pengguna jalan raya. Nah, bangsa dan pemerintah kita seperti pemilik rumah di pinggir jalan raya itu yang punya obsesi aneh. Obsesi itu adalah bagaimana pagar rumah itu terlihat selalu bersih, mengkilat, dan tidak boleh berdebu. Adalah tampak muka rumah yang paling penting. Yang lain masa bodoh. Pokoknya, penampilan.

Sehingga ketika perabotan rumah dicuri orang di depan mata si pemilik rumah, ia tidak begitu peduli. Mungkin hanya bisa tersenyum getir. Bahkan ketika istri dan anak-anaknya dibawa keluar oleh orang lain, si pemilik rumah tidak mengambil tindakan apa pun. Ia hanya bisa menonton, seolah tidak ada sesuatu yang perlu dirisaukan. Pokoknya pagar dan wajah depan rumah kelihatan bagus. Itu yang penting. Kira-kira kontradiksi dan ironi seperti itu yang sedang menimpa bangsa kita.

Nasionalisme kita telah menjadi nasionalisme dangkal. Kita bela merah putih hanya dalam hal-hal yang bersifat simbolik, namun ketika kekayaan alam kita dikuras dan dijarah oleh korporasi asing, ketika sektor-sektor vital ekonomi seperti perbankan dan industri dikuasai asing, bahkan ketika kekuatan asing sudah dapat mendikte perundang-undangan serta keputusan-keputusan politik, kita diam membisu. Seolah kita sudah kehilangan harga dan martabat diri.

Padahal tanpa ada kesadaran nasional untuk menegakkan kemandirian dan kedaulatan nasional di bidang ekonomi, politik, dan pertahanan keamanan, barangkali kita tidak perlu lagi bermimpi dan berbicara tentang masa depan Indonesia. Tidak banyak gunanya kita berbicara tentang Indonesia yang kuat secara politik dan militer, Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur secara sosial dan ekonomi, Indonesia yang maju dan cangguh secara ilmu dan teknologi dan Indonesia yang tangguh serta tahan banting secara mental dan spiritual.

Suatu bangsa dan pemerintah yang sudah kehilangan kemandirian, tidak akan bisa lagi membedakan antara patron dan klien, antara majikan dan pelayan, dan antara tuan dan budak. Risalah ini mencoba membedah masalah mendasar bangsa, agar kita tidak terus-menerus terjebak dalam kesemrawutan mental dan seakan bingung tentang jati diri kita sendiri: Jati diri sebagai

bangsa besar yang bebas, merdeka, berdaulat, mandiri dan mampu menentukan nasib sendiri tanpa bergantung pada bangsa lain atau kekuatan asing.

Saya sadar bahwa usulan kritis dalam risalah ini oleh sebagian masyarakat, khususnya Pemerintah Yudhoyono, dianggap terlalu keras dan tajam. Akan tetapi saya yakin, etika demokrasi justru mendorong pertukaran fikiran yang jujur, gamblang dan jelas agar hal-hal yang perlu dikoreksi dapat diangkat ke permukaan dan dipecahkan bersama.

Negara-negara otoriter, apalagi diktatorial, cenderung membasmi perbedaan pendapat. Akibatnya jelas. Ketika kerusakan moral, politik, ekonomi, sosial, hukum, dan lain-lain mulai terjadi, pemerintah negara otoriter/diktatorial tidak pernah membuka kritik atau koreksi. Rakyat dididik untuk melantunkan keroncong harmoni. Harmoni yang membawa bangsa ke tragedi.

Di Indonesia cara menutup kritik atau koreksi publik dilakukan lewat himbauan yang terdengar santun dan seolah bertanggung jawab, “Janganlah perbedaan tajam diangkat ke permukaan, kasihan rakyat, nanti jadi bingung”.

Para pemimpin dihibau untuk menahan diri, jangan membuat pernyataan yang bisa mengurangi kepercayaan rakyat pada pemerintah. Sekelebatan hal ini baik. Namun bagaimana bila sebuah pemerintah sudah tidak lagi berfungsi membela kepentingan rakyat, tetapi justru mengunggulkan kepentingan konglomerat dan korporatokrat? Pemerintahan tersebut dengan nikmat menjual aset nasional dan aset bangsa kepada “investor strategis”, lagi-lagi istilah yang menyesatkan? Bukankah investor strategis itu tidak lain adalah investor asing? Haruskah kita berdiam diri terus melihat negara dan bangsa kita dikuliti oleh kekuatan-kekuatan luar sehingga kita tidak pernah mampu bangkit kembali?

Orang Perancis mengatakan, *du choc des opinions jaillit la verité*, dari benturan berbagai opini akan muncul sebuah kebenaran. Perbedaan pendapat bila digelar secara jujur dan lugas dengan mengingat tanggung jawab pasti akan melahirkan pemikiran yang lebih segar. Lagi-lagi orang Perancis mengatakan *du choc des idées jaillit la lumière*, dari benturan berbagai gagasan akan muncul sinar (kebenaran). Atau seperti dikatakan orang Inggris, *from the shock of ideas springs forth light*.

Menyangkut masa depan bangsa, kita tidak perlu takut menggelar pertukaran pikiran secara lugas dan tajam. Yang kita pertaruhkan adalah masa depan generasi muda kita yang rata-rata mulai pesimis melihat masa depan. Bila pesimisme itu sampai berubah menjadi apatisme, masih bisakah kita melihat masa depan kita dengan kepala tegak dan yakin diri?

Bila risalah kritis ini diterima oleh sidang pembaca, sebagian atau seluruhnya, tentu saya bersyukur dan berbahagia. Akan tetapi bila ditolak sebagian atau semuanya, saya tetap bersyukur dan merasa lega karena kewajiban civil serta obligasi moral dan intelektual saya telah saya tunaikan.

Akhirnya saya kutip pernyataan Nabi Syu'aib a.s. seperti tertera abadi dalam Kitab Suci Al-Qur'an: "Aku hanya menghendaki perbaikan semampuku. Tiada keberhasilanku, kecuali dengan pertolongan Allah. KepadaNya aku berserah diri, dan kepadaNya pula aku akan kembali". (Al Qur'an XI:88).

Mohammad Amien Rais

B A B I

SEJARAH BERULANG

Ketika risalah atau monograf ini saya tulis, kita bangsa Indonesia sudah lebih dari 62 tahun mengalami “kemerdekaan” dan “kedaulatan” nasional, sejak kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan oleh dua Bapak Bangsa, Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945. Kata “kemerdekaan” dan “kedaulatan” saya beri tanda petik untuk mengingatkan kita semua bahwa kemerdekaan dan kedaulatan kita itu masih semu, belum sepenuhnya kita miliki, seperti akan kelihatan dalam uraian ringkas risalah ini.

Apa yang kita alami dan saksikan dalam beberapa dasawarsa terakhir abad 20 dan dasawarsa pertama pada abad 21 sesungguhnya, dalam banyak hal, merupakan pengulangan belaka dari apa yang kita alami pada zaman penjajahan kompeni dan pemerintahan Belanda di masa lalu. Perbedaan antara tempo *doeloe* dengan masa sekarang hanyalah dalam bentuk atau format belaka. Dahulu pendudukan fisik dan militer Belanda menyebabkan bangsa Indonesia kehilangan kemerdekaan, kemandirian dan kedaulatan politik, ekonomi, sosial, hukum dan pertahanan. Sedangkan sekarang ini pendudukan fisik dan militer asing itu secara resmi sudah

tidak ada dan tidak kelihatan. Tetapi sebagai bangsa kita telah kehilangan kemandirian, dan sampai batas yang cukup jauh, kita juga sudah kehilangan kedaulatan ekonomi. Dalam banyak hal, bangsa Indonesia tetap tergantung dan menggantungkan diri pada kekuatan asing.

Kedaulatan ekonomi yang telah kita gadaikan pada kekuatan asing itu hakekatnya telah melemahkan kedaulatan politik, diplomatik, pertahanan dan militer kita. Bisa dikatakan dalam hampir setiap kebijakan domestik dan kebijakan luar negeri Indonesia selalu kelihatan pengaruh besar kepentingan asing yang melemahkan kepentingan nasional bangsa Indonesia sendiri. Dalam era gloalisasi yang mengalir deras, Indonesia telah terseret menjadi sekedar subordinat atau agen setia bagi kepentingan asing.

Kekuatan-kekuatan korporasi telah mendikte bukan saja perekonomian nasional seperti kebijakan perdagangan, keuangan, perbankan, penanaman modal, pelayaran dan kepelabuhan, kehutanan, perkebunan, pertambangan migas dan non-migas, dan lain sebagainya, tetapi juga kebijakan politik dan pertahanan. Bahkan bisa dikatakan bangsa Indonesia telah tidak menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Nampak bangsa kita begitu cepat lupa pada sejarah. George Santayana, filosof Spanyol berpendidikan Amerika (1863-1952), pernah memperingatkan bahwa mereka yang gagal mengambil pelajaran dari sejarah dipastikan akan mengulangi pengalaman sejarah itu (*Those who fail to learn the lessons of history are doomed to repeat them*). Ada pepatah asing yang sangat terkenal, *l'histoire se répète*, sejarah berulang kembali. Kalau kita mau jujur melihat hilangnya kemandirian dan kedaulatan ekonomi kita, sesungguhnya sejarah imperialisme tempo *doeloe* itu kini sudah hadir kembali dalam bentuk dan pengejawantahan yang berbeda. Namun agaknya banyak di antara kita yang belum atau tidak menyadarinya.

George Bernard Shaw, seorang dramawan dan sosialis Irlandia (1856-1950), mengatakan bahwa manusia merupakan makhluk yang unik dan agak aneh, sekalipun sejarah selalu berulang, manusia sangat sulit, bahkan tidak mampu, untuk tidak mengulangi sejarah yang buruk. Shaw mengatakan: *If history repeats itself, and the unexpected always happens, how incapable must man be of learning from experience.*

Namun apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW mengenai pentingnya kesadaran sejarah, melampaui jauh pendapat para filosof mana pun. Beliau mengatakan:

“Barang siapa memiliki masa sekarang yang lebih bagus dari masa lalunya, ia tergolong orang yang beruntung; bila masa sekarangnya sama dengan masa lalunya, ia termasuk orang yang merugi; bila masa sekarangnya lebih buruk dari masa lampainya, ia tergolong orang yang bangkrut.”

Sejarah adalah kontinuitas antara masa lampau, masa sekarang dan masa depan.

Berdasarkan kriteria Nabi SAW itu, kita mudah-mudahan bukan bangsa yang bangkrut, sekalipun belum menjadi bangsa yang beruntung. Bila kita cermati, apa yang kita lihat, rasakan, dan saksikan dewasa ini pada hakekatnya dalam banyak hal merupakan pengulangan sejarah kolonial. Kita segera ingat bahwa pada awal abad 17, VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) mulai menjajah kita dan diteruskan oleh Pemerintah Belanda sampai menjelang berakhirnya Perang Dunia II. Bahkan Belanda berusaha kembali menduduki Indonesia pada tahun 1947 dan 1949.

Perusahaan Belanda itu dan Pemerintah Belanda berhasil menguasai kepulauan Indonesia dan mengurus hasil bumi, terutama rempah-rempah, dan perkebunan Indonesia, sampai sekitar 3 abad karena mekanisme korporatokrasi pada waktu itu. Ketika VOC

bangkrut pada 1799 Pemerintah Belanda mengambil alih kegiatan VOC di Indonesia. VOC adalah korporasi multinasional pertama dalam sejarah dan merupakan perusahaan pertama yang menerbitkan saham.¹

‘ Mengapa VOC bisa berjaya menjarah kekayaan alam Indonesia sampai demikian lama? Pertama, tentu karena Pemerintah Belanda memberikan dukungan politik sepenuhnya. VOC diberi hak monopoli dagang di Hindia Timur (maksudnya kepulauan Nusantara) dan dibantu menyingkirkan para pesaing dari Eropa, seperti Inggris dan Portugal. Sebuah piagam Pemerintah Belanda diterbitkan yang bukan saja memberikan monopoli dagang pada VOC, tetapi juga wewenang untuk menduduki wilayah mana pun yang dikehendaki dan menjajah penduduk asli sesuai dengan tuntutan pasar dan kebutuhan politik VOC sendiri (....*according to market requirements and VOC political imperatives*).²

Dukungan militer juga melekat dalam hampir semua kegiatan VOC. Mustahil VOC mampu membuka wilayah baru untuk diduduki dan penduduknya dijajah tanpa kekuatan militer sebagai ujung tombak. Para jendral yang menjadi pimpinan VOC seperti Jan Pieterzoon Coen (1619-1629), Anthony van Diemen (1636-1645), dan Joan Maetsyker (1653-1678) adalah tokoh-tokoh militer yang menggerakkan kekerasan dalam rangka membunuh dan memperbudak penduduk setempat untuk mencapai tujuan dagang VOC. Yang dilakukan oleh J.P. Coen malah mendekati kategori *genosida*. Pernyataan J.P. Coen yang terkenal adalah “*Dispereert niet, ontziet uw vijanden niet, want God is met ons*” (Janganlah putus asa, jangan biarkan musuh-musuhmu bebas, karena Tuhan bersama kita).³

¹ <http://en.wikipedia.org/wiki/Dutch-East-India-Company>

² <http://www.sahistory.org.za/pages/special/projects/VOC/VOC.htm>

³ <http://en.wikipedia.org/wiki/Dutch-East-India-Company>

Pada 1669 VOC telah menjadi “perusahaan swasta” terbesar di dunia dengan memiliki 150 kapal dagang, 40 kapal perang, 50.000 karyawan, angkatan darat swasta sebesar 10.000 prajurit, dan pembayaran dividen sebanyak 40%.⁴ Kekayaan yang demikian dahsyat untuk ukuran jaman itu tentu dapat diperoleh karena kerjasama korporatokratik dari tiga pilar utama, yakni VOC sendiri sebagai korporasi raksasa, kekuatan politik Pemerintah Belanda, dan kekuatan militer Belanda yang selalu siap untuk menggebuk setiap rintangan yang dihadapi VOC.

Secara bertahap VOC menjadi sebuah kekuasaan teritorial. Pada abad 19 kekuatan-kekuatan ekonomi Eropa, sebagai produk kapitalisme industrial, akhirnya menjadi unsur pokok dalam gelombang baru imperialisme Eropa.⁵ Untuk mempertahankan imperialisme dan kolonialisme mereka, negara-negara Barat memerlukan komponen-komponen penopang yang berupa perbankan, dukungan kaum intelektual, media massa dan dukungan elite nasional bangsa yang terjajah. Hakekatnya korporatokrasi pada awal abad 21 ini merupakan turunan belaka dari korporatokrasi empat abad silam. Hanya saja yang sekarang ini tentu lebih canggih dan seringkali bersifat terselubung (*disguised*), namun daya hancurnya barangkali justru lebih besar. Pendek kata seperti kata pepatah di atas, sejarah selalu berulang.

Sejarah berbeda dengan mitos. Mitos bersifat stasioner, berhenti, tidak pernah berubah. Sedangkan sejarah berwatak dinamis dan seringkali memunculkan perubahan-perubahan, baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Karena itu sekalipun sejarah cenderung selalu berulang, pengulangan itu, sesuai dengan perkembangan jaman, dapat bersifat lebih fundamental, radikal dan destruktif. Imperialisme ekonomi ternyata dapat muncul

⁴ *ibid.*

⁵ <http://www.britannica.com/eb/article-22811/Indonesia>

kembali sambil menunggangi proses globalisasi dengan daya eksploitasi dan destruksi yang lebih luas.

Lembaga semacam bank pasti sudah dikembangkan pada jaman VOC, mengingat VOC mengembangkan pasar saham pertama kali dalam sejarah dengan aset berdurasi panjang dan berbagai skema investasi yang terkendali. Mudah dibayangkan lembaga semacam bank sudah hadir pada abad 4 lalu. Sebuah lukisan yang dimuat dalam laporan tahun 2001 Koninklijke Brill, sebuah penerbit terkemuka di Belanda, dalam memperingati ulang ke 400 tahun VOC, menggambarkan 8 anggota direksi VOC duduk melingkar di depan sebuah meja dengan sebuah buku bank dan peta India.⁶ Di samping mengembangkan berbagai lembaga keuangan untuk menopang tercapainya tujuan VOC, korporasi kuno ini dapat dipastikan juga menguasai media massa yang ada pada saat itu. Penulis tidak dapat menunjukkan fakta, apakah sudah ada koran pada waktu itu. Namun mengingat kekejaman VOC tidak pernah mengusik masyarakat Belanda waktu itu, kemungkinan besar karena sumber berita yang ada telah melakukan manipulasi informasi ataupun disinformasi tentang nasib negara jajahan. Mengapa? Karena rumus sederhana menunjukkan bahwa fungsi media massa-kapitalis adalah untuk melestarikan kapitalisme.⁷

Ada baiknya untuk selalu diingat bahwa media massa bukan terbatas pada TV, radio, surat kabar, dan majalah yang dahulu justru belum ada. Namun setiap sumber berita yang mempengaruhi tindakan dan perilaku masyarakat hakekatnya bagian dari media massa. Termasuk di dalam media massa adalah *movies*, teater, buku-buku, sistem pendidikan, berbagai klub sosial dan organisasi keagamaan yang dimiliki oleh perorangan (swasta) atau pemerintah.

⁶ <http://www.brill.nl/uploadedFiles/170.pdf>

⁷ *op.cit.*

Demikian juga berbagai publikasi publik. Semua hal ini berfungsi membentuk perilaku dan pemahaman masyarakat.⁸

Cerita imperialisme Belanda yang disuguhkan pada masyarakat Belanda oleh berbagai sumber berita adalah serba manis, manusiawi, dan menguntungkan. Para sejarawan Belanda bahkan menganggap perdagangan dan perniagaan Belanda mencapai jaman keemasan pada masa VOC. Pada tahun 2002 hegemoni VOC dirayakan dan diperingati di berbagai tempat di Belanda. Padahal di Indonesia jaman VOC merupakan lembar hitam sejarah yang telah begitu parah mengendap dalam kesadaran bangsa.

Bila VOC dalam melancarkan kegiatan imperialis dan ekspansionisnya didukung oleh kekuatan politik dan kekuatan militer pemerintah Belanda, juga difasilitasi oleh lembaga-lembaga keuangan pada waktu itu termasuk bank dan didukung pula oleh “media massa” yang ada, VOC masih memerlukan dukungan kaum intelektual. Dukungan itu khususnya, datang dari para orientalis untuk membuat telaah sosiologis, antropologis, dan theologis tentang rakyat negeri jajahan serta membuat sertifikasi atau pembenaran terhadap imperialisme.

Snouck Hurgronje (1857-1936) adalah salah satu contoh intelektual-orientalis yang mengabdikan kehidupannya untuk kepentingan imperialisme Belanda. Ia seorang sarjana terkemuka di bidang peradaban dan bahasa-bahasa Oriental dan menjadi tangan kanan Gubernur Jendral J.B. Van Heutsz. Ia menasehati Van Heutsz bagaimana cara memerangi rakyat Aceh. Atas dasar nasehatnya, Perang Aceh menelan korban 50.000 sampai 100.000 nyawa rakyat Aceh dan jumlah yang lebih besar menderita luka-luka. Contoh lainnya adalah Charles Olke Van der Plas (1891-1977) yang pernah menjadi Gubernur Jawa Timur. Van der Plas

⁸ *ibid.*

dikenal sebagai tukang adu domba antar golongan dan kelompok bangsa Indonesia untuk memperlemah perlawanan Indonesia terhadap Belanda.

Bila dicermati, mengapa VOC dan kemudian Pemerintah Belanda dapat menjajah Indonesia, tentu karena elite atau penguasa pada waktu itu, katakanlah para raja, tidak semuanya melakukan perlawanan bersama rakyat untuk memukul balik kaum imperialis-kolonialis. Tetapi justru sebagian dari mereka berkolaborasi dengan pihak penjajah. Tentu para pahlawan bangsa seperti Sultan Hasanudin, Sisingamangaraja, Cik di Tiro, Panglima Polim, Pangeran Diponegoro, Sultan Agung Hanyokrokusumo, Cut Nyak Dien, dan lain-lain, telah berbuat yang terbaik untuk membela kepentingan bangsa. Akan tetapi ada juga lapisan aristokrasi yang cenderung berdamai dan bahkan mensubordinasikan diri di bawah kompeni dan penjajah Belanda. Mereka bahkan mengumpulkan pajak atas nama Pemerintah Hindia Belanda.

Sebagai misal Amangkurat I dan II yang menggantikan Sultan Agung sebagai raja Mataram justru mempermudah jatuhnya sebagian wilayah Jawa Barat ke tangan VOC pada akhir abad 17. Ketika Amangkurat II diganti oleh Pemerintah Belanda dengan Pamannya, Pakubuwono I, konsensi tanah yang lebih luas lagi diberikan pada Pemerintah Belanda. Pada 1755 wilayah kerajaan Mataram telah mengkerut kecil. Seluruh pulau Jawa telah jatuh ke tangan Belanda, kecuali daerah Jogjakarta dan Surakarta, itu pun dipecah menjadi dua kerajaan, kesultanan dan kasunanan.

Dari pemaparan singkat di atas jelas bahwa VOC dan Pemerintah Belanda akan mendapat kesulitan luar biasa untuk masuk ke Indonesia, andaikata tidak ada elite masa itu yang membuka pintu lebar-lebar bagi VOC dan Pemerintah Belanda. Berdasarkan perjalanan sejarah, pada dasarnya kekuatan-kekuatan korporatokrasi di awal abad 21 ini tidak mudah, bahkan mustahil

dengan gampang bisa mengacak-acak kedaulatan ekonomi kita, seandainya elite nasional kita tidak membungkuk, bahkan mungkin tiarap, di depan berbagai korporasi internasional. Korporasi multi-nasional adalah bagian paling penting dari korporatokrasi dunia.

Kita tidak boleh lupa bahwa akibat penjajahan VOC dan Pemerintah Belanda yang panjang itu struktur mental kita, anak-anak bangsa dan sebagian pemimpin, telah rusak lumayan parah. Kita sudah merdeka lebih dari 6 dasawarsa.

“Akan tetapi jauhnya penderitaan yang ditimpakan VOCtidak terperikan. Banyak negara Asia Timur, seperti Indonesia, yang telah dijajah Belanda akibat proyek VOC, masih mengalami kesulitan dalam mengatasi warisan kolonialisasi dan perbudakan 400 tahun kemudian” (*However, the extent of suffering wreaked by the VOC...is uncalculable. Many an East Asian country, such Indonesia, that had been colonized by the Dutch because of the VOC project, still have to deal with the legacy of colonization and slavery four hundred years later*).⁹

Membongkar mentalitas *inlander* ternyata tidak mudah. Semangat kemandirian dan rasa percaya diri yang diajarkan oleh Bung Karno, Bung Hatta, H. Agus Salim, Syahrir dan lain-lain kini terbang entah ke mana. Sekeping contoh dapat disebutkan disini. Banyak pemimpin bangsa yang “ketakutan” dan merasa panas dingin karena Presiden Bush akan mampir ke Indonesia di akhir 2006. Pengamanan yang diberikan kepada Presiden AS yang di negerinya sendiri sudah tidak populer itu sungguh berlebih dan sekaligus agak memalukan. Tidak ada negara mana pun di dunia yang menyambut Presiden Bush seperti maharaja diraja, kecuali Indonesia di masa kepemimpinan Susilo B. Yudhoyono. Seolah Indonesia telah menjadi *vazal* atau negara protektorat A.S.

⁹ *ibid.*

B A B I I

GLOBALISASI MAKIN LAYU

Sebuah buku berjudul *Globalization* (Alex Mac Gillivray, 2006) menerangkan ada sekitar 3.300 buku berbahasa Inggris, 700 buku berbahasa Perancis, 670 buku berbahasa Jerman dan ratusan lainnya dalam bahasa Rusia, Arab, Hindia, China, Spanyol dan lain-lain yang membahas berbagai masalah di seputar globalisasi.¹ Di samping itu tentu ada ribuan artikel berserakan di berbagai jurnal, majalah, *website* dan koran tentang hal yang sama. Karena itu wajar bila ada ratusan definisi tentang globalisasi. Kita terpaksa memilih beberapa definisi yang kiranya dapat merefleksikan fenomena globalisasi yang sudah dan sedang kita hadapi sebagai bangsa. Masa depan kita sangat ditentukan oleh cara kita memahami dan menyikapi globalisasi tersebut.

Sebuah definisi menyatakan bahwa globalisasi pada pokoknya berarti proses interkoneksi yang terus meningkat di antara berbagai masyarakat sehingga kejadian-kejadian yang berlangsung di sebuah negara mempengaruhi negara dan masyarakat lainnya. Dunia yang terglobalisasi adalah dunia di mana peristiwa-peristiwa politik, ekonomi, budaya dan sosial semakin terjalin erat dan merupakan

¹ Mac Gillivray, Alex, *Globalization* (2006), London : Constable & Robinson, Hal. 1.

dunia di mana kejadian-kejadian tersebut berdampak semakin besar. Dengan kata lain, kebanyakan masyarakat dipengaruhi secara ekstensif dan lebih intensif oleh peristiwa yang terjadi di masyarakat lain. Peristiwa itu pada dasarnya berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.²

Menurut IMF (*International Monetary Fund*) sebagai salah satu institusi pilar globalisasi, globalisasi ekonomi adalah sebuah proses historis. Globalisasi merujuk pada integrasi ekonomi yang terus meningkat di antara bangsa-bangsa di muka bumi, terutama lewat arus perdagangan dan keuangan.³ Istilah globalisasi juga merujuk pada perpindahan manusia (tenaga kerja) dan pengetahuan (teknologi) melewati batas-batas internasional. Harus cepat ditambahkan bahwa globalisasi juga menyangkut berbagai dimensi budaya, politik dan lingkungan hidup yang lebih luas daripada sekedar perubahan di bidang ekonomi, keuangan dan perdagangan.

Menurut IMF tidak ada misteri dalam globalisasi. Namun istilah yang mendunia ini menjadi istilah yang paling populer, bahkan menimbulkan semacam kelatihan pada beberapa bangsa, sejak dasawarsa 1980-an. Diyakini bahwa kemajuan teknologi komunikasi, informasi dan transportasi telah memudahkan terjadinya berbagai transaksi internasional, yang menyangkut arus perdagangan dan keuangan. Kekuatan-kekuatan pasar dan pusat-pusat keuangan “meledak” menerobos batas-batas nasional menghempaskan ekonomi bangsa yang tidak siap.

Ada semacam keyakinan IMF yang dijual ke seantero dunia bahwa ekonomi pasar bebas menjamin efisiensi lewat kompetisi atau persaingan dan pembagian kerja (*division of labor*). Pembagian

² Baylis, John dan Smith, Steve, *The Globalization of World Politics* (2006), New York: Oxford University Press, hal. 8.

³ <http://www.imf.org/external/np/etr/ib/2000/041200.htm>, Globalization: Threat or Opportunity?

kerja dan spesialisasi komoditas ekonomi akan memungkinkan masyarakat untuk memusatkan perhatian dan pekerjaan pada apa yang paling baik buat dirinya. Secara demikian masyarakat memiliki akses lebih baik pada aliran modal, akses ke teknologi mutakhir, impor yang lebih murah, dan pasar ekspor yang lebih luas.

Sementara itu institusi pilar lain dari globalisasi, yakni Bank Dunia (*World Bank*), menyatakan memang terdapat banyak definisi globalisasi, dari yang melihat globalisasi sebagai proses pemiskinan kaum melarat dunia dan pengayaan kaum kaya serta merusak lingkungan, sampai yang berpendirian bahwa globalisasi adalah cara terbaik untuk membangun perdamaian dan kemakmuran universal. Yang jelas, menurut Bank Dunia, inti globalisasi ekonomi adalah proses *sharing* kegiatan ekonomi dunia yang berjalan melanda semua masyarakat di berbagai negara dengan mengambil 3 bentuk kegiatan, yaitu perdagangan internasional, investasi asing langsung dan aliran pasar modal.⁴

Perdagangan internasional antara sesama negara kaya maupun antara sesama negara miskin terus meningkat pada dasawarsa 1980-an dan 1990-an: dari 27 ke 39 persen buat negara kaya dan dari 10 ke 17 persen buat negara miskin. Kecenderungan ini terus meningkat pada dasawarsa pertama abad 21. FDI (investasi asing langsung) juga terus menanjak. FDI mengalami kepesatan, dari US \$ 192 milyar pada 1988 menjadi US \$ 610 milyar pada 1998 dan terus cenderung meningkat. Aliran pasar modal juga menyaksikan peningkatan dari masa ke masa.

Jan Aart Scholte menggambarkan secara garis besar ada 5 definisi luas tentang globalisasi seperti ditemukan dalam literatur:

⁴ http://www1.worldbank.org/economic_policy/globalization/ag_01.htm, The World Bank Group, Globalization

- (1) globalisasi sebagai *internasionalisasi* yakni dilihat sebagai kegiatan antar negara yang melampaui batas wilayah masing-masing sehingga terjadi saling tukar dan saling ketergantungan internasional, terutama menyangkut modal dan perdagangan;
- (2) globalisasi sebagai *liberalisasi*, yakni merujuk pada proses pemusnahan berbagai restriksi politik sehingga ekonomi dunia menjadi lebih terbuka dan tanpa batas;
- (3) globalisasi sebagai *universalisasi* informasi, komunikasi dan transportasi dan berbagai kegiatan masyarakat dunia lainnya;
- (4) globalisasi sebagai *westernisasi* atau *modernisasi*, yakni merebaknya ke seluruh dunia struktur modernitas barat yang menyangkut kapitalisme, rasionalisme, industrialisme, birokratisme dan lain sebagainya yang cenderung merusak budaya lokal yang sudah ada lebih dulu; dan
- (5) globalisasi sebagai *deteritorialisasi* di mana terjadi rekonfigurasi geografi, sehingga ruang sosial tidak lagi dipetakan berdasarkan peta teritorial, jarak dan batas teritorial.

Geografi sosial yang berupa perkembangan ekonomi pasar bebas, musnahnya batas-batas teritorial negara dan jaringan berbagai institusi sosial, ekonomi dan politik internasional memperkuat *deteritorialisasi* tersebut.

Jadi seperti kata Anthony Giddens, globalisasi adalah intensifikasi hubungan sosial tingkat dunia yang mempertemukan berbagai tempat (lokalitas) sedemikian rupa sehingga kejadian-kejadian yang terjadi di suatu daerah dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang berlangsung di tempat-tempat yang sangat jauh **dan demikian** pula sebaliknya.⁵

⁵ <http://www.infed.org/biblio/defining-globalization.htm>

Tidak Ada Pilihan Lain?

Tiga institusi pilar yang menopang globalisasi sejak 1980-an adalah IMF, World Bank dan WTO (*World Trade Organization*). Ideologi yang menyatukan 3 lembaga bersaudara itu kira-kira adalah apa yang dinamakan *Washington Consensus*. Sekalipun banyak pihak berpendapat bahwa Konsensus Washington itu sudah mati atau telah kehilangan relevansi, ada baiknya sekelebatan kita bicarakan di sini.

Adalah John Williamson, seorang yang mula-mula mengamati bahwa lembaga-lembaga yang bermarkas di Washington, yaitu IMF, World Bank dan US Treasury Department memiliki kesamaan pandangan mengenai langkah apa saja yang harus ditempuh oleh negara-negara berkembang yang dilanda krisis ekonomi. Williamson merumuskan kesamaan pandangan itu menjadi 10 langkah perbaikan ekonomi buat negara-negara yang dilanda krisis dan kemudian langkah-langkah atau rekomendasi itu dikenal sebagai Konsensus Washington.⁶

Sepuluh rekomendasi ekonomi yang terkenal dengan Konsensus Washington itu adalah:

1. Perdagangan bebas.
2. Liberalisasi pasar modal.
3. Nilai tukar mengambang.
4. Angka bunga ditentukan pasar.
5. Deregulasi pasar.
6. Transfer aset dari sektor publik ke sektor swasta.
7. Fokus ketat dalam pengeluaran publik pada berbagai target pembangunan sosial.
8. Anggaran berimbang.
9. Reformasi pajak.
10. Perlindungan atas hak milik dan hak cipta.⁷

⁶ http://en.wikipedia.org/wiki/Washington_Consensus

⁷ *ibid.*

Pada dasawarsa 1980-an dan 1990-an IMF, World Bank dan WTO dengan kebijakan-kebijakannya yang mengatur ekonomi dunia dengan mengacu pada Konsensus Washington itu memang terasa sungguh sakti. Seolah tidak ada satu pun negara yang dapat menghindari dari magnet globalisasi. Hanya sedikit negara yang dapat menghindari “penyesuaian struktural” ala IMF, World Bank dan WTO serta dapat lolos dari mahkamah arbitrase WTO. Walaupun lembaga-lembaga keuangan internasional ini sesungguhnya tidak terlalu perkasa, tetapi merekalah yang menentukan arah globalisasi, aturan-aturan apa yang harus diikuti, negara mana yang harus dihadiahi dan negara mana yang harus dihukum (dikucilkan) karena berani menentang mereka.⁸

Amerika Serikat dengan 3 “tangan globalisasinya” itu ingin melihat integrasi semua ekonomi nasional - sekalipun tidak sama rata – ke dalam satu sistem pasar bebas tunggal. Pada satu tataran inilah tujuan politik Amerika diarahkan. Sedangkan maksud Konsensus Washington adalah

“untuk menghancurkan seluruh rintangan nasional terhadap perdagangan, mengakhiri proteksionisme, memperluas pasar dan zona bebas, dan memungkinkan mengalirnya modal kemana saja dengan kendala dan regulasi minimal” (*to break down national barriers to trade, end protectionism, expand free markets and free zones, and allow capital to flow anywhere with minimal restraint or regulation*).⁹

Pada dua dekade terakhir abad 20 (1980-an dan 1990-an) dengan dimotori mula-mula oleh Margaret Thatcher (London) dan Ronald Reagan (Washington) dunia seperti kena hipnotis globalisasi ala Konsensus Washington di atas. Malahan Thatcher menggulirkan sebuah istilah yang melanda dunia waktu itu, yaitu TINA,

⁸ Garrison, Jim, *America as Empire : Global Leader or Rogue Power?* (2004), San Francisco : BK Publishers, Inc ; hal. 38.

⁹ *ibid.*

kepanjangan dari *There Is No Alternative* – Tidak Ada Pilihan Lain. Maksudnya, Tidak Ada Alternatif Lain bagi globalisasi; bagi WTO, World Bank, dan IMF; bagi ekonomi pasar bebas; bagi kapitalisme; bagi kuasa korporasi; bagi monopoli media yang telah dimerjer; bagi hegemoni politik dan supremasi ekonomi Barat. Tidak Ada Alternatif Lain bagi itu semua. Semua negara harus memahami dan menyesuaikan diri dengan TINA tersebut.

Dalam euphoria globalisasi itu masyarakat dunia disuruh percaya bahwa globalisasi menjanjikan masa depan dunia yang lebih indah. John Ralston Saul menulis janji globalisasi seperti sering dikemukakan para sponsornya itu antara lain sebagai berikut :

- Kekuasaan negara-bangsa (*nation state*) semakin redup.
- Negara - bangsa semacam itu mungkin malah segera gulung tikar.
- Di masa depan kekuasaan terletak pada pasar global.
- Ekonomi, bukan politik dan militer, yang membentuk peristiwa-peristiwa masyarakat.
- Pasar ekonomi global, bila dibiarkan berjalan bebas, akan mencapai keseimbangan ekonomi internasional.
- Masalah abadi siklus *boom and bust* akan berakhir.
- Pasar bebas akan mendorong gelombang dagang yang pada gilirannya akan mengangkat pertumbuhan ekonomi dunia yang besar.
- Gelombang besar itu akan mengangkat seluruh kapal ekonomi baik di negara kaya maupun negara miskin.
- Kemakmuran yang diraih akan menggeser kediktatoran dan menggantinya dengan demokrasi.
- Demokrasi baru itu akan melenyapkan nasionalisme picik, rasisme yang tidak bertanggung jawab dan kekerasan politik.
- Di lapangan ekonomi, pertumbuhan pasar yang dahsyat memerlukan kehadiran berbagai korporasi yang lebih besar.

- Korporasi yang begitu besar tidak memungkinkan terjadinya kebangkrutan dan karena itu justru menjamin stabilitas internasional.
- Para tokoh korporasi trans-nasional akan memegang kepemimpinan peradaban karena penguasaannya atas pasar.
- Akhirnya berbagai korporasi dunia itu akan menjadi semacam negara dan tatanan kehebatan dominasinya tidak mudah dimasuki prasangka-prasangka politik lokal.

Semua itu akan menciptakan pemerintahan yang sehat di muka bumi dan dunia akan menyaksikan munculnya *debt-free governments* atau pemerintah-pemerintah yang bebas hutang. Pasar sendiri juga semakin anggun berwibawa. Kebahagiaan abadi akhirnya diperoleh umat manusia. Siklus sejarah akhirnya patah dan sejarah akhirnya berakhir. Sejarah akan mati. "*History will indeed be dead*".¹⁰

Impian globalisasi itu kini semakin tidak terbukti. Sekitar 16 tahun yang lalu, para pemikir globalisasi seperti Kenichi Ohmae dan Robert Reich menulis tentang *borderless world*, dunia tanpa batas. Kata mereka integrasi ekonomi dunia tidak mungkin dielakkan. Ekonomi global adalah keniscayaan. Mereka yang menentang globalisasi diejek sebagai kaum *Luddites*, kaum penentang revolusi industri di Inggris yang menghancurkan mesin-mesin. Akan tetapi sekarang kita menyaksikan globalisasi itu makin layu, karena bau imperialisme ekonomi ternyata cukup menyengat dalam proses globalisasi.¹¹

Globalisasi dan Imperialisme Ekonomi

Adalah Dr. Mahathir Mohammad, mantan perdana menteri Malaysia, yang mengingatkan kita semua tentang bahaya neo-

¹⁰ John Ralston Saul, *The Collapse of Globalism* (2005) London: Atlantic Books, hal 15-16.

¹¹ <http://www.fpip.org/fpifxt/3826>, Walden Bello, *Globalization in Retreat*

kolonialisme. Dalam pidatonya di depan *the Asia HRD Congress* di Jakarta, 3 Mei 2006, Mahatir mengatakan:

“Neokolonialismee bukanlah istilah khayalan yang diciptakan oleh Presiden Sukarno. Ia (neokolonialisme) itu nyata. Kita merasakannya tatkala kita hidup berada di bawah kontrol agen-agen yang dikendalikan oleh mantan penjajah kita.” (*Neo-colonialism is not a fancy term carried by President Sukarno. It is real. We feel it as we come under the control of agencies owned by our former colonial masters*).¹²

Ketika kita bangsa Indonesia, termasuk para pemimpinnya sudah melupakan ajaran Bung Karno, justru pemimpin negara tetangga kita, Malaysia, yang masih mengingatnya. Mungkin bukan saja lupa, tetapi secara tidak sadar sebagian kita malah sudah melawan ajaran Bung Karno dalam praktik atau kenyataan. Bayangkan, arah kebijakan politik luar negeri kita yang bebas dan aktif dapat sekonyong-konyong berbalik arah karena Pemerintah kita mendapat telepon dari Gedung Putih di Washington.

Rakyat Iran dan dunia tahu ketika Mahmoud Ahmadinejad, Presiden Iran, berkunjung ke Indonesia pada 2006, Presiden Yudhoyono menyatakan Indonesia mendukung program pengembangan nuklir Iran untuk perdamaian. Tetapi dukungan itu dicabut karena Indonesia akhirnya memilih mendukung Resolusi DK PBB 1747 yang mengenakan sanksi terhadap Iran, karena Iran bersikukuh mengembangkan kemampuan nuklirnya. Semua orang tahu bahwa Resolusi PBB itu dimotori oleh AS. Kebijakan politik luar negeri kita pada Iran sebagai negara sahabat dengan gampang berubah karena ada telepon dari Presiden Bush. Martabat macam apakah sesungguhnya yang sedang kita pertaruhkan kepada dunia?

¹² South Bulletin 124, 15 Mei 2006, hal 242.

Mahathir mengingatkan bila negara-negara Asia ingin maju, mereka harus mengubah *mindset* atau tata-pikir mereka agar benar-benar merdeka dan berdaulat. Tata-pikir bangsa-bangsa Asia yang dijajah sampai berabad-abad telah demikian kuat terpola dan berurat-berakar. Betapa tepatnya pandangan Mahathir itu. Kita seringkali melihat cara berpikir dan bertindak sebagian anak bangsa yang bagaikan beo dan (ma'af) monyet yang selalu meniru-niru apa saja yang datang dari Barat.

Karena para majikan dan pemikir ekonomi asing menyatakan bahwa sistim ekonomi yang paling produktif adalah sistim yang ramah pada pasar, maka sebagian dari kita mengumandangkan seruan agar ekonomi Indonesia berwatak *market friendly*. Mereka seolah lupa bahwa pasar tak pernah punya nurani. Ideologi pasar adalah seratus persen mencari profit tanpa ada pertimbangan apa pun juga. Joseph Stiglitz mengingatkan teori *invisible hand* atau tangan tidak kelihatan dalam ekonomi pasar sesungguhnya tidak nyata. Karena "tangan" itu memang tidak ada. Penulis pernah terkejut ada seorang ekonom Indonesia yang mungkin karena ilmu ekonominya masih nanggung, dalam sebuah seminar menganggap Stiglitz dan pendahulunya, bodoh. Bodoh karena keduanya berpendirian bahwa ekonomi pasar dapat lebih berfungsi bila pemerintah melakukan intervensi agar dapat lebih efisien, di samping dapat mengurangi pengangguran.

Mengapa benar bila dikatakan bahwa globalisasi dilihat dari beberapa segi hakekatnya adalah imperialisme ekonomi? Atau seperti kata Bung Karno dan Mahathir sebuah neokolonialisme? Sebagaimana kita ketahui imperialisme dan kolonialisme tempo *doeloe* bercirikan tiga hal. Pertama, ada kesenjangan kemakmuran antara negara penjajah dan negara terjajah. Kedua, hubungan antara kaum penjajah dan terjajah adalah hubungan yang

eksploitatif atau bersifat menindas. Ketiga, negara terjajah, sebagai pihak yang lemah, kehilangan kedaulatan dalam arti luas.

Bila kita cermati kesenjangan negara kaya dan negara miskin, juga antara kelas kaya dan kelas miskin dalam sebuah negara, cenderung makin menganga lebar. Di akhir dasawarsa 1990-an, memasuki abad dua puluh satu, 20 persen penduduk dunia yang kebetulan hidup di negara-negara maju menikmati 86 persen penghasilan dunia, sedangkan 20 persen paling bawah hanya mendapat 1 persen penghasilan dunia. Sekitar 1,3 milyar atau 1/6 penduduk dunia berpenghasilan kurang dari satu dolar sehari. Ternyata kesenjangan makin memburuk, bukan membaik.

Lebih dari 80 negara memiliki pendapatan per kapita yang makin kecil pada akhir 1990-an dibandingkan pada akhir 1980-an. Di tahun 1960, sebanyak 20 persen penduduk paling atas berpenghasilan 30 kali lebih besar daripada 20 persen penduduk paling bawah. Hal ini semakin membesar menjadi 32 kali pada 1970, 45 kali pada 1980, dan 60 kali pada 1990. Pada penghujung akhir abad 20 penduduk dunia yang merupakan 20 persen di peringkat atas memperoleh 75 kali lebih besar dibandingkan penghasilan 20 persen yang ada di peringkat bawah. Kesenjangan makin telak terlihat di bidang *cyberspace*. Seperlima penduduk teratas dari segi penghasilan mencakup 93 persen pengguna jasa internet, sementara seperlima di bawah hanya meliputi 0,2 persen pengguna internet.¹³

Fakta dan angka berikut ini dapat juga menggambarkan bagaimana kesenjangan ekonomi antar negara sudah kelewatan dalam era globalisasi sekarang ini. Perbaikan pendidikan-dasar-untuk-semua di negara-negara berkembang memerlukan dana sebesar \$ 6 milyar setahun, jumlah yang sangat terbatas

¹³ http://Encarta.msn.com/text_1741588347_0/Globalization.html

dibandingkan dengan \$ 8 milyar yang dihabiskan untuk belanja kosmetik di AS saja. Instalasi air dan sanitasi di negara-negara berkembang memerlukan \$ 9 milyar, sedangkan konsumsi es krim mencapai \$ 11 milyar di Eropa. Pemeliharaan kesehatan dasar dan nutrisi memerlukan \$ 13 milyar, sementara \$ 17 milyar dihabiskan untuk membeli makanan hewan piaraan (kucing dan anjing) di Eropa dan Amerika Serikat.¹⁴

Masalahnya, bilamana hewan di negara-negara maju memperoleh perlakuan dan uang belanja yang lebih daripada sebagian besar umat manusia, pasti ada yang salah dengan distribusi kekayaan di dunia ini. Demikian juga apabila kemiskinan dunia yang memerlukan sudah begitu meluas, sementara \$ 35 milyar dibelanjakan untuk bisnis hiburan di Jepang; atau \$ 105 milyar untuk konsumsi alkohol di Eropa; maka pasti ada yang salah, bahkan sangat salah, dengan berbagai lembaga internasional yang ada serta pola-pola kekuasaannya.¹⁵

Noam Chomsky mengingatkan:

“Globalisasi yang tidak memprioritaskan hak-hak rakyat (masyarakat) sangat mungkin merosot terjerembab ke dalam bentuk tirani, yang dapat bersifat oligarkis dan oligopolistis. Globalisasi semacam itu didasarkan atas konsentrasi kekuasaan gabungan negara dan swasta yang secara umum tidak bertanggung jawab pada publik.” (*Globalization that does not prioritize the right of people will very likely degenerate into a form of tyranny, perhaps oligarchic and oligopolistic, based on concentrations of tightly-largely unaccountable to the public*).¹⁶

Pengamatan Chomsky sungguh tepat. Kejahatan kebanyakan korporasi dalam melanggar HAM yang merusak lingkungan dan

¹⁴ http://faculty.Virginia.edu/mesp/Fatton_Globalization_Terror.pdf

¹⁵ *ibid.*

¹⁶ Free and Fair Trade, *Global Agenda 2006*, hal. 111.

menguras kekayaan alam negara-negara berkembang memang sulit dijangkau oleh hukum dan politik dari negara yang menjadi korban globalisasi. Apalagi di negara yang serba lemah seperti Indonesia, kecenderungan imperialisme ekonomi yang mengakibatkan kesenjangan kaya-miskin antar negara menjadi semakin nyata. James K. Galbraith berpendapat bahwa kesenjangan sosial ekonomi di jaman globalisasi adalah sebuah *perfect crime* atau kejahatan yang sempurna.¹⁷

Hubungan ekonomi yang eksploitatif dalam globalisasi yang terutama digerakkan oleh berbagai korporasi pada dasarnya mengarah pada konsep "*one-size-fits-all golden strait jacket*" ala Thomas L. Friedman. Menurut Friedman sebagai pembela globalisasi yang diilhami oleh neoliberalisme dan neokonservatisme, jaket pengaman emas buat ekonomi yang cocok untuk segala ukuran (tidak peduli negara besar atau kecil, negara maju atau terbelakang, negara industri atau negara pertanian) itu mencakup: upah buruh direndahkan untuk menekan laju inflasi; privatisasi BUMN dan memasukkan BUMN ke dalam pasar sekuritas global; menghapus tarif dan kuota agar barang bisa bergerak bebas menerobos batas-batas negara; memprioritaskan produksi barang-barang ekspor; dan membuka seluruh bidang ekonomi bagi kepemilikan asing.¹⁸

Konsep perdagangan dan pasar bebas yang digambarkan oleh Friedman sudah tentu hanya menguntungkan pihak kuat dan merugikan pihak lemah. Mengadu petinju kelas berat dan petinju kelas terbang tentu di samping tidak *fair* juga tidak mempunyai prospek karena sistem itu sendiri menjadi tidak alami dan pasti berakhir dengan kegagalan. Namun sayang sekali, pihak kuat, sekalipun sudah pasti menang dalam *free trade* dan *free market* itu

¹⁷ James K. Galbraith, "A Perfect Crime : Inequality in the Age of Globalization", *Daedalus*, Winter 2002, hal. 22.

¹⁸ Thomas L. Friedman, *The World is Flat* (2006), London: Penguin Books.

ternyata masih saja berlaku curang. Untuk melindungi petani mereka dari kompetisi petani luar, negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, Perancis, Jepang dan Kanada memberikan subsidi milyaran dolar sehingga pasar produk pertanian mereka tidak mungkin tertembus oleh produk pertanian negara-negara berkembang.

Sementara negara-negara berkembang sendiri terus ditekan agar membuka pasar mereka tanpa batas. Negara-negara maju itu seolah menyatakan “pasar dan perdagangan bebas untuk anda, bukan untuk saya”. Kita masih ingat bagaimana Indonesia tunduk pada WTO untuk menerima impor paha ayam dari AS sehingga ribuan peternak ayam kita serentak gulung tikar. Demikian juga Indonesia begitu taatnya membuka diri tanpa proteksi terhadap impor gula, tekstil, dan berbagai komoditas lain yang merugikan rakyat Indonesia sendiri. Sikap konyol Indonesia itu jarang ditandingi oleh negara lain.

Henry Veltmeyer menulis sebuah artikel panjang yang membuktikan dengan tajam bahwa globalisasi yang disponsori terutama oleh AS pada dasarnya adalah sebuah pengejawantahan imperialisme ekonomi.¹⁹ Sejak 1948, Presiden Truman mengadakan program yang dinamakan Program ODA (*Overseas Development Assistance*). Ada keperluan AS waktu itu untuk membentengi negara-negara yang baru lepas dari penjajahan agar tidak masuk ke jaringan komunisme. AS berusaha agar negara-negara yang baru merdeka dapat dimasukkan ke dalam kepentingan geopolitiknya.

Pada dasawarsa 1960-an dan 1970-an AS mengkampanyekan perlunya *nation-building* bagi negara-negara berkembang lewat reformasi sosial, bahkan revolusi sosial. Berbagai pemerintahan dan LSM diberi bantuan keuangan agar tidak tergiur dengan magnit

¹⁹ <http://laberinto.uma.es>, Development and Globalization as Imperialism, January 30, 2005

super power yang lain, yakni Uni Soviet. Sampai-sampai dikatakan bahwa banyak LSM yang secara tidak sadar telah berperan sebagai agen yang melayani kebutuhan imperialisme Amerika. Mereka mempromosikan nilai-nilai dan perilaku yang fungsional bagi pemenuhan ekonomi dan politik imperialisme Amerika yang semakin meningkat.²⁰

Secara singkat dapat dikatakan pada dasawarsa 1980-an dan 1990-an globalisasi yang didasarkan pada model ekonomi baru atau karakanlah didasarkan pada neoliberalisme berjalan sangat lancar bagi kepentingan negara-negara besar. Salah satu doktrin globalisasi, seperti telah diungkapkan di atas, mendorong negara-negara di muka bumi untuk mengintegrasikan ekonomi mereka ke dalam satu ekonomi global tunggal. Doktrin itu meliputi: liberalisasi perdagangan dan arus keuangan; deregulasi produksi, modal dan pasar tenaga kerja; dan merampingkan (*downsizing*) peran negara, terutama yang berkaitan dengan program pembangunan sosial dan ekonomi.

Tujuan pokok reformasi struktural ini adalah menggusur peran negara dan menggantinya dengan lembaga-lembaga swasta dan melepaskan kekuatan-kekuatan ekonomi dari belenggu regulasi agar ekonomi pasar bebas bergerak dengan kendali sesedikit mungkin. Meminjam istilah George W. Bush yang disampaikan dalam Laporan Keamanan Nasional 2002, sistem ekonomi yang diinginkan Amerika adalah sistem di mana

“kekuatan-kekuatan kebebasan ekonomi dan politik dapat berjaya, menaklukkan musuh-musuh kebebasan dan berbagai rintangan seperti regulasi pemerintah, pengawasan modal serta pembatasan perpindahan barang dan modal.” (*The forces of economic and political freedom could flourish,*

²⁰ *ibid.*

vanquishing the enemies of freedom and obstacles such as government regulation, capital controls and restriction on the movement of goods and capital).

Pada 2004 UNCTAD mencatat terjadi aliran modal dari negara-negara berkembang (periferi) ke negara-negara metropolitan sebesar 239 milyar dolar.²¹

Di kalangan elite AS memang terdapat oknum-oknum yang bermimpi agar negara mereka dapat meraih supremasi, dominasi atau hegemoni dunia. Mereka ingin membangun orde dunia baru, apalagi setelah Uni Soviet runtuh pada 1989 dan negara-negara komunis berjatuh dan surut menjadi seperti negara berkembang. Sekitar 5 tahun sebelum Ronald Reagan menjadi presiden, sejumlah tokoh neokon (*neoconservatives*) mendirikan CPD (*Committee on the Present Danger*) atau Komite tentang Bahaya yang Dihadapi. Sepertiga lebih dari 61 para direktur komite itu ditampung masuk dalam Pemerintahan Reagan. Tokoh-tokohnya antara lain adalah Donald Rumsfeld (pernah menjadi menhan), menlu jaman Reagan, William Kristol, Irving Kristol, dan sejumlah akademisi peminat perang seperti Richard Pipes, anggota terkemuka CIA pada kepemimpinan George Bush Senior. Komplotan ini diperkuat oleh Paul Wolfowitz yang bergabung dengan Richard Perle, asisten Dick Cheney yang kemudian menjadi wapres. Komplotan yang terobsesi dengan hegemoni dan supremasi Amerika ini menemukan George Bush Junior sebagai boneka yang efektif untuk menggapai politik luar negeri Amerika yang imperialistik.

Claes C. Ryn, guru besar ilmu politik di Universitas Katolik Amerika, menyatakan bahwa mereka yang menopang ideologi imperium Amerika yakin tentang keunggulan dan kehebatan Amerika.²² Mereka merasa menjadi jawara-jawara kebajikan (*cham-*

²¹ *ibid.*

²² Ryn, Claes G., "The Ideology of American Empire", *Orbis*, Summer 2003.

pions of virtues) dan menganggap apa yang terbaik buat Amerika pasti juga terbaik buat bangsa-bangsa lain. Dunia harus mengikuti Amerika. Bahkan doktrin Bush membawa lebih jauh lagi ideologi imperium Amerika ini. Tidak ada negara lain yang boleh menyamai keperkasaan militer Amerika. Negara yang tidak tunduk pada kemauan Amerika harus ditekan supaya melakukan pergantian pemerintahan (*regime change*). Amerika mempunyai hak untuk melakukan serangan *preemptif* atau serangan dadakan ke negara mana saja bila negara itu “dianggap” berbahaya bagi keamanan Amerika.

Banyak kalangan yang berpendapat bahwa George W. Bush pada dasarnya seorang fundamentalis Kristen, seperti halnya Osama bin Laden seorang fundamentalis Islam. George Soros mengingatkan bahwa yang terjadi di AS sekarang ini adalah gabungan antara fundamentalisme pasar dan fundamentalisme agama.²³ Kedua kekuatan ini sedang menguasai Gedung Putih dengan ideologi supremasi Amerika atas dunia. Globalisasi yang dikembangkan Amerika karena itu memang hakekatnya sebuah neoimperialisme. Petualangan mutakhir AS di Afghanistan dan Iraq adalah contoh yang tidak terbantahkan.

Jim Garrison, Ketua The State of the World Forum, mengingatkan bahwa sesungguhnya AS kini telah berubah dari Republik menjadi Imperium. Dulu Amerika didirikan agar menjadi mercusuar kebebasan, demokrasi dan egalitarianisme. Sekarang Amerika telah menjadi negara paling kuat yang melakukan dominasi atas dunia. Dulu Amerika teladan kebebasan, sekarang pecandu kekuasaan.²⁴ Garrison meramalkan bahwa Amerika pada suatu ketika akan jatuh. Ia yakin:

²³ Soros, George, *The Bubble of American Supremacy* (2004), London : Phoenix, hal. 184.

²⁴ Garrison, Jim, *America As Empire : Global Leader of Rogue Power?* (2004), hal. 4.

sebagai Republik, Amerika akan terus membubung, tetapi sebagai imperium Amerika pasti jatuh (*As a Republic, there was nowhere to go but up. As an Empire there is nowhere to go but down*).²⁵

Di atas telah disebutkan bahwa di samping melahirkan kesenjangan negara kaya dan negara miskin dan menciptakan sisim ekonomi yang eksploitatif, imperialisme juga cenderung menghilangkan kedaulatan negara-negara yang lemah pertahanan nasionalnya. Contoh negara yang terpaksa kehilangan kedaulatannya, dalam hal ini kedaulatan ekonomi, tentu adalah Indonesia sendiri. Kita masih ingat bagaimana secara faktual ekonomi Indonesia pernah didikte dan didominasi oleh IMF pasca krisis moneter yang melanda Indonesia pada akhir 1990-an. Hampir semua koran dalam dan luar negeri memuat gambar Pak Harto yang duduk dengan wajah tunduk menandatangani *Letter of Intent* (semacam Surat Perjanjian yang menyatakan janji-janji Indonesia pada IMF untuk dilaksanakan), sementara Michael Camdessus, Presiden IMF, berdiri pongah sambil melipat kedua tangannya di dada menyaksikan penandatanganan itu.

²⁵ *Ibid.*

BAB III

KRITIK TAJAM DARI DALAM

Telah diuraikan di atas dengan sangat singkat pandangan yang menyamakan globalisasi sebagai sebuah imperialisme ekonomi. Barangkali banyak orang yang berpendirian bahwa penyamaan globalisasi dengan imperialisme atau kolonialisme ekonomi sebagai sesuatu yang terlalu jauh dan terlalu tajam.

Namun perlu kita sadari bahwa globalisasi yang telah berjalan cepat pada sekitar 3 dasawarsa terakhir ini telah memunculkan kritik tajam yang membuka sisi-sisi gelap, bahkan negatif dan destruktif dari proses globalisasi. Yang menarik adalah bahwa kritik sangat tajam terhadap globalisasi itu justru berdatangan dari kalangan dalam, dari mereka yang pernah berada di “sarang penggerak” globalisasi seperti Joseph Stiglitz dan John Perkins, atau dari kalangan LSM internasional seperti Naomi Klein, Susan George, Arundhati Roy dan Tariq Ali atau pemikir bebas seperti Stephan Lendman, atau para akademisi seperti Chalmers Johnson, Noam Chomsky, James Petras, Walden Bello, Howard Zinn, mendiang Kenneth Galbraith dan sebagainya.

Di antara kritikus terhadap globalisasi itu, yang paling menjulang adalah Joseph Stiglitz, karena pemikirannya yang konsisten dan

komprehensif, dengan didukung teori ekonomi dan praktik lapangan yang mengesankan. Selain pernah mengajar di Yale, Duke, Stanford, Oxford, dan Princeton, Stiglitz kini mengajar di Universitas Columbia. Ia pernah menjadi wakil Presiden Bank Dunia (1997-2000) dan menjadi Ketua Dewan Penasehat Ekonomi Presiden Clinton (1995-1997). Stiglitz juga mendapat Hadiah Nobel di bidang ekonomi pada tahun 2001. Di antara pemenang Hadiah Nobel yang masih hidup, Stiglitz adalah ekonom yang paling banyak menulis buku dan artikel di berbagai jurnal ilmiah.

Tiga bukunya yang menghantam globalisasi adalah *Globalization and Its Discontents* (2002), *The Roaring Nineties: Seeds of Destruction* (2003), dan *Making Globalization Work* (2006). Tidak mungkin intisari ketiga buku itu dipaparkan disini, akan tetapi beberapa hal yang teramat penting perlu disebutkan. Kiranya perlu dicatat bahwa resiko oversimplifikasi pikiran-pikiran Stiglitz sudah pasti sulit dihindarkan.

Dalam buku pertamanya, Stiglitz menunjukkan bahwa ekonomi pasar bebas tidak pernah menghasilkan efisiensi karena adanya informasi asimetris dari pelaku pasar. Tangan yang tidak kelihatan (*invisible hands*) yang “mengatur” pasar sejatinya tidak pernah ada. Yang ada adalah bahwa pelaku pasar yang menguasai informasi akan meneguk keuntungan atas kerugian mereka yang miskin informasi. IMF menjadi sasaran kritik Stiglitz karena pada dasarnya IMF memaksakan konsep pasar bebas terhadap negara-negara yang menjadi nasabahnya.

Keyakinan IMF bahwa keterbukaan ekonomi dan liberalisasi adalah *panacea* atau obat mujarab bagi keterbelakangan ekonomi dikoreksi oleh Stiglitz secara meyakinkan. Negara-negara yang membuka lebar dirinya terhadap perdagangan bebas, melakukan deregulasi pasar uang, dan mendadak menswastakan berbagai perusahaan milik negara dalam kenyataannya justru mengalami

kemunduran sosial dan ekonomi. Bukan mengalami kemajuan. Liberalisasi pasar modal malah memukul pasar yang baru mulai bangkit di negara berkembang dan bukannya memperkuat.

Keadaan yang menyusahkan bagi negara berkembang justru muncul sebagai akibat liberalisasi modal dan keuangan. Negara berkembang menjadi korban serbuan uang panas (*hot money*) yang masuk, yang pada gilirannya mengangkat kejayaan *real-estate* untuk sementara waktu dan menghasilkan *boom* atau lebih tepat *bubble* (buih). Namun begitu sentimen pasar investasi berubah karena ada perubahan sosial atau politik tertentu, uang yang masuk segera ditarik lagi keluar dan mengakibatkan kehancuran ekonomi (*bust*). Dus, ekonomi *boom and bust*.

Secara tersamar sesungguhnya Stiglitz juga membenarkan adanya mentalitas kolonialis di pihak IMF. Katanya, terlalu sering pendekatan IMF ke negara berkembang berbau penguasa kolonial. (*All too often the Fund's approach to developing countries has had the feel of a colonial ruler*). IMF menunjukkan semacam paternalisme terhadap negara berkembang dengan gaya khas: "Kami pihak yang sudah mapan paling tahu bagaimana cara mengelola pasar modal. Kerjakan saja apa yang kami perintahkan." Tentu arogansi semacam ini cukup menyakitkan dan menunjukkan bahwa IMF sesungguhnya mengalami defisit demokrasi.

Ada semacam asumsi bahwa demokrasi dengan sendirinya tidak akan melahirkan disiplin. Katakanlah, kadangkala diperlukan pendisiplinan eksternal. Hanya saja, pendisiplinan dari luar itu seharusnya paham apa yang terbaik buat pertumbuhan ekonomi dan sekaligus bisa memahami dan menghormati nilai-nilai bangsa dan negara yang sedang dibantu. Sayang dalam kaitan ini IMF tidak pernah peduli pada apa yang dikatakan dan dirasakan negara klien atau negara nasabah.

Sementara itu kesukaan IMF untuk memaksa negara klien agar melakukan privatisasi secepat mungkin lebih banyak memperpuruk ekonomi negara bersangkutan. Yang dilupakan oleh IMF, menurut Stiglitz, adalah bahwa privatisasi terlalu dini tidak pernah memperhitungkan pentingnya budaya korporatokrasi yang menyertainya, menganggap remeh kesulitan dalam membangun lembaga yang diperlukan dan juga melupakan bahwa banyak negara yang tidak atau belum memiliki pemerintahan yang dapat mengatur kompetisi secara adil.

Liberalisasi dan pembukaan pasar ekonomi bukan saja harus mementingkan efisiensi ekonomi, tetapi akibatnya harus secara sosial dapat diterima agar liberalisasi pasar dan modal dapat bertahan. Dengan kata lain pembangunan yang berkelanjutan bukan saja menuntut liberalisasi dan privatisasi, melainkan juga sekaligus harus disertai berbagai program yang dapat menjamin bahwa seluruh unsur masyarakat memperoleh manfaat globalisasi.

Lagi-lagi yang dilakukan IMF sungguh aneh. Stiglitz mengingatkan bahwa IMF telah gagal mengantisipasi konsekuensi/ akibat dari nasehatnya tentang stabilitas sosial dan politik. Dengan menekankan pentingnya pemerintah negara berkembang melakukan privatisasi secara cepat, IMF mengabaikan dampak negatif distribusi kekayaan. Dengan menuntut pengetatan uang (*financial austerity*) sambil mendorong terus liberalisasi, IMF tidak memperdulikan kebutuhan pokok sosial yang paling mendasar. Dan dengan memaksa pejabat-pejabat negara berkembang untuk melanggar kontrak sosial dengan masyarakatnya sendiri atas nama keseimbangan fiskal, IMF menenggelamkan legitimasi banyak pemerintah dan proses liberalisasi pasar yang justru diagungkan sebagai prinsip penting.

Pukulan Stiglitz terhadap Bank Dunia tidak sekeras terhadap IMF. Menurut Stiglitz, Bank Dunia adalah sebuah organisasi yang

terus belajar (*a learning organization*), sedangkan IMF gagal belajar (*learning impaired*). Stiglitz menggambarkan IMF telah membabi buta mencengkeram ideologi fundamentalisme pasar bahwa pasar paling tahu apa yang paling baik dan tidak memerlukan debat publik dan tidak butuh suara kritis. IMF mendorong para stafnya untuk berpikir mekanis sesuai "*financial programming model*" yang diajarkan di berbagai seminar, yakni sebuah model di mana kebijakan moneter dan fiskal dipertahankan untuk menyeimbangkan antara penawaran dan permintaan dan di mana informasi asimetris tidak dikenal.

Kebijakan dan nasehat IMF salah arah karena para ekonom IMF selain rata-rata hanya ekonom klas tiga (*third rate*), mereka juga bekerja di ruang tertutup. Apalagi mereka bekerja secara mekanis. Mereka tetap saja menerapkan model yang digunakan untuk mengatasi krisis hutang Amerika Latin pada 1980-an untuk mengatasi krisis Asia pada 1990-an. Nampaknya belum terlihat di masa datang IMF akan lebih kreatif. Dalam sebuah kesempatan Stiglitz pernah mengatakan bahwa para ekonom IMF serampangan dalam memberikan solusi ekonomi negara-negara berkembang, bagaikan pesawat tempur Amerika yang terbang sangat tinggi dan menjatuhkan bom seenaknya tanpa membedakan apakah yang kena sasaran bom itu instalasi militer, pasar, pemukiman, rumah sakit, rumah ibadah atau sasaran lainnya.

Stiglitz mengingatkan bahwa IMF, sampai batas tertentu juga Bank Dunia, mengidap penyakit bawaan. Penyakit itu adalah kewenangan Amerika yang menguasai gugusan suara terbesar dan karena itu paling menentukan dalam semua langkah IMF dan Bank Dunia. Dominasi Amerika ini, ditambah dengan kerahasiaan sidang-sidang IMF, telah memungkinkan Amerika menjadikan IMF sebagai instrumen politik luar negerinya, yang pada umumnya merugikan negara berkembang.

Kritik Stiglitz pada WTO juga tidak kalah telak. Baginya WTO adalah simbol yang paling jelas dari kesenjangan global dan kemunafikan (hipokrisi) negara-negara industri maju. Negara-negara maju terus saja berkhotbah, bahkan memaksa, agar negara berkembang membuka pasarnya bagi produk negara maju. Akan tetapi mereka menutup rapat pasar mereka sehingga produk negara berkembang tidak dapat masuk, terutama produk pertanian dan tekstil.

Negara maju tanpa henti berkhotbah supaya negara berkembang tidak memberikan subsidi di sektor industri, tetapi mereka terus menerus memberikan subsidi milyaran dolar bagi para petaninya, sehingga mustahil negara berkembang dapat bersaing dengan mereka. Demikian juga Amerika Serikat selalu berkhotbah tentang keindahan atau keutamaan pasar yang kompetitif, namun Amerika Serikat-lah yang paling cepat membentuk kartel global untuk baja dan aluminium ketika industri dalam negerinya mulai terancam oleh impor.

AS mendorong liberalisasi jasa keuangan (*financial services*), tetapi pada saat yang sama, menentang liberalisasi sektor jasa pada umumnya, termasuk jasa konstruksi dan jasa maritim, karena negara berkembang memiliki posisi kuat pada sektor-sektor terakhir ini. Stiglitz mengingatkan begitu curangnya agenda perdagangan WTO sampai saat ini, sehingga bukan saja negara berkembang (miskin) tidak memperoleh keuntungan secara wajar, melainkan nasib negara berkembang justru semakin sulit. Afrika sub-Sahara, misalnya, berposisi semakin parah setiap kali perundingan perdagangan ala WTO ditandatangani dan dilaksanakan.

Ada baiknya kita lengkapi kritik Stiglitz di atas dengan pendapat Martin Khor, seorang tokoh jurnalis-ekonom dari Malaysia, tentang WTO. Menurut Khor, WTO tidak mengelola ekonomi global secara adil, tetapi berbagai keputusan dan operasinya penuh dengan

bias sistematik yang menguntungkan negara-negara kaya dan korporasi multinasional, serta merugikan negara-negara miskin yang tidak memiliki kekuatan dan daya tawar. Di antara bias atau ketidaknetralan itu adalah:¹

- Negara-negara kaya dapat mempertahankan pajak impor yang tinggi beserta kuota untuk produk-produk tertentu yang pada gilirannya dapat memblokir impor dari negara-negara berkembang, semisal pertanian;
- Kenaikan rintangan non-tarif seperti peraturan *anti-dumping* diperbolehkan untuk menghadapi negara-negara berkembang;
- Dipertahankannya proteksi tinggi bagi sektor pertanian di negara maju, sementara negara berkembang ditekan untuk membuka pasar mereka.
- Banyak negara berkembang yang tidak mempunyai kemampuan untuk mengikuti berbagai negosiasi dan berpartisipasi secara aktif di Putaran Uruguay; dan
- Adanya perjanjian TRIPs yang membatasi negara-negara berkembang untuk memanfaatkan sejumlah teknologi yang berasal dari luar negeri di dalam sistem lokal mereka (termasuk obat-obatan dan produk pertanian).

Kembali ke Stiglitz. Ia mengingatkan bahwa kadangkala AS menampakkan hipokrisi alias kemunafikan, misalnya ketika membahas keanggotaan China di WTO. Juru runding utama AS berpendapat pada dasarnya China adalah negara maju, bukan negara berkembang. Padahal hanya negara berkembang yang diperbolehkan memperpanjang masa transisi, termasuk memperpanjang subsidi negara dan berbagai penundaan atas aturan

¹ http://en.wikipedia.org/wiki/criticism_of_the_WTO

WTO yang ketat. Karena China adalah negara maju versi Amerika, maka China tidak boleh lagi menikmati kelonggaran-kelonggaran WTO.

Sesungguhnya China bukan termasuk negara maju (*developed country*). Namun China mempunyai banyak “capita” atau kepala. Dengan jumlah penduduk yang begitu banyak, ekonomi China menjadi sangat besar karena jumlah penduduk yang begitu besar bila dikalikan dengan pendapatan per capita rata-rata menjadi sebuah ekonomi dengan ukuran sangat besar. Dus, China dianggap negara maju. Bayangkan, AS yang meminta China dimasukkan ke kategori negara maju, tiba-tiba menuntut agar dirinya dimasukkan ke kategori negara berkembang (*developing country*) agar punya kesempatan untuk memperoleh waktu-ekstra guna melindungi industri tekstilnya yang kalah bersaing dengan produk luar negeri.²

Sebagai penjelajah di antara dua dunia (*a traveler between two worlds*), dunia maju dan dunia berkembang, Stiglitz juga mengarahkan kritiknya ke AS, negaranya sendiri dalam *The Roaring Nineties*. Tidak ada pemenang hadiah Nobel bidang ekonomi yang berkelana ke seluruh pelosok dunia seperti Stiglitz. Ia berceramah di pertemuan tahunan Davos, Swiss, sebagai kiblat globalisasi, tetapi juga berceramah keliling dunia di negara-negara Eropa Barat/Timur, Amerika Latin, Australia, Afrika dan Asia, termasuk Indonesia.

Alejandro Shtulmann mengemukakan saripati buku Stiglitz di atas secara jitu, seperti dipaparkan berikut ini.³ Semua langkah dan kebijakan ekonomi global Amerika pada 1990-an mempengaruhi nasib jutaan penduduk dunia lainnya, apalagi pada dasa-warsa itu, kapitalisme dunia memungkinkan terjadinya super-

² Stiglitz, Joseph, “Globalism’s Discontents”, *The American Prospect*, Winter 2002.

³ Demint dalam www.iadb.org/ethics

konsumsi dan super-pertumbuhan yang berdampak buruk bagi negara-negara berkembang.

Pada masa itu terjadi proses deregulasi ekonomi dan privatisasi yang berlebihan, praktik akuntansi yang buruk dan culas yang melahirkan apa yang dinamakan oleh Greenspan sebagai *irrational exuberance* atau katakanlah optimisme kelewatan yang memunculkan *bubble economy* (ekonomi gelembung, ekonomi buih).

Setelah Perang Dingin usai dan globalisasi mulai menggelinding, sesungguhnya AS berpeluang menciptakan tata dunia internasional baru yang mencerminkan nilai-nilai Amerika, terutama untuk membangun keseimbangan antara pemerintah dan pasar yang dapat menjamin keadilan sosial dan demokrasi pada tatanan global.

Bagi Stiglitz, pemerintahan Clinton berprestasi dalam memajukan perdagangan dengan menciptakan NAFTA (*the North American Free Trade Agreement*) antara Mexico, AS dan Kanada dan mengarahkan perundingan Putaran Uruguay yang melahirkan WTO (*the World Trade Organization*) dalam rangka mendorong perdagangan global.

Berbagai pembicaraan Putaran Uruguay dan WTO menjanjikan keuntungan tanpa batas bagi ekonomi Amerika, termasuk mengurangi biaya hidup (*the costs of living*), mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja melalui akses ke pasar baru yang lebih luas. Namun janji-janji itu tidak terbukti dalam kenyataan.

Jarak antara kaum kaya dan kaum miskin di AS, antara AS dan negara-negara berkembang, antara kaya-miskin di dunia miskin justru makin lebar. Pengangguran dan rasa tidak aman pada masa depan terus bertambah besar dikarenakan hasil pertumbuhan ekonomi yang terbatas hanya dinikmati oleh kaum kaya dan lebih mempertajam rasa ketidakadilan sosial. Kemiskinan dan pengang-

guran global cenderung meningkat, sementara di Asia, khususnya India dan China, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan justru lebih berhasil karena resep neoliberal tentang *growth and development* tidak pernah diikuti dan ditaati.

Pada dekade 1990-an pengaruh Amerika terhadap ekonomi global tidak tertandingi. Bukan secara kebetulan bila dalam dasawarsa tersebut krisis ekonomi yang sangat tajam terjadi beruntun di berbagai belahan dunia yang lain. AS memang bertahan, bahkan memetik keuntungan gara-gara harga barang impor yang rendah, dan sebagian besar keuntungan mengalir ke bank-bank investasi yang menjadi promotor pasar modal global.

Sayang sekali AS tidak mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi gejolak ekonomi internasional sebagai akibat percepatan dan pertumbuhan globalisasi modal. Di samping itu penyakit bawaan AS, yakni mau menang sendiri dan terus mengendalikan hegemoni ekonomi global, membuat nasib negara-negara berkembang semakin buruk.

Semua negara berkembang diminta membuka pasar mereka bagi seluruh wilayah ekspor, khususnya buat barang-barang Amerika yang paling kompetitif. Sedangkan Amerika mempertahankan tarif perdagangan tinggi serta menggelontorkan subsidi guna melindungi sektor pertanian dan berbagai macam industrinya sehingga pasar domestik Amerika tertutup rapat dari kompetisi produk pertanian dunia ketiga.

Stiglitz juga mengingatkan bahwa dasawarsa 1990-an menyaksikan skandal korporasi yang berupa akuntansi bohong-bohongan, kolusi koruptif antara korporasi dengan bank-bank investasi, pencucian uang, pembuatan anak perusahaan fiktif untuk mengelabui para *stakeholders* dan lain sebagainya. Enron dan World Com diangkat sebagai contoh puncak skandal korporasi yang

dapat terjadi akibat deregulasi yang liar dan keserakahan tak terperi dari para eksekutif korporasi. Uang yang dicuri lewat skandal Enron dan WorldCom lebih besar dari Produksi Domestik Bruto beberapa negara berkembang. Bank-bank investasi sesungguhnya mengetahui kebobrokan manajemen dan kepalsuan akuntansi dari berbagai korporasi, namun terus saja mereka berkolusi karena ikut menikmati hasil skandal di atas sambil berharap terjadinya pemulihan (*recovery*) kesehatan keuangan korporasi.

Stiglitz mencemaskan usaha hegemoni Amerika dan peranannya dalam sistem internasional. Amerika cenderung lupa bahwa dunia telah menjadi semakin interdependen. Satu-satunya cara untuk mewujudkan stabilitas global adalah lewat perjanjian/kesepakatan internasional yang setara dan adil. Hal ini menuntut kesediaan dan kerjasama Amerika agar tidak mudah menggunakan kekuasaan telanjang; tidak gampang mendiktekan kehendak yang tidak proporsional di tengah krisis; juga tidak memanfaatkan secara berlebihan kekuatan ekonomi Amerika untuk mempromosikan perjanjian perdagangan yang tidak adil; demikian juga tidak mengambil kebijakan perdagangan hipokrit.

Sebagai ekonom, Stiglitz berbicara tentang keadilan sosial yang tidak boleh dilupakan dalam proses globalisasi ekonomi. Keadilan sosial dalam arti luas, persamaan kesempatan, pemberdayaan rakyat, penciptaan kesempatan, kesetaraan yang lebih langgeng antar generasi, penguatan supervisi pemerintah terhadap pasar, karena *market has no memory and no mercy*.

Namun seperti kita ketahui *bubble economy* yang meraung-raung seperti diungkap oleh Stiglitz bukan saja memperpuruk nasib negara-negara berkembang, tetapi juga memukul Amerika sendiri dengan berbagai krisis ekonomi, seperti krisis kredit perumahan yang mulai mengguncang stabilitas internasional.

Dalam bukunya *Making Globalization Work* (2006) Stiglitz, seperti dalam buku-buku sebelumnya, pada dasarnya tidak ingin mengubur kapitalisme, tetapi ingin menyelamatkan kapitalisme lewat antara lain reformasi pasar yang selama ini diagungkan oleh kaum neo-liberal. Kaum neo-liberal pada dasarnya berpendapat setiap restriksi yang dilakukan pemerintah terhadap perdagangan, industri manufaktur, dan penerapan tarif dan terhadap pasar pada umumnya hanya akan membuat ekonomi suatu bangsa makin terpuruk.

Sebaliknya bila kontrol atau restriksi itu dihilangkan, semangat individualisme akan melahirkan usaha bebas dan persaingan bebas (*free enterprise, free competition*) yang kemudian berarti bebas bagi para kapitalis untuk meneguk sebesar-besar keuntungan sebagaimana mereka inginkan.

Mengapa model globalisasi yang sedang berjalan dewasa ini tidak memberikan manfaat bagi kebanyakan masyarakat dunia? Jawaban Stiglitz sangat sederhana, yakni karena ada lima kelemahan kunci:⁴

- aturan main yang ada tidak *fair* dan dirancang supaya menguntungkan negara-negara kaya dan korporasi;
- globalisasi mengunggulkan nilai-nilai material di atas nilai lainnya, sehingga tidak ada perhatian terhadap lingkungan hidup;
- aturan perdagangan dunia cenderung menenggelamkan kedaulatan negara-negara miskin;
- pertumbuhan ekonomi berdasar hukum-hukum pasar hanya menguntungkan sebagian orang dan memperlebar kesenjangan; dan

⁴ Paul Kingsnorth, <http://www.arlindo-correia.com/041006.html>

- model atau resep Amerika yang dipaksakan atas negara-negara miskin cenderung merusak dan menimbulkan kebencian atau perlawanan.

Beberapa anomali dalam globalisasi ditunjukkan oleh Stiglitz. Seperti uang yang seharusnya mengalir dari negara kaya ke negara miskin dalam kenyataan mengalir ke arah yang berlawanan. Kelompok kaya selalu saja memperoleh keuntungan setiap terjadi pergolakan nilai tukar uang dan fluktuasi bunga bank, sedangkan kelompok miskin mendapat getah pergolakan itu.

Perdagangan bebas pada akhirnya hanya menguntungkan negara-negara kaya. Amerika Serikat dan Eropa telah berhasil lewat kemampuan politik dan argumentatifnya melancarkan perdagangan bebas dan secara simultan mengupayakan kesepakatan dagang guna melindungi impor mereka dari persaingan negara berkembang. “Rata-rata seekor sapi di Eropa mendapat subsidi 2 dolar Amerika per hari, sementara lebih dari separoh penduduk dunia hidup di bawah 2 dolar per hari”.

Dari berbagai pemikiran Stiglitz yang disampaikan dalam *Making Globalization Work* di atas, yang sangat penting untuk kita cermati adalah “kutukan sumber daya alam” yang harus dihilangkan dari negara-negara berkembang. Kita semua diingatkan bahwa sumber daya alam yang kita miliki pada hakekatnya dapat menjadi berkah, tetapi dapat juga menjadi kutukan. Sayang sekali, di negara-negara berkembang sumber daya alam seperti minyak dan gas, juga mineral atau non-mineral, lebih menjadi kutukan daripada kurnia dan berkah Tuhan.

Resource curse, kutukan sumber daya alam atau *curse of oil*, kutukan minyak di berbagai negara berkembang menunjukkan adanya *paradox of plenty*. Paradoks antara sumber daya alam yang melimpah di sebuah negara dan kemelaratan rakyat yang merata di dalam tubuh bangsa bersangkutan. Sumber daya alam yang melimpah

seringkali justru membuat sebuah bangsa menjadi miskin, tidak produktif, cenderung malas, dan memerosotkan industri manufaktur, industri pertanian, dan pada gilirannya menurunkan kemampuan ekspornya. Bukan itu saja. Korupsi yang dilakukan pemerintah juga semakin menggila karena kekayaan melimpah yang tersimpan di perut bumi.

Memahami mengapa negara-negara yang kaya sumber daya alam justru gagal membangun kemakmuran sangat penting untuk kita cermati. Mengapa? Pertama, cukup banyak negara berkembang yang bergantung pada sumber daya alam; lebih dari sepertiga penghasilan ekspor Afrika berasal dari sumber daya alam; pendapatan kebanyakan negara Timur Tengah dan beberapa daerah di Russia, juga Indonesia dan sebagian Amerika Latin termasuk Venezuela, Mexico, Bolivia, Peru dan Ekuador sangat bergantung pada sumber daya alam. Demikian juga Papua New Guinea tergantung pada tambang emas dan hutan yang cukup lebat dan luas.

Kedua, karena kenyataan aneh, negara-negara yang kaya-raja sumber daya alam justru kebanyakan berpenduduk miskin, maka paradoks ini dapat menguak lebih jelas tentang kegagalan globalisasi serta sekaligus mencari pemecahan atas masalah penting ini.

Stiglitz memperingatkan bahwa dengan kekayaan alamnya yang melimpah, negara berkembang seharusnya lebih berhasil dalam membangun masa depannya, apalagi bila negara maju bersedia membantu proses pembangunan itu dengan resep ekonomi yang benar. Yang diperlukan oleh negara berkembang dengan kekayaan alam yang melimpah bukan bantuan atau hutang asing. Namun yang diperlukan negara-negara berkembang adalah

”pertolongan lebih besar agar mereka memperoleh harga/ nilai penuh bagi sumber daya alam mereka dan dapat

membelanjakan uang yang mereka peroleh dengan cara yang benar” (*more help in getting full value for their resources and in ensuring that they spend well the money they get*).

Bila kita baca buku Stiglitz, kita merasa seolah-olah nasehat sederhana Stiglitz itu ditujukan ke Indonesia. Katanya, kutukan kekayaan alam itu sesungguhnya bukan sebuah takdir, melainkan sebuah pilihan. Jelas sekali kepentingan negara-negara Barat yang membutuhkan kekayaan alam dari negara-negara berkembang punya kepentingan yang tidak berkaitan dengan upaya kemakmuran dari negara yang menjadi tuan rumah. Mudah dimaklumi bila berbagai korporasi Barat hanya memikirkan keuntungan buat mereka sendiri, tanpa menaruh perhatian terhadap proses pemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang. Pada akhirnya memang terpulang pada negara berkembang untuk memperjuangkan nasibnya sendiri dalam proses globalisasi yang cukup ganas.

Stiglitz memuji India, China dan negara-negara Asia Timur termasuk Malaysia, yang berhasil membangun ekonomi negara masing-masing tanpa mengikuti Konsensus Washington dan pada intinya mengambil langkah-langkah globalisasi secara selektif. Globalisasi seperti dirancang oleh Amerika Serikat dapat dikatakan gagal, sementara pendekatan Asia Timur menawarkan cara lain yang lebih optimis dan memberi harapan. Globalisasi di Afrika, Amerika Latin, Timur Tengah dan bekas negara-negara komunis tidak menunjukkan keberhasilan, berbeda dengan negara-negara Asia Timur.

Selama 30 tahun terakhir Asia Timur menikmati angka pertumbuhan ekonomi rata-rata sekitar 6%, sementara Afrika malahan mengalami penurunan sebesar 0,2% setiap tahun. Demikian juga Russia sebelum naiknya Putin mengalami keterpurukan sehingga pendapatan per-kapitanya turun sebesar

15%. Mengapa Russia sebelum Putin gagal dan China berhasil? Karena yang pertama mengikuti dengan setia preskripsi IMF dengan *shock therapy* yang berupa penerapan fundamentalisme pasar, sedangkan yang terakhir tidak terbuai dengan fundamentalisme pasar ala Anglo-Saxon, memahami sentralitas pemerintah dan melindungi industri yang masih muda umurnya serta menolak liberalisasi pasar uang dan pasar modal secara gegabah.

Sesungguhnya setiap negara berkembang, bahkan negara maju, dalam menghadapi globalisasi harus memiliki cara sendiri agar tetap *survive* dan berhasil. Khusus mengenai penyelamatan dan penguasaan aset strategis yang berupa kekayaan tambang, Stiglitz menyebut 3 negara sebagai contoh keberhasilan. Di antara negara maju, Norwegia merupakan model pertambangan yang baik. Minyak merupakan 20% dari GDP dan 45% persen eksportnya. Perusahaan minyak milik negara (belakangan sebagian diprivatisasi) cukup efisien. Yang lebih penting lagi, negara ini menyadari betul cadangan terbatas kekayaan alamnya, yang diperkirakan habis dalam masa 70 tahun. Karena itu sebagian penghasilan dari minyak disisihkan sebagai dana stabilisasi yang sudah mencapai 150 milyar dolar.

Botswana merupakan sedikit contoh negara berkembang yang berhasil mengelola tambang permata untuk kesejahteraan rakyatnya. Ekonomi Botswana tumbuh sebesar 9 persen dalam 30 tahun terakhir ini, menyaingi beberapa “macam” Asia. Pemerintah negara Afrika ini berhasil melindungi kekayaan tambangnya dan mampu meyakinkan rakyatnya bahwa dana stabilisasi adalah kebutuhan pokok untuk menghadapi harga barang tambang yang mudah bergolak. Malaysia juga merupakan negara yang berhasil memanfaatkan kekayaan alamnya. Malaysia berhasil bergabung dalam jajaran negara industri baru berkat penanganan sumber daya alam secara cerdas dan baik.

Bagi Norwegia, Australia, Malaysia, Botswana, Iran, Venezuela (sejak Hugo Chavez berkuasa), Bolivia (sejak Evo Morales jadi presiden), dan sejumlah negara cerdas lainnya, kekayaan alam, terutama kekayaan tambang, merupakan berkah, bukan kutukan. Bagi Indonesia, mengingat praktik pertambangan selama ini yang begitu menguntungkan korporasi asing dan sangat merugikan bangsa sendiri, serta telah menghancurkan ekologi Indonesia tanpa ampun, maka sumber daya alam kita telah menjadi kutukan. Semua itu karena kesalahan dan kebodohan kita sendiri.

Stiglitz mengingatkan bahwa strategi perusahaan-perusahaan minyak, gas dan tambang adalah berusaha meyakinkan pemerintah negara-negara berkembang agar mendapat bagian sesedikit mungkin, sambil membantu pemerintahan yang bodoh itu menemukan alasan dungu, mengapa memperoleh bagian yang sedikit justru lebih baik. Mereka mengatakan bahwa diperlukan keuntungan sosial, sehingga banyak kawasan harus dibangun. Lewat perolehan pajak dan royalti tertentu pemerintah sudah dapat memetik keuntungan. Tidak perlu menyiapkan modal, teknologi dan tenaga ahli untuk menggarap pertambangan. Serahkan saja semuanya, termasuk *operatorship*-nya ke perusahaan asing, pemerintah negara berkembang tahu beres.

Bahwa dengan sikap pemerintah seperti itu di mana bagian terbesar keuntungan pertambangan diangkut keluar, sementara negara tuan rumah hanya mendapat bagian kecil keuntungan, hakekatnya negara berkembang seperti Indonesia tidak memiliki masa depan. Kekayaan alam yang seharusnya dinikmati oleh bangsa secara keseluruhan, justru “dihibahkan” kepada perusahaan-perusahaan asing dan inilah yang telah terjadi di Indonesia dari masa ke masa. Bahkan bisa dikatakan keadaannya semakin parah.

Seperti diuraikan di bab lain dalam buku ini, banyak korporasi asing yang mengerjakan kegiatan pertambangan di negara kita,

begitu bebasnya dan begitu serakahnya dalam menjarah sumber daya alam kita, sehingga mereka bukan lagi bagaikan negara di dalam negara (*a state within a state*), tetapi sudah seperti negara di atas negara (*a state above a state*). Kita hanya menjadi sekedar penonton yang membisu, karena kita tidak berani berteriak, suka atau tidak suka.

Seperti sudah kita ketahui bersama, seluruh kontrak karya pertambangan yang kita buat dengan berbagai korporasi asing, seluruhnya lebih menguntungkan pihak asing dan merugikan bangsa sendiri. Nampaknya kita sudah di "*brain-washed*" bahwa kontrak karya itu kita anggap *sacrosant* alias suci, tidak mungkin dinegosiasi ulang, dengan alasan *pacta sunt servanda*, perjanjian yang sudah disetujui tidak boleh diotak-atik. Perjanjian itu harus dilaksanakan.

Kita memegang teguh doktrin *pacta sunt servanda* tetapi melupakan klausul hukum yang tidak kalah penting, yaitu klausul *rebus sic stantibus* ('*things thus standing*') yang berarti bahwa sebuah perjanjian menjadi tidak berlaku lagi (*inapplicable*) bilamana ada perubahan fundamental dengan konteks situasinya.⁵ Bila jelas-jelas sebuah perjanjian ternyata merugikan salah satu pihak maka pihak yang dirugikan dapat mengusulkan negosiasi ulang terhadap perjanjian tersebut. Namun bila keberanian itu tidak pernah kita miliki, maka sampai kapan pun perjanjian yang merugikan tersebut – dalam hal ini seluruh kontrak karya pertambangan – akan terus berlaku dan proses penjarahan sumber daya alam kita terus berlangsung sampai berakhirnya kontrak tersebut. Kita lebih bodoh, maaf, dari keledai.

⁵ Doktrin hukum *rebus sic stantibus* ini dikodifikasikan dalam Konvensi Wina pada bagian Hukum Perjanjian (*Law of Treaties*) dalam artikel 62: Perubahan Fundamental Suasana (*Fundamental Change of Circumstance*).

Posisi Indonesia

Salah seorang petinggi Indonesia pernah mengatakan bahwa mustahil bagi Indonesia menuntut negosiasi ulang atas kontrak karya pertambangan yang sudah ditandatangani. Alasannya karena Indonesia bisa dikucilkan oleh para investor internasional. Mereka tidak akan percaya lagi pada Indonesia. Pernyataan itu sungguh tidak beralasan, kecuali karena kekurangpahaman terhadap masalah, kepicingan informasi internasional mutakhir atau ketakutan yang sulit diterangkan.

Ketika Stiglitz berkunjung ke Indonesia pada bulan Agustus 2007, ia mengingatkan supaya Indonesia keluar dari kungkungan pemahaman yang keliru terhadap globalisasi. Selama ini kelemahan kita adalah “kebodohan” dan “kepengecutan” kita sendiri sehingga seluruh mantra globalisasi seperti difatwakan oleh IMF, Bank Dunia dan WTO kita telan semuanya tanpa daya dan nalar kritis yang diperlukan.

Stiglitz mengingatkan bahwa liberalisasi pasar modal seperti kita praktikkan bukanlah sebuah solusi. “Bukti-bukti memperlihatkan bahwa di banyak negara berkembang, liberalisasi modal, pasar keuangan tidak menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, tetapi bahkan menciptakan ketidakstabilan. India dan China yang pertumbuhan ekonominya tinggi terhindar dari krisis Asia tahun 1997 tanpa melakukan liberalisasi”.⁶

“Indonesia perlu agenda baru”. Ini adalah usulan terpenting Stiglitz yang seyogyanya kita dengarkan dengan cermat dan obyektif. Di antara agenda baru itu adalah *land reform* dan investasi yang lebih berkaitan dengan pendidikan. Di samping itu ada semacam agenda mendesak, yakni melakukan negosiasi ulang terhadap seluruh kontrak karya pertambangan yang pada intinya merugikan

⁶ *Kompas*, 13 Agustus 2007.

Indonesia sendiri dan memberikan keuntungan eksekutif pada korporasi asing. Jika pemerintah **berani** (sayang, pemerintah tidak berani, penulis), yaitu berani menegosiasi ulang kontrak karya pertambangan yang merugikan rakyat, Indonesia akan memperoleh keuntungan jauh lebih besar dibandingkan yang diperoleh para investor asing.⁷

“Mereka (para perusahaan tambang asing) tahu kok bahwa mereka sedang merampok kekayaan alam negara-negara berkembang”. Kata-kata Stiglitz ini seharusnya menjadi *wake-up call*, menjadi penggugah kita supaya kita berhenti menjadi bangsa yang “bodoh” atau “pura-pura bodoh”. Dengan kata lain kita harus mampu menghentikan perampokan atau penjarahan oleh berbagai korporasi asing yang berlindung di balik kontrak karya yang sesungguhnya tidak masuk akal itu. Stiglitz juga bercerita bagaimana seorang duta besar Amerika Serikat memberikan kuliah agar Indonesia menghormati kontrak-kontrak pertambangan yang terindikasi korupsi, sementara dia sedang mempraktikkan korupsi itu sendiri.

Bukan itu saja. Selama di Indonesia Stiglitz memperkenalkan kembali sebuah istilah yang kita anggap tabu dan haram kita sebutkan, karena begitu takutnya kita mendengar istilah itu, yaitu **nasionalisasi**. “Sebaiknya eksplorasi migas di Indonesia dinasionalisasi”,⁸ demikian pernyataannya.

Di Malaysia, Brazil, Chili dan Norwegia misalnya, pertambangan yang digarap sendiri oleh pemerintah ternyata mendatangkan keuntungan lebih besar dibandingkan bila diberikan kepada korporasi asing. Negara-negara Amerika Latin telah dengan jelas menunjukkan bagaimana negosiasi ulang mampu mendatangkan keuntungan jauh lebih banyak dan ternyata tidak ada perjanjian

⁷ Lihat majalah *Tempo*, 26 Agustus 2007.

⁸ *Seputar Indonesia*, 15 Agustus 2007.

atau kontrak karya yang tidak dapat dinegosiasi kembali. Venezuela dibawah Hugo Chavez dan Bolivia di bawah Evo Morales membuktikan hal itu.

Mengapa Indonesia takut untuk sekedar meminta negosiasi? Kalau nasionalisasi dianggap terlalu ekstrim, terlalu revolusioner, bukankah ada jalan lain untuk mencapai keadilan demi perbaikan nasib Indonesia sendiri, yaitu lewat negosiasi ulang? Mengapa Indonesia tiba-tiba kehilangan keberanian dan sekaligus kememandiriannya sebagai bangsa besar, bangsa terbesar nomor 4 di muka bumi (setelah China, India dan Amerika Serikat)?

Paling tidak ada empat alasan mendasar bahwa sudah tiba waktunya kita segera menuntut negosiasi ulang atas seluruh kontrak karya pertambangan yang merugikan bangsa Indonesia selama puluhan tahun terakhir ini. Pertama, doktrin *pacta sunt servanda* harus dipahami sekaligus dengan klausula *rebus sic stantibus*, sebagaimana diuraikan secara singkat di atas. Bila sebuah kontrak atau perjanjian ternyata dalam pelaksanaan merugikan salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan berhak merundingkan kembali kontrak atau perjanjian tersebut. Negara-negara berkembang yang cukup cerdas sudah melakukannya. Kapan Indonesia menjadi bangsa yang cerdas?

Kedua, pasal 1 ayat 2 *The International Rights Covenant on Civil and Political Rights* mengatakan

semua bangsa, untuk mencapai tujuannya memiliki kebebasan untuk memanfaatkan kekayaan dan sumber daya alamnya. Dalam pasal ini juga dikatakan bahwa kerjasama ekonomi internasional harus didasarkan pada prinsip saling-untung dan pada hukum internasional. Tidak dibenarkan suatu bangsa kehilangan atau dihilangkan hak hidupnya.

(All peoples may, for their own ends, freely dispose of their natural wealth and resources without prejudice to any obligations arising out of international economic corporation, based upon the principle of mutual benefit, and international law. In no case a people be deprived of its means of subsistence).

Jadi tidak ada alasan sampai kita takut mengelola kekayaan alam kita sendiri, apalagi untuk kesejahteraan bangsa kita sendiri pula.

Ketiga, tafsir yang agak luas atas *Universal Declaration of Human Rights* (1948) memberikan kita keyakinan bahwa melindungi dan memanfaatkan kekayaan alam yang kita miliki untuk bangsa Indonesia sendiri adalah salah satu bentuk hak asasi manusia. Pasal 3 dan 4 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menjamin hak setiap orang untuk menikmati hidup, kebebasan dan keamanan. Tidak diperkenankan ada seseorang yang dikungkung dalam perbudakan dan penghambaan. Seorang pakar mengatakan bahwa, “*each people’s right to its resources is a human right*”, hak setiap orang/bangsa untuk menguasai kekayaan alamnya adalah hak asasi manusia.

Keempat, kita sudah merdeka lebih dari 6 dasawarsa. Sudah sangat terlambat kalau masih saja mengabaikan pesan UUD 1945 pasal 33 ayat 3: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Kontrak Karya Pertambangan (KKP) di dunia pertambangan non-migas maupun Kontrak *Production Sharing* (KPS) di dunia migas hampir tanpa kecuali merugikan Indonesia dan kelewat menguntungkan investor asing. Karena kebanyakan *operatorship* pertambangan kita dipegang oleh pihak korporasi asing, maka *cost recovery* yang dibuat oleh investor asing selalu mengalami *mark-up* sampai tingkatan yang penuh dengan skandal manipulasi. Kurtubi mengatakan bahwa perjanjian-

perjanjian yang menghisap kekayaan negara itu hakekatnya adalah warisan penjajahan.⁹

Pertanyaannya adalah mengapa para pengelola negara kita begitu kerasan, begitu merasa “*at home*” dengan penjajahan dan penghinaan nasional itu? Selain kemungkinan kurang informasi atau rasa takut tanpa dasar, yang paling mungkin adalah karena para pengelola negara itu memegang teguh kepentingan picik dan sempitnya. Kepentingan picik dan sempit itu berupa keuntungan pribadi, keluarga atau kelompok kecil dan melupakan sama sekali kepentingan bangsa yang lebih luas dan besar. Tidak tertutup kemungkinan adanya penyogokan gelap.

Kasus penyogokan untuk para petinggi Kazakhstan yang dilakukan oleh agen bernama James Giffen yang bekerja untuk Exxon Mobil mencuat karena sempat bocor di pers. Sogokan Giffen sebesar 78 juta dolar Amerika itu tidak sia-sia. Yang disogok tidak tanggung-tanggung. Presiden Nursultan Nazarbayev dan menteri minyaknya, Nurlan Balgimbayev. Dalam liputan pers internasional sogokan itu dikenal sebagai *kazakbgate*. Berkat sogokan lumayan besar itu, Exxon Mobil mendapat perlakuan istimewa. Exxon Mobil memperoleh 25 persen bagian di ladang minyak Tengiz.

Mengapa Exxon Mobil diberi hak pengoperasian Blok Cepu dan bukannya Pertamina, padahal Ikatan Sarjana Geologi Indonesia sudah menyatakan bahwa mereka lebih dari mampu untuk menjadi operator tambang minyak di Blok Cepu? Dan mula-mula Pertamina sendiri juga menyatakan bisa dan sanggup? Akal sehat mengatakan, tentu ada Giffen-Giffen lain yang memberikan sogokan besar ke sejumlah petinggi Indonesia, sehingga sampai 2036, Exxon Mobil akan mengendalikan pengoperasian Blok Cepu

⁹ *Ibid.*

dengan segenap *mark-up* khasnya atas kerugian bangsa Indonesia.

Sebagai catatan, pada tahun 2036, saat KPS dengan Exxon sudah usai, atau pada tahun 2041 saat KKP dengan Freeport berakhir, ketika kekayaan tambang kita rata-rata sudah semakin ludes dan kehancuran ekologi tidak terpikulkan lagi, saya, Yudhoyono, Kalla dan mereka yang seangkatan kami sudah ada di alam lain, di alam baka. Tidak pernahkah kita pikirkan bahwa kesalahan fatal yang kita lakukan dalam berbagai kebijakan nasional sekarang ini akan berakibat buruk buat generasi mendatang?

Sesungguhnya apa yang dianjurkan oleh Joseph Stiglitz kurang lebih sama dengan apa yang sering disampaikan oleh para tokoh kita sendiri di berbagai fora. Dradjad Hari Wibowo, Kwik Kian Gie, Marwan Batubara, Rizal Ramli, Dawam Rahardjo, Siswono Yudo Husodo, Sri Edhi Swasono, Sony Keraf, Kurtubi, Revrisond Baswir, Abdillah Toha, Adi Sasono, Tjatur Sapto Edi, Marwoto Mitrohardjono, Sugeng Sarjadi, Fadli Zon, tokoh-tokoh Hizbut Tahrir, Chalid Muhammad (Walhi), Siti Maimunah (Jatam), dan masih banyak lagi, termasuk saya sendiri. Tetapi sebegitu jauh bangsa besar ini dan para pemimpinnya belum tergerak.

Saya lantas ingat cerita Ali Shariati ketika pulang ke Iran. Ia menceritakan apa yang perlu dikerjakan oleh Iran guna membangun masa depannya. Semua kolega dan sahabat Shariati mengatakan bahwa gagasan yang disampaikannya sangat masuk akal, realistis dan bahkan mendesak. Namun kemudian ada yang bertanya, gagasan itu berasal dari Profesor Sorbonne yang mana? (Ali Shariati pernah berkuliah di Sorbonne).

Ketika dijawab bahwa gagasan itu merupakan hasil renungan dan pemikiran Shariati sendiri, mendadak semua yang mendengar kecewa. Mereka kemudian mengatakan bahwa gagasan itu tidak

bagus, karena datang dari orang Iran sendiri. Mereka mengharapkan gagasan itu datang dari seorang profesor botak dari Sorbonne. Inilah cerminan dari kaum *inlander* gaya Persia.

Bukan tidak mungkin sebagian masyarakat kita masih mengidap penyakit *inlander* gaya Indonesia. Dengan merujuk pada pendapat-pendapat Stiglitz dan sarjana-sarjana Barat lainnya, siapa tahu mereka yang bermentalitas *inlander* mau membuka kesadaran dan wawasannya. Sekian puluh tahun yang lalu, Rosihan Anwar pernah menulis bahwa sebagian bangsa kita punya kekaguman otomatis pada pemikiran orang-orang bule berambut pirang. Tetapi kalau sawo matang, nanti dulu. Siapa tahu, buku-buku Stiglitz dan kedatangannya di Indonesia dapat menggugah kita dari tidur lelap kita yang panjang. Siapa tahu!

B A B I V

PAX AMERICANA

Akhir Perang Dunia II menyaksikan Amerika Serikat sebagai negara paling kuat di muka bumi. Kekuatan ekonomi Amerika tidak tertandingi, seperti halnya kekuatan nuklirnya. Bahkan Amerika menjadi kekuatan nuklir pertama dan juga negara pertama, bahkan satu-satunya, yang pernah menjatuhkan bom atom untuk menaklukkan musuhnya, Jepang. Penduduk sipil di Hiroshima dan Nagasaki yang mati langsung akibat bom atom itu ditaksir sekitar 200 ribu, sedangkan yang meninggal kemudian karena terbakar, radiasi dan lain-lain berjumlah puluhan ribu.

Dalam Perang Dingin (kadang-kadang disebut sebagai Perang Dunia III) yang berlangsung antara akhir 1940-an sampai sekitar 1991, Amerika keluar sebagai pemenang. Uni Soviet bubar, badan intelejen KGB juga otomatis bubar, sedangkan Tentara Merah yang terkenal perkasa pada Perang Dunia II menjadi mengerut kehilangan keperasaannya.¹ Ada lagi yang tidak kalah penting. Partai Komunis Uni Soviet juga bubar setelah sekitar 70 tahun

¹ Pada tahun 1990 penulis kebetulan berada di Wina, Austria, mengikuti seminar tentang Palestina-Israel yang diselenggarakan oleh PBB. Di kamar hotel penulis

malang-melintang. Hal ini berdampak luas bagi liberalisasi negara-negara Eropa Timur.

Rupanya stamina politik dan ekonomi Soviet kalah tangguh dibanding Amerika. Apalagi di samping Perang Dingin telah menelan ongkos milyaran dolar, perlombaan senjata tanpa batas dengan Amerika juga menguras kekuatan ekonomi Soviet. Di sebelah itu keresahan negara-negara bagian Soviet, negara-negara Eropa Timur dan Jerman Timur terus bergejolak ingin melepaskan diri dari kungkungan Moskow. Oleh sebab itu keruntuhan Uni Soviet memang tinggal menunggu waktu, dan akhirnya menjadi kenyataan.

Amerika Serikat pasca Perang Dingin, sebagai negara pemenang, nampak mencari posisi baru yang tepat untuk mengelola kemenangannya dalam jangka panjang. Bila dicermati, ada benang merah politik luar negeri yang sama yang menjadi ciri pokok sejak usainya Perang Dunia II. Seluruh Presiden Amerika, sejak dari Truman, Eisenhower, Kennedy, Lyndon Johnson, Nixon, Gerard Ford, Carter, Reagan, Bush Sr., Clinton sampai Bush Jr., ingin agar Amerika Serikat menjadi pemimpin dunia, baik dalam politik maupun ekonomi.

Baik pada masa Perang Dingin, masa *détente* (peredaan ketegangan) sampai sekarang, intisari dari seluruh politik luar negeri Amerika di bawah para presiden dari Partai Republik maupun dari Partai Demokrat sama saja, yakni berusaha memegang hegemoni dan supremasi dunia. Hegemoni dan supremasi itu dimaksudkan berlaku di bidang ekonomi, politik, teknologi dan militer. Bila dilihat dari kelahirannya, lembaga-lembaga internasional

menyaksikan tayangan pembubaran Partai Komunis Uni Soviet dan KGB. Penulis kemudian ingat sebuah ayat di surat Al-Ankabut yang mengatakan bahwa ideologi/keyakinan yang tidak bersandar pada kekuasaan Allah akan hancur karena rapuh, serapuh rumah laba-laba.

seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*), Bank Dunia, IMF dan WTO sejak semula dirancang untuk melindungi kepentingan ekonomi jangka panjang Amerika dan sekutu-sekutunya.

Menjelang berakhirnya Perang Dunia II, Amerika dan negara-negara sekutu mengadakan perundingan di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat. Rangkaian kesepakatan Bretton Woods itu pada akhir 1945 melahirkan IBRD yang kemudian menjadi Bank Dunia (*World Bank*) dan IMF (*International Monetary Fund*). Sedangkan WTO (*World Trade Organization*) yang lahir pada 1995 merupakan pengganti GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) yang dibentuk pada 1947. Sebagian aturan main yang dibuat WTO digodok dalam rangkaian perundingan yang dinamakan Putaran Uruguay (*Uruguay Round*). Sejak 2001 WTO memprakarsai rangkaian pertemuan di antara para anggotanya dalam lembaga yang dinamakan DDA (*Doha Development Agenda*).

Di antara agenda pokok DDA adalah bagaimana mendapatkan titik temu dari negara-negara maju dan negara-negara berkembang dalam hal pengurangan rintangan perdagangan internasional, mendorong perdagangan bebas serta menyatukan aturan main pemberian subsidi bagi petani di negara maju dan sebagainya. Pertemuan Doha itu dilanjutkan di Cancun (2003), Geneva (2004), Paris dan Hong Kong (2005), Geneva (2006) dan Postdam (2007). Namun sejauh ini negara-negara maju yang diwakili oleh Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang selalu tidak bersedia berkompromi dengan negara-negara berkembang yang tergabung dalam G-20 yang diwakili oleh India, Brazil, China dan Afrika Selatan. Sebegitu jauh belum pernah dicapai kesepakatan yang produktif dan saling menguntungkan kedua belah pihak, sehingga banyak suara-suara yang mengharapkan sebaiknya WTO dibubarkan saja.

Pax Americana

Sebagai salah satu pemenang Perang Dunia II dan pemenang utama Perang Dingin, dapat dimaklumi bila Amerika Serikat ingin memegang kepemimpinan dunia. Keinginan untuk menjadi *world leader* itu barangkali tidak perlu berkonotasi buruk bila dalam pelaksanaannya tetap melihat realitas politik dan ekonomi yang bergerak dinamis dan memperhatikan perubahan-perubahan geopolitik dan geoekonomik. Namun sayang sekali keadregan ingin menjadi pemimpin dunia itu cenderung membutuhkan para pemimpin Amerika seperti terjadi pada zaman Nixon dan terlebih-lebih pada zaman Bush Jr. sekarang ini.

Arogansi yang berlebihan dan obsesi Amerika sebagai negara nomor satu tanpa tanding telah membuat Kennedy, Lyndon Johnson dan Nixon melakukan intervensi ke Vietnam dan melibatkan negara mereka dalam perang panjang yang berakhir dengan kekalahan. Perang Vietnam yang berjalan selama 15 tahun itu (1959-1975) telah melenyapkan sekitar satu setengah juta rakyat Vietnam dan menelan nyawa 60 ribu serdadu Amerika. Ditambah dengan 350 ribu lainnya yang menjadi invalid abadi. Ongkos yang dikeluarkan Amerika melampaui 150 milyar dolar yang bila dinilai dengan nilai tukar dolar sekarang tentu menjadi berlipat sampai 9 atau 10 kali.

Bila direnungkan secara mendalam apa yang diperoleh Amerika Serikat dengan perang Vietnam yang panjang itu? Pada 1973 Amerika dan Vietnam Utara akhirnya mendatangani Persetujuan Perdamaian Paris. Nixon menyebut Persetujuan Paris itu sebagai *peace with honor* (perdamaian yang terhormat). Ketika akhirnya Saigon jatuh pada 1975, yang diperoleh Amerika hanyalah sebuah kesia-siaan, dengan prestasi membunuh sekitar satu setengah juta rakyat Vietnam dan melenyapkan sekitar 60 ribu serdadu Amerika

sendiri. Bahwa para pemilik pabrik senjata Amerika mendapat untung besar lewat Perang Vietnam itu memang sudah jelas. Tetapi sayang, ternyata trauma Vietnam itu kurang dari satu generasi seolah telah lenyap dilupakan.

Begitu cepatnya para pemimpin Amerika melupakan kebiadaban di Vietnam itu, sampai seorang tokoh intelektual Amerika bernama Gore Vidal mengatakan USA sebagai kepanjangan *United States of Amnesia*. Pada zaman George Bush Sr., keinginan untuk mendominasi dunia muncul kembali. Ia menjual gagasan *New World Order*, Tata Dunia Baru. Pada masa kepresidenannya (1989-1993), Bush Sr. menekankan perlunya Amerika memimpin dunia. Akan tetapi paling tidak dalam retorika Bush Sr., Amerika harus tetap menghormati pihak lain dan Tata Dunia Baru itu tidak sampai meninggalkan PBB. Dua kutub bagi dunia baru itu bukan lagi Amerika dan Uni Soviet, tetapi Amerika dan PBB. Amerika menjadi polisi dunia (*global cop*), sementara PBB hakim dan jurinya. Keputusan dan tanggung jawab internasional harus dipikul bersama.

Pada masa kepemimpinan Clinton (1993-2001) Tata Dunia Baru itu tidak sering dibicarakan. Namun pada masa itulah sebuah *cabal* atau komplotan yang terdiri dari sejumlah intelektual, wartawan, dan polisi Amerika mengembangkan sebuah impian Pax Americana. Dalam istilah akademik maupun jurnalistik kumpulan tokoh yang mendambakan Pax Americana itu disebut sebagai kaum *neocons* atau kaum neokonservatisme.

Pada pokoknya kaum *neocons* itu meyakini perlunya supremasi militer yang tidak terkejar oleh negara manapun juga. Amerika “ditakdirkan” menjadi penjaga stabilitas internasional. Konsep keseimbangan kekuatan/kekuasaan (*balance of power*), konsep *détente* (peredaan ketegangan), dan konsep keseimbangan teror (*balance of terror*) seperti dipraktikkan pada masa Perang Dingin dianggap

sudah usang. PBB juga tidak perlu dihiraukan bila ternyata menjadi batu sandungan bagi politik imperialisme Amerika. Dengan kata lain bila PBB, terutama Dewan Keamanannya, mau mengikuti Amerika, itu yang diharapkan. Bila sebaliknya yang terjadi, PBB bisa dilupakan. Ciri lain dari kaum *neocons* itu adalah paralelismenya dengan pandangan Israel dalam hampir semua hal. Banyak pakar politik internasional yang berkesimpulan bahwa wawasan politik internasional kaum *neocons* berimpit dengan wawasan Zionisme Israel.

Cikal-bakal impian Pax Americana ala *neocons* di atas berasal dari sebuah usulan tentang Panduan Perencanaan Pertahanan (*Defense Planning Guide*, DPG) di tahun 1992. DPG itu diolah oleh 7 tokoh yang sebagian besar mempunyai posisi penting di Departemen Pertahanan yaitu Dick Cheney (menteri pertahanan), Andrew Marshall (Ketua Bagian *Net Assessment* Departemen Pertahanan selama belasan tahun), Paul Wolfowitz,^{2a} Zalmay Khalilzad,^{2b} dan I. Lewis Libby. Yang tersebut 3 terakhir ini adalah staf. Dua tokoh lainnya adalah Richard Perle dan Albert Wohlstetter. Richard Perle pernah menjadi Ketua Dewan Penasihat Kebijakan Pertahanan antara 2001 dan 2003. Wohlstetter adalah profesor

^{2a} Saya tidak pernah menyangka bahwa Wolfowitz, yang pernah jadi Dubes Amerika di Indonesia, kemudian menjadi Deputi Pertahanan serta Presiden Bank Dunia ternyata seorang *hawkish*, pecinta perang. Dua kali saya berceramah di John Hopkins University, di depan para mahasiswanya, kalau tidak salah tahun 1997 dan 1998. Keramahan dan kesantunannya "melebihi" rata-rata orang Indonesia. Saya sangat terkesan ketika diantarkan ke Museum Holocaust di Washington. Setelah keluar dari museum, saya diminta menanti, duduk di atas bangku di bawah pohon yang rindang. Tidak lama kemudian Wolfowitz kembali, kedua tangannya penuh membawa sandwich, salad, dan minuman untuk makan siang bersama. Tidak pernah terlintas dalam benak saya, Wolfowitz (sering dipanggil Wolfie oleh Bush Jr.) yang santun, ramah, bersahaja, dan penuh simpati dan empati itu ternyata di belakang hari menjadi arsitek penghancuran Afghanistan dan Iraq.

^{2b} Khalilzad adalah teman sekelas saya di Universitas Chicago. Di antara teman-teman dialah yang paling galak dan ganas setiap ada penceramah tamu yang berceramah tentang Israel. Pertanyaannya selalu menusuk yang intinya mengapa Israel mewarisi kejahatan Nazi dan menjadi rasialis, imperialis dan ekspansionis.

ilmu politik di Universitas Chicago, anggota pembimbing disertasi Wolfowitz dan Khalilzad. Entah mengapa, saya tidak pernah tertarik untuk mengambil mata kuliahnya.

Defense Planning Guidance di atas pada intinya berisi: belanja pertahanan Amerika harus diperbesar; tidak boleh ada pesaing kekuatan militer Amerika di kawasan mana pun; serangan preventif dan preemptif boleh dilakukan bila dinilai dapat memenuhi kepentingan global Amerika. Satu usulan yang *over-ambisius* adalah hak Amerika untuk melakukan intervensi ke setiap konflik di mana saja di bola bumi ini, walaupun tidak berkaitan dengan kepentingan Amerika, namun mungkin berkaitan dengan kepentingan sekutu-sekutunya atau demi “memelihara” stabilitas internasional.³ Tentu DPG tidak menyebutkan bahwa serangan preemptif/preventif terhadap suatu negara atau suatu wilayah serta intervensi global Amerika itu sesungguhnya untuk melindungi, memperluas dan menjamin kepentingan ekonomi Amerika. Termasuk untuk mengontrol minyak dan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara-negara berkembang.

DPG ini oleh para penggagasnya disodorkan kepada Bill Clinton. Namun dokumen itu ditolak karena dalam pandangan Clinton isinya terlalu melenceng dari nilai-nilai demokrasi dan politik luar negeri Amerika yang selama ini dianut oleh para presiden sebelumnya. Penolakan Clinton tidak membuat kaum *neocons* kehilangan gairah.

Kami maklum, karena dia berkebangsaan Afghanistan dan sangat prihatin dengan perkembangan di Timur Tengah. Saya juga tidak pernah membayangkan manusia Khalilzad akhirnya pindah warga negara dan menjadi salah satu arsitek penghancuran Iraq dan Afghanistan, tanah tumpah darahnya sendiri. Sementara itu Wolfowitz dan Khalilzad adalah pencinta berat Israel. Dalam kasus ini Wolfowitz mungkin masih bisa dipahami karena ada keluarganya yang tinggal di Israel. Kalau Khalilzad?

³ 1992 Draft Defense Planning Guidance dapat diakses di <http://rightweb.ire-online.org/profile/1571>

Mereka kemudian bergabung dalam sebuah *think tank* yang dinamakan Proyek Abad Baru Amerika (*Project for the New American Century*, PNAC), yang didirikan pada awal 1997 oleh dua tokoh *neocons* lainnya, yakni William Kristol dan Robert Kagan. William Kristol adalah pengasuh majalah *The Weekly Standard* sebagai corong neokonservatisme. Ayahnya, Irving Kristol adalah dedengkot neokonservatisme dan mengasuh jurnal *Commentary*, corong para intelektual dan akademisi Yahudi di Amerika. Sedangkan Kagan adalah wartawan yang pernah menjadi birokrat di zaman Carter.

"Karya" besar PANC adalah sebuah dokumen bernama RAD, *Rebuilding America's Defenses*, Membangun Kembali Pertahanan Amerika, yang diterbitkan pada September 2000. Bagaimana cara menggapai Pax Americana ditunjukkan oleh dokumen RAD ini dan jangan lupa, tim Bush dalam keanggotaan PNAC terdiri dari Dick Cheney (wakil presiden), Rumsfeld (menteri pertahanan), Wolfowitz (deputi menteri pertahanan), dan petinggi-petinggi penting di pemerintahan Bush seperti Eliot Abrams, John Bolton, Richard Perle, Randy Scheunemann, dan Bruce Jackson. Ditambah William Kristol dan Jeb Bush, adik kandung Bush yang menjadi Gubernur Florida.

Tidak berlebihan jika dikatakan bila komplotan kaum *neocons* memang berhasil menyusup sangat dalam ke dalam pemerintahan Bush. Orang boleh saja menyangkal teori komplotan atau *conspiracy theories*, tetapi kenyataan bahwa kebijakan-kebijakan nasional dan politik luar negeri Bush hampir-hampir didekte oleh kelompok *neocons*, para pencinta Israel, memang tidak terbantahkan. Pat Buchanan bahkan mengatakan yang mengelilingi Bush sejatinya adalah para *Likudnis* Washington. Likud adalah nama partai Zionis-fundamentalis di Israel.⁴

⁴ Patrick Buchanan, "Whose war?", <http://www.amconmag.com/3-24-03/cover.html>

Benang merah RAD itu menggaris bawahi beberapa hal berikut ini: Pertama, impian Pax Americana bukan lagi sebuah kemustahilan karena setelah Uni Soviet rontok, Amerika Serikat menjadi negara adidaya satu-satunya. Supremasi militer Amerika tidak boleh berkurang sedikit pun. Empat misi penting adalah: pertahanan tanah air adalah paling utama; Amerika harus siap untuk menghadapi perang dalam panggung apa saja dengan mengerahkan kekuatan massif; mampu menjadi polisi dunia dan selalu mempercanggih kemampuan militernya. Juga dikatakan bahwa peran PBB dapat dikesampingkan sesuai kepentingan Amerika.

Kedua, hegemoni global harus dipelihara dengan segala jalan. Seluruh permukaan bumi adalah panggung global buat Amerika. Poros kejahatan (*axis of evil*) yang terdiri dari Iraq, Iran dan Korea Utara harus dibendung dan dilemahkan, karena sangat berbahaya bila memiliki senjata pemusnah massal atau senjata nuklir. China harus diwaspadai karena sedang bangkit sangat mengesankan. Eropa jangan sampai mendirikan sistem keamanan sendiri, negara-negara Eropa tidak boleh keluar dari NATO. Kalau perlu perubahan rezim di negara-negara berkembang dapat dipaksakan supaya tidak mengganggu stabilitas internasional dan supaya mereka tetap menganggap Amerika sebagai "boss".

Ketiga, peningkatan kualitas militer Amerika harus selalu diasah, termasuk kemampuan nuklirnya. Panggung perang bagi Amerika bukan lagi terbatas di daratan, lautan dan udara, tetapi juga meliputi ruang angkasa dan *cyberspace*. Ruang angkasa dan *cyberspace* yang seharusnya menjadi milik seluruh umat manusia harus berada di bawah kendali Amerika. Persiapan Perang Bintang, dengan biaya supermahal dan belum tentu berhasil, terus dilangsungkan.

Semua itu harus ditempuh oleh Amerika dengan segenap kemampuannya dalam rangka memelihara imperium globalnya. Imperium global berarti Amerika menjadi penguasa tunggal politik

global, ekonomi global dan pertahanan global. Bila kita baca RAD buatan PNAC setebal 76 halaman itu, salah satu kesimpulan kita adalah bahwa tokoh-tokoh *neocons* itu sudah dirasuk kepongahan luar biasa. Mereka lupa bahwa negara-negara lain juga terus bekerja membangun masa depan yang lebih mandiri dan bebas, tidak ingin hidup di bawah bayang-bayang Amerika. Tidak berlebihan bila Tom Engelhardt menganggap imperium yang dibayangkan oleh kaum *neocons* itu tidak lebih dari sebuah *empire of stupidity*, sebuah imperium kejahiliyahan atau imperium ketololan.⁵ Menurut Engelhardt, Amerika hakekatnya sudah menciptakan sebuah neraka dalam 7 tahun terakhir.

Amerika sendiri mungkin tidak hidup dalam “neraka”, walaupun hidup bagi rakyat kebanyakan di sana mulai makin sulit. Yang jelas hidup bak di neraka sekarang dirasakan rakyat Iraq dan sebagian rakyat Afghanistan. Engelhardt mengingatkan, jika Bush meneruskan aksi-aksi imperialismenya di Timur Tengah atau kawasan lain, segenap penghuni Gedung Putih akan berakhir menjadi para *defeatocrat* atau para pecundang.⁶ Kita juga melihat di Iraq sekarang tentara Amerika tidak mungkin lagi memenangi perangnya melawan rakyat Iraq. Akhirnya bukan saja Bush, melainkan juga teman-teman *cabahnya* menjadi *defeatocrat* sejati.

Para tokoh neokonservatisme yang mencita-citakan Pax Americana pasti merasa senang ketika Gedung Putih menerbitkan sebuah dokumen resmi bernama *The National Security of the United States of America* pada September 2002. Mengapa demikian? Oleh karena *The National Security Strategy* (disingkat NSS) itu, sebagai dokumen panduan bagi kebijakan politik dan pertahanan Amerika, kebanyakan diambil dari RAD ciptaan PNAC. Dengan demikian

⁵ Tom Engelhardt, “Empire of Stupidity”, <http://hnn.us/roundup/entries/42584.html>

⁶ *Ibid.*

lengkap sudah pengaruh dan peran tokoh-tokoh *neocons*. Mereka masuk ke jantung kekuasaan Bush.

Cheney menjadi wakil presiden, Rumsfeld menteri pertahanan, Wolfowitz wakil menteri pertahanan, dan puluhan lainnya masuk ke sel-sel penting mesin kekuasaan Bush, seperti diterangkan di muka. Pertanyaannya mengapa Bush Jr. begitu mudah “dimasuki”, bahkan didikte oleh tokoh-tokoh pecundang yang pernah bergabung dalam PNAC?

Mungkin betul apa yang dikatakan Zbigniew Brzezinski, mantan Ketua Dewan Keamanan Nasional Amerika semasa Carter, bahwa sejak awal sudah nampak Bush tidak menguasai masalah-masalah internasional. Katanya:

”Sejumlah pernyataan Bush menunjukkan kebodohnya dalam urusan masalah-masalah dunia internasional, berbeda dengan dua presiden pendahulunya. Enam bulan pertama pemerintahannya tidak memberikan sedikit pun arahan yang jelas bagi politik luar negeri”. (*Some of his public comments betrayed a basic ignorance of world affairs, quite in contrast with his two predecessors. His first six months as president were not notable for any demonstrable sense of direction in foreign policy*).⁷

Seperti kata pepatah Arab, *faqidussyai la yu'thi*, orang yang tidak punya apa-apa tidak mungkin memberikan apa-apa. Karena Bush tidak terlalu menguasai soal-soal internasional, ia hanya menjadi penerima apa adanya yang ia peroleh dari para pembantunya, terutama dari mereka yang berhimpun dalam kelompok *neocons* yang *hawkish*, yang cenderung menjadi *warmongers* alias pencinta kerusakan dan perang.

⁷ Zbigniew Brzezinski, *Second Chance* (New York: Basic Books), 2007, p. 138.

Doktrin Bush

Bila kita bicara tentang Doktrin Bush, maka rujukan pokok doktrin itu kita dapatkan dari NSS 2002. Kaitan NSS 2002 sebagai panduan kebijakan resmi Amerika dengan RAD buatan PNAC dan DPG yang digagas kelompok elit kaum *neocons/hawkish/war-monger* juga telah diuraikan di atas. Seorang pengamat mengatakan bahwa gagasan-gagasan agresif untuk membangun Pax Americana yang termuat dalam RAD hakekatnya mirip dengan isi *Mein Kampf* Adolf Hitler. Kita diingatkan, dulu rakyat Jerman tidak peduli dengan *Mein Kampf* kecuali setelah kekuasaan katastrofis Hitler runtuh membawa korban kemanusiaan tidak terperiikan. Agaknya sebagian besar rakyat Amerika tidak begitu peduli dengan RAD, apalagi dengan DPG sebagai cikal bakal Doktrin Bush.⁸

Kebiadaban serdadu-serdadu Amerika dan destruksi fisik, infrastruktur serta *genocida* yang dilakukan Amerika di Iraq sesungguhnya lebih dahsyat dibandingkan dengan apa yang dilakukan Amerika di Vietnam. Tetapi reaksi rakyat Amerika terhadap kejahatan pemerintah Bush di Iraq ternyata jauh lebih lembek dan lebih akomodatif. Ketika penulis berkunjung dan memberi ceramah di Universitas Columbia, Universitas Chicago dan Universitas Notre Dame pada bulan Februari 2007, penulis tidak merasakan dan tidak melihat protes di kalangan mahasiswa Amerika terhadap Perang Iraq. Berbeda dengan protes kampus-kampus Amerika secara meluas dan beruntun terhadap Perang Vietnam pada awal 1970-an.

Bila kita baca NSS 2002 segera kelihatan bahwa Amerika, menurut Bush, memiliki kekuatan militer, ketangguhan ekonomi dan pengaruh politik yang tidak ada bandingannya. Dalam berbagai ceramahnya sejak menjadi presiden, Bush suka berbicara tentang

⁸ Bette Stockbauer, <http://antiwar.com/orig/stockbauer1.html>

keistimewaan Amerika (*American exceptionalism*) dan kejernihan moral (*moral clarity*). Dibandingkan dengan negara-negara lain, hanya AS saja yang pantas dan punya hak untuk menjaga stabilitas internasional dan sekaligus hak untuk melakukan intervensi di negara mana saja dan kapan saja.

Bahwa "hak" seperti itu jelas bertentangan dengan moralitas dan hukum internasional, agaknya bagi Bush dan para *cabahnya* tidak menjadi soal. Di samping itu harus digugat, kejernihan moral yang mana yang membenarkan pembunuhan acak terhadap ribuan penduduk sipil di Iraq dan Afghanistan? Nilai-nilai moral siapa dan yang mana yang membolehkan sebuah negara membuat dalih bohong untuk menduduki negara lain yang jauh lebih lemah? Juga ukuran moral jernih ciptaan siapa yang pada awal abad 21 membolehkan penjara-penjara penyiksaan bagi tawanan perang tanpa batas dan tanpa perlindungan hukum seperti penjara penyiksaan di Abu Gharib di Iraq, Guantanamo di Cuba dan puluhan lainnya berserakan di muka bumi?

Dengan dalih keistimewaan Amerika dan kejernihan/kemantapan moralnya, Amerika sudah 4 tahun lebih menjagal Iraq, sebuah negara merdeka dan berdaulat. Kebiadaban serdadu Amerika baik di medan luas maupun apalagi di Abu Gharib dan Guantanamo tidak kalah dengan kekejaman serdadu Nazi Jerman dan Fascist Italia. Bukalah internet dan bacalah jurnal, buku dan majalah mengenai penyiksaan yang dilakukan oleh serdadu-serdadu Amerika. Kita segera mengetahui bahwa penyiksaan dan kekejaman itu kemungkinan lebih biadab daripada yang dilakukan tentara Nazi atau Fascist.

Donald Rumsfeld, Menteri Pertahanan Amerika yang mengundurkan diri, telah dituntut oleh banyak kalangan untuk dihukum sebagai penjahat perang (*war criminal*). Rumsfeld sampai tidak berani menghadiri sebuah seminar di Jerman dan mengaku

takut ditangkap di sana, berhubung para penuntut hukum (*prosecutor*) Jerman lewat lembaga *Center for Constitution Rights* yang bermarkas di New York telah mengajukan tuntutan terhadap Rumsfeld sebagai penjahat perang. Rumsfeld dituntut bersama 10 petinggi Amerika lainnya, termasuk Jaksa Agung Alberto Gonzales yang juga sudah mengundurkan diri. Bagaimana dengan Bush sendiri? Ternyata tidak kurang dari Paul Craig Robert, anggota senior Institusi Hoover dan asisten sekretaris bendahara negara di zaman Reagan telah melancarkan tuduhan pada Bush dengan berbagai kebohongan dan agresi perang ilegal terhadap Iraq, kejahatan perang terhadap penduduk sipil Iraq serta kebiadaban di pusat-pusat penyiksaan di Abu Gharib dan Guantanamo. Bahkan Bush dituntut agar segera dimakzulkan.⁹ Ada puluhan artikel yang ditulis oleh para ahli sejarah dan intelektual Amerika yang menyatakan bahwa Bush seperti Hitler atau sangat banyak kemiripan antara Bush dan Hitler.¹⁰

Keinginan Bush untuk memegang supremasi dan hegemoni dunia secara utuh dan menyeluruh (*full spectrum hegemony*) dengan membenarkan serangan preemptif sesuai selera Amerika serta didirikannya penjara-penjara penyiksaan itulah yang menyebabkan banyak pakar sejarah menyamakan Bush dengan Hitler. Dalam majalah *Maclean's*, Patrick Graham malah mengatakan Bush telah menjadi *Saddam Baru*.¹¹ Saya yakin tangan Bush jelas jauh lebih berlumuran darah daripada tangan Saddam. Menyamakan Bush dengan Saddam bagi saya kurang fair, terlalu menyenangkan Bush. Mengapa? Karena jumlah nyawa rakyat Iraq yang direnggut oleh Bush lewat kebengisan para serdadunya berjumlah ratusan ribu,

⁹ Jeremy Brecher and Brendan Smith, *Bush War Crimes*, <http://www.counterpunch.org/brecher/12062005.html>

¹⁰ Silahkan mengunjungi website *One thousand reasons*, terlalu banyak tulisan yang meminta Congres Amerika untuk memakzulkan (meng-*impeach*) George Bush.

¹¹ Raymond Ponzini, "American Caligula", the *peoplesvoice.org*, [http://liberty.Hypermart.net/voices/2004/American Caligula.htm](http://liberty.Hypermart.net/voices/2004/American%20Caligula.htm)

di samping kenyataan penghancuran Bush terhadap Iraq berwatak multi-dimensional.

Oleh sebab itu lebih tepat disamakan dengan Hitler atau Caligula. Raymond Ponzini menyebut Bush sebagai Caligula Amerika. Alasan Ponzini adalah keduanya mengidap penyakit schizophrenia, nampak puas melihat kebengisan/kebiadaban, dan merasa dapat tugas dari Tuhan. Caligula adalah kaisar Romawi pada 37-41 yang paling busuk yang mengidap 3 penyakit di atas. Caligula adalah tokoh yang gila kekuasaan, seorang psikotik yang berbahaya dengan kemampuan intelek yang pas-pasan. Semasa kekuasaannya yang pendek, Romawi mengalami kemerosotan ekonomi yang tidak tertahankan.

Bayangkan, Bush yang menciptakan doktrin “ugal-ugalan” itu pernah berucap:

“Tuhan menyuruh saya untuk menghajar Al Qaidah dan saya sudah menghajar mereka dan kemudian Dia menyuruh saya untuk menghancurkan Saddam dan sudah saya hancurkan”

(God told me to strike at al Qaida and I struck them, and then he instructed me to strike Saddam, which I did).

Kata-kata Bush itu dikutip oleh banyak sumber.¹²

Menurut Ponzini,

“George W. Bush adalah produk aneh dari sebuah keluarga berpengaruh, tumbuh dewasa dalam sebuah dunia kaya yang dekaden yang terjebak menghunjam dalam generasi-generasi khianat dan intrik politik. Dianggap sebagai Presiden yang paling bangkrut secara moral dan etis yang pernah menguasai imperium Amerika, Bush akan diunggulkan dalam ingatan kemanusiaan kolektif sebagai

¹² *Ibid* dalam *ibid*.

pecinta perang dan pencari keuntungan lewat perang yang korup dan serakah”.

“Bagi kaum wanita dan anak-anak yang telah menjadi korban rentetan bom dan senjata uranium – 238, Bush dianggap sebagai tukang jagal massal dan penjahat perang. Sejarah mencatat tingkah laku seorang *sociopath* predator, yang sama sekali tidak memiliki empati, hanya berminat mengurus kekuasaan dan pemuasan keinginan-keinginan gelapnya. Dia (Bush, penulis) nampak tidak peduli terhadap ongkos kemanusiaan dan lingkungan yang dikeluarkan oleh rezimnya dan tidak peduli sama sekali dengan penderitaan tak terkira yang ditimbulkannya di muka bumi”.¹³

Doktrin militer Bush juga dikecam berat oleh editorial *National Catholic Reporter online*. Dalam tajuk tersebut, Doktrin Bush (NSS 2002) yang disampaikan ke Congress Amerika dinilai mendorong politik luar negeri yang semakin imperialistik. Gagasan khas Amerika tentang penegakan keadilan dan kerjasama internasional telah luntur sama sekali. Doktrin Bush telah mengkhancurkan harapan semua bangsa untuk untuk mengokohkan hukum internasional dan menyelesaikan pertikaian internasional lewat jalan damai. Doktrin itu sangat arogan karena bangsa-bangsa lain dianggap baik bila mengikuti kemauan Amerika dan jelek bila berani menanyakan kebijakan Amerika. Hanya ada dua pilihan

¹³ *Ibid*. Kutipan aslinya: George W. Bush, the schizophrenic by-product of an influential American family grew up in a wealthy decadent world steeped in generations of treachery and political intrigue. Considered the most morally and ethically bankrupt President ever to rule the great American empire, Bush will be distinguished prominently in the collective memory of humanity as a greedy and corrupt war monger and war profiteer. For the innocent men, women and children on the receiving end of his cluster bombs and uranium-238 weapons he is thought of as a mass murderer and a war criminal. History records the behavior of a predatory sociopath, utterly lacking in empathy, concerned only with power and satisfaction of his dark desires. He seems oblivious to the human and environmental costs of his regime, and unconcerned with the immense suffering they are causing on the planet.

yang tersedia bagi seluruh bangsa, apakah mereka ikut Amerika atau ikut teroris. (*Either you are with us or you are with the terrorists*).

Seorang bijak menggambarkan Doktrin Bush sebagai “visi yang mencengangkan bahwa Pax Americana ternyata berhakekat korporasi dan bersifat global, yang dipaksakan lewat mesin pembunuhan yang paling dahsyat dalam sejarah dunia” (*a jaw-dropping vision of a globalized corporate Pax Americana, enforced by the mightiest killing machine in the history of the world*). Dalam tajuk National Catholic Reporter itu Bush dikatakan mirip Napoleon abad 21. Mungkin, Napoleon yang agak pandir.

Doktrin Bush yang termuat dalam NSS 2002 di atas sejatinya bukan saja doktrin politik dan militer, melainkan juga doktrin ekonomi. Bab VI NSS berjudul “*Ignite A new Economic Era of Global Economic Growth Through Free Markets And Free Trade*” (Gebrakan Era Pertumbuhan Ekonomi Baru melalui Pasar Bebas dan Perdagangan Bebas). Dalam bab ini pokok-pokok *Washington Consensus* hampir semuanya diulang-ulang, sambil membicarakan pentingnya memelihara kelestarian lingkungan dan iklim global. Sebuah pembicaraan yang pada dasarnya sekedar basa-basi, karena semua orang mengetahui bahwa andil Amerika adalah yang terbesar dalam proses pemerosotan lingkungan global.

Sebagai contoh, Amerika sampai sekarang tidak mau menandatangani Kyoto Protocol, padahal sampai akhir Desember 2006 sebanyak 169 negara sudah menandatangani protokol tersebut. Tujuan pokok protokol itu adalah untuk mencapai stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada satu tingkatan tertentu sehingga dapat melindungi sistem iklim global dari rembesan antropogenik. Mingguan TIME menyebutkan Amerika tiba-tiba menjadi *rogue state*, negara penipu dan pelanggar hukum internasional kalau sudah menyangkut Protokol Kyoto.¹⁴

¹⁴ TIME, 24 Juli 2001.

Doktrin ekonomi Amerika yang dimuat dalam NSS 2002 dapat dikatakan mementingkan fundamentalisme pasar dalam ekonomi, karena ekonomi pasar satu-satunya sistem ekonomi yang diyakini dapat menghadirkan kemakmuran dan sekaligus mengatasi pengangguran. Setiap kebijakan yang memperkuat insentif pasar dan lembaga-lembaga pasar menjadi relevan buat semua ekonomi – apakah di negara-negara industri, negara-negara dengan pasar yang sedang mulai tumbuh, ataupun di negara-negara berkembang. Fundamentalisme pasar semacam inilah yang dikoreksi oleh Stiglitz, seperti diterangkan dalam Bab III.

NSS 2002 menguraikan 9 langkah strategis Amerika untuk mencapai kemakmuran global. Sebagai misal, inisiatif global harus terus dilakukan lewat agenda ambisius mengenai perbaikan pertanian, manufaktur, perusahaan-perusahaan jasa; inisiatif regional harus dikerjakan agar kerjasama ekonomi regional lebih produktif; persetujuan perdagangan bebas bilateral terus digalakkan; kemitraan eksekutif-legislatif terus didorong; penguasaan energi dunia terus diupayakan dan lain sebagainya. Hanya saja tidak usah dikatakan bahwa semua yang dinamakan strategi komprehensif itu harus sesuai dengan arahan Amerika.

NSS 2002 itu diperbaharui dan diperluas menjadi NSS 2006. Benang merah sejak dari DPG (1992), RAD (2000) dan NSS 2002 secara konsisten tetap kelihatan, dalam dokumen Doktrin Bush 2006 itu. Benang merah itu adalah bahwa Amerika harus tetap memegang hegemoni dan supremasi dunia; serangan preemptif tetap dimungkinkan; mengganti rezim negara yang tidak disukai tetap dimungkinkan; anggaran belanja pertahanan harus diperbesar (sekitar 3,8% GDP); tidak boleh ada negara yang mendekati kemampuan militer Amerika; kemampuan nuklir terus ditingkatkan; daratan, lautan, angkasa dan *cyberspace* harus berada di bawah kontrol Amerika; dan lain sebagainya.

Sementara itu doktrin ekonomi yang telah dimuat dalam NSS 2002 dipertegas lagi, terutama pasar bebas dan perdagangan bebas harus dijalankan sambil menghilangkan proteksionisme. Ekonomi pasar diyakini sebagai *antidote* kemiskinan. Kebebasan ekonomi adalah sebuah imperatif moral. Kebebasan ekonomi akan mendorong kebebasan politik. Pendek kata doktrin ekonomi Bush tidak beringsut sama sekali dari teori globalisasi ala IMF, World Bank, dan WTO. Dan lagi-lagi doktrin ekonomi Bush berpretensi menaruh perhatian terhadap pelestarian lingkungan.

Ada sesuatu yang “menggelikan” dalam NSS 2006 yang dimaksudkan sebagai *balance sheet* atau neraca penilaian tentang kemajuan-kemajuan yang dicapai dari Doktrin Bush setelah dilaksanakan selama 4 tahun. Yang menggelikan itu adalah catatan keberhasilan politik luar negeri Amerika sejak 2002, dalam Bab II, *Champion Aspirations for Human Dignity*. Dikatakan, dunia telah menyaksikan kemajuan dalam hal ekspansi kebebasan, demokrasi dan martabat manusia.

Afghanistan disebut sebagai contoh keberhasilan. Tirani Taliban dimusnahkan dan sebuah pemerintahan yang merupakan pilihan rakyat dengan konstitusi yang menjamin hak asasi manusia dan berbagai kebebasan telah didirikan, untuk pertama kalinya dalam sejarah Afghanistan. Padahal semua orang tahu bahwa Pemerintahan Hamid Karzai adalah pemerintahan boneka Washington dalam arti kata sebenarnya. Di samping itu ribuan tentara Amerika dan sekutunya masih menduduki Afghanistan. Rakyat Afghanistan merasa kehidupan mereka sebelum dijajah Amerika terasa lebih baik.

Iraq juga disebut sebagai cerita sukses. Pemerintah Iraq dibawah Nur El-Maliki disebut sebagai hasil pilihan rakyat secara jujur, bebas dan sebagainya. Semua orang tahu bahwa Pemerintahan Iraq sekarang juga seratus persen pemerintahan boneka Wash-

ington. Hebat bukan? Iraq yang telah menjadi semacam neraka bagi penduduknya disebut sebagai keberhasilan politik luar negeri Amerika?

Tanpa malu-malu NSS 2006 juga menyebutkan bahwa Libanon, Mesir, negara-negara di Afrika, Amerika Latin dan Asia (tidak jelas negara yang mana) disebut sebagai negara-negara yang berhasil menegakkan demokrasi, *rule of law*, lembaga kehakiman yang bebas, pertumbuhan ekonomi dan pemantapan hak-hak asasi manusia. Keberhasilan mereka diklaim sebagai keberhasilan pelaksanaan NSS 2002. Kita lantas harus bicara apa, kalau sebuah dokumen resmi dengan kata pengantar dari sang presiden lengkap dengan tanda tangan dan cap simbol kepresidenan mampu menjungkirbalikkan fakta-fakta internasional? Tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa sebagian isi NSS 2006, sebagai Doktrin Bush yang diperbaharui, merupakan *insult to human intelligence* alias penghinaan terhadap akal sehat manusia.

Kritik Terhadap Pax Americana

Berdasarkan perkembangan dunia mutakhir, bagaimana kira-kira impian Pax Americana, termasuk Doktrin Bush di masa depan? Saya yakin, tidak perlu menunggu masa depan. Sekarang saja terlalu banyak bukti yang menunjukkan bahwa hegemoni atau supremasi multi-dimensional sebagaimana diimpikan oleh para *neocons*, *terror mongers*, *warmongers* atau kaum *hawks*, alias mereka yang punya kecenderungan kuat untuk mengempakkan sayap imperialis Amerika, kini sudah mulai patah kelelahan.

Lihatlah Perang Iraq yang sudah memakan korban nyawa demikian banyak. Jumlah serdadu Amerika yang tewas sudah mendekati angka 4 ribu orang (saat monograf ini ditulis) dengan biaya yang menurut Stiglitz sudah melampaui 1 trilyun dolar.

Tentu pihak Iraq sebagai korban imperialisme Amerika tidak terperikan dalam menanggung agresi ilegal Amerika itu, baik dari jumlah nyawa yang lenyap, kehancuran total infrastruktur ekonomi Iraq dan kehancuran psikologi bangsa Iraq yang belum tentu pulih dalam puluhan tahun mendatang. Hampir semua pengamat internasional sudah berkesimpulan bahwa Perang Iraq itu tidak mungkin dimenangkan oleh Amerika. Kalau dengan Iraq saja kalah, apalagi menghadapi Iran atau Korea Utara yang siap tempur.

Kedua, AS yang berpretensi sebagai negara adidaya satu-satunya, ternyata dalam banyak hal keropos, tak ubahnya dengan negara berkembang. Musibah taufan Katrina di New Orleans dan sekitarnya yang terjadi pada 2005 benar-benar membuat malu Amerika. Puluhan ribu keluarga New Orleans yang terjebak air bah dari laut gara-gara tanggul yang jebol ternyata tidak mempunyai mobil. Sampai sekarang mereka masih berserakan di berbagai negara bagian lainnya menjadi pengungsi dan tinggal di rumah-rumah kumuh. Untuk kembali ke rumah kumuh mereka di New Orleans sekarang ini mereka masih mengalami kesulitan. Paling tidak 1836 orang meninggal dan kerusakan yang ditimbulkan sekitar 81 milyar dolar.

Taufan Katrina itu menampar muka Washington karena: pertama, ternyata ada bagian Amerika yang melarat, terbelakang, kumuh dan tanpa masa depan; kedua, penanganan musibah Katrina dianggap sangat lambat dan tidak serius, mungkin karena mayoritas penduduk yang dilanda Katrina kebetulan berkulit hitam – sehingga muncul tuduhan bahwa pemerintahan Bush masih berbau rasialis. Demikian juga ketika jembatan besar di Missisipi ambrol segera terkuak bahwa 28% (sekali lagi, 28%) jembatan lainnya di Amerika

sekualitas dengan jembatan yang ambrol itu. Istilahnya *structurally deficient*.¹⁵ Dus, tak ubahnya dengan negara berkembang.

Ketiga, ekonomi Amerika sendiri semakin rapuh. Di abad 21 ekonomi Amerika tidak lagi menciptakan lapangan kerja di bidang industri ekspor dan industri yang bersaing dengan barang-barang impor. Tambahan lapangan kerja hanya di bidang pelayanan dan jasa. Pengangguran juga cenderung meningkat. Karena banyak industri Amerika terpaksa bergerak ke luar mencari tenaga kerja yang lebih murah, profesi teknik ikut merosot dan menambah pengangguran.

Neraca dagang Amerika praktis mengalami defisit dengan hampir semua negara: dengan Eropa \$142,5 milyar; Kanada \$75 milyar; Amerika Latin \$112,5 milyar; Asia Pasifik \$409,7 milyar (termasuk China dan Jepang); Timur Tengah \$36 milyar; dan Afrika \$69,1 milyar. Pada 2006 defisit neraca dagang Amerika sekitar 838 milyar dolar. Artinya Amerika mengkonsumsi 838 milyar dolar lebih banyak dari pada yang mereka produksi.

Belum lagi hutang luar negeri Amerika. Hutang itu pada 2005 sudah menyundul angka 2,3 trilyun dolar, sehingga setiap penduduk Amerika, dari bayi sampai kakek menanggung hutang luar negeri sebesar 6.846 dolar. Karena defisit neraca perdagangan dan defisit anggaran, nilai tukar dolar juga terus menerus merosot vis-a-vis Euro, dolar Kanada, bahkan Thai Baht. Bagaimana mungkin dengan ekonomi yang begitu rapuh Amerika ingin menjadi *super-power* ekonomi?

Pamor Amerika Serikat memang sedang menurun cepat. Kekuatan militernya makin dicemooh dunia. Dengan Iraq yang praktis sudah tanpa senjata saja, Amerika tidak bisa memenangi perangnya. Kekuatan ekonominya juga makin rapuh dan rawan.

¹⁵ CBS/KCBS, 3 Agustus 2007.

Mau berjualan *soft power*? Mana mungkin. Suatu negara bisa berjualan *soft power*nya kalau *image* atau citra negara itu berwibawa, anggun, perkasa dan disegani lawan, dihormati kawan.

Noam Chomsky pernah mengingatkan bahwa predator, termasuk predator ekonomi yang mulai menurun dan cenderung kalah karena makin banyak pesaing yang muncul, biasanya bertingkah makin ganas. IMF sudah ditendang di mana-mana, termasuk di Amerika Latin. Ekonomi Cina sudah melampaui Inggris dan Perancis dan terus mengejar Amerika. India juga semakin perkasa. Uni Eropa cenderung tidak lagi bergantung pada Amerika. Mungkin salah satu sebab agresi kalap Amerika terhadap Iraq disebabkan kemerosotan Amerika yang bersifat multi-dimensional tersebut.

Amerika sudah mirip dengan apa saja yang dikatakan Cornelius Tacitus, sejarawan di zaman Romawi (sekitar 55-117 AD) yang mengatakan:

“Menjarah, membunuh, mencuri, hal-hal ini mereka salahnamakan sebagai imperium; dan di mana mereka membuat kekacauan, mereka menamakannya perdamaian”. (*To plunder, to slaughter, to steal, these things they misname empire; and where they make a wilderness, they call it peace*).¹⁶

Sudah tiba saatnya para pemimpin Amerika meresapi kata-kata mutiara yang mengatakan: “siapa yang tidak mau belajar dari sejarah, pasti akan mengulangnya” (*Those who don't learn from history, are doomed to repeat it*). Banyak tokoh Amerika merasa senang kalau Amerika dianggap sebagai Romawi modern. Yang harus mereka ingat adalah bahwa Romawi akhirnya runtuh berkeping-keping karena haus kekuasaan, kekuatan militernya yang *overstretched*

¹⁶ Willian Rivers Pitt, *Of Gods and Mortals and Empire*, <http://www.truthout.org/docs/02/022203 A.p.html>

(kelewat luas wilayah operasinya), arogansi yang tidak ketulungan, dan tidak bisa lagi berempati pada banyak manusia yang makin menderita.

Dengan kata lain, para kaisar Romawi akhirnya kehilangan sentuhan dengan realitas, dengan dunia nyata. Mereka dilanda megalomania dan narcisisme yang berlebihan. Arnold J. Toynbee pernah mengingatkan bahwa peradaban-peradaban mati karena bunuh diri, bukan karena dibunuh (dari luar). *Civilizations die from suicide, not by murder.*

Saya yakin Amerika dan sekutu-sekutunya dalam jangka tidak terlalu lama akan mengalami kemerosotan. Amerika sudah mulai melewati titik puncak prestasi politik, ekonomi, sosial, militer dan peradaban pada umumnya. Hukum cakra-manggilingan juga berlaku bagi siapa dan negara mana saja.

Akan tetapi keruntuhan atau kemerosotan itu, sesuai dengan hukum besi sejarah pasti memerlukan waktu dalam hitungan dekade atau dasawarsa. Sementara itu kaum globokrat dan korporatokrat akan terus berusaha menguasai dunia dengan segala cara yang tersedia.

Pax Americana yang dibayangkan oleh para pemikirnya akhirnya kandas karena dalam sejarah manusia sejak Adam dan Hawa, belum pernah ada satu bangsa atau bahkan kelompok bangsa dapat menguasai seluruh planet bumi. Ambisi Amerika itu, dalam bahasa agama, bertentangan dengan *sunnatullah*. Sejarawan ulung Arnold Toynbee berkomentar sangat tajam tentang Amerika:

“Dari dua puluh dua peradaban yang pernah muncul dalam sejarah, sembilan belas di antaranya runtuh tatkala sampai pada keadaan (tingkatan) moral seperti dialami Amerika sekarang ini”. (*Of twenty-two civilizations that have appeared*

*in history, nineteen of them collapsed when they reached the moral state the United States is in now).*¹⁷

J.B. Foster dan R.W. Mc Chesney menulis buku berjudul *Pox Americana* (2004).¹⁸ Kedua penulis itu bersepakat dengan Harry Magdoff dan Paul Sweezy yang mengatakan bahwa Amerika telah kehilangan kontrol dalam menggunakan kekerasan militer dan kekuasaan telanjang untuk menguasai dunia. Pada akhirnya yang ditawarkan bukan Pax Americana atau Perdamaian Amerika, tetapi *Pox Americana* atau Pageblug Amerika. Di berbagai penjuru dunia Amerika menebar pageblug kekerasan, kesombongan, penindasan dan merasa sebagai “pemilik” dunia. Tangan Amerika terlalu sering menimbulkan bencana kemanusiaan di Timur Tengah, di Asia Tenggara, di Afrika Hitam, di Amerika Latin dan di berbagai belahan bumi lainnya.

Agaknya para pemimpin Amerika perlu memiliki sikap rendah hati dan jangan terbuai dengan kekuasaan yang memabukkan. Mereka perlu meresapi hukum besi sejarah atau *sunnatullah*, atau katakanlah hukum moral, seperti dikatakan Lord Acton:

“Opini berubah, tata-cara kehidupan berganti, keyakinan muncul dan tenggelam, tetapi hukum-hukum moral telah ditulis di atas meja keabadian” (*Opinions alter, manners change, creeds rise and fall, but the moral laws are written on the table of eternity*).¹⁹

¹⁷ <http://www.brainyquote.com/quotes/authors/a/arnold-j-toynbee.html>

¹⁸ John B. Foster dan Robert W. McChesney, *Pox Americana: Exposing the American Empire* (London: Pluto Press, 2004).

¹⁹ http://www.brainyquote.com/quotes/authour/l/lord_action.html

Indonesia, seperti semua negara yang lain, menghadapi keganasan Pax Americana yang sedang meregang nyawa. Menghadapi raksasa ekonomi dan militer yang rapuh yang sedang berusaha bertahan untuk tetap menjadi nomor satu, lewat korporatokrasi. Fenomena yang kita hadapi adalah korporatokrasi dunia yang memang sangat dahsyat kekuatannya. Korporatokrasi adalah pengejawantahan imperialisme ekonomi yang tidak kalah dampaknya dengan imperialisme politik dan militer.²⁰ Mari kita lihat bersama berbagai segi korporatokrasi itu.

²⁰ Administrasi/Pemerintahan Bush segera berakhir pada awal 2009, ketika pengganti Bush dilantik pada bulan Januari. Bila yang mengganti John McCain, tidak dapat diharapkan adanya perubahan politik luar negeri Amerika yang bergaya dan bersubstansi neoimperialisme. Bila yang mengganti Hillary Clinton, sekalipun dari Partai Demokrat, perubahan yang cukup berarti politik luar negeri Amerika tidak juga dapat diharapkan. Apalagi Bill Clinton pernah mengatakan antara Mc Caine dan Hillary sesungguhnya tidak terdapat perbedaan yang mencolok. Namun bila Obama yang jadi Presiden Amerika Serikat yang baru, harapan segar cukup beralasan, terutama jika kita cermati pernyataan-pernyataan Obama yang tidak klise dan inkonvensional. Ia berjanji membawa perubahan di Washington D.C. Masalahnya, seberapa jauh ia dapat menjebol *industrial-military-congressional complex* yang begitu kukuh, jaringan korporasi yang sudah “kawin” dengan kekuasaan dan posisi media massa yang cenderung kuat membela kemapanan **selama ini?**

B A B V

KORPORATOKRASI

Dalam dunia ilmu sosial, istilah korporatokrasi belum digunakan secara meluas dan relatif baru. Se jauh yang saya ketahui adalah John Perkins, dalam bukunya *Confessions of an Economic Hit Man* (2004) yang menggunakannya untuk menunjukkan bahwa dalam rangka membangun imperium global, maka berbagai korporasi besar, bank, dan pemerintahan bergabung menyatukan kekuatan finansial dan politiknya untuk memaksa masyarakat dunia mengikuti kehendak mereka.

Atau menurut Wikipedia, dengan merujuk pada Perkins, korporatokrasi dilukiskan sebagai sistem kekuasaan yang dikontrol oleh berbagai korporasi besar, bank-bank internasional dan pemerintahan. Perkins sendiri mengatakan,

“istilah itu begitu saja datang bertengger di pikiran saya: korporatokrasi. Saya tidak yakin apakah saya sudah pernah mendengarnya sebelumnya atau saya yang menciptakannya, tetapi istilah itu nampak sangat cocok untuk menggambarkan elite baru yang telah berketetapan untuk mencoba menguasai planet bumi”. (*A word came to my mind: corporatocracy. I was not sure whether I had heard it before or had*

*just invented it, but it seemed to describe perfectly the new elite who had made up their minds to attempt to rule the planet*¹

Buku Perkins itu tidak disukai dan dinilai sangat kontroversial oleh kalangan yang merasa tertohok dan membela kemapanan korporasi-korporasi besar dalam mendiktekan kekuasaannya pada pemerintahan, perbankan, media massa, bahkan pada kaum militer. Suatu hal yang lumrah, bahkan sangat lumrah. Namun Perkins dibenarkan oleh para pengamat dan sebagian tukang pukul ekonomi internasional lainnya yang berhimpun dan menerbitkan buku yang tidak kalah mengejutkan. Buku itu berjudul *A Game As Old As Empire* (2007) yang dieditori oleh Steven Hiatt.² Buku ini membenarkan fenomena yang sesungguhnya cukup mencolok, yaitu korporasi-korporasi besar, dengan segala cara, ingin menguasai dunia dalam rangka memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Sesungguhnya istilah korporatokrasi dapat digunakan untuk menunjukkan betapa korporasi atau perusahaan besar memang dalam kenyataannya dapat mendikte, bahkan kadang-kadang membeli pemerintahan untuk meloloskan keinginan mereka. Kalau pemerintahan yang dikuasai oleh kaum aristokrat (bangsawan) disebut sebagai aristokrasi, oleh plutokrat (orang kaya) disebut sebagai plutokrasi, oleh kleptokrat (maling, preman) disebut sebagai kleptokrasi, maka sebuah pemerintahan yang dikendalikan oleh korporatokrat (pemilik korporasi besar) boleh juga dinamakan sebagai korporatokrasi.

Dalam tulisan ini saya menggunakan istilah korporatokrasi sebagai sistem atau mesin kekuasaan yang bertujuan untuk mengon-

¹ John Perkins, *Confessions of an Economic Hit Man* (London: Penguin Books Ltd: 2006), p.31.

² Steven Hiatt, ed., *A Game As Old As Empire* (San Fransisco: Berret-Koehler Publishers, Inc.: 2007).

trol ekonomi dan politik global yang memiliki 7 unsur, yaitu: korporasi-korporasi besar; kekuatan politik pemerintahan tertentu, terutama Amerika dan kaki-tangannya; perbankan internasional; kekuatan militer; media massa; kaum intelektual yang dikooptasi; dan terakhir, yang tidak kalah penting adalah elite nasional negara-negara berkembang yang bermental inlander, komprador atau pelayan. Dalam Bab I, *Sejarah Berulang*, sudah dipaparkan secara singkat bagaimana VOC dapat menjajah dan menjarah tanah air kita selama beberapa abad karena hakekatnya VOC juga membangun sebuah korporatokrasi pada zamannya. VOC adalah korporasi pertama di dunia dalam arti kata sebenarnya.

1. Korporasi Besar

Kata “Besar” perlu ditambahkan setelah kata “Korporasi” karena korporasi-korporasi kecil pada umumnya tidak memiliki ambisi untuk menguras kekayaan bumi dan membangun sistem atau mesin kekuasaan untuk menciptakan imperium global. David Korten melukiskan betapa menakutkan langkah-langkah korporasi besar itu untuk melakukan kolonisasi planet bumi:

Ketika korporasi-korporasi (besar) memperoleh kekuasaan kelembagaan yang bersifat otonom dan makin terasingkan dari masyarakat dan tempatnya, kepentingan korporasi dan kepentingan kemanusiaan semakin menganga berbeda. Kini kita merasa seolah-olah diserbu oleh makhluk-makhluk aneh yang bermaksud menduduki planet bumi kita, mereduksi kita menjadi sekedar budak sahaya, dan mengucilkan kita sebanyak-banyaknya. (*As corporations gain in autonomous institutional power and become more detached from people and place, the human interest and the corporate interest increasingly diverge. It is almost as though we were being invaded*

*by alien beings intent on colonizing our planet, reducing us to serfs, and then excluding as many of us as possible).*³

Banyak orang berpendapat bahwa Amerika Serikat adalah bentuk korporatokrasi yang begitu jelas. Kekhawatiran bahwa akhirnya kedaulatan rakyat akan diambil alih oleh perusahaan-perusahaan besar (korporasi), sudah dinyatakan oleh Abraham Lincoln dalam sebuah surat kepada William Elkins, sahabatnya. Isi surat Abraham Lincoln, Presiden Amerika ke-16 yang berhasil menghapuskan perbudakan setelah perang saudara itu antara lain:

Sebagai akibat perang, berbagai korporasi telah menjadi seperti raja dan era korupsi di tingkatan tinggi segera mengikuti, dan kekuasaan uang akan berupaya memperpanjang kekuasaannya dengan merugikan kepentingan rakyat sehingga seluruh kekayaan akan terpusat di sejumlah tangan yang terbatas dan Republik menjadi hancur. Saya lebih prihatin pada saat ini lebih dari saat-saat sebelumnya, tentang nasib negeri saya, bahkan di tengah suasana perang. Puji Tuhan, semoga kekawatiran saya ini salah adanya (*As a result of the war, corporations have been enthroned and an era of corruption in high places will follow, and the money power of the country will endeavor to prolong its reign by working upon the prejudices of the people until all wealth is aggregated in a few hands and the Republic is destroyed. I feel at this moment more anxiety for the safety of my country than even before, even in the midst of war. God grant that my suspicions may prove groundless).*⁴

Pada umumnya korporasi besar dihindangi penyakit *pathology of profit* atau penyakit mencari untung secara membabi buta. Tujuan mutlak korporasi adalah mencari keuntungan maksimal dengan biaya minimal dan waktu minimal. Semua cara untuk mendapatkan

³ Dalam Ted Nace, *Gangs of America, The Rise of Corporate Power and The Disabling Democracy* (Berkeley: Ted Nace, 2003), p. 19.

⁴ *Ibid*, p. 24.

keuntungan dapat ditempuh. Yang premier adalah keuntungan, yang lainnya sekunder. Proses rekrutmen, pelatihan, administrasi, advertensi, akomodasi, produksi, penggudangan, *profit-sharing* dan lain-lain dibenarkan lewat segala cara, asal tujuan mutlak dapat dicapai.

Kompromi adalah kata yang harus dihindari, karena kompromi berarti kegagalan. Karena itu tidak aneh di negara-negara berkembang berbagai korporasi besar meremehkan nyawa manusia dan tidak peduli dengan pelestarian lingkungan. Nyawa manusia, berapa pun, tidak menjadi soal, sementara kerusakan ekologi selalu dijustifikasi dengan segala macam dalih. Tidak berlebihan bila dikatakan pada dasarnya sistem korporatokrasi itu bersifat psikopatik.⁵

Dalam memburu keuntungan maksimal berbagai korporasi melakukan skandal dalam berbagai bentuk. Dunia pernah digemparkan dengan skandal komplis yang dilakukan oleh perusahaan energi bernama *Enron*. Korporasi energi terbesar no.7 di Amerika ini dapat mengelabui masyarakat cukup lama lewat kejahatan multidimensional: kejahatan perpajakan (antara 1996-2000), *Enron* mangkir membayar pajak sebanyak ratusan juta dolar); kejahatan akuntansi (kantor akuntansi Arthur Andersen membuat pemalsuan dan penggelapan fakta keuangan *Enron*); kejahatan *bank frauding* (menipu kalangan perbankan); kejahatan *inside trading*; kejahatan *money laundering* (pencucian uang); kejahatan politik (menyuap para anggota Kongres Amerika sejumlah seratus juta dolar rata-rata satu tahun); dan lain sebagainya.⁶

⁵ David Edwards, *The Wound Outside*, http://www.thirdworldtraveler.com/Media_control_propaganda/Wound_Outside_BAI.html

⁶ Mengenai skandal *Enron*, sumber-sumber yang dapat diakses terlalu banyak. Mingguan TIME, NEWSWEEK dan ECONOMIST pada masa terjadinya skandal memuat relatif lengkap. Juga dapat dilihat di *website* tentang *Enron*, Worldcom dan lain-lain.

Pemerintahan Clinton pernah memuji Enron sebagai model korporasi yang sukses dan perlu dicontoh. Namun pada akhir 2001 begitu seluruh skandal dan kejahatan Enron terkuak, perusahaan yang mengklaim punya aset lebih dari 100 milyar dolar ini bangkrut tiba-tiba. Empat puluh ribu karyawannya kehilangan pekerjaan. Demikian juga kantor akuntansi Arthur Andersen langsung gulung tikar. Dua puluh delapan ribu karyawannya di Amerika dan 85 ribu lainnya di berbagai negara langsung *jobless*. Yang tersisa tinggal sekitar 200 orang di Chicago yang masih harus mengatasi tuntutan hukum. Selembar saham Enron yang bernilai sekitar 90 dolar pada akhir 1990-an menjadi bernilai beberapa sen saja.

Pada 2002 kejahatan Enron mendapat pesaing berat, namanya WorldCom. Sebagai korporasi besar, WorldCom melakukan kejahatan akuntansi tergawat dalam sejarah Amerika. Uang sebesar 3,8 milyar dolar disalahgunakan oleh pimpinannya. Gara-gara skandal ini, 17 ribu karyawan WorldCom dirumahkan. Harga saham yang pada awal 2002 masih sekitar 15 dolar per lembar jatuh menjadi 20 sen pada pertengahan tahun yang sama.⁷

Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa hampir semua korporasi besar di Amerika pernah dan sedang melakukan skandal dalam berbagai bentuk: menyuap para pejabat negara; *anti-trust*; akuntansi bohong; merusak lingkungan; pencucian uang dan lain sebagainya. *Corporate Crime Reporter*, sebuah buletin yang khusus mencatat skandal dan kejahatan korporasi membeberkan bahwa selama dekade 1990-an ada seratus korporasi yang melakukan aneka pelanggaran dan telah dihukum oleh pengadilan.⁸

Hanya saja hukuman itu berupa denda yang berjumlah hanya belasan atau puluhan juta dolar saja, tidak sebanding dengan

⁷ Lihat catatan no 6.

⁸ *Corporate Crime Reporter*, <http://www.corporatecrimereporter.com/top100.html>

kejahatan yang telah dilakukan. Di antara seratus perusahaan itu, nama-nama seperti Exxon, IBM East Europe, General Electric, Chevron, dan Rockwell International menempati urutan di atas. Exxon yang di Indonesia disegani oleh pemerintah kita, oleh buletin itu disebut sebagai *criminal recidivist company* atau perusahaan residivis yang berulang kali melakukan kejahatan.

Rakyat Amerika sendiri umumnya tidak mengetahui apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Ketika mereka membeli saham Exxon, atau sedang mengisi bahan bakar di stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) milik Exxon, mereka tidak mengerti bahwa sesungguhnya mereka sedang membantu sebuah korporasi residivis kriminal. Demikian juga ketika mereka sedang berwisata naik kapal pesiar milik *Royal Caribbean Cruises Lines*, mereka sedang naik kapal yang dimiliki oleh korporasi residivis kriminal.⁹

Ada beberapa perbedaan yang mencolok antara kejahatan korporasi dan kejahatan biasa. Pertama, kejahatan yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh mafia, oleh para gangster, oleh perompak dan penjahat jalanan, tetapi dapat dilakukan oleh korporasi adalah membuat undang-undang. Atau lebih tepat mendiktekan undang-undang pada pemerintah dalam arti luas, yakni lewat eksekutif, legislatif dan yudikatif. Mereka membangun lobi yang kelewat kuat.

Kedua, kehancuran yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi jauh lebih dahsyat dari kehancuran kejahatan biasa. Kejahatan kerah putih (*white collar crime*) di Amerika merugikan negara/rakyat sebesar antara 300-500 milyar dolar per tahun. Ini berdasarkan estimasi konvensional. Sementara menurut FBI perampok, penggarongan dan kejahatan jalanan hanya mencapai sekitar 3,8 milyar dolar per tahun. Dus, kejahatan korporasi tidak terperiikan kedahsyatannya.

⁹ *Ibid.*

Ketiga, karena kekuatan politiknya, kejahatan korporasi cenderung selalu menang bila dibawa ke proses hukum. Mereka punya sumber daya politik dan finansial untuk mengatur proses hukum, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh penjahat biasa. Ada ungkapan yang sesuai kenyataan, "*corporations define the laws under which they live*". Jadi bukan undang-undang saja yang diarahkan oleh korporasi besar, bahkan hukum pun juga dapat ditekuk-tekuk oleh mereka.

Keempat, begitu kuatnya korporasi-korporasi besar itu, sehingga banyak hakim dan jaksa justru membela korporasi dengan menghindari keadilan. Mengapa? Karena dengan membela kejahatan korporasi itu karir mereka justru menjadi lebih cemerlang. Ini sekelebatan tidak masuk akal, tetapi itulah yang terjadi di banyak negara, termasuk Amerika.

Kelima, lembaga-lembaga hukum yang ada seperti kepolisian, kehakiman dan kejaksaan pada umumnya tidak memiliki kemampuan dan keberanian untuk menjangkau kejahatan korporasi. Andaikata lembaga-lembaga penegak hukum ini masih bersih, tetap saja dalam menghadapi *corporate crime* dalam berbagai jenis, tidak punya nyali. Karena seperti akan kita lihat di bawah, kekuatan korporatokrasi adalah kekuatan yang memang berada di luar jangkauan lembaga penegak hukum biasa.¹⁰

Korporasi yang berpikir, berencana, bertindak dan melakukan apa saja untuk mendapat keuntungan maksimal, tidak mungkin hanya bekerja sendirian untuk mendapat keuntungan maksimal, tidak mungkin hanya bekerja sendirian. Mereka memerlukan kekuatan politik pemerintah.

¹⁰ Disarikan dari *ibid* dan sumber-sumber lain.

2. Pemerintah

Secara teoritis pemerintah yang mendapat kekuasaan dari rakyat seharusnya jauh lebih kuat dari perusahaan atau korporasi, terlepas dari betapa besarnya korporasi itu. Pemerintah punya lembaga penegak hukum, punya kekuatan militer dan mempunyai legitimasi kekuasaan dari rakyat yang telah memberikan mandat kekuasaan untuk periode tertentu sesuai dengan konstitusi. Akan tetapi pemerintah dalam arti luas, dalam era globalisasi sekarang ini, banyak yang justru tunduk dengan kepentingan ekonomi korporasi. Pihak eksekutif, legislatif dan yudikatif secara sukarela merunduk hormat bahkan cenderung takut pada kemauan korporasi.

Cara paling mudah bagi korporasi untuk menaklukkan kekuatan politik adalah dengan memberikan biaya kampanye tatkala calon presiden atau calon gubernur melakukan kampanye menjelang pemilihan umum. Presiden yang terpilih tidak bisa tidak pasti akan membalas budi pada korporasi yang telah menggelontorkan dana kampanye. Di Amerika sendiri dana kampanye siluman merupakan salah satu masalah politik dan hukum yang paling pelik. Bukan saja korporasi Amerika yang berlomba-lomba memberikan dana kampanye kepada capres yang dinilai bakal mudah menjadi fasilitator kepentingan korporat, perusahaan asing (dari luar Amerika) juga ikut-ikutan menimbrung supaya kelak memperoleh kemudahan-kemudahan.

Pada zaman Clinton, misalnya, Narman Hsu, kelahiran Hong Kong, seorang agen kampanye, terbukti dapat "memeras" para investor asing sampai 60 juta dolar sesuai hasil investigasi persidangan. Kita juga masih ingat seorang konglomerat Indonesia dapat menembus Gedung Putih ikut-ikutan menyumbang dana kampanye Clinton. Menurut David Korten, demokrasi Amerika tidak saja dijual untuk korporasi-korporasi Amerika,

tetapi juga dijual untuk koporasi asing. "*American democracy isn't for sale only to Americas's transnational corporations.*"¹¹

Pemerintah Mexico mengeluarkan sedikitnya 25 juta dolar sebagai uang pelicin untuk melobi tokoh-tokoh politik di Washington agar posisi Mexico tetap aman di NAFTA. Pada akhir 1980-an berbagai korporasi Jepang mengeluarkan uang semir sekitar 100 juta dolar per tahun untuk melobi tokoh-tokoh di Washington. Sedangkan 300 juta dolar (sekitar 2,7 trilyun rupiah) untuk tokoh-tokoh yang dapat mempengaruhi opini publik di masyarakat. Pemerintah Jepang dan korporasi Jepang mendirikan 92 biro hukum, p.r., dan lobi, disusul 25 dari Kanada, 42 dari Inggris dan 7 dari Belanda. Tujuan pokoknya cuma satu: untuk melahirkan undang-undang atau mengganti undang-undang yang lebih menguntungkan kepentingan korporasi. Dan seringkali memang berhasil.¹²

Uang pelumas yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan dari luar Amerika itu kecil adanya, dibandingkan dengan uang sogok dari korporasi Amerika sendiri. Sesuatu yang mudah dimengerti. Pada musim kampanye pemilihan presiden dan anggota Kongres 2004, korporasi Amerika mengeluarkan hampir 4 milyar dolar sebagai uang sogok kepada Kongres. Berkat uang pelumas sebesar itu, korporasi-korporasi besar mendapat kontrak dari pemerintah yang besarnya sekitar 100 kali dari uang yang dikeluarkan. Mereka juga mendapat potongan pajak (*tax cut*) sebesar 1,35 trilyun dolar (dengan nilai rupiah, lebih dari 12.400 trilyun rupiah!).¹³ Siapa bilang Demokrasi Amerika demokrasi ideal? Hakekatnya demokasi di negeri Paman Sam itu telah menjadi

¹¹ David Korten, *When Corporations Rule the World* (Kumarian Pres, 1995), dalam Bab "Buying Out Democracy".

¹² *Ibid.*

¹³ Ravi Brata, *The New Golden Age* (New York: Palgrave Mac Millan, 2007), p.102.

demokrasi korporat, tidak lebih, tidak kurang. Sebagian anggota DPR kita mungkin lebih banyak berguru ke Kongres Amerika.

Namun ada cara korporasi besar Amerika dalam memegang kendali pemerintahan dengan lebih efektif lagi. Caranya langsung menduduki pos-pos kekuasaan yang penting. Pemerintahan Bush sekarang ini merupakan bukti yang meyakinkan. Tokoh-tokoh penentu kebijakan Amerika sangat terkait erat dengan korporatokrasi Amerika yang bergerak di bidang perminyakan. Dick Cheney, sebelum menjadi wakil presiden, adalah CEO Halliburton yang berbasis di Dallas, Texas. Sekalipun secara formal dia mengaku tidak lagi memiliki hubungan dengan Halliburton, bukti-bukti di lapangan menunjukkan keterkaitan itu semakin akrab. Buktinya Halliburton memenangi kontrak bernilai milyaran dolar untuk melakukan rekonstruksi Iraq.

Condoleezza Rice, menteri luar negeri Amerika, adalah Direktur Chevron antara 1991-2001. Secara formal ia juga meninggalkan Chevron, tetapi keterkaitannya dengan kepentingan Chevron semakin menjadi-jadi setelah memegang kekuasaan politik luar negeri Amerika. Bermitra dengan Cheney, C. Rice dapat memenangkan kontrak pemipaan minyak (*crude oil pipelines*) sepanjang 900 mil dari Kazakhstan Barat sampai Laut Hitam. Halliburton akan mengerjakan pemipaan itu untuk Chevron.

Tidak mau kalah dengan Cheney dan Rice, menteri pertahanan Rumsfeld, ternyata menjadi direktur non-eksekutif perusahaan ABB, sebuah perusahaan *engineering* raksasa yang berbasis di Zurich. Pada masa Rumsfeld “berkarya” di ABB antara 1990-2001, perusahaannya memenangi kontrak sebesar 200 juta dolar untuk merancang *design* dan komponen-komponen penting buat reaktor nuklir.

Sementara itu latar belakang Bush Sr. dan Bush Jr. juga berbasah-basah dengan minyak. Bush Sr. pernah membuat pernyataan yang sangat jelas, apa sesungguhnya yang menjadi motivasi penting politik luar negeri Amerika. Secara terbuka ia mengatakan:

“kerja kita, *way of life* kita, kemerdekaan kita, kemerdekaan negara-negara sahabat kita di seantero dunia akan menderita bilamana penguasaan sumber-sumber minyak dunia jatuh ke tangan Saddam Hussein.”¹⁴

Langsung dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin pernyataan sepenting itu akan muncul kalau Bush Sr. tidak punya konektisitas erat dengan para petrokrat Amerika. Bush Sr. pernah mendirikan perusahaan minyak bernama Zapata Oil yang berkedudukan di New York pada 1953. Perusahaan ini terus berkembang dan membuka pertambangan lepas pantai di berbagai negara. Sampai 1966 Bush Tua menjadi presiden Zapata Off-Shore. Ketika ia menjadi Direktur CIA (1976-1977), Bush berperan melicinkan kerja-sama perusahaan minyaknya dengan CIA.

Riwayat Bush Jr. juga belepotan dengan minyak. Di Texas ia mendirikan perusahaan minyak kecil-kecilan, dinamakan *Arbusto Energy* (*arbusto* dalam bahasa Spanyol berarti *bush*/semak belukar). Dalam perjalanan selanjutnya ia bergabung dengan *Harken Energy Corporation*. Ketika Harken kedodoran, sebagian besar sahamnya dijual ke pialang Saudi, Shaikh Abdullah Bakhsh. Bush kemudian menjual saham yang dimilikinya sebesar sekitar 1 juta dolar, sebelum masuk pilihan gubernur di Texas.¹⁵

Tidak berlebihan bila dikatakan alasan sejati mengapa Amerika menduduki Iraq sampai sekarang karena Amerika ingin menguasai ladang-ladang minyak di Iraq sambil tentu memenuhi ambisi berbagai korporasi energi Amerika yang kepentingannya begitu

¹⁴ Kevin Phillips, “*American Petrocracy*,” *The American Conservative*, 17 Juli 2006.

¹⁵ <http://www.famoustexans.com/georgewbush.htm>

terintegrasikan dengan kepentingan pemerintah Amerika. Alasan agresi Amerika karena Iraq menyimpan WMD (*Weapons of Mass Destruction*), senjata pemusnah massal, dan Iraq punya keterikatan dengan al-Qaeda sudah terbukti merupakan kebohongan publik yang begitu telanjang dan sangat vulgar.

Tak kurang dari Henry Kissinger sendiri sudah mengatakan bahwa penguasaan minyak adalah masalah kunci yang menentukan mengapa Amerika melakukan aksi militer terhadap Iraq.¹⁶ Demikian juga Alan Greenspan, bekas *Chairman of the Board of Governors of the Federal Reserve* (1987-2006), membuat pernyataan yang menohok Presiden Bush:

“saya sedih karena sekalipun secara politis tidak mengenakkan, saya harus mengakui apa yang semua orang sudah tahu: Perang Iraq adalah terutama sekali karena minyak”.¹⁷

Dari paparan singkat di atas menjadi jelas bahwa elemen terpenting dari korporatokrasi, yakni korporasi-korporasi besar tidak mungkin mencapai tujuan absolutnya jika tidak menggandeng pemerintah yang memiliki kekuatan politik. Dalam kenyataan riil kedua unsur tersebut memerlukan satu unsur lagi, yaitu perbankan dan lembaga-lembaga keuangan internasional.

¹⁶ *Washington Post*, 10 Sepet 2007.

¹⁷ Robert Weissman, *Old Warriors*, <http://www.counterpunch.org/weissmann/09192007.html>

3. Perbankan & Lembaga Keuangan Internasional

Di antara banyak bank korporat, ada dua bank penting bentukan bersama antara Amerika dan sekutu-sekutunya lewat konferensi Bretton Woods di akhir PD II, *World Bank* (WB) dan *International Monetary Fund* (IMF). Dua lembaga keuangan internasional ini dapat diibaratkan menjadi "keponakan" *United Nations* (UN) atau PBB.

UN yang demikian besar saja hakekatnya dapat dijadikan sebagai salah satu alat diplomasi dan politik internasional Amerika, apalagi WB dan IMF. Ada semacam aturan main yang tidak tertulis, Presiden WB harus tokoh Amerika, sedangkan Ketua IMF tokoh dari Eropa. Kenyataan ini dapat menunjukkan bahwa tugas pokok kedua bank besar ini adalah untuk melindungi kepentingan ekonomi Amerika dan Eropa. Markas masing-masing secara fisik juga berhadapan-hadapan di Washington.

Seperti diuraikan singkat di Bab II, WB dan IMF adalah pilar atau pemain globalisasi, bahkan ada yang mengatakan sebagai arsitek ekonomi dunia. Mula-mula fokus kedua lembaga keuangan dunia itu diarahkan ke Eropa Barat, Jepang dan negara-negara sahabat Amerika, tetapi belakangan diarahkan ke negara-negara berkembang. Tugas pokok WB sekilas cukup mulia, seperti slogan yang ditulis di gerbang markas besarnya, yaitu: "Impian kami adalah dunia yang bebas dari kemiskinan" (*Our dream is a world free from poverty*).

Namun keduanya berperan sebagai instrumen untuk membela kapitalisme internasional, mengupayakan keuntungan maksimal bagi korporasi-korporasi besar, dan melestarikan dominasi ekonomi Amerika. Pembagian kerja masing-masing dapat dilukiskan sebagai berikut: WB memberikan pinjaman jangka panjang ke negara-negara berkembang untuk mendanai proyek-proyek pembangunan

semisal membuat jalan, waduk/dam, pusat-pusat pembangkit tenaga listrik, jembatan, pelabuhan, sekolahan, dan berbagai pembangunan infrastruktur lainnya. Sedangkan IMF memilih mana negara-negara yang perlu dibantu untuk mencapai stabilitas ekonomi dan finansialnya serta memberikan arahan-arahan (baca "tekanan-tekanan") apa yang harus dikerjakan oleh negara yang mendapat bantuan hutang. Keduanya seringkali berkegiatan tumpang-tindih dan satu hal yang dipegang keduanya sebagai "aqiedah" adalah apa yang dinamakan SAP (*structural adjustment programs*).

Kalau ingin mendapat bantuan hutang, negara-negara berkembang harus melaksanakan SAP yang didiktekan secara sepihak. Bila ada elite nasional yang begitu tunduk dan patuh pada kemauan IMF dan WB, elite nasional negara berkembang itu akan dipuji dengan segala pujian bohong-bohongan sampai elite nasional itu tidak sadarkan diri. Elite nasional negara-negara tertentu yang sudah menjadi hamba sahaya IMF dan WB itu diberi khutbah yang harus dijalankan.

Khutbah itu kira-kira: Supaya dapat membayar hutang, pemerintah harus mengisi kocek nasional dengan jalan menjual aset negara (BUMN) dan perusahaan-perusahaan milik negara lainnya; anggaran belanja negara untuk pendidikan, kesehatan, perawatan anak, dana pensiun, lupakan dulu, atau keluarkan secara minimal saja; deregulasi ekonomi dijalankan tanpa ampun; buka pasar secara penuh dalam rangka perdagangan bebas; kurangi subsidi bagi industri lokal dan perkecil tarif dan berbagai rintangan terhadap barang impor; buka lebar-lebar ekonomi nasional agar korporasi multinasional dapat masuk tanpa halangan; berilah izin dan kemudahan pada korporasi asing untuk mendapat akses langsung ke sumber daya alam dengan tawaran harga yang semurah-murahnya; dan jangan pernah berani mematok nilai tukar uang

terhadap uang asing, karena “tidak realistis”; dan gertak sambal “awas, bila tidak taat, anda akan dikucilkan oleh investor internasional”.

Terhadap khutbah IMF dan WB yang bersumber pada *Washington Consensus* itu, ada pemimpin yang berani menolak dan akhir-akhir ini bahkan menendang kedua lembaga dunia itu. Mereka menyadari bahwa kedua instrumen imperialisme ekonomi itu sesungguhnya tidak sekuat seperti disangka oleh para pengecut dan terlalu sering menyebar “gertak sambal”. Akan tetapi ada juga para pemimpin di negara tertentu yang ikut membuatkan sambal dan ikut menakut-nakuti rakyatnya supaya patuh dengan IMF dan WB.

Jesse Jackson, seorang tokoh Afro-Amerika, dalam sebuah konferensi yang dihadiri negara-negara Afrika mengatakan:

“Mereka (kaum imperialis) dulu menggunakan peluru atau tali... sekarang mereka menggunakan Bank Dunia dan IMF” (*They used to use the bullet or the rope... now they use the World Bank and the International Monetary Fund*).¹⁸

Tidak kurang dari *the New York Times* menyebutkan bahwa:

“IMF bertindak bagaikan anjing pengintil Departemen Keuangan Amerika” (*IMF acts as a lap dog of the US Treasury*).¹⁹

Reaksi internasional terhadap IMF dan WB, dua lembaga yang dianggap lebih banyak menyengsarakan rakyat di negara berkembang, makin lama memang makin luas. Pada umumnya alasan kuat untuk mengubah secara radikal, bahkan ada yang mengusulkan pembubaran terhadap IMF dan WB, adalah sebagai berikut (sebagian sudah dikemukakan dalam Bab II dan Bab III):

¹⁸ The IMF, The World Bank, and the Global Economy, [http:// socialistalternative.org/publications/imtwb/introduction...](http://socialistalternative.org/publications/imtwb/introduction...)

¹⁹ *Ibid.*

- Keduanya bersifat elitis dan tidak representatif secara internasional;
- Keduanya hanya menguntungkan elite nasional yang korup dan merugikan rakyat kebanyakan;
- Keduanya memperparah malnutrisi dan memperluas kesengsaraan;
- Keduanya “mempromosikan” penghancuran ekologi;
- Keduanya “mempromosikan” standar kehidupan pekerja/buruh semurah mungkin
- Keduanya mempromosikan kesejahteraan korporat, yakni hanya berpikir dan bertindak demi keuntungan korporasi;
- Kebijakan-kebijakannya cenderung memperlemah masyarakat sipil;
- Resep-resep ekonomi mereka bukan sungguh-sungguh untuk menolong negara *debtor* supaya menjadi kuat secara ekonomi, tetapi dibantu sejauh dapat membayar bunga dalam jebakan hutang selama mungkin.
- Keduanya dikendalikan oleh Amerika dan Eropa Barat.
- *Hubris* dan *arrogance*, kepongahan dan kesombongan keduanya tidak tertahankan.

Akan tetapi satu hal sangat penting dalam kehidupan dilupakan oleh IMF dan WB. Hal sangat penting itu adalah bahwa tidak ada kehidupan di dunia ini yang tidak berubah. Meminjam istilah Herakleitos, kehidupan dunia ini ber *Panta Rei*, terus bergerak dan berubah, bahkan pergerakan itu dapat merubah kehidupan secara kualitatif dan kuantitatif. Ungkapan terkenal dari Herakleitos adalah: *Everything flows and nothing stand still* atau *All things are in motion and nothing remains still*.

Sunnatullah juga mengajarkan bahwa tidak ada yang abadi atau kekal di dunia ini. Ajaran agama ini demikian jelas, tetapi bagi yang menderita *hubris* dan arogansi, dunia disangka abadi atau

langgeng. Perkembangan global memang sangat cepat. Rata-rata pasien IMF sudah tidak mau lagi dipecundangi oleh IMF. Tentu, juga oleh kembarannya, WB. Pamor IMF dan WB hari-hari ini memang sudah sangat merosot tajam dan agaknya sulit untuk dipulihkan. Peran IMF demikian negatif dalam keruntuhan ekonomi Argentina 2001 dan WB menjadi makin tidak menarik setelah skandal moral yang melibatkan presidennya, Paul Wolfowitz. Russia yang makin parah ekonominya ketika jadi pasien IMF, kini sudah bebas IMF. Seluruh hutang Russia ke IMF sudah dilunasi dan sekarang ekonomi Russia, dengan membuang seluruh resep IMF, justru semakin maju.

Di negara-negara Afrika peran IMF dan WB juga dinilai destruktif. Sangat terasa proses pemelaranan negara-negara Afrika gara-gara percaya dengan hutang yang diberikan oleh kedua alat imperialisme ekonomi Barat itu. Kesehatan rata-rata penduduk Afrika makin buruk, pendidikan makin amburadul dan standar kehidupan umumnya semakin melorot, karena hal-hal ini tidak diunggulkan dalam SAP ala IMF dan WB.

Dr. Jeffrey Sachs, profesor ekonomi dari Universitas Columbia, Amerika Serikat, salah satu tokoh yang sangat terhormat dan disegani dalam setiap perbincangan ekonomi dunia, dan pernah menjadi penasihat khusus Sekjen PBB, Kofi Annan, pernah membuat usul yang cukup dramatis. Berhubung negara-negara Afrika yang berhubungan dengan WB dan IMF sudah membayar hutang setiap tahun yang besarnya hampir 10 kali lipat dibandingkan dana bantuan (*grant*) dari kedua lembaga keuangan itu, sudah tiba saatnya hutang negara-negara Afrika itu diputihkan. Hutang sebesar 200 milyar dolar itu sudah tidak perlu dibayar lagi.

Sachs membuat rekomendasi agar negara-negara Afrika itu berhenti membayar hutang. Cukup sudah. Permainan berat sebelah itu harus dihentikan. Kata Sachs: "Waktunya sudah tiba untuk

mengakhiri dagelan yang tidak lucu ini. Hutang itu sudah tidak tertanggungkan. Bila mereka (IMF dan WB) tidak mau memutihkan hutang itu, saya menganjurkan perlawanan/penghancuran; anda lakukan sendiri. Afrika harus mengatakan:

“Terima kasih banyak, tetapi kami memerlukan uang ini untuk memenuhi kebutuhan anak-anak kami sendiri yang sekarang pada meninggal sehingga kami akan memanfaatkan uang yang seharusnya untuk melunasi hutang, kami gunakan untuk investasi sosial yang mendesak di bidang kesehatan, pendidikan, air minum, kontrol atas AIDS dan keperluan lainnya.”²⁰

Namun pukulan-pukulan telak kini datang dari negara-negara Amerika Latin. Secara tegas Hugo Chavez, Presiden Venezuela yang tegas dan tidak suka berbasa-basi mengatakan WB dan IMF adalah alat imperialisme Amerika Serikat, *tools of US imperialism*. Tidak kalah tegas adalah keputusan Rafael Corraa, Presiden Ecuador yang mengusir pejabat WB dari negerinya, karena pejabat itu dijadikan *persona non grata*.²¹

Langkah-langkah Chavez setelah mendapat kepercayaan rakyatnya dengan 63% suara untuk memimpin Venezuela 5 tahun lagi kedepan terasa semakin tegas dan cenderung nekat. Bagi Chavez jabatan kepresidenan adalah sebuah perjuangan kepahlawanan, sebuah *epic struggle*. Ia merasa menjadi gladiator yang tidak mau dipecundangi oleh sang kaisar, dalam hal ini imperium yang ia bayangkan sudah tentu adalah Amerika Serikat.²²

²⁰ Wikipedia, <http://en.wikipedia.org/wiki/Neocolonialism>. Teks aslinya: *The time has come to end this charade. The debts are unaffordable. If they won't cancel the debts I would suggest obstruction; you do it yourselves. Africa should say: 'thank you very much but we need this money to meet the needs of children who are dying right now so we will put the debt servicing payments into urgent social investment in health, education, drinking water, control of AIDS and other needs'.* (Professor Jeffrey Sachs, Director of the Erah Institute at Columbia University and Special Economic Advisor to UN Secretary General Kofi Annan).

²¹ *Christian Science Monitor*, 12 Juli 2007.

²² Ian Jaman, *Associated Press*, 23 September 2007.

Ia bahkan menyamakan Bush dengan setan dalam pidato resmi di Sidang Umum PBB 2006. Dalam kesempatan lain ia menyebut Bush sebagai *Mr. Donkey, assassin* (pembunuh) dan sebutan-sebutan lain yang sangat meremehkan Bush. Tetapi barangkali itulah cara Chavez membangkitkan keberanian para pemimpin lainnya di Amerika Latin. Seperti kata Noam Chomsky, sekali seorang pemimpin sudah menghempaskan rasa takutnya, berbagai watak positif segera bermunculan.²³ Pengertian terbaliknya, bila seorang pemimpin dihindangi rasa takut dan memasung keberaniannya, maka berbagai watak negatif justru akan berkumpul dalam dirinya.

Chavez telah menyatakan resmi bahwa Venezuela menarik diri dari IMF dan WB. Alasannya sederhana, kedua organisasi *mindring* internasional itu hanya berprestasi melestantakan kemiskinan di Amerika Latin lewat pemaksaan resep-resep ekonomi yang mencelakakan rakyat. Sebagai gantinya, ia mengusulkan agar dibentuk *Banco del Sur, Bank of the South*, atau Bank untuk Selatan. Chavez merencanakan Bank untuk Selatan itu menjadi bank pembangunan yang akan membantu keperluan negara-negara berkembang, khususnya di Amerika Latin dalam menyelenggarakan proyek-proyek pembangunan. Yang menarik adalah bahwa Ecuador, Argentina, Bolivia, Brazil, Paraguay, Uruguay dan Nicaragua setuju dengan gagasan Chavez dan bersedia bergabung membangun sebuah bank pembangunan yang bersemboyan Amerika Latin untuk orang Amerika Latin.

Bahwa Bank untuk Selatan itu akan menghadapi berbagai persoalan, kiranya dapat dimaklumi. Akan tetapi satu hal mencolok yang harus ditangkap adalah bahwa Amerika Latin yang secara historis sudah lama menjadi halaman belakang ekonomi Amerika, kini perlahan tapi pasti sudah berniat untuk lebih mandiri dan

²³ Interview Chomsky dengan Sameer Dossani, <http://www.50years.org/cms/update/story/383>

tidak ingin lagi berada di daerah pengaruh (*sphere of influence*) Amerika Serikat, terlebih-lebih lagi menjadi bagian daerah pengawasan dan kendali (*sphere of control*) Amerika.

Pada awal abad 21 Amerika Latin menyaksikan gelombang merah jambu (*pink tide*), sebuah istilah yang dipakai para ahli Amerika Latin untuk menengarai gerakan-gerakan Amerika Latin yang menjauhi Washington. Dulu semasa Perang Dingin, Washington mewaspadai hantu komunisme (*red scare*) yang dapat melanda Amerika Latin, sehingga Washington mengarahkan perhatian penuh agar virus Cuba tidak menyebar ke Amerika Latin. Setelah Soviet bubar Washington menyangka bahwa Amerika Latin sudah aman dari bahaya komunisme dan karena itu lebih mudah diarahkan dan “dibentuk” sesuai kemauan Washington.

Namun persangkaan itu keliru. Terbukti para pemimpin Amerika Latin semakin cerdas dan tangkas untuk mencari jalan sendiri meninggalkan ikatan-ikatan ekonomi dan politik Washington yang dirasakan makin menyengsarakan. Resep-resep neolib (neoliberalisme) ala *Washington Consensus* tidak lagi dipercaya. Tokoh-tokoh seperti Hugo Chavez (Venezuela), Evo Morales (Bolivia), Lula da Silva (Brazil), Nestor Kirchner (Argentina), dan Rafael Correa (Ecuador) dengan cara masing-masing memberikan signal sangat jelas bahwa sudah tiba waktunya mereka tidak mau lagi menjadi “agen” neolib di Amerika Latin. Bahkan Chili, Meksiko dan Peru menunjukkan gejala “gelombang merah jambu” itu, menyusul Venezuela dan kawan-kawan.²⁴

Setelah kebanyakan negara nasabah “beramai-ramai” melunasi hutang mereka (termasuk Indonesia) ke IMF dan WB, kedua organisasi *mindring* dunia itu kini berada di simpang jalan. Sampai

²⁴ Larry Birns dan Nicholas Birns, “The Reverberations of American Populism”, *Harvard International Review*, 27 Juni 2007.

5 tahun lalu komitmen IMF ke negara-negara Amerika Latin masih berkisar sekitar 50 milyar dolar. Sekarang tinggal di bawah 3 milyar dolar. Tidak berlebihan bila dikatakan sejak 2006 IMF dan WB mulai resah, bahkan bisa dikatakan lebih kurang “linglung”. Bayangkan nasib sebuah bank yang kehilangan hampir semua nasabahnya.

Anoop Singh, konsultan WB mengatakan bahwa WB tidak pernah mengantisipasi bila suatu ketika nasabah sudah tidak lagi memerlukan uang pinjaman dari WB, apa yang harus dilakukan? Mereka tidak pernah memikirkan untuk menemukan sebuah *exit strategy*, strategi keluar dari keadaan seperti sekarang ini, yakni sepi nasabah dan citra yang makin anjlok. Agaknya IMF mengalami nasib yang sama.

Mungkin sekali pihak IMF dan WB akan berargumentasi bahwa dengan sepinya negara nasabah yang mengambil hutang ke kedua lembaga keuangan itu berarti mereka telah sukses menolong negara-negara berkembang sehingga tidak perlu lagi hutang baru. Alasan ini tentu menyesatkan, karena negara-negara itu tidak lagi percaya pada IMF dan WB yang terbukti membuat perangkap hutang, di samping kesadaran bahwa keduanya hanyalah alat belaka dari imperialisme ekonomi Amerika.

Negara-negara Amerika Latin memang sudah “siuman” dari tidur panjang yang merugikan diri sendiri, tidur di atas pangkuan kekuatan ekonomi raksasa yang sekaligus menyedot kekayaan alam negara-negara Amerika Latin tersebut. Pada pertengahan tahun 2007 Bolivia, Venezuela dan Nicaragua mengejutkan para pengamat internasional. Ketiga negara ini mengumumkan mencabut diri dari badan arbitrase internasional di bawah WB, yaitu ICSID (*International Center for Settlement of Investment Disputes*) atau Pusat Internasional buat Penyelesaian Perselisihan Investasi. ICSID adalah tempat menyelesaikan kasus-kasus

perselisihan antara investor asing dengan negara-negara tuan rumah.²⁵

Alasan Bolivia dan kawan-kawan masuk akal. Bagaimana ICSID sebagai badan arbitrase dapat mengambil posisi netral, sementara ia merupakan bagian dari Bank Dunia (WB)? Ternyata WB juga tidak bisa apa-apa menghadapi aksi Bolivia dan kawan-kawan itu. Malah jangan lupa semua korporasi asing yang menambang minyak dan gas Bolivia akhirnya tunduk sepenuhnya ketika Bolivia secara sepihak (sekali lagi, secara sepihak) merekonstruksi semua kontrak karya yang semula terlalu merugikan rakyat Bolivia menjadi sangat menguntungkan. Padahal sebelumnya, korporasi seperti Exxon, Repsol, Petro Gas, Shell menakut-nakuti Bolivia, kalau Bolivia sampai meminta negosiasi ulang terhadap berbagai kontrak karya, Bolivia akan dikucilkan, akan dibawa ke arbitrase, dan lain sebagainya. Ternyata dengan sikap tegas dan rasional, semua “gertak sambal” korporasi besar itu tidak pernah dilaksanakan.

Sikap tegas itu sebelumnya ditunjukkan oleh Venezuela di bawah Hugo Chavez. Terbukti Chevron, Exxon Mobil, British Petroleum, Conoco Phillips dan lain-lain tidak pernah hengkang dari Venezuela. Mereka tetap saja di sana, karena *tokoh* masih membuat untung (profit), sekalipun jauh lebih ramping.

Idem ditto Argentina. Setelah negeri ini kolaps pada 2001/2002, persis seperti Indonesia dua tahun sebelumnya (ingat betapa sulitnya kehidupan pada masa awal reformasi), Argentina melakukan pembaharuan kontrak-kontrak pertambangannya. Tidak ada ceritera korporasi asing lari dari Argentina karena aturan-aturan baru yang dibuat Argentina, secara sepihak. Mereka menerima perubahan-perubahan itu. Percaya apa tidak, dalam 5 tahun

²⁵ Mark Weisbrot, *International Business Times*, 15 Juni 2007.

terakhir ini (2003-2007) pertumbuhan ekonomi Argentina rata-rata 8,6 persen per tahun, mendekati pertumbuhan ekonomi China yang menakjubkan itu.²⁶

Pelajaran sangat penting adalah bahwa tidak ada hubungan sama sekali antara slogan reformasi harus ramah pada pasar, ramah pada investor (*investor friendly*) dengan jumlah FDI (investasi asing langsung) yang selalu ditunggu-tunggu dengan rasa berdebar dan panas-dingin oleh sedikit negara seperti Indonesia.

Lihatlah China. Negara ini penerima FDI, *foreign direct investment*, terbesar dibandingkan negara-negara lain. China tidak pernah mau “membeli” teori arbitrase ala WB atau ala imperialis lainnya. China mendirikan sendiri lembaga arbitrase yang dinamakan *China International Economic and Trade Arbitration Commission* (CIETAC). Setiap kasus perselisihan antar perusahaan atau korporasi asing dengan pemerintah China harus diselesaikan lewat CIETAC, titik. Gagah bukan?²⁷ Dan korporasi asing di China tidak ada yang mengeluh, membantah, apalagi protes. Beranikah Indonesia mengikuti Cina yang bertindak berani dan rasional?

Setelah kita bahas singkat 3 unsur korporatokrasi, yakni korporasi besar, pemerintah yang memegang kekuatan politik dan bank-bank penunjang, maka ada unsur yang tidak mungkin ditinggalkan yaitu unsur militer.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

4. Militer

Michael Chassudovsky, seorang guru besar ilmu ekonomi di Universitas Ottawa dan Direktur Pusat Studi Globalisasi, seorang ilmuwan yang cukup otoritatif menunjukkan bagaimana pihak militer Amerika mempunyai keterkaitan sangat erat dengan lembaga-lembaga keuangan internasional dan perusahaan-perusahaan minyak dan lain-lain sehingga kepentingan militer menjadi identik dengan kepentingan mereka. Saya kutipkan secara utuh dua paragraf dari bukunya (2005):

Dalam kaitan Tata Dunia Baru, para perancang militer (Amerika, penulis) di Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan dan CIA menentukan kebijakan politik luar negeri. Mereka tidak saja menjalin hubungan dengan NATO, tetapi juga membangun kontak dengan pejabat-pejabat IMF, Bank Dunia dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Pada gilirannya, birokrasi keuangan internasional yang berbasis di Washington, yang bertanggungjawab memaksakan resep-resep maut di Dunia Ketiga dan kebanyakan negara-negara bekas blok Uni Soviet, memelihara hubungan dengan kekuatan keuangan Wall Street.

Kekuatan-kekuatan di belakang sistem ini adalah bank-bank global dan lembaga-lembaga keuangan, kompleks industri-militer, raksasa-raksasa minyak dan energi, para konglomerat di bidang biotek dan farmasi, dan raksasa-raksasa media massa serta komunikasi, yang mengarah berita dan secara terbuka mempengaruhi jalannya peristiwa-peristiwa dunia melalui pendistorsian fakta-fakta secara kasar.²⁸

²⁸ Michael Chossudovsky, *America's War on Terrorism* (KL: Thinker's Library SDN.BHD: 2007), p.7.

(Under the New World Order, military planners in the State Department, the Pentagon and the CIA call the shots on foreign policy. They are not only in liaison with NATO, they also maintain contacts with officials in the IMF, the World Bank and the World Trade Organisation (WTO). In turn, the Washington-based international financial bureaucracy, responsible for imposing deadly "economic medicine" in the Third World and in most of the countries of the former Soviet block, maintains a close working relationship with the Wall Street financial establishment.

The powers behind the system are those of the global banks and financial institutions, the military-industrial complex, the oil and energy giants, the biotech and pharmaceutical conglomerates and the powerful media and communications giants, which fabricate the news and overtly influence the course of the world events by blatantly distorting the facts.)

Kekuatan-kekuatan yang mengganas, merusak, merampas dan merampok kekayaan umat manusia di berbagai negara itu, diberi nama dengan sebutan yang halus, yakni *power elite*. Adalah C. Wright Mills, sosiolog Amerika terkemuka yang memopulerkan istilah itu.²⁹ Mills menguak bagaimana manusia-manusia di *high circles* (lingkaran atas) di Amerika Serikat secara bersama-sama memegang kekuasaan ekonomi, kekuasaan politik, dan kekuasaan militer untuk mencapai ambisi mereka. Ambisi itu berupa pemenuhan maksimal nafsu keduniaan mereka, dengan memegang kendali rakyat Amerika yang telah menjadi *mass society*, menjadi masyarakat massa dalam arti masyarakat yang anggotanya sulit dibedakan satu sama lain, karena telah menjadi masyarakat yang atomistik, untuk meminjam istilah terkenal Emile Durkheim.

Memang agak aneh rakyat Amerika yang katanya relatif lebih terdidik dibanding bangsa lain sekarang ini lebih sering menjadi sekedar *bystanders*, menjadi penonton belaka. Langkah-langkah

²⁹ C. Wright Mills, *The Power Elite* (Oxford Press: 1956).

para elitnya yang anti-demokrasi dan meremehkan hak-hak politik mereka dibiarkan berlalu begitu saja. Seakan-akan rakyat Amerika telah menderita *bystanders syndrome*, sindrom penonton yang tidak lagi merasa bertanggungjawab terhadap masa depan negeri mereka.

Hampir setengah abad yang lalu, William J. Lederer menulis buku berjudul *A Nation of Sheep* (1961), yang menunjukkan betapa mudah rakyat Amerika ditipu oleh para wakilnya di Kongres. Para anggota Kongres itu seharusnya bekerja untuk kepentingan para pemilihnya. Mereka semestinya memberi informasi apa adanya tentang hal-hal penting yang sedang terjadi, agar para pemilihnya tercerahkan.

Akan tetapi yang mereka kerjakan adalah dengan seluruh tenaga dan talenta yang dimiliki mereka berupaya tetap berkuasa dan mempertahankan bos-bos mereka supaya juga tetap berkuasa. Lain tidak. Mereka menganggap rakyat yang telah memilih mereka tidak lebih dari kambing congek yang mudah dibohongi dan diberi informasi selektif agar tetap saja tidak sadar bahwa kepentingan rakyat banyak menjadi terkorbankan. Dus, *a nation of sheep*, bangsa kambing.³⁰

Dr. Dominick Maglio malah menyebut bangsa Amerika sekarang sebagai bangsa kambing yang berpretensi sebagai *pseudo-intelektual*.

“Kita adalah bangsa yang begitu rentan, menyesuaikan diri dengan agenda elite kekuasaan. Sayang sekali Amerika cepat sekali berubah menjadi *a nation of pseudo-intellectual sheep*.”³¹ Banyak di antara rakyat Amerika yang merasa jadi intelektual karena pernah mengenyam pendidikan tinggi. Tetapi kalau mereka malas berpikir dan malas

³⁰ William J. Lederer, *A Nation of Sheep* (Greenwich: Fawcett, 1961). Saya membaca buku ini tahun 1963, dipinjami sahabat saya, Yahya Muhaimin yang waktu itu baru pulang mengikuti program AFS.

³¹ <http://www.drmaglio.com/articles/culturewar/internet.php>

meneliti kebenaran sebuah masalah yang begitu penting dan hanya mengandalkan reaksi emosional berulang kali, sejatinya mereka tidak lebih dari *pseudo-intellectuals* atau bahkan *a flock of sheep*, sebuah rombongan kambing.³²

Sepintas kita bicarakan tentang rakyat Amerika yang dewasa ini tidak menampakkan antusias untuk mengoreksi langkah-langkah pemerintahnya, yang cenderung makin jauh dari nilai-nilai yang dibanggakan oleh rakyat Amerika sendiri, seperti kebebasan bicara; rakyat adalah sumber kekuasaan; presiden tidak boleh melawan opini publik dari rakyat yang telah membayar pajak; militer tunduk pada sipil; dan lain sebagainya. Dalam keadaan rakyat yang mengarah seperti *a nation of sheep* atau malah seperti *a nation of frogs* (bangsa kodok),³³ salah satu elite kekuasaan di Amerika, yakni kaum militer, hampir dapat berbuat apa saja tanpa resiko dan tanpa reaksi berarti dari rakyat Amerika sendiri.

Bila kita gunakan pengertian korporatokrasi, maka kemauan korporasi adalah yang lebih utama, yakni ingin meraup uang sebanyak-banyaknya, sementara elite militer justru melayani kepentingan korporat itu sambil – sudah tentu – memenuhi kepentingan militer sendiri yang kebutuhannya pada uang tidak pernah bertepe. Menurut Mills, struktur ekonomi, struktur militer dan struktur politik adalah saling mengunci. Perhatikan urutan struktur ekonomi adalah yang pertama, kemudian disusun struktur militer dan politik (... *economic, military, and political structures are interlocked*). Lima belas tahun kemudian, pada 1961, Presiden Eisenhower, 3 hari sebelum turun panggung, secara otentik dan otoritatif menyampaikan peringatan suatu bahaya yang dihadapi Amerika, yaitu *military-industrial complex*. Dari waktu ke waktu

³² *Ibid.*

³³ William Borst, "Mindszenty Report", Yayasan Kardinal Mindszenty, Vol. XLV No.1, Januari 2003.

peringatan Eisenhower itu menjadi semakin relevan, tetapi agaknya Amerika sudah tidak dapat berbalik arah. Artinya peran militer di dalam demokrasi Amerika justru semakin kuat dan menentukan, apalagi pada masa kepemimpinan Bush Jr. sekarang ini.

Dalam pidato perpisahannya setelah 8 tahun memimpin Amerika itu, Eisenhower antara lain mengingatkan rakyat Amerika beberapa hal berikut ini:

- 1) Setelah Perang Dunia II Amerika menjadi negara yang paling kuat, paling berpengaruh dan paling produktif di muka bumi. Hal itu pasti membanggakan, tetapi harus diingat bahwa kepemimpinan dan prestise Amerika bukan saja tergantung pada kemajuan material yang tidak tertandingi, melainkan juga tergantung bagaimana kekuasaan/kekuatan itu digunakan untuk membangun perdamaian dunia dan membangun kemajuan kemanusiaan.
- 2) Dalam menghadapi berbagai krisis, baik yang asing atau domestik, besar atau kecil, selalu ada godaan bahwa sejumlah aksi yang spektakuler dan mahal dapat menjadi solusi ajaib bagi seluruh kesulitan yang dihadapi. Seolah-olah belanja militer yang makin besar, ekspansi drastis dalam riset dasar dan terapan, program luar biasa untuk mengatasi masalah pertanian dan lain-lain dianggap satu-satunya jalan menuju masa depan.
- 3) Namun tidak boleh dilupakan bahwa semua langkah harus ditimbang dalam keseimbangan; keseimbangan antara ekonomi publik dan ekonomi swasta; keseimbangan antara yang jelas-jelas diperlukan dan yang diinginkan; keseimbangan antara tuntutan-tuntutan esensial bagi suatu bangsa dan kewajiban individu; keseimbangan antara rangkaian tindakan yang diambil sekarang dan kesejahteraan nasional masa depan.

- 4) Unsur vital bagi pemilihan presiden adalah keberadaan militer yang kuat, yang selalu siap tempur sehingga tidak ada satu pun agresor potensial yang akan mengambil resiko hancur sendiri. Keterkaitan antara keberadaan militer yang dahsyat dan industri senjata yang besar merupakan pengalaman baru bagi Amerika. Pengaruh kenyataan ini dirasakan menyeluruh di seluruh sudut kehidupan Amerika. Semua harus mewaspadaai pengaruh yang kelewat besar dan sesungguhnya tidak dikehendaki dari *military industrial complex* itu. Kemungkinan munculnya kehancuran akibat kekuasaan yang salah tempat itu memang ada dan akan selalu ada.
- 5) Hanya para warga negara yang selalu waspada dan paham masalah, yang dapat memaksa agar terbangun paduan yang serasi antara mesin industri dan mesin militer dengan metode dan tujuan perdamaian, sedemikian rupa, sehingga keamanan dan kebebasan dapat berjalan bersama-sama.

Kompleks militer-industrial itu mengejawantah dalam hubungan yang akrab antara pihak-pihak yang mengelola perang (militer, pemerintah yang dipimpin presiden, dan kongres) serta perusahaan-perusahaan yang memproduksi senjata dan peralatan perang lainnya. Ketiga unsur ini mengejar tujuan yang sama, yaitu keuntungan uang sebesar-besarnya. Bisa saja dalih melancarkan perang dibuat muluk dan ideal, seperti mengalahkan terorisme atau menegakkan demokrasi dan berbagai celoteh lainnya, tetapi yang dicari hakekatnya adalah *profit*, keuntungan dalam bentuk uang. Uang adalah yang pertama dan utama.

Mula-mula dalam draft sebelumnya istilah yang akan digunakan Eisenhower adalah *military-indutrial-congressional complex*. Tetapi banyak anggota Kongres keberatan, barangkali merasa malu dengan rakyat Amerika bila sampai diketahui kolaborasi Kongres dengan pihak militer dan kaum industriawan.

Contoh mutakhir bagaimana kompleks militer-industrial itu bekerja adalah betapa cepatnya ribuan kontraktor Amerika menyerbu Iraq begitu Baghdad, Basra dan kota-kota lain di Iraq sudah luluh lantak. Sebagian besar infrastruktur Iraq hancur, demikian juga seluruh lini produksi menunjukkan tidak lagi berfungsi. Para kontraktor militer maupun sipil yang berjumlah sekitar 48 ribu orang bergentayangan melakukan kenduri besar menghisap kekayaan Iraq lewat dalih rekonstruksi Iraq.

Kalau Iraq diibaratkan sapi yang gemuk (karena sumber daya alamnya yang sangat kaya, terutama minyak) dan militer serta rombongan kontraktor yang berjumlah puluhan ribu itu srigala-srigala lapar, maka begitu sapi itu sudah jatuh tidak berdaya, para predator itu melakukan kenduri berkepanjangan atas mangsanya yang memang sudah diincar lama. Eisenhower tidak pernah membayangkan bahwa *military industrial complex* itu menjadi begitu biadab, barbarik dan jahanamiyah. Tidak pernah terlintas di benak Eisenhower bahwa pada awal abad 21, militer resmi Amerika (Pentagon) bergandengan tangan dengan *mercenaries* (tentara sewaan) milik korporasi yang juga dipersenjatai dan terlibat konflik bersenjata dengan rakyat Iraq.

Ketika monograf ini ditulis ada puluhan ribu serdadu sewaan itu yang berkolaborasi dengan militer resmi Amerika. Bedanya adalah jika serdadu bayaran itu membunuh rakyat Iraq tidak perlu menghadapi resiko hukum, karena mereka “tidak punya identitas”. Secara demikian ketika sejumlah serdadu *Blackwater USA*, sebuah perusahaan kontraktor senjata menembaki dan membunuh penduduk Iraq tidak berdosa pada pertengahan 2007, mereka tidak kena sanksi hukum, karena mereka tidak termasuk militer resmi yang menduduki Iraq.

Di antara korporasi predator yang ikut kenduri Iraq itu adalah Halliburton. Wakil Presiden Dick Cheney adalah mantan CEO

Halliburton. Belum mulai bekerja saja, Halliburton sudah me-*“mark-up”* tagihan pengadaan minyak untuk kebutuhan serdadu Amerika sebesar 60 juta dolar. Anak perusahaan Halliburton yang sudah bangkrut, KBR (Kellog, Brown, and Root) dihidupkan lagi dan memenangi kontrak ratusan juta dolar.³⁴

Tentu diperlukan puluhan, mungkin ratusan, milyaran dolar untuk membangun kembali Iraq menjadi negara normal. Dari mana uangnya? Dari mana lagi kalau bukan dari Iraq sendiri. Paul Wolfowitz, salah satu predator besar, begitu diangkat jadi Presiden Bank Dunia mengatakan dengan jelas bahwa *“Iraq’s oil revenue would pay for our imperial adventure.”* (Penghasilan Iraq dari minyak yang akan membayai petualangan imperial kita).³⁵

Andaikata saya seorang Amerika, saya akan merasa malu sepanjang kehidupan. Bayangkan, pemerintah saya, para pemimpinnya, pengusahanya, jenderal-jendralnya, para kontraktornya menghancurkan sebuah negara lain dengan segala dalih. Setelah negara itu hancur, pura-pura dibangun kembali, dan dalam proses pembangunan itu mereka berkerumun di negara yang dihancurkan itu mencari keuntungan sebesar-besarnya. Inikah yang dinamakan eksepsionalisme atau keistimewaan Amerika? Juga kejernihan moral Amerika? Penggak keadilan dan demokrasi di muka bumi? Karena itu tidak terlalu keliru kalau dikatakan mereka itu bagaikan kambing congek *pseudo*-intelektual.

Anggaran militer untuk Departemen Pertahanan (Pentagon) yang meliputi AD, AL, AU, Korps Marinir dan Pengawas Pantai untuk tahun 2007 mencapai \$532,8 milyar. Anggaran yang sudah lebih besar dari jumlah total anggaran militer 14 negara berikutnya

¹ Robert Scheer, *Ike was Right*, http://www.truthdig.com/report/print/20061226_robert_scheer_ike

³⁵ *Ibid.*

(dalam urutan sesuai besarnya anggaran) itu belum termasuk anggaran untuk pengembangan senjata nuklir, riset dan pemilihan, dan juga di luar biaya Perang Iraq, yang untuk tahun 2007 saja dianggarkan sebesar \$120 milyar.³⁶

Kini ada kecenderungan bahwa yang sedang terjadi adalah *new military industrial complex*, karena ada tekad dari Pentagon untuk membuat doktrin perang yang baru, yaitu menciptakan model peperangan yang lebih cepat, lebih ringan, lebih cerdas – dengan memanfaatkan keunggulan teknologi Amerika. Dari situ diharapkan senjata Amerika benar-benar berbahaya dan bersifat pamungkas.³⁷ Di muka juga sudah disinggung tentang riset Perang Bintang yang harus dilanjutkan sesuai dokumen NSS 2006. Tidak perlu dibahas di sini bahwa anggaran militer/pertahanan Amerika agaknya akan terus meningkat.

Saya menduga bahwa kompleks militer-industrial yang diidap oleh Amerika sudah makin merasuk dalam *psyche* atau kepribadian Amerika. Seperti orang yang menderita, baik kompleks inferior (*inferiority complex*) maupun kompleks superior, sangat sulit disembuhkan dan pulih kembali menjadi manusia normal, maka *military-industrial-congressional complex* di Amerika dewasa ini juga tidak mudah diatasi.

Di samping itu ada perkembangan kejiwaan rakyat yang makin mengkhawatirkan. Saya kebetulan melihat berita CNN pada 29 September 2007 tentang 600 ribu rakyat Iraq yang sudah musnah akibat invasi Amerika, 2 juta rakyat Iraq yang sudah mengungsi ke Jordan dan Suriah dan 2 juta lainnya yang sudah tercerabut dari daerah asalnya dan sedang bergerak keluar. Sementara Jordan dan Suriah sudah tidak kuat lagi menampung para pengungsi

³⁶ Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Military_budget_of_the_US

³⁷ Source Watch, http://sourcewatch.org/index.php?title=Military-industrial_co...

itu. Cara sang *anchorman* yang tanpa ekspresi dalam membaca berita itu dan juga bahasa tubuh koresponden CNN di Baghdad dan di markas PBB yang begitu dingin mengesankan pada saya bahwa berita kemanusiaan yang demikian memilukan itu seperti biasa-biasa saja bagi CNN, pasti biasa-biasa saja bagi Bush dan seantero teman-temannya.

Yang ingin saya tegaskan adalah bahwa kompleks militer-industrial di dalam pikiran, kesadaran dan tingkah laku para pemimpin Amerika nampaknya sudah mengkristal dan menjungkirbalikkan sebagian akal sehat mereka. Pada gilirannya apa yang disebut oleh C. Wright Mills bahwa dalam *high circles* Amerika juga terdapat *higher immorality* bukan lagi sebuah teori, tetapi sudah menjadi kenyataan. Kebejatan moral yang lebih parah justru menghinggapi mereka yang menjadi elite ekonomi, politik, dan militer. Mereka adalah pemuja uang, "*A million dollars covers a multitude of sins*", sejuta dolar membungkus seongkok dosa.

Sesungguhnya bagi elite ekonomi, politik, dan militer hanya ada satu loyalitas yang mereka kenal dan pegang, yaitu loyalitas hanya pada profit, *loyalty only to profits*. Saya khawatir bahwa komitmen untuk membangun demokrasi, menegakkan keadilan, melindungi hak asasi manusia, menegakkan *rule of law*, dan hal-hal yang bersifat moral sejatinya hanyalah dalih atau *pretext* untuk mengelabui masyarakat banyak. Di kalangan elite Amerika ada semacam *joke*, kalau Iraq tidak kaya minyak dan cuma punya kebun wortel, "ngapain" harus diduduki.

Yang ada di bawah sadar mereka sepanjang masa adalah profit, profit dan profit. Karena itu dilihat dari sisi ini tidak salah bila dikatakan bahwa militer Amerika hakekatnya mengabdikan pada korporasi minyak. Michael Klare, seorang sarjana terkemuka di dalam bidang perang sumber daya alam dan ahli geopolitik menyimpulkan: militer semakin dimanfaatkan untuk ladang-ladang

minyak di luar negeri dan rute suplai yang menghubungkan ladang-ladang itu... Upaya semacam itu, suatu ketika hanya terbatas di kawasan Teluk, namun sekarang diperluas ke segala daerah minyak yang tidak stabil di bagian lain dunia. Lambat tapi pasti, militer Amerika Serikat telah diubah menjadi suatu pelayanan perlindungan minyak global (*a global oil protection service*).³⁸ Sekali lagi, militer telah menjadi pelayan perlindungan minyak global.

Sudah merasa cukupkah para korporatokrat dengan 4 unsur yang bergabung bersama, yaitu korporasi besar, pemerintah, bank-bank besar, dan militer? Ternyata 4 unsur korporatokrasi ini sangat memerlukan bantuan media massa. Mari kita lihat bersama.

5. Media Massa

Dalam teori demokrasi, media massa, baik cetak maupun elektronik, yang meliputi harian, mingguan, majalah, *newsletter*, televisi dan radio, merupakan “wilayah demokrasi” (*democratic estate*) keempat, di samping 3 “wilayah demokrasi” lainnya, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Bisa juga dikatakan, media massa pada dasarnya telah menjadi pilar demokrasi keempat di samping tiga pilar demokrasi lainnya.

Ketika Montesquieu (1689-1755) meluncurkan teori Trias Politika yang membagi kekuasaan menjadi tiga lembaga, eksekutif, legislatif dan judisial secara terpisah, ia tidak memasukkan media massa sebagai kekuatan demokrasi. Media massa dinilai sebagai pilar atau “wilayah demokrasi” keempat oleh Edmund Burke (1729-1797) ketika ia mengatakan sambil menunjuk galeri pers di gedung *House of Commons*: “Di sana duduk wilayah keempat, dan mereka

³⁸ Kevin Phillips, *America Petrocracy, The American Conservative*, 17 Juli 2006.

lebih penting dibandingkan semuanya.” (*yonder sits the Fourth Estate, and they are more important than them all*).³⁹

Pada masa itu kekuatan politik di Inggris terbagi menjadi 3 komponen, yakni kaum bangsawan, gereja, dan rakyat biasa (*Lord, Church, and Commons*). Thomas Carlyle (1795-1881) ikut mempopulerkan istilah *the fourth estate* itu. Dalam kenyataan memang seringkali pers atau media massa pada umumnya, sangat menentukan dalam memelihara kehidupan demokrasi. Pers dan media massa dapat dijadikan andalan untuk membela kepentingan publik tatkala eksekutif, legislatif dan yudikatif tidak lagi saling melakukan *checks and balances*. Terlebih lagi bila ketiga pilar demokrasi itu telah terjebak dalam kepentingan picik sehingga kehilangan gairah dan komitmen untuk menjadi pembela kepentingan rakyat banyak.

Namun sayang sekali teori muluk dan ideal tentang peran media massa sebagai pilar keempat demokrasi semakin mengalami erosi. Akhirnya di Amerika sendiri, media massa utama yang membentuk publik opini telah menjadi alat kepentingan korporasi. Pada 1988 Noam Chomsky dan Edward Herman menerbitkan buku tebal berjudul *Manufacturing Consent*.⁴⁰ Hampir 20 tahun lalu Chomsky sudah mengingatkan bahwa media massa pada dasarnya menyuarakan kepentingan korporasi besar atau para pemilik modal, sehingga isi pokok media massa di Amerika sejatinya adalah propaganda untuk melindungi kepentingan korporasi. Chomsky menggunakan istilah “propaganda” tentu bukan tanpa alasan kuat.

Ada 4 filter yang menyebabkan suara sebagian media massa di Amerika menjadi lebih kurang seragam dalam menyuarakan

³⁹ *Fourth Estate*, Wikipedia, the free encyclopedia, <http://en.wikipedia.org/wiki/Fourth-estate>

⁴⁰ Edward S. Herman dan Noam Chomsky, *Manufacturing Consent: The Political and Economy of Mass Media* (New York: Pantheon Books, 1988).

kepentingan modal atau kepentingan korporatokrat. Pertama, filter yang berupa ukuran, kepemilikan dan orientasi profit media massa. Karena sebagian besar pembiayaan media massa dipegang oleh korporasi besar, mudah dimengerti bila penampilan, tingkah laku, penataan *headlines*, pembuatan tajuk rencana, sampai pemasangan iklan media massa pada hakekatnya diarahkan dan ditentukan oleh kepentingan korporasi.

Kebanyakan masyarakat tidak tahu atau lupa bahwa 4 stasiun televisi raksasa di Amerika, yang berpengaruh dalam meletakkan arah pemberitaan ternyata dimiliki oleh korporasi besar non-media. NBC, ABC, CBS, dan CNN, masing-masing dimiliki oleh General Electric, Walt Disney Company, Viacom Inc., dan AOL-Time Warner. Sedangkan pimpinan 3 koran raksasa Amerika duduk dalam pimpinan berbagai korporasi besar. Unsur-unsur pimpinan *New York Times* duduk di Carlyle Group, Eli Lilly, Ford, Johnson and Johnson, Hallmark dan sebagainya. *Washington Post* di Lockheed Martin, Coca-Cola, Don & Bradstreet, Gillette, dan sebagainya. *The Tribune* (Chicago dan LA Times) ikut duduk di 3M, Allstate, Caterpillar, Conoco Phillips, Kraft, Mc Donalds, Pepsi, dan sebagainya.

Bukan saja kebijakan pemberitaan media massa harus sejajar dengan kepentingan korporasi yang mendanainya, para wartawan dan koresponden dari berbagai media massa harus tahu bahwa perusahaan mereka bernaung di bawah korporasi tertentu. Dengan kata lain para redaksi, wartawan dan koresponden sudah harus tahu bagaimana cara melakukan *self-censorship* agar tetap *survive* dan tidak bertabrakan dengan kepentingan korporasi.

Rupanya untuk menyampaikan kebenaran seperti apa adanya bukan perkara mudah di Amerika Serikat, negeri yang sering dianggap sebagai negara demokrasi dengan jaminan kebebasan pers yang tinggi. Beberapa pemenang hadiah Pulitzer atau Emmys

bahkan dipecat karena berani menulis laporan yang membuka “aib” perusahaan-perusahaan besar. Jane Akre, seorang wartawan kawakan yang sudah bekerja selama 20 tahun sebagai koresponden TV, ketika bekerja di Fox News, dipecat karena terus mendesak agar laporannya mengenai Monsanto⁴¹ yang membahayakan kesehatan masyarakat dapat ditayangkan.

Manajer umum Fox News, Dave Boylan, mengatakan berita tentang Monsanto itu berbahaya untuk ditayangkan. Boylan mengingatkan Fox News dibangun dengan biaya 3 milyar dolar berkat bantuan berbagai korporasi. Berita itu dapat menyinggung para korporatokrat. Boylan mengatakan:

“Kami akan beritahu anda apa yang dinamakan berita. Berita adalah apa yang kami katakan kepada anda sebagai berita.” (*We'll tell you what the news is. The news is what we say it is*).⁴²

Setelah Jane dan suaminya, Steve Wilson, yang juga bekerja untuk Fox News, menolak gaji setahun penuh dan uang tambahan sebesar 200 ribu dolar asalkan mau dipindah ke bagian konsultasi, keduanya akhirnya dipecat. Ada sekitar 20 wartawan terkemuka yang mengalami nasib sulit seperti Jane dan suaminya, seperti Dan Rather, Michael Levine, Greg Palast dan sebagainya.

Kejadian di atas hanyalah sekeping contoh bagaimana media massa begitu tunduk di bawah kendali dan pengarahan korporasi. Secara demikian sangat jelas bahwa ukuran (besar atau kecil), kepemilikan dan orientasi profit korporasi telah mendikte isi dan arah pemberitaan media massa. Inilah sebabnya, antara lain, me-

⁴¹ Monsanto adalah perusahaan multinasional di bidang bioteknologi pertanian yang memiliki 16 ribu karyawan di seluruh dunia dengan penghasilan tahunan sekitar 7,5 milyar dolar seperti dilaporkan tahun 2006. Sebagian produksi makanannya berbahaya, dinamakan *frankenfood*. Ingat *Frankenstein*, makhluk destruktif ciptaan Dr. Frankenstein dalam film khayalan.

⁴² <http://www.wanttoknow.info/massmedia>

ngapa Chomsky mengatakan media telah menjadi alat propaganda dari kepentingan korporasi.

Filter kedua adalah kekuatan korporasi yang menentukan “memasang atau tidak memasang iklan”. Tangan pemasang iklan lebih kuat dari tekanan pemerintah atau pajak pemerintah dalam mengarahkan berita media massa. Sebabnya jelas. Tidak ada koran dapat hidup tanpa iklan yang memadai. Bukan saja di negara kapitalis seperti Amerika, di Indonesia keadaan mirip juga kita jumpai. Saya pernah diberitahu sebuah koran lokal yang terpaksa *mem-blacked-out* peristiwa pembantu rumah tangga yang disiksa berat oleh majikannya di daerah koran tersebut.

Alasannya, ada ancaman dari komunitas tertentu untuk tidak lagi memasang iklan di koran tersebut bila sang redaksi berani memuat peristiwa penyiksaan pramuwisma itu. Contoh kecil ini dapat menggambarkan betapa koran-koran besar di negara-negara demokrasi Barat tidak mungkin diharapkan mengkoreksi kebijakan korporat yang sesungguhnya menghancurkan kepentingan masyarakat. Takut iklan merosot dan profit koran tinggal menjadi kenangan.

Filter ketiga yang dapat menjamin bahwa berita media massa tidak akan terlalu jauh meninggalkan batas kelayakan, kepantasan dan “keamanan” di pihak penguasa ekonomi dan politik adalah sumber-sumber berita itu sendiri. Karena tidak mungkin sebuah media dapat menyebar wartawan dan korespondennya ke seluruh penjuru negeri dan penjuru dunia, maka berita dari pusat-pusat kekuasaan dan pusat-pusat korporasi menjadi sangat menentukan.

Sebuah media dituntut untuk sepanjang waktu mengalirkan informasi tanpa henti ke tengah publik. Pusat-pusat berita seperti Gedung Putih, Pentagon (Departemen Pertahanan), Departemen Luar Negeri, Markas Besar Kepolisian, dan sebagainya menjadi sangat penting, apalagi konferensi pers secara berkala di-

selenggarakan di pusat-pusat kekuatan itu. Di samping itu kelompok-kelompok korporat dan bisnis juga selalu membuat berita lewat berbagai jalan yang tidak pernah gagal ditangkap oleh media.

Pada tahapan terakhir akan kelihatan bagaimana media sebagai sebuah birokrasi mau tidak mau membutuhkan birokrasi pemerintah, birokrasi kekuasaan dan berbagai birokrasi lainnya. Di sinilah kebenaran prinsip afinitas birokrasi yang dikatakan Mark Fishman:

hanya birokrasi-birokrasi lain yang dapat memenuhi kebutuhan input sebuah birokrasi pemberitaan (*only other bureaucracies can satisfy the input needs of a news bureaucracy*).⁴³

Oleh karena itu ada kecenderungan bagi seluruh media massa untuk ikut memublikasikan pandangan, arahan dan bahkan esensi pemberitaan sesuai apa yang disampaikan oleh para jubar berbagai birokrasi itu. Tidak dapat dibayangkan bila sebuah koran harus melakukan kajian dan pendalaman seluruh berita penting. Filter ketiga di atas pada dasarnya melakukan proses seleksi berita secara sangat menentukan.

Masih berkaitan dengan filter ketiga ini, Herman dan Chomsky mencatat bagaimana organisasi-organisasi nirlaba tidak mungkin menandingi berita-berita yang diedarkan oleh pusat-pusat kekuasaan. Sebagai contoh, pada 1971 Pentagon menerbitkan 371 majalah dengan biaya 57 juta dolar per tahun, mengungguli penerbit terbesar di Amerika. Pada 1982, Pentagon menerbitkan 1203 jurnal dan periodikal (majalah). Bandingkan hal ini dengan dua organisasi nirlaba terbesar yang konsisten menantang suara dan pandangan Pentagon, yaitu AFSC (American Friends Ser-

⁴³ Edward S. Herman dan Noam Chomsky, *op.cit.*, pp. 18-19.

vice Committee) dan NCC (*National Council of the Churches of Christ*).

Anggaran kantor pusat AFSC 1984-1985 hanya setengah juta dolar dengan staf sebanyak sebelas orang, duaratus *press release*, tigapuluh konferensi pers, dan membuat satu atau dua film, dua atau tiga *slide* per tahun. Anggaran NCC per tahun berkisar 350 ribu dolar dengan seratusan *press release* dan empat kali konferensi pers. Rasio perbandingan *press release* dan konferensi pers antara angkatan udara dan AFSC beserta NCC adalah 150:1 (antara 2200:1, bila *news release* dari berbagai kota-kota yang dilakukan oleh angkatan udara termasuk dalam hitungan. Tidak sulit membayangkan mengapa opini publik di Amerika sangat diwarnai oleh opini pusat-pusat kekuasaan.⁴⁴

Filter keempat adalah *flak* yang diarahkan kepada media oleh pusat-pusat kekuasaan politik dan ekonomi. *Flak* adalah berondongan kritik dan ancaman yang menghambisi nyali media massa. Telepon dari Pentagon atau Gedung Putih pada wartawan dan redaksi yang dianggap membangkang atau kampanye anti media pembangkang oleh berbagai lembaga seperti Freedom House adalah bentuk-bentuk *flak* yang cukup efektif.

Teori muluk tentang pers bebas yang melakukan penyeimbang terhadap eksekutif, juga terhadap legislatif dan yudikatif dalam kenyataan tetap tinggal teori atau bahkan ilusi. Yang terjadi adalah kontrol atas media massa yang begitu ketat sehingga pada hakekatnya media telah menjadi sebuah orkestra besar yang menghadirkan senandung kepentingan korporat.⁴⁵

David Swanson mengatakan di samping memproduksi senjata, kompleks militer-industrial juga memproduksi banyak kebohongan

⁴⁴ *Ibid*, pp. 20-21.

⁴⁵ Mengenai kontrol atas media ini, Noam Chomsky melukiskan dalam *Media Control: the Spectacular Achievement of Propaganda* (New York: Seven Stories Press, 2002).

publik. Kebohongan tentang WMD (senjata pembunuh massal) yang dimiliki Iraq di bawah Saddam Hussein ataupun keterkaitan antara Saddam dan Osama bin Laden adalah bentuk-bentuk kebohongan yang dapat meyakinkan publik Amerika menjelang invansi dan agresi Amerika ke Iraq 2001.

Kebohongan-kebohongan lain yang diungkap oleh Swanson adalah misalnya: bersikap garang dan lapar perang lebih bagus untuk memelihara keselamatan Amerika; seluruh perang Amerika adalah dalam rangka pertahanan; perang yang dijalankan sesungguhnya untuk menghilangkan ancaman internasional terhadap perdamaian; sejatinya Amerika berperang karena terpaksa; menghindari perang menunjukkan kelemahan dan sebagainya.⁴⁶ Berbagai kebohongan itu dapat menancap di pikiran publik tentu karena pemberitaan media massa.

Dengan demikian mudah dimengerti bahwa kompleks militer-industrial yang hakekatnya bermotif tunggal berupa profit (keuntungan), tidak mungkin mencapai sasarannya tanpa peran yang dimainkan oleh media massa. Kenyataan ini telah melahirkan istilah MIMC (*Military Industrial Media Complex*). Lewat MIMC ini industri perang memperoleh sokongan dari publik atau rakyat Amerika, berhubung pikiran rakyat Amerika berhasil digarap dengan baik oleh media massa utama Amerika. Media massa kemudian menjadi semacam mesin pembuat uang yang sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan modal, kekuatan politik dan kekuatan militer yang jauh lebih kuat dari media massa. Lagi-lagi teori *the fourth estate* tidak cocok dengan realitas yang ada.

Bila kita ingat bahwa terdapat saling ketergantungan dan saling sokong antara kekuatan korporat dengan kaum militer, kongres dan pihak media, tidak mudah kiranya memukul jaringan *military industrial congressional media complex* itu. Kompleks dalam arti jaringan

⁴⁶ <http://freepress.org/departments/display/20/2006/2085>

birokratik maupun mental itu demikian mendalam sehingga mereka yang berusaha melemahkan jaringan itu biasanya berakhir dengan kegagalan. Para calon presiden Amerika dari waktu ke waktu, baik dari Republik maupun Demokrat, cenderung menyesuaikan diri dengan kompleks tersebut, karena lebih mudah dan lebih efektif untuk menuju ke Gedung Putih.

Dalam pada itu ada perkembangan yang semakin mengkhawatirkan dalam dunia media informasi. Ketika media massa tradisional, baik cetak maupun elektronik sudah berjatuh ke tangan para pemilik modal atau ke wilayah kekuasaan korporasi, banyak orang mengharapkan dipertahankannya netralitas dan independensi Internet. "*The Internet is really a great bastion of democracy*".⁴⁷ Demikian kata Elliot Cohen, yang mengatakan Internet adalah benteng besar bagi demokrasi. Namun benteng besar demokrasi itu kini mulai diguncang-guncang dan tidak mustahil akan bernasib seperti media massa konvensional.

Bila internet sampai dikuasai oleh kekuatan korporasi, benteng besar dan terakhir demokrasi itu bisa sirna dan mungkin benar apa yang dikhawatirkan Cohen, kita sedang melihat hari-hari akhir demokrasi, seperti judul buku Cohen, *The Last Days of Democracy*. Cara menguasai Internet adalah dengan menjadikannya bukan lagi sebagai sistem telekomunikasi, tetapi sebagai sistem informasi. Jadi tidak berbeda dengan CNN atau jaringan Fox News. Secara demikian dilukiskan bila beberapa korporasi besar dapat menguasai saluran Internet, maka mereka otomatis dapat menguasai isi saluran-saluran Internet. Kata Cohen: *And if they can control the conduit, they can control the content of the Internet pipes*.⁴⁸ Tentu ini sebuah bencana demokrasi.

⁴⁷ Elliot Cohen, [http://www.truthdig.com/interview/print/20070802 last days of democracy](http://www.truthdig.com/interview/print/20070802%20last%20days%20of%20democracy)

⁴⁸ *Ibid*.

Sementara itu, setelah invansi Amerika ke Iraq tahun 2003 muncul sebuah istilah yang kini makin populer, yaitu *embedded journalist*. Istilah baru itu berarti seorang wartawan yang disenyawakan dengan sebuah satuan militer dan mengikuti jalannya pertempuran langsung di medan pertempuran. Di permukaan selintas nampak bahwa pihak militer membuka diri pada media. Tetapi sejatinya para wartawan itu mendapat pengarahan langsung dari para komandan militer itu tentang apa yang bisa dan tidak bisa diberitakan.

Pada awal perang Iraq di tahun 2003 sebanyak 775 wartawan dan wartawan foto ditempelkan pada satuan-satuan militer Amerika. Mereka menandatangani kontrak dengan pihak militer tentang apa saja yang boleh diberitakan. Ketika ditanya mengapa pihak militer melakukan seleksi dan persyaratan khusus dengan para *embedded journalist*, seorang Let.Kol Angkatan Laut Amerika Serikat menjawab:

“Terus terang tugas kita adalah memenangkan perang. Bagian dari kemenangan itu adalah peperangan informasi. Jadi kami mencoba mendominasi lingkungan informasi”
(*Frankly, our job is to win the war. Part of that is information warfare. So we are going to attempt to dominate the information environment*).⁴⁹

Bagaimana ketatnya saringan berita oleh pihak militer untuk menutupi apa yang sebenarnya terjadi di medan pertempuran diceritakan oleh wartawan BBC lewat *Phil Taylor's Web Site*. Seluruh wartawan yang secara resmi tidak memiliki keterangan bahwa mereka telah *embedded* tidak boleh mendekati media pertempuran. Mereka hanya tinggal di kamar hotel mengikuti perang dari kaca televisi. Dengan cara ini kekejaman dan kebiadaban serdadu-serdadu Amerika tidak pernah dimunculkan. Peti-peti mayat

⁴⁹ *Embedded Journalist*, *Wikipedia*, the free encyclopedia.

serdadu Amerika yang setiap hari dibawa ke pangkalan militer tidak boleh ditayangkan dan lain sebagainya. Dengan demikian yang kita peroleh adalah distorsi informasi, disinformasi dan segala macam manipulasi berita yang tidak layak dilakukan oleh masyarakat beradab. Saya pernah menulis di sebuah majalah bahwa demokrasi Amerika sudah mencapai titik nadir dan sulit dibayangkan dapat kembali naik ke atas. Memperbaiki demokrasi yang sudah rusak total barangkali merupakan sebuah ilusi.

Mengenai peran media informasi di dalam sistem demokrasi ada sebuah pengandaian yang cukup menarik. Media massa bisa berperan sebagai *watch dog*, bisa sebagai *guard dog* dan bisa menjadi semacam *lap dog*. Sebagai *watch dog* (anjing pengawas), media massa menjadi musuh berat buat pemerintah dan korporasi-korporasi besar dan sekaligus berpihak pada masyarakat, khususnya bagi mereka yang tuna kuasa dan yang tidak terorganisasi secara baik. Dus, membela masyarakat lemah. Dalam model pertama ini para jurnalis memandang dirinya sebagai pembela kebenaran dan keadilan. Mereka tidak sudi menyuarakan kepentingan para politisi dan para eksekutif puncak.⁵⁰

Model kedua adalah sebagai *guard dog* (anjing penjaga). Dalam model kedua ini media massa dan para jurnalis mendukung lembaga-lembaga politik yang dominan, kelompok-kelompok ekonomi penting dan nilai-nilai yang diterima masyarakat luas. Akan tetapi media massa dapat melancarkan kritik terhadap lembaga-lembaga itu, terutama tatkala sebagian elit dari kelompok-kelompok itu melanggar sistem nilai yang berlaku. Hanya saja para jurnalis tetap mendukung struktur kekuasaan yang ada, walaupun melontarkan kritik terhadap kaum elitnya.

⁵⁰ http://www.12manage.com/description_watchdog-model.html

Berhubung dalam model ini komitmen para jurnalis dan media informasi adalah untuk melestarikan struktur politik dan ekonomi yang sudah ada maka hekekatnya mereka mendukung *statusquo* dan kemapanan. Dengan demikian kritik dan kecaman yang dilontarkan hanya menyangkut perorangan dan kadangkala mengenai kelemahan-kelemahan beberapa institusi, tetapi keterikatan mereka untuk menjaga kelangsungan struktur politik dan ekonomi yang ada adalah cukup kuat.⁵¹

Model ketiga adalah sebagai *lap dog* (anjing pangkuan). *Lapdog* adalah anjing kecil nan jinak yang suka dielus-elus oleh pemiliknya di pangkuannya dan tidak berbahaya sama sekali asalkan tetap diberi makan dan minum. Dalam model ketiga ini media massa memproduksi berita-berita untuk melayani kepentingan elit politik dan elit ekonomi dan membiarkan kaum miskin dan yang sengsara berada tetap di pinggiran.⁵² Sulit dibayangkan media massa yang mengambil posisi sebagai *lap dog* memiliki nyali untuk memberitakan hal-hal yang dapat merugikan para korporatokrat.

Sayang sekali pada umumnya media massa, para redaksi, para wartawan dan reporter, bahkan para kolumnis di media informasi utama telah mengambil posisi sebagai *lap dog*. George Orwell pernah menggambarkan bahwa anjing sirkus melompat ketika pelatuhnya mengayunkan cambuk. Tetapi anjing yang sudah benar-benar terlatih dengan baik adalah anjing yang dapat melakukan gerakan-gerakan salto, tanpa cambuk sama sekali. (*Circus dogs jump when the trainer cracks the whip, but the really well-trained dog is the one that turns somersaults when there is no whip*).⁵³

⁵¹ <http://www.12manage.com/description-tichenor-guard-dog-theory.html>

⁵² <http://www.12manage.com/description-lap-dog-theory.html>

⁵³ Alan Maass, *Socialist Worker* Online, 12 Februari 2002.

Bila media massa, para pemimpin redaksi dan wartawan sudah tidak berani lagi menyuarakan kebenaran dan hanya sekedar memikirkan untung dan menjadi orang baik-baik saja tanpa spirit perlawanan, demokrasi mengalami musibah besar. Mereka bukan lagi menjadi *watch dog*, tetapi terus merosot menjadi sekedar *guard dog*, lantas *lap dog*, kemudian menjadi *circus dog* dan akhirnya lebih parah lagi, menjadi *subservient and stupid dog* yang akan melakukan apa saja untuk menyenangkan tuannya.

Lima elemen korporatokrasi di atas ternyata masih membutuhkan satu elemen lagi agar pencapaian kepentingannya diperoleh dengan lebih lancar, yaitu kaum intelektual yang bersedia dikooptasi. Dikooptasi berarti ditarik dan diberi iming-iming serta imbalan dengan syarat bersedia menjadi alat, juru bicara atau pembenar bagi kepentingan elit politik, ekonomi, dan militer. Dengan kata lain, mereka adalah intelektual bayaran.

6. Intelektual Pengabdian Kekuasaan

Seorang intelektual adalah seorang yang memiliki pengetahuan umum secara memadai sehingga mampu menangkap fenomena yang tengah berlangsung di tengah masyarakat, bangsa dan negaranya dan memiliki komitmen untuk membela kepentingan bangsanya serta sanggup menanggung resiko dalam perjuangan mengemukakan keadilan dan kebenaran. Dengan demikian kaum intelektual memegang peran menentukan dalam setiap perubahan sosial, bahkan revolusi, yang terjadi di negara mereka.

Kemampuan yang dimiliki oleh kaum intelektual yang tidak dimiliki oleh kelompok masyarakat lainnya adalah kemampuan untuk melahirkan ide atau gagasan segar yang menjadi tenaga pendorong perubahan sosial. Ada ungkapan asing yang menga-

takan bahwa “*ideas are the moving forces of history*” (gagasan adalah tenaga penggerak dalam sejarah). Namun ada kalanya gagasan yang dijual oleh seorang intelektual atau kelompok intelektual justru melahirkan tragedi sejarah.

Adolf Hitler dan komplotannya melakukan pemusnahan jutaan orang Yahudi di Jerman dalam tragedi *holocaust*, pada dasarnya dipengaruhi oleh gagasan Joseph Arthur Comte de Gobineau. Gagasan Gobineau antara lain adalah bahwa setiap ras melahirkan budayanya masing-masing. Namun, begitu sebuah ras bercampur dengan ras lain, kekacauan (*chaos*) akan lahir. Ras kulit putih adalah ras unggul, terutama yang tergolong ras Arya atau ras Indo-Iran. Karena itu, ras penyusup harus dibersihkan. Ideologi rasialis yang dipinjam oleh Nazisme telah memunculkan *holocaust*, sebuah tragedi kemanusiaan paling buruk sepanjang abad 20. Gobineau adalah intelektual yang kehilangan nurani.

Sebaliknya, Ali Shariati adalah contoh intelektual yang mendekati gambaran sosok intelektual sejati. Ia mampu menggabungkan nilai-nilai kitab suci Al-Qur'an dengan pandangan sosiologi dan theologi modern. Ia berpikir keras, berceramah dan menulis di berbagai fora tentang bagaimana membebaskan kemanusiaan, terutama di Dunia Ketiga, dari eksploitasi, imperialisme dan berbagai penyakit; bagaimana membebaskan masyarakat dari cengkeraman konsumerisme dan tekanan keterasingan; dan bagaimana mendekatkan manusia ke Sang Maha Pencipta untuk menyejahterakan kehidupannya serta membangun dunia berdasarkan keadilan, perdamaian dan kesetaraan.⁵⁴

Shariati dianggap banyak kalangan sebagai salah satu tokoh spiritual revolusi Iran 1979. Tentu tokoh puncaknya adalah Aya-

⁵⁴ Ali Shariati, a brief biography, <http://www.geocities.com/CapitolHill/Lobby/2554/Shariati.html>

tollah Khomeini. Pada dasarnya revolusi Islam Iran itu diilhami dan digerakkan oleh para ulama dan intelektual.

Amerika Serikat di abad 20 juga melahirkan banyak intelektual dari berbagai disiplin ilmu. Mereka itu antara lain adalah C. Wright Mills yang sebagian pendapatnya telah diuraikan di atas, seperti halnya para pemikir yang mengkritisi proses globalisasi sebagai kepanjangan proses imperialisme dengan bentuk lain. Ada juga tokoh-tokoh intelektual *theologi*, terutama Paul Tillich dan Reinhold Niebuhr.

Paul Tillich (1886 -1965) adalah intelektual, *theolog* dan sekaligus filsuf. Sangat tidak fair kalau kita hanya menukil satu-dua butir pemikirannya yang sangat luas dan penuh makna bagi kemanusiaan, hanya dalam satu-dua paragraf. Lahir dan dewasa di Jerman, Tillich diusir pemerintah Nazi karena menentang Nazisme dan pindah ke Amerika pada 1940. Atas permintaan Reinhold Niebuhr, Tillich mengajar di Universitas Theology Seminary, New York, Amerika Serikat.

Istilah yang sangat terkenal dari Tillich adalah bahwa agama merupakan *ultimate concern* bagi manusia. Mungkin karena tidak mau bermain-main dengan agama, Tillich tidak mendukung kapitalisme yang berwatak eksploitatif. Ia bukan saja berpendirian bahwa seorang Kristiani yang bermoral menuntut kebijakan-kebijakan sosialis, namun juga meyakini bahwa pemikiran Kristiani dan pemikiran sosialis memiliki akar dan fondasi yang sama.⁵⁵

Reinhold Niebuhr (1892-1971), seorang *teolog* Kristiani yang juga seorang intelektual publik, juga memiliki pendirian politik yang tegas. Ia bahkan termasuk dalam daftar FBI sebagai tokoh yang harus dicurigai dan berpendapat bahwa pesan-pesan Kristiani harus ditafsirkan sebagai tanggung jawab sosial. Ia menolak

⁵⁵ <http://en.Wikipedia.org/wiki/Paul-Tillich>

pendapat sementara tokoh Partai Republik bahwa Amerika Serikat adalah *a new divinely chosen nation*, sebuah bangsa pilihan yang baru. Yang perlu disadari adalah, menurut Reinhold Neibuhr, bahwa dengan kekayaan dan kekuatannya, Amerika harus mengupayakan terselenggaranya perdamaian dan keadilan sosial di bagian-bagian dunia di mana Amerika memiliki pengaruh.⁵⁶

Salah satu ciri yang sama di antara para intelektual itu adalah bahwa mereka bisa keluar dari kungkungan masyarakat serta negaranya, memiliki pandangan kemanusiaan universal, tidak segan-segan untuk membedah kebusukan kekuasaan politik dan ekonomi negara mereka sendiri. Mungkin dapat dikatakan kaum intelektual pada dasarnya mewarisi tradisi kenabian.

Tentu, karena dilengkapi dengan wahyu, nabi atau rasul adalah intelektual sempurna. Al-Qur'an mengatakan: "Dialah (Allah) yang membangkitkan di antara massa (*ummiyyin*) seorang rasul dari mereka sendiri, ia bacakan ayat-ayatNya untuk mereka, ia sucikan mereka, ia ajarkan Kitab dan Kearifan, sekalipun mereka itu sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata" (Qur'an 62:02). Memang tidak ada intelektual yang hidup jauh dari masyarakatnya, tinggal di istana gading, berteori, berkeluh kesah apalagi menyodorkan gagasan yang justru merusak kepentingan masyarakat banyak.

Bila kita buat kategorisasi kaum intelektual, paling tidak ada 3 kelompok yang satu sama lain berbeda tajam. Kelompok pertama adalah para intelektual yang mengabdikan pada kebenaran, keadilan dan kemanusiaan universal. Mereka bisa berasal dari berbagai kalangan atau lingkaran: universitas, komunitas agama, penggiat LSM, wartawan, budayawan, seniman, dan ilmuwan yang

⁵⁶ <http://speakingoffaith.publicradio.org/programs/neihbuhr-rediscovered/educated-union-shunt.html>

menggeluti disiplin ilmu tertentu, bahkan kadangkala dari lingkungan militer. Singkat kata, mereka yang berusaha mengikuti jejak kenabian.

Kelompok kedua adalah mereka yang menentang perubahan. Mereka memilih mendukung kemapanan. Barangkali kategori kedua ini dapat disebut sebagai *establishmentarians*. Bagi intelektual dari kelompok ini, lebih aman dan enak mendukung *status quo*, karena tidak akan menimbulkan resiko. Dengan kata lain mereka adalah *safety players*, cenderung bermain aman, tidak akan pernah menjadi *risk-taker*, pengambil resiko. Oleh sebab itu tidak mungkin diharapkan akan muncul perubahan sosial, apalagi revolusi dari kaum intelektual kategori kedua ini.

Kategori ketiga adalah intelektual “netral”, intelektual yang atas nama obyektivitas ilmu tidak pernah tertarik untuk melakukan pemihakan. Baik pemihakan pada *status quo* atau pun pemihakan pada perubahan sosial (*social change*) dalam arti luas. Akan tetapi kebanyakan intelektual dari kategori ini selalu menunggu arah angin, menunggu pemenang yang muncul jika sampai terjadi perubahan sosial. Mereka enggan bekerja dan berpeluh, tetapi paling cepat menuju barisan depan ketika sebuah perubahan, baik yang bersifat reformatif maupun revolusioner telah usai. Pepatah Arab mengatakan *idza maalat ar-riehu maala haitsu tamiel* (Mereka condong bergerak menyesuaikan arah angin).

Kadangkala intelektual jenis terakhir ini menamakan dirinya sebagai intelektual pasifis, intelektual cinta damai. Kejahatan dan kezaliman tidak perlu dilawan atau ditentang, karena pasifisme mengajarkan kedamaian, bahkan terhadap sebuah kejahatan. Dengan berpangku tangan dan diam seribu bahasa melihat kejahatan atau kezaliman pada hakekatnya mereka telah menjadi sangat *immoral*. Bagi kaum intelektual pasifis immoralitas seperti ini tidak menjadi soal yang terlalu serius. Pada hal “sikap moral

seperti ini mungkin tanpa disadari, membunuh orang lain, membunuh orang banyak, membunuh saudara dan bahkan akhirnya membunuh diri sendiri”. (*The moral stance of the Pacifist is, unwittingly perhaps, homicidal, genocidal, fratricidal, suicidal*).⁵⁷

Di Barat maupun di Timur, universitas diharapkan menjadi tempat menyemai manusia-manusia terdidik dan sebagian dari mereka didambakan menjadi intelektual. Akan tetapi dalam 20-30 tahun belakangan ini, universitas dijadikan sasaran oleh kekuatan korporat agar menghasilkan sebanyak mungkin manusia terdidik dan intelektual dalam berbagai kaliber yang menghamba dan melayani kepentingan korporasi. Sekedar mengingatkan, kepentingan pertama dan terakhir korporasi adalah memperoleh keuntungan maksimal dengan segala cara yang mungkin.

Universitas bertugas melayani kepentingan luas publik dengan jalan mengembangkan ilmu pengetahuan, melakukan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi ke para mahasiswa, membuat berbagai analisa tentang aneka persoalan, melakukan riset-riset strategis dan sekaligus menjalankan pengabdian masyarakat. Semua itu dilakukan dengan memegang teguh standar integritas moral dan intelektual. Bila aktivitas universitas di atas dijalankan dengan sungguh-sungguh tidak jarang universitas akhirnya bertabrakan dengan kekuasaan yang punya kepentingan untuk mengawetkan *status quo*. Sepanjang sejarah terbukti para akademisi dan intelektual yang memegang teguh misi mereka harus bertentangan dengan kekuasaan politik dan sektor korporat. Dengan kata lain, kaum intelektual seringkali harus berseberangan dengan penguasa yang menjadi “kacung” kekuatan korporasi-korporasi besar.

⁵⁷ *Pacifism: The Ultimate Immorality*, <http://www.freerepublic.com/focus/f-news/1671688/posts>

Intervensi dan keterlibatan korporasi ke dalam tubuh universitas dewasa ini berjalan makin jauh, terutama setelah banyak universitas mengalami himpitan finansial. Kenyataan ini membawa korporasi seolah sebagai dewa penolong, karena kebutuhan besar keuangan universitas dapat ditambal oleh beberapa korporasi. Hal-hal yang dulu dianggap tabu dilakukan oleh universitas, karena himpitan finansial tersebut, kini sering dilakukan, yakni meminta bantuan keuangan dari pihak korporasi. Berbagai riset dilakukan oleh universitas semata-mata untuk tujuan korporat. Tidak ada lagi donasi yang diberikan kepada universitas yang tanpa ikatan. Dewasa ini pihak donor mengharap imbalan balik, walaupun untuk itu harus menenggelamkan kaidah-kaidah ilmiah. Dengan kata lain, konsep filantropi bagi universitas sudah tidak dikenal lagi.⁵⁸

Seringkali donasi korporasi untuk universitas bersifat rahasia. Donasi rahasia itu akhirnya terkuak misalnya yang menyangkut Universitas Toronto, Kanada. Universitas Toronto memperoleh donasi rahasia itu dari Joseph Rutman Foundation, CEO Peter Munk dari Barrich Gold dan juga dari Horsham dan Nortel Institute for Telecommunications yang meliputi puluhan juta dolar. Tentu, ini yang sempat terkuak keluar. Berbagai donasi rahasia itu menyebabkan pengaruh berbagai korporasi menjadi terlalu besar bagi arah perjalanan akademis banyak program di Universitas Toronto.⁵⁹ Ada kemungkinan kasus Universitas Toronto itu hanyalah puncak gunung es yang terlihat oleh publik.

Bahwa intelektual dan akademisi kampus dapat “keblinger” ternyata bukan sesuatu yang luar biasa. Pernah ada sebuah panel dari para ahli yang membuat rekomendasi agar komersialisasi dijadikan misi keempat universitas. Di samping 3 misi universi-

⁵⁸ Anatomy of Corporate Takeover, http://www.Unesco.org/courier/2001_11/uk/dossll.htm

⁵⁹ *Ibid.*

tas yang sudah terkenal selama ini, yaitu riset, transfer pengetahuan dan pengabdian masyarakat, komersialisasi dapat dijadikan sebagai misi keempat. Bisa dibayangkan apabila ilmu pengetahuan harus dikomersialisasikan sesuai selera dan kepentingan korporat, universitas akan segera berhenti sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebebasan dan otonomi akademis akan sirna dan kaum intelektual akan menjadi budak kekuasaan ekonomi dan politik.

Pendapat kaum intelektual tentang kekuasaan, sementara itu, berbeda satu sama lain. Edward Said menganggap kekuasaan selalu membius kaum intelektual. Seorang intelektual harus selalu menjaga jarak agar tidak jatuh terperangkap dalam kekuasaan.⁶⁰ Said mengingatkan agar intelektual selalu bersikap kritis terhadap kekuasaan. Kekuasaan yang berupa kungkungan dogma, kungkungan tradisi, sejarah dan pasungan *status quo*; kekuasaan korporasi besar dan lembaga-lembaga hirarkis seperti kekuasaan militer; dan yang paling penting adalah kekuasaan negara (*the power of the state*).

Bagi Said seorang intelektual adalah seorang yang selalu gelisah, memiliki kefasihan untuk merumuskan gagasan-gagasannya, mempunyai keberanian luar biasa dan selalu “marah” terhadap kekuasaan yang melenceng dari kebenaran. Bagi seorang intelektual tidak ada ketakutan sedikit pun untuk mengkritik secara tegas dan lugas kekuasaan dunia, betapa pun besar dan dahsyatnya. Said berpendapat peran kaum intelektual memang sangat menentukan dan dapat membawa sejarah ke dua arah yang berlawanan. Katanya:

⁶⁰ *Ibid.*

“Tidak ada revolusi besar dalam sejarah modern tanpa kaum intelektual; sebaliknya tidak ada gerakan kontra-revolusioner tanpa kaum intelektual” (*There has been no major revolution in modern history without intellectuals; conversely there has been no counterrevolutionary movement without intellectuals*).⁶¹

Sikap intelektual terhadap kekuasaan memang berlain-lainan. Seperti diuraikan singkat di atas, Edward Said tegas menolak terlibat dalam kekuasaan. Akan tetapi lain dengan Vaclav Havel, intelektual, penulis, dramawan, yang berhasil menjadi presiden Republik Ceko selama 10 tahun (1993-2003). Vaclav Havel yakin bahwa dunia memerlukan politisi sejati yang tercerahkan dan cukup berpandangan luas sehingga mampu melihat masalah-masalah jauh melampaui keperluan masyarakat jangka pendek yang mendesak. Dunia membutuhkan politisi yang mampu berdiri di atas cakrawala kepentingan politik mereka sendiri atau kepentingan partai atau bahkan kepentingan negara dan bertindak sesuai dengan kepentingan kemanusiaan.⁶²

Memang diakui oleh Havel kadangkala bukan saja seorang intelektual lupa pada nilai-nilai keadilan dan kebenaran setelah ia masuk ke dalam lingkaran kekuasaan, ia malah dapat menjadi diktator. Ia bukannya mengabdikan pada kepentingan rakyat, tetapi setelah berkuasa ia menjadi bencana bagi rakyat. Mungkin dengan bahasa lain dapat dikatakan intelektual jenis ini tidak lagi berpikir dan bekerja untuk rakyat, tetapi semata-mata untuk kekuasaan dan kepentingan korporat.

Havel mengatakan kehadiran intelektual harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat: jika tidak sebagai pemegang jabatan

⁶¹ Uraian luas tentang peran intelektual bisa dibaca dalam Edward Said, *Representations of the Intellectuals* (New York: Vintage, 1994).

⁶² <http://www.ahram.org.eg/print/2006/783/bo66.htm>

publik (*office holder*), ia harus memegang cermin (*mirror holder*) dalam arti terus mengamati kegiatan pemegang jabatan publik agar tidak menyelimuti perbuatan durjananya dengan kata-kata yang manis.⁶³ Havel tidak setuju seorang intelektual mengambil sikap netral. Ia harus punya sikap tertentu untuk masalah-masalah strategis yang menentukan nasib bangsanya.

Mungkin pendapat Havel ini agak mirip dengan kata-kata Dante Alighieri bahwa tempat paling gelap di neraka diperuntukkan buat mereka yang terus saja bersikap netral dalam zaman krisis moral. (*The darkest places in the hell are reserved for those who maintain their neutrality in times of moral crisis*). Pujangga Italia abad 14 ini juga berpendapat bahwa tidak mungkin sebuah perkara selesai tanpa diambil tindakan (*The secret of getting things done is to act*).

Saya berpendapat bahwa seorang intelektual akan jauh lebih bermakna bagi masyarakat dan bangsanya bila ia ikut terlibat dalam rangkaian aksi kemanusiaan dalam arti luas. Kalau perlu, berkiprah di dalam politik. Tentu bukan untuk ikut terseret dan terjerembab ke dalam pusaran kepentingan jangka pendek yang nista, tetapi untuk memegang teguh prinsip kebenaran dan keadilan dan menghidangkan permainan politik yang lebih anggun. Supaya politik tidak menjadi *dirty business*, tetapi menjadi *meaningful and useful business*.

Akan tetapi pendapat Havel di atas dikritik tajam oleh Timothy Garton-Ash, sejarawan terkemuka Inggris. Ia mengatakan bahwa mustahil seorang menjadi intelektual dan sekaligus politikus. Menjadi *office holder* dan *mirror holder* pada saat bersamaan tidak dapat berjalan karena kedua jenis posisi itu berbeda.

⁶³ *Intellectual in Politics*, <http://www.prospect-magazine.co.uk/article-details.php?id=3979>

Tugas pokok intelektual di dunia politik adalah memegang tinggi-tinggi cermin yang jernih, kritis dan obyektif di depan para penguasa yang biasanya dilingkari dengan pendukung-pendukung yang “menjilat”. Berbeda dengan intelektual, politisi dan penguasa pada umumnya bukan *to live in truth*, tetapi *to work in half-truth*. Bukan hidup dalam kebenaran, tetapi bekerja dalam setengah kebenaran. Bila kebenaran hanya diambil setengah, tentu setengahnya lagi adalah ketidakbenaran. Garton-Ash mengatakan bahwa Vaclav Havel adalah perkecualian.⁶⁴

Sementara itu hubungan antar kelompok intelektual dengan kekuatan korporat di Amerika dewasa ini memang agak unik. Kelompok intelektual yang tergolong dalam neolib dan neocon bukan semata-mata menjadi *mercenary intellectuals* atau intelektual bayaran bagi kepentingan korporat. Akan tetapi di antara mereka ada yang berhasil masuk ke sel-sel kekuasaan dan dalam banyak hal bisa mendiktekan kemauannya pada pemerintah. Hal ini sangat jelas dalam pemerintahan Bush Jr.

Pamor para intelektual pengabdikan kekuasaan itu kini makin redup. Tokoh-tokoh seperti Paul Wolfowitz, Donald Rumsfeld, Condoleezza Rice, Dick Cheney, Douglas Feith, John Bolton, Bill Kristol, Michael Chertoff, Zalmay Khalilzad, Richard Perle, dan lain-lain, satu demi satu jatuh, mundur dan mulai surut menghilang dari panggung. Condoleezza Rice sendiri dianggap lebih banyak menjual tampang dan melambaikan tangan, sementara tidak ada prestasi penting yang pantas dicatat. Seperti diuraikan sebelumnya, Pax Americana yang mereka dambakan telah berubah menjadi Pox Americana, Pageblug Amerika.

Agaknya dari sudut pandang korporatokratik dapat dikatakan bahwa intelektual penghamba atau pengabdikan kekuasaan boleh

⁶⁴ *Ibid.*

datang dan pergi, boleh jatuh dan bangun, namun kepentingan dan kekuatan korporatokrasi secara umum jalan terus. Akan selalu ada sejumlah intelektual bayaran atau intelektual gadungan yang dapat direkrut di tengah jalan.

7. Elite Nasional Bermental *Inlander*

Gabungan antara kekuatan korporasi besar, kekuatan politik pemerintah, kekuatan perbankan, kekuatan militer, kekuatan media-massa, dan kecanggihan para intelektual penghamba kekuasaan, merupakan kekuatan yang sangat dahsyat untuk menjalankan imperialisme ekonomi terhadap negara-negara berkembang. Sekalipun demikian enam unsur korporatokrasi ini tidak bisa berbuat banyak tanpa adanya elite nasional negara-negara berkembang (dulu diistilahkan sebagai negara-negara Dunia Ketiga) yang bersedia menjadi subordinat dari gabungan enam unsur di atas.

Satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa negara berkembang yang mudah dijadikan sebagai negara komprador, negara subordinat, atau negara pelayan kepentingan kapitalisme internasional adalah negara yang para pemimpinnya masih menderita penjajahan mental. Selama kolonisasi mental itu tetap kuat bercokol di benak suatu bangsa dan para pemimpinnya, selama itu pula sulit diharapkan bangsa tersebut betul-betul dapat memelihara kemerdekaan dan kedaulatannya.

Dengan kata lain, apakah suatu negara berkembang dapat melepaskan diri dari cengkeraman kapitalisme internasional, atau sebaliknya justru menjadi pelayan yang patuh atau taat pada kepentingan korporatokratik, tergantung pada satu pertanyaan. Pertanyaan itu adalah mampukah negara-negara berkembang melawan dan menaklukkan musuh dari dalam, mengusir *the en-*

emy within? Musuh di dalam atau dari dalam tubuh suatu bangsa adalah *psyche* bangsa tersebut yang telah begitu krasan dengan mentalitas terjajah, dengan kompleks inferioritasnya, dengan perasaan rendah diri serta penyakit selalu kalah (*defeatism disease*). Pada gilirannya *psyche* atau kejiwaan seperti itu akan membuahkan kebingungan, *inertia* (kelemahan) dan kehilangan rasa percaya diri.

Saya khawatir berlarut-larutnya Indonesia jatuh atau menjatuhkan diri di bawah bayang-bayang korporatokrasi internasional disebabkan karena para pemimpin kita lebih kurang masih bermental terjajah. Bermental *inlander*.⁶⁵ Sebagian pemimpin kita dan sebagian anak bangsa mengalami semacam proses *brain-washing* bahwa kita bangsa sawo-matang, mustahil dapat mencapai kemajuan, kecuali mengikuti jalan yang ditunjukkan negara-negara maju (Barat). Sebagian intelektual kita ada yang berlagak lebih Amerika dari Amerika dan memandang bangsa sendiri sebagai bangsa kelas dua. Saudara-saudara kita ini sangat memerlukan proses dekolonisasi mental dan kejiwaan.

Di bawah ini kita lihat sebentar para pemimpin Dunia Ketiga (negara-negara berkembang) yang sudah melepaskan diri dari mentalitas terjajah. Dalam bahasa kita, mereka bukan pemimpin *inlander*. Lihatlah “Bung Karno”nya Malaysia, Dr. Mahathir Mohammad. Ketika Malaysia dihantam krisis moneter pada 1997 bersama Korea Selatan, Thailand, Indonesia, dan Filipina, semua negara ini terjun bebas secara moneter. Semua negara menerima uluran bantuan IMF dengan kadar berlainan, kecuali Malaysia.

⁶⁵ Secara harafiah “*inlander*” berarti pribumi atau anak negeri. Dalam zaman penjajahan istilah “*inlander*” digunakan secara sinis-sarkastik buat anak-anak bangsa yang penakut, merasa inferior di depan penjajah Belanda, selalu jadi pecundang serba “*urimo*”, bodoh, potongan dan jahitannya memang pantas dijajah dan dihina.

Mahathir tidak berminat sama sekali menggandeng IMF. Ia tantang habis ortodoksi IMF² dan seluruh resepnya ia lawan. Tidak ada model SAP (*Structural adjustment programs*), ringgit Malaysia tidak diambangkan *vis-a-vis* dolar, tidak ada pencabutan subsidi untuk rakyat sendiri, dan proses pembangunan tidak ada yang berhenti. Karena menolak IMF, sebagian tokoh Malaysia menyindir IMF sebagai kepanjangan *It's Mahathir's Fault*, yang kira-kira berarti itu semua kesalahan Mahathir.

Mahathir memang seperti Bung Karno. George Soros, raja uang di New York, karena menjadi biang spekulasi-uang yang merontokkan banyak negara Asia, termasuk Indonesia, disebut Mahathir sebagai *moron*, sangat tolol. Sedangkan spekulasi-spekulasi lainnya disebut sebagai *brigands* (maling jalanan), *robbers* (perampok), *anarchists* dan *manipulators*. Soros menyerang balik dengan menyebut Mahathir sebagai bahaya masyarakat dan ancaman buat negerinya sendiri. Akibatnya, pasar, kata para pengamat, berdebar-debar dan ringgit semakin ambles. Dalam dua bulan ringgit terjun bebas merosot 24 persen.

Gentarkah Mahathir? Tidak. Dengan melawan resep IMF yang menurut Mahathir berbau neoimperialis itu, ditambah dengan pengawasan ketat arus modal asing, semua pengamat ekonomi memprediksi Malaysia bakal hancur. Ternyata Mahathir benar, IMF keliru. Dengan melawan resep dukun ekonomi, IMF, Malaysia justru makin mantap dan kuat, sampai sekarang. Ibarat pertandingan tinju, Mahathir dielu-elukan karena menang, sedangkan IMF digotong keluar ring dan disuruh istirahat saja. Dengan bangga Mahathir mengatakan "*I did it my way, and it's worked*".⁶⁶

⁶⁶ East Beats West, *The Spectator*, 18 Maret 2000.

Ketika Mahathir turun panggung pada 2003, setelah sejak 1981 memimpin Malaysia, prestasi Mahathir diukir lewat nasionalisme industri (terutama industri pertambangan). Investasi asing juga digalakkan, terutama semua aturan main ditentukan sepenuhnya oleh Malaysia sendiri. Bapak Malaysia ini dikenang antara lain berani mengisolasi Malaysia dari pasar finansial global pada saat dilanda krisis tahun 1997. Hasilnya lumayan menakjubkan. Ketika Mahathir pertama kali menjadi Perdana Menteri, seperempat (25%) penduduk Malaysia tergolong miskin. Ketika ia lengser, tinggal 5% penduduk yang tergolong miskin. Penghasilan per capita Malaysia juga melonjak 3 kali, kini sekitar sepuluh ribu dolar.⁶⁷

Mentalitas terjajah nampaknya sudah ditendang jauh oleh para pemimpin Malaysia, khususnya Mahathir. Kemerdekaan, kedaulatan, dan kemandirian adalah aset bangsa yang tidak mungkin digadaikan atau dilacurkan dengan alasan apapun. Mahathir sependapat dengan James Gibb Stuart, ekonom Amerika yang menasehati agar negara-negara berkembang jangan bergantung pada negara-negara kaya. Juga jangan takut dengan negara-negara kaya. Mengapa takut? Bukankah

“matahari masih bersinar. Panen masih bisa dipetik. Tangan, ketrampilan, dan energi pekerja yang penuh semangat tidak pernah susut – asalkan ia masih percaya pada pemerintahannya dalam melindungi penghasilannya dan menjamin imbalan yang memadai untuk dirinya dan keluarganya?” (*The sun still shines. The crops still ripen. The*

⁶⁷ Menjelang Mahathir turun panggung, pada 2002 saya berbincang-bincang di kantornya di Putra Jaya, Malaysia. Saya masih ingat ketika Mahathir mengatakan gagal memahami, mengapa Indonesia menjual BUMN ke pihak asing secara serampangan. Pihak luar boleh membeli mayoritas saham BUMN. Katanya, Malaysia tidak pernah membolehkan pihak asing membeli lebih dari 22,5% saham perusahaan negara di Malaysia, itu pun dengan aturan main yang sangat ketat dan hati-hati.

*eager workman's hands and skills and energies are in no way diminished – provided he can have faith in his Government to protect his earnings and an adequate rewards for himself and his family).*⁶⁸

Betul. Mengapa kita takut mandiri?

Dalam beberapa tahun terakhir ini Amerika Latin menyaksikan tokoh-tokohnya yang telah mendepak mentalitas terjajah. Mereka, dalam bahasa kita, tidak lagi menjadi pemimpin bermentalitas *inlander*. Secara perlahan tapi pasti nampak bahwa beberapa tokoh Amerika Latin mulai meninggalkan Washington sebagai rujukan, karena ternyata dengan mengikuti arahan dan keinginan Washington, kondisi Amerika Latin justru semakin parah.

Pembangunan ekonomi, sosial dan politik selama tahun 1980-an sampai 2000 terbukti gagal membawa kesejahteraan dan keadilan. Pertumbuhan yang dialami Amerika Latin pada kurun 1940-1980 masih lebih bagus dibanding dua dasawarsa berikutnya ketika mengikuti Konsensus Washington. Malahan khusus untuk Brazil dan Meksiko, dua negara besar di Amerika Latin, pertumbuhan ekonomi itu hanya berkisar 3%, separoh dari pertumbuhan sebelumnya. Bisa dimengerti jika kemudian muncul tokoh-tokoh yang menekankan kemandirian, kedaulatan dan kemerdekaan. Mereka menolak untuk selalu dipecundangi Amerika Serikat.

Para pengamat menengarai kehadiran *pink tide* atau gelombang merah jambu politik dan ekonomi yang sedang menggusur pelan-pelan cengkeraman politik dan ekonomi Washington atas negara-negara Amerika Latin. Hugo Chavez, Presiden Venezuela, adalah tokoh yang paling terkemuka dalam gerakan merah jambu menentang dominasi politik dan ekonomi Washington di Amerika Selatan. Chavez sebagai presiden pilihan rakyat pernah digusur

⁶⁸ James Gibb Stuart, <http://www.prosperityuk.com/prosperity/articles/jgsl.html>

dengan rekapaksa CIA selama beberapa hari pada 2002, tetapi rakyat Venezuela dapat mengembalikan Chavez ke kursi presiden.

Pada 2007 Chavez dipilih lagi untuk masa 5 tahun. Kunci kemenangannya terletak pada keberaniannya untuk memukul *status quo* dan menomorsatukan kepentingan rakyat miskin di atas program pembangunan lainnya. Juga gebrakan-gebrakan Chavez dalam melakukan nasionalisasi industri minyak, gas dan sumber daya mineral lainnya menyebabkan kocek nasional Venezuela menjadi tebal. Pertumbuhan ekonomi Venezuela pada 2006 mencapai angka 10,5%, sebuah pertumbuhan yang tidak pernah dibayangkan ketika pimpinan Venezuela sebelum Chavez menjadikan Venezuela sebagai halaman belakang Washington.

Kalau Chavez dapat menggunakan uang dari bonanza minyak secara taktis dan cerdas, dan tidak terlalu boros dalam membiayai gerakan-gerakan revolusioner di Amerika Latin, masa depan Venezuela agaknya memang semakin terang. Di samping Chavez, tokoh anti-dominasi ekonomi Amerika adalah Evo Morales, Presiden Bolivia hasil pemilu 2005. Morales, “bujang lapuk” berusia 46 tahun dipilih lewat partai atau gerakan yang dinamakan *Movimiento al Socialismo* (MAS), Gerakan ke Arah Sosialisme. MAS adalah sebuah partai politik yang berasal dari kalangan bangsa sendiri yang bertujuan melakukan nasionalisme industri, legalisasi pertanian koka dan pembagian sumber daya alam nasional yang lebih adil.⁶⁹

Menurut MAS, musuh paling bahaya bagi kemanusiaan adalah kapitalisme Amerika Serikat. Musuh itulah yang membangkitkan perlawanan mereka terhadap sebuah sistem, terhadap model neo-liberal yang mewakili kapitalisme yang ganas. Kalau dunia tidak menyadari realitas ini, sehingga negara-negara bangsa tidak lagi menyantuni rakyatnya lewat layanan kesehatan, pendidikan dan

⁶⁹ Evo Morales, Wikipedia, the free encyclopedia

kecukupan pangan, maka setiap hari hak asasi manusia yang paling mendesak telah dilanggar.⁷⁰

Pelajaran penting buat para tokoh yang masih bermentalitas *inlander* adalah apa yang dilakukan Bolivia. Sejak 1 Mei 2006 seluruh industri gas alam di Bolivia dinasionalisasi secara penuh. Hanya ada dua pilihan bagi korporasi asing yang selama itu telah menjarah sumber daya alam Bolivia lewat kontrak karya dan kontrak *production sharing*, yang terlalu menguntungkan mereka secara ugaltugalan. Dua pilihan itu adalah *expulsion or nationalization*. Ternyata Exxon Mobil Amerika Serikat, Total Perancis, Repsol Spanyol, British Petroleum dan semua korporasi asing tidak ada yang hengkang, semua tetap menambang di Bolivia dengan kontrak baru yang jauh menguntungkan Bolivia.

Berkat nasionalisme atau renegosiasi radikal terhadap aturan main kegiatan industri tambang yang baru, penghasilan (*revenue*) Bolivia melonjak 6 kali (sekali lagi 6 kali) dibandingkan apa yang diperoleh Bolivia pada 2002. Bisakah Indonesia mengambil pelajaran dari Bolivia? Bersama kita bisa! Kalau kita berani. Karena kekuatan imperialis dan kapitalis Amerika Serikat tidak pernah dapat menerima reformasi ekonomi dan politik Bolivia, Evo Morales dan para koleganya harus selalu waspada terhadap jebakan atau jeratan khas predator ekonomi (Amerika Serikat) yang sedang mengalami proses kemerosotan di mana-mana.

Tokoh Amerika Latin lainnya yang sudah melakukan dekolonisasi mental adalah Presiden Ecuador, Rafael Carrera. Ia sudah memutuskan untuk tidak memperpanjang pangkalan militer Amerika Serikat di pangkalan udara Manta, di pantai Pasifik Ecuador. Presiden Ecuador akan menutup pangkalan militer Amerika Serikat yang segera berakhir pada 2009.

⁷⁰ *Ibid.*

Pada Oktober 2007 Carrera mengajukan syarat sederhana, bila Amerika Serikat tetap ingin menggunakan pangkalan militer di teritori Ecuador itu. Syarat itu adalah Ecuador juga boleh membuka pangkalan militernya di Miami. Jadi bersifat resiprokal atau setara dan sama derajat. Hal yang mirip pernah saya kemukakan pada Juli 2007 di gedung DPR-RI tentang rencana ratifikasi Persetujuan Kerjasama Pertahanan (DCA) antara Indonesia dan Singapura. Karena perjanjian itu sudah ditandatangani oleh masing-masing Menteri Pertahanan Indonesia dan Singapura, DPR RI silahkan meratifikasi asalkan Indonesia berhak melakukan latihan perang-perangan dengan peluru tajam di Orchard Road, Singapura.

Mengapa? Karena Singapura diperbolehkan latihan perang-perangan di daerah Alfa I, Alfa II, Bravo dan Baturaja dengan menggunakan peluru tajam dan boleh mengundang pihak ketiga selama 25 tahun. Hebat bukan? Jadi saya usulkan hal yang bersifat resiprokal. Kalau pusat pembelanjaan atau perkantoran di Singapura terpaksa ada yang hancur, tentu merupakan resiko logis dari latihan perang-perangan dengan peluru tajam. Saya tahu buat orang-orang yang bermental *inlander* dan terkagum-kagum pada Singapura usul saya ini dinilai kelewatan. Namun untuk orang yang bermental merdeka dan berdaulat usul saya itu masuk akal. Tidak ada yang luar biasa. Yang dilakukan Carrera untuk menjaga martabat negaranya juga wajar saja.

Argentina yang pernah menjadi murid setia Washington, kini para pemimpinnya telah membuang jauh mentalitas terjajah. Mereka berhasil melakukan dekolonisasi pikiran dengan kesadaran tinggi. Presiden Nestor Kirchner, sebelum diganti istrinya, Christina Kirchner, pada 2007, membuka cerita bagaimana IMF menggurui Argentina. IMF menegaskan bahwa Argentina harus membuat persetujuan dengan IMF agar dapat membayar utang. Nestor Kirchner balik mengatakan: "Tuan-tuan, kami berdaulat. Kami

akan bayar hutang, tetapi jangan anda mengigau lagi, sampai kapan pun kami tidak akan pernah lagi membuat persetujuan dengan IMF”⁷¹

Berkat posisi baru yang diambil oleh para pemimpin Amerika Latin, posisi sebagai negara yang berdaulat, merdeka dan mandiri, IMF jatuh terhempas dan menjadi pihak pariah di Amerika Latin. Pada 2005 Amerika Latin mendapat 80% dari portofolio utang yang diberikan oleh IMF. Pada akhir 2007 tinggal 1%, sebuah perubahan yang radikal-dramatik. Dalam tiga tahun terakhir, portofolio pinjaman IMF merosot dari \$81milyar menjadi \$11,8 milyar, itupun sebagian besar diambil oleh Turki. IMF agaknya pelan-pelan mulai gulung tikar. Nasib Bank Dunia (*World Bank*) kelihatannya hampir sama.

Pertanyaan sederhana, mengapa ekonomi neolib dan politik neocon yang dijajakan oleh Amerika Serikat tidak laku lagi di Amerika Latin, kecuali di beberapa negara saja? Jawabannya, karena para pemimpin di sana sudah dapat membebaskan diri dari semangat *inlander* dan penjara mental rendah diri dan telah menemukan kembali rasa percaya diri dan kemanusiaan yang mantap. Hugo Chavez (Venezuela), Evo Morales (Bolivia), Rafael Carrera (Ecuador), Tabare Vasquez (Uruguay), Lula da Silva (Brazil), Michelle Bachelet (Chili), dan Nestor serta Christina Kirchner (Argentina), mungkin juga Daniel Ortega (Nicaragua), sudah mengucapkan selamat tinggal pada kolonisasi mental. Mereka tidak berjiwa *inlander* lagi.

Nah, kita masih membahas deretan tokoh internasional yang sudah bebas dari kolonisasi mental. Ahmadinejad, Presiden Iran sekarang ini adalah tokoh yang sangat menonjol, yang sudah putus

⁷¹ Naomi Klein, *Latin America's Shock Resistance*, <http://www.alternet.org/story/67745>

urat takutnya menghadapi tekanan-tekanan Amerika Serikat dan beberapa sekutunya. Tidak ada sedikit pun halangan mental bagi Ahmadinejad untuk menyuarakan kebenaran yang diyakininya. Sikapnya yang utuh dan penuh percaya diri dan tanpa basa-basi itu dikemukakannya di Sidang Umum PBB berulang kali. Ketika berpidato di Universitas Colombia, Amerika Serikat, pada tahun 2007, di depan para akademisi yang kritis dan sebagian wartawan yang “thengil”, Presiden Iran itu menampakkan kematangan dan kemandirian dirinya. Tidak terbersit sama sekali unsur kolonisasi mental dalam dirinya.

Mahmoud Ahmadinejad adalah seorang pemimpin yang sederhana, cerdas, dan berani. Ia mengendarai sendiri mobil tua Peugeot dan tinggal di sebuah rumah sederhana di dekat Teheran. Dalam rangka pengiritan, istrinya membeli kurma Iran di New York, dibawa ke hotel di mana Ahmadinejad tinggal ketika ia harus berpidato di sidang umum PBB. Mereka tidak makan di restoran mewah. Jaket sederhana selalu menempel di badan Ahmadinejad. Ia mengidentifikasikan dirinya sebagai pejuang hak-hak orang kecil dan lemah.

Akan tetapi jangan bertanya tentang kekukuhan pendiriannya dan keberaniannya. Saya pernah bertanya pada duta besar Iran di Jakarta, dari mana asal muasal keberanian Presiden Iran yang berusia 51 tahun itu (pada saat monograf ini ditulis). Sang dubes Iran mengatakan, sederhana saja. Ahmadinejad mengatakan, karena hidup di dunia hanya sekali saja, mengapa harus menjadi pengecut atau penakut, sampai melacurkan prinsip? Barangkali seperti kata penyair terbesar kita, Chairil Anwar, sekali berarti, kemudian mati. Atau seperti kata pepatah Arab, *“isy kariiman au mut syahiidan”*, hiduplah terhormat atau matilah sebagai syahid (pejuang).

Iran di bawah para pemimpinnya yang memegang teguh kedaulatan, kemerdekaan dan kemandirian telah mengalami

kemajuan yang sangat pesat. Sekalipun ekonomi Iran menjadi bermasalah karena tekanan politik, diplomatik dan ekonomi yang dilakukan oleh Washington tidak pernah dikendurkan, tetapi masa depan Iran justru tetap menjanjikan. Ternyata Iran termasuk sedikit negara yang segera menyusul masuk ke dalam elite iptek internasional.⁷²

Bila kita melihat elite kepemimpinan dua raksasa Asia, India dan China, kita segera menyadari bahwa dua negara ini berhasil menyiasati pusaran globalisasi. Malah dapat dikatakan China dan India, dengan kecerdasan, kerja keras, dan inovasi atau kreativitas mampu “menaklukkan” proses globalisasi untuk kemajuan negara masing-masing.

Kini dua negara ini karena kemajuannya yang menakjubkan di bidang ekonomi, dan teknologi, dinamakan Chindia. Diperkirakan dua negara ini akan menjadi pemimpin global di bidang ekonomi dan industri *high-tech*. Sekalipun keduanya pernah terlibat perang karena konflik perbatasan pada 1962, kedua negara itu cenderung membuka kerjasama di berbagai bidang. Ungkapan para pedagang China di masa lalu sering dikumandangkan lagi, yakni *Hindi Chini bhai bhai* (Orang India dan Orang Tionghoa adalah bersaudara).

Tentu dari segi asal-muasal ras, latar belakang sejarah, nilai-nilai budaya dan sistem politik dan juga bahasa, China dan India berbeda secara nyata. Akan tetapi para pemimpin dua negara ini nampaknya berkesimpulan bahwa bekerjasama lebih menguntungkan daripada saling bersaing. Perdana Menteri China Wen Jiabao menyatakan China dan India akan menjadi dua “pagoda” kekuatan ekonomi pada abad 21. Katanya, kerjasama dua negara

⁷² Baca surat Ketua LIPI, Prof. Dr. Umar Anggara Jenie pada penulis, dalam lampiran.

itu dapat menyerupai dua pagoda kokoh ekonomi dunia, yang satu memegang keunggulan *hardware*, perangkat keras (China) dan yang lain memanfaatkan keunggulan *software*, perangkat lunak (India).⁷³

CLSA, sebuah perusahaan riset sekuritas internasional, meramalkan pada tahun 2020 kereta besi ekonomi China dan India yang berkekuatan \$16 trilyun akan menentukan tatanan ekonomi dunia.⁷⁴ Tidak berlebihan jika diramalkan pada sekitar 2020 ekonomi Amerika, yang kini masih paling kuat, akan mengalami gerhana parsial dan mungkin saja akhirnya mengalami gerhana total ekonomi.

Tanpa digabungkan dengan kekuatan ekonomi India, China sendiri telah menghadirkan keajaiban ekonomi pada peralihan milenium. Dari 1976 tat kala reformasi ekonomi digulirkan sampai 2006 GDP China naik rata-rata 9,7%, ukuran ekonominya menjadi sebelas kali lebih besar, GDP *percapita* tumbuh 8 kali, dan perdagangan totalnya bangkit dari urutan ke 27 menjadi ke 3. Dalam satu dasawarsa (2016) tidak mustahil ekonomi China menjadi yang terbesar di dunia.⁷⁵ Dikhawatirkan China akan menyalib ekonomi Amerika sebagai adidaya ekonomi dalam satu dua dasawarsa mendatang. Kebangkitan ekonomi China nampaknya berbarengan dengan kemerosotan Amerika Serikat. Defisit perdagangan Amerika dengan China pada 1990 hanya \$10,4 milyar, tetapi pada 2006 menjadi \$232 milyar.⁷⁶ China juga aktif mencoba melakukan akuisisi beberapa perusahaan Amerika.

Pertanyaan penting dalam kaitan ini adalah mengapa India dan China justru menunjukkan prestasi gemilang dalam era

⁷³ *Sunday Business* (London), July 30, 2006.

⁷⁴ *Hindustan Times*, October 15, 2006.

⁷⁵ Congressional Research Service, January 2007, Order Code RL33604

⁷⁶ *Ibid.*

globalisasi dewasa ini? Salah satu jawabannya adalah karena para pemimpin China dan India tidak pernah latah menelan mantra-mantra globalisasi yang dijajakan oleh IMF, World Bank dan WTO. Mereka sudah lama meninggalkan mentalitas *inlander*. Sikap yang percaya diri, berdaulat, merdeka, dan disertai dengan kreativitas dan kerja keras telah “menyulap” dua negara berkembang Asia ini menjadi kekuatan ajaib yang telah mengguncangkan *statusquo* internasional.⁷⁷

Dari uraian singkat di atas dapat disimpulkan bahwa ternyata negara-negara yang mengalami kemajuan pesat pada 20-30 tahun belakangan ini adalah negara-negara yang mempunyai pemimpin bermental bebas, merdeka, berdaulat dan mandiri serta percaya diri. Mereka tidak pernah silau melihat negara-negara kapitalis-imperialis yang di masa lalu pernah menjajah negara-negara Asia, Afrika dan Amerika Latin. Mereka berhasil melakukan dekolonisasi mental dalam sikap hidup dan kepemimpinannya. Bahkan China diperkirakan oleh banyak pengamat dapat meng-*overtake* atau menyalib ekonomi Amerika Serikat dalam satu dua dasawarsa mendatang, *ceteris paribus*.

Nah, sekarang kita lihat negara-negara yang masih agak krasan dengan mentalitas terjajah. Dengan kata lain kolonisasi pikiran yang ditinggalkan penjajah puluhan tahun lalu masih saja membekas dalam *psyche* atau kejiwaan para pemimpin negara-negara itu. Kebetulan negara-negara itu ada di benua Afrika. Mengapa Afrika tetap saja miskin? Jawabannya: *Africa is poor because she is not free*. Kalimat pendek yang cukup tajam ini dijadikan semboyan *The Free Africa Foundation*. Memang, Afrika miskin karena belum merdeka.

⁷⁷ Dalam sebuah ceramah saya pernah berkelakar, dengan cadangan devisa China yang kini sudah jauh melampaui 1 triliun dolar, Beijing dapat *menanyakan* para petinggi IMF, apakah IMF perlu pinjaman lunak dari China.

Banyak di antara pemimpin Afrika yang masih sanggup melayani kepentingan kapitalisme internasional. Karena banyak di antara mereka yang begitu lunak dan mengalah pada kepentingan bekas penjajahnya, seorang kolumnis Inggris menganjurkan apakah tidak sebaiknya sebuah bentuk neoimperialisme dirancang kembali.

Agar Inggris dan Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya dapat mengangkat tokoh-tokoh lokal serta memberi mereka pengarahan bagaimana cara menggerakkan pasar bebas, *rule of law*, dan akhirnya sebuah versi lokal demokrasi. Bila mereka, tokoh-tokoh lokal itu sampai berani berulah, mereka harus digusur. Yang menarik, pendapat itu dikemukakan terus terang pada Juni 2003.⁷⁸ Betapa kuat nostalgia Barat untuk tetap menguasai Afrika! Ia lupa 2005 tidak sama dengan 1859. Ternyata pikiran seperti kolumnis neo-imperialis itu tidak jauh berbeda dengan usulan R.W. Johnson dari *The Daily Telegraph* yang mengusulkan agar dilakukan rekolonisasi Afrika oleh kekuatan-kekuatan Barat.⁷⁹

Kebobrokan perilaku para pemimpin Afrika dilaporkan oleh seorang intelektual Afrika berkebangsaan Ghana di depan Komisi Luar Negeri Senat Amerika Serikat. Laporan yang disampaikan pada September 2004 itu pada pokoknya berisi bukti-bukti korupsi yang dilakukan oleh sejumlah kepala negara dan jenderal di Afrika. Disebutkan Jenderal Sani Abache dan Jenderal Ibrahim Babagdia, keduanya dari Nigeria, masing-masing sebesar \$20 milyar dan \$5 milyar. Presiden H. Borjny dan Presiden Henri Bedie dari Pantai Gading, masing-masing sebesar \$6 milyar dan \$300juta; Presiden Mobutu (Zaire), \$4milyar; Presiden Mousa Traore, \$2milyar; Presiden Denis N'guesso (Congo), \$200 juta; Presiden Omar Bongo (Gabon), \$80 juta; Presiden Paul Biya (Kameroon),

⁷⁸ *The Independent*, Juni 2003.

⁷⁹ Baffour Ankamah, Dr. Livinstone, I Presume, [http://www.swans.com/library/art 9/ankamah 8](http://www.swans.com/library/art%209/ankamah%208)

\$70 juta; Presiden Haile Maryam (Ethiopia), \$30 juta; dan Presiden Hissene Habre (Chad), \$3 juta.⁸⁰

Menurut George Ayyittey, sang pelapor, banyak negara Afrika yang menjadi *vampire states*, negara penghisap kesejahteraan rakyat, di mana negara terdiri dari gerombolan gangster dan pencoleng yang memperkaya diri sendiri; para kroni, teman-teman sesuku sambil mengucilkan kelompok lain. Menurut Ayyittey, mereka yang paling kaya di Afrika adalah para kepala negara dan para menteri dan kadangkala yang menjadi presiden adalah kepala bandit.⁸¹

Dalam bukunya *Africa Unchained* (2005), Ayyittey menghajar habis para pemimpin Afrika yang bermental pelayan, suka hutang, otoritarian, dan menghisap hak-hak rakyat. Penguasa penghisap darah rakyat itu didukung oleh kaum intelektual dan profesional, yang telah menjadi pelacur-pelacur yang menjual kesadaran dan harga dirinya ke rezim militer yang biadab (*but many of them act like intellectual prostitutes, selling off their conscience and integrity to serve the dictates of barbarous military regimes*).⁸²

Tokoh-tokoh Afrika yang korup (meminjam istilah Ayyittey, gangster dan bandit) sangat paham, selama mereka bersedia mengadaikan sumber daya alam Afrika ke berbagai korporasi asing, maka selama itu pula, *World Bank* dan IMF serta lembaga finansial Barat lainnya, seperti *African Development Bank* akan terus bersedia mengucurkan kredit sebanyak-banyaknya untuk Afrika. Bahwa tiap dolar yang dihutangkan ke Afrika, 80 sen dikorup oleh para pemimpin Afrika dan dijadikan sebagai *capital flight* yang diparkir

⁸⁰ George Attiyyey, Testimony Before the Senate Foreign Relations Committee, 28 September 2004.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² George B.N. Ayyittey, *Africa Uncabined: The Blue print for Africa's Future* (New York: Palgrave Macmillan, 2005), hal. XXV.

di bank-bank Swiss, nampaknya tidak dipersoalkan oleh berbagai bank *mindring* internasional semisal IMF, *World Bank*, dan AfDB. Para pemimpin korup itu tidak berkeberatan sama sekali bila negara-negara mereka menjadi subordinat atau bagian yang dihisap oleh korporatokrasi internasional.

Pertanyaan paling penting dalam kaitan posisi elite nasional dari negara-negara berkembang *vis-a-vis* korporatokrasi internasional adalah, bagaimana elite nasional Indonesia sendiri?

Elite Indonesia memang tidak monolitik. Sepanjang sejarah Indonesia, kita memiliki beberapa pemimpin yang bermentalitas merdeka, mandiri, percaya diri dan demikian kuat melindungi kedaulatan, harga diri dan martabat bangsa. Akan tetapi sayang sekali tidak sedikit pemimpin atau elite bangsa yang demikian gampang menggadaikan atau melacurkan harga diri, martabat dan kedaulatan bangsa kepada pihak asing. Yang terakhir ini melakukan pengkhianatan terhadap bangsa hanya karena menginginkan keuntungan jangka pendek dan hanya untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongannya saja.

Pemimpin tipe *inlander* ini hakekatnya bermental budak, mereka mengidap *slave mentality*. Seorang budak tidak mampu dan tidak berani bergerak bebas. Ia selalu menunggu orang lain untuk membebaskannya. Ezra Pound mengatakan: *a slave is one who waits for someone to come and free him*. Pengejawantahan mentalitas *inlander* atau katakanlah, mentalitas budak, memang bermacam-macam.

Kita masih ingat bagaimana Indonesia berpikir panjang sekali untuk membuka kantor perwakilan PLO di Jakarta. Tatkala semua negara ASEAN yang lain sudah menerima kehadiran kantor perwakilan PLO di ibukota masing-masing, barulah pada 1989 Jakarta melakukan hal yang sama. Gara-gara Indonesia selalu me-

nunda kesediaan menerima kehadiran kantor perwakilan PLO di Jakarta, setiap kali SU PBB mengagendakan kasus Timor Timur, sekitar 20 negara Arab bersikap abstain.

Akibatnya fatal. Indonesia kekurangan suara untuk memblokir agenda perdebatan Timor Timur di Sidang Umum PBB. Sebabnya jelas. Indonesia menunda-nunda terus pembukaan PLO *office* di Jakarta karena takut dianggap keliru oleh Washington. Dalam hal ini ada yang mengatakan bahwa politik luar negeri kita bebas dan aktif dalam pengawasan Amerika Serikat. Indonesia belum sepenuhnya independen. Sebagian penentu kebijakan Indonesia masih bermental *inlander*.

Ciri lain mentalitas *inlander* adalah merasa nikmat dalam ketergantungan. Sampai sekarang kita masih dihinggapi penyakit *debt-addict*, kecanduan hutang. Bahwa membuat hutang sesungguhnya merupakan perbuatan tercela (kecuali sudah tidak ada jalan lain dan untuk menghindari kiamat nasional), para pemimpin dan penguasa kita tidak peduli. Mereka sudah benar-benar *brain-washed*, sudah tercuci pikirannya.

Bahkan kita bangga setiap kali mendapat hutang baru dengan alasan yang bagi manusia normal sulit dicerna. Hampir semua koran Indonesia, selama kurun waktu belasan tahun, mengeluhkan hutang Indonesia dari IGGI (*Inter-Governmental Group on Indonesia*). Setiap kali hutang dari IGGI, yang didirikan pada 1967 dan dipimpin Belanda, diterima Indonesia, para pemimpin kita merasa bangga. "Kita bersyukur dan bangga sebagai bangsa Indonesia, karena kita masih dipercaya oleh IGGI untuk mengambil hutang baru". Demikian kira-kira setiap tahun kita baca komentar elite kita.

Tentu tidak pernah dirisaukan kenyataan bahwa Indonesia makin jauh terjebak dalam *debt trap*, terjatuh dalam jeratan hutang luar negeri yang makin lama makin besar. Padahal bangsa yang

tertindih hutang besar mau tidak mau pasti kehilangan bukan saja kemandirian ekonomi, tetapi juga kemandirian politik. Dengan kata lain kita menjadi bangsa yang tersandera.

Sementara itu hutang luar negeri Indonesia sesungguhnya termasuk dalam *odious debt* atau hutang najis. Mengapa? Karena selain mengalami kebocoran besar, terlalu banyak bagian hutang itu yang tidak digunakan sesuai rencana. Selain dikorupsi oleh para pejabat atau penguasa kita, oleh rezim yang sedang berkuasa sebagian hutang digunakan untuk memasung rakyatnya sendiri dan mengawetkan sistem pemerintahan otoriter.

Nigeria dan Pakistan adalah sedikit contoh negara yang ternyata dapat meminta pemutihan hutang pada kreditor internasional mereka, dengan alasan hutang yang dibuat rezim sebelumnya termasuk hutang najis. Tetapi kita, tidak mau minta pemutihan hutang, karena ingin nampak lebih gagah, lebih “ksatria”. Jangan sampai Indonesia dicap sebagai *bad boy*, anak nakal. Di mata IMF, Bank Dunia, IGGI, Asian Development Bank, dan CGI (*Consultative Groups on Indonesia*), Indonesia ingin jadi *nice boy*, anak manis dan penurut. Bahwa jumlah cicilan hutang luar negeri kita sudah jauh melampaui jumlah hutang itu sendiri, tidak pernah kita pertimbangkan sama sekali.

Dalam era reformasi, tabiat kecanduan hutang belum terkikis sama sekali. Setiap tahun ketika pemerintah bersama DPR menetapkan APBN, dari hari pertama APBN itu sudah mengalami defisit. Defisit itu mencapai angka sekitar 73,3 trilyun rupiah (APBN 2008). Pemerintah begitu enak dan nikmat membuat APBN yang berdefisit tinggi. Mengapa? Karena, seperti kata seorang petinggi, *don't worry and be happy*, defisit itu tokh bisa ditutup lewat hutang baru atau jualan BUMN ke pihak asing. Tidak pernah terlintas dalam benak sang pejabat itu untuk melihat Indonesia

yang kuat, lebih mandiri dan akhirnya dapat lolos dari perangkap hutang.

Mental *inlander* dan pecundang juga nampak dari cara pemerintahan kita dari dulu sampai dengan era reformasi menangani hutan tropis kita. Pemberian HPH kepada oknum-oknum korup dan subversif selama ini menjadi hak mutlak eksekutif, terutama Departemen Kehutanan. Hutan tropis kita, yang terbesar kedua setelah Brazilia, dibuat kenduri besar oleh para pemegang HPH, yang merasa memiliki hak penggundulan hutan dan hak merusak hutan. Kebanyakan hutan kita, dengan berbagai jenis fauna dan flora di dalamnya, termasuk sumber pokok bahan-bahan farmasi, sebagian besar telah amblas dihajar para *illegal loggers* tanpa henti. Sampai hari ini.

Kantor berita Reuters menyebutkan bahwa 72 persen hutan Indonesia telah musnah, sementara setengah dari sisanya terancam punah karena *commercial logging* (pembalakan komersial, mungkin istilah lain dari *illegal logging*), kebakaran hutan dan penggundulan untuk perkebunan sawit. Guinness Book of Records (2008), diterbitkan September 2007, menyebutkan: *Indonesia is the world champion in deforestation*. Indonesia memegang kejuaraan dunia penggundulan hutan.⁸³ Menurut Greenpeace, selama 2000-2005 Indonesia merupakan negara paling cepat dalam menggunduli hutannya, sehingga setiap jam, hutan seluas 300 X (tiga ratus kali) lapangan sepak bola amblas untuk selama-lamanya. Kecepatan itu sekarang pasti menurun, karena hutan yang tersisa tinggal sedikit, sudah tidak memungkinkan kenduri besar lagi.

⁸³ Baca: Indonesian Fastest Forest Destroyer, http://www.treehugger.com/files/2007/05/indonesia_fastest.php; Rainforest Deforestation- Indonesia Matters, <http://www.indonesia.matters.com/1252/rainforest-deforestation>; Deforestation puts Indonesia as 3rd largest greenhouse gas emitter, <http://asia.news.yahoo.com/0703/23/kyodo/d8023ef80.html>

Presiden Yudhoyono lumayan jujur ketika mengatakan:

“karena kejahatan pembalakan liar dengan modal dan jaringan yang luas di luar negeri untuk memasarkan hasil hutan, Indonesia rugi besar karena tidak mendapat uang, sementara hutan dan negeri rusak.”⁸⁴

Yudhoyono tahu persis permasalahannya. Indonesia tidak mendapat apa-apa. Hutan dan negeri rusak. Di samping itu ia paham kaitan antara pembalak dalam negeri dengan korporasi kayu dan *plywood* di luar negeri. Namun dalam pidato yang sama Yudhoyono minta agar masa lalu tidak perlu dilihat dan tidak usah mencari siapa yang salah. Katanya: “tak usah melihat ke belakang. Dulu barangkali banyak yang tidak bertanggungjawab mengobrak-abrik hutan dan tidak mau memelihara. Tidak usah mencari yang salah. Mari mulai sekarang bersama-sama kita bikin baik”. Pernyataan ini sungguh mengagetkan. Dalam bahasa hukum, ia telah melakukan *crime of omission*, kejahatan membiarkan kejahatan terjadi.⁸⁵

Komentar cerdas datang dari politikus muda Budiman Sudjatmiko. Ia mengatakan: “Rakyat punya hati dan mata untuk melihat, mengapa kasus yang diusut umumnya yang terjadi sebelum Yudhoyono memerintah atau mengapa tidak ada menteri atau mantan menteri di era Yudhoyono yang dibawa ke pengadilan?”. Kalau Yudhoyono mengeluh mereka yang “berpesta pora” pada masa lalu tidak mau “cuci piring”, kata Budiman, sebenarnya juga menunjuk ke Yudhoyono sendiri. Sebab, sebelum ini ia ikut duduk dalam pemerintahan.⁸⁶

Salah satu pembalak liar terdepan, Adelin Lis, tertangkap di Beijing pada akhir 2006. Pemilik dua perusahaan kayu ini dijadikan tersangka oleh Kepolisian Daerah Sumatera utara karena diduga

⁸⁴ Kompas, 29 November 2007.

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*

melakukan *illegal logging* yang merugikan negara sebesar Rp 227 triliun atau 227 ribu milyar rupiah, sekitar sepertiga APBN Indonesia. Namun ia dilepaskan oleh majelis hakim dengan alasan “tidak ada kesalahan atau pelanggaran hukum yang ia lakukan”. Masyarakat luas protes keras terhadap kezaliman ini. Akan tetapi sebegitu jauh elite puncak nampak tenang-tenang saja. Mengapa?

Media pernah digemparkan ketika 3 orang pengemplang BLBI dapat melenggang masuk istana pada Februari 2006. Tentu dapat dibuat berbagai dalih dan alasan, mengapa istana, tempat bersemayamnya jantung kekuasaan, dapat menggelar karpet merah buat para musuh besar bangsa dan negara itu. Mengapa?

Ketika aparat Bea Cukai menyita 36 ribu pasang merek Yonex pada Mei 2007 buatan perusahaan Hartati Murdaya di Tangerang, Hartati langsung berang dan melapor ke Presiden. Majalah Tempo membuat laporan utama berjudul Sepatu Masuk Istana. Buat rakyat kebanyakan pertanyaan yang segera muncul adalah mengapa demikian mudah para pengusaha bermasalah bisa masuk-keluar istana. Ada apa dan mengapa? Salah satu jawabannya karena istana, simbol kedaulatan negara, dianggap oleh para pengusaha bermasalah sebagai *playing fields* alias lapangan untuk main-main sesuai selera dan kepentingan mereka. Dapat dibayangkan, jika dengan konglomerat kecil-kecilan kaliber lokal saja elite puncak kita tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi menghadapi korporatokrat internasional yang jauh lebih dahsyat kemampuan multi-dimensionalnya.

Elite nasional kita nampak menyerah total terhadap kekuatan keuangan internasional. Perbankan Indonesia, sebagai urat nadi ekonomi bangsa, sudah bertekuk lutut di hadapan kekuatan ekonomi global. Dominasi asing dalam perbankan nasional dari hari ke hari semakin mendalam dan meluas. Masalah pokok dalam kaitan ini jelas. Bank Indonesia sendiri tidak membatasi kepemilikan asing, karena investor atau badan hukum asing boleh memiliki

hingga 99 persen saham bank di Indonesia. Angka 99 persen itu merupakan angka ajaib yang membuka pintu penjajahan ekonomi Indonesia semakin terbuka.

Saya tidak tahu *brain-washing* macam apa yang telah “menyihir” pemerintahan Yudhoyono sehingga membiarkan dunia perbankan kita tanpa pagar pengaman. Lihatlah negara-negara di lingkungan Asia, bagaimana mereka tidak cukup bodoh untuk menyerahkan bulat-bulat perbankan nasional mereka ke pihak asing. Filipina membatasi kepemilikan asing hanya sampai 51 persen, Thailand 49 persen, India 49 persen, Malaysia 30 persen, China 25 persen, Vietnam 30 persen. Negara-negara Asia ini sadar, kalau pihak asing diperbolehkan menguasai perbankan nasional mereka, ekonomi mereka akan tersandera oleh asing dan mereka tidak akan pernah menjadi tuan di negeri sendiri. Amerika Serikat, pemimpin puncak globalisasi dan liberalisasi ekonomi saja, membatasi kepemilikan asing di perbankan nasionalnya hanya sampai 30 persen.

Menurut Biro Riset Info Bank pada penghujung akhir 2005 penguasaan aset oleh pihak asing mencapai 48,51 persen, pemerintah hanya 37,45 persen dan selebihnya dikuasai kalangan swasta. Namun tidak tertutup kemungkinan kalangan swasta itu merupakan kepanjangan tangan belaka dari korporasi asing. Sehingga cukup aman mengatakan bahwa lebih dari 50 persen perbankan nasional kita kini sudah dikuasai asing. Pada awal 2008 laju kepemilikan asing atas aset perbankan nampaknya juga semakin pesat.

Bukan itu saja. Miranda Goeltom dari BI menegaskan bahwa BI tidak akan pernah membatasi kepemilikan asing pada instrumen SBI (Sertifikat Bank Indonesia). Pada hal uang dari luar yang masuk ke Indonesia sangat gigih memborong SBI. Kita tidak boleh lupa bunga yang dibayar oleh BI untuk SBI yang dimiliki

asing itu adalah uang negara, uang rakyat Indonesia. Dengan demikian negara atau rakyat kita membayar bunga SBI yang dimiliki asing itu untuk memperkaya mereka. SBI jelas bukan instrumen investasi. Mengapa BI tidak akan pernah membatasi kepemilikan asing dalam mengoleksi SBI?

Hal ini merupakan sebuah bukti lagi betapa elite nasional kita membuka pintu selebar mungkin buat masuknya kontrol asing di bidang perbankan nasional. BEI News menulis: “Ujung-ujungnya, kita hanya akan menjadi penonton di negeri sendiri. Tidak ada lagi “aset nasional” perbankan yang betul-betul dimiliki anak negeri”.⁸⁷ Fuad Bawazier menunjukkan kekurangcerdasan kita, yaitu: Proses asingisasi dikesankan sebagai suatu prestasi globalisasi dan modernisasi.⁸⁸ Akibat *brainwashing* yang kita alami, pikiran kita jadi terbalik-balik. Seperti orang yang sedang diserang diare, pencegahannya justru dengan makan sambal tanpa batas, tanpa henti.

Untuk membangun ekonomi nasional yang mandiri kita tidak boleh bersikap anti asing. Namun kiprah atau manuver serta kepemilikan asing pada aset nasional dalam arti luas harus secermat mungkin kita batasi. Yang kita lakukan selama ini cukup ironis. Di satu pihak kita sering bicara pentingnya kemandirian dan ekonomi kerakyatan, tetapi yang kita lakukan adalah asingisasi pertambangan, perkebunan, perbankan, pertelekomunikasian, pelayaran, penerbangan dan semua proses yang mempercepat Indonesia menjadi negara komprador, negara pelayan kepentingan asing. Negara yang dengan kekurangcerdasan sebagian elitnya diperalat oleh kepentingan asing. Dengan kata lain, yang kita lakukan adalah bukan saja *contradictio in terminis*, tetapi juga, lebih

⁸⁷ BEI News Edisi 29 Tahun V, Januari – Februari 2006.

⁸⁸ Fuad Bawazier, “Kepemilikan asing di Indonesia”, *Republika ONLINE*. d

gawat lagi, *contradictio in principii*. Melakukan dua hal berseberangan. Ibarat mandi dengan sabun wangi di kubangan kerbau.

Mentalitas *inlander* kita juga nampak jelas dalam kita mengelola kekayaan tambang kita, baik migas maupun non migas. Freeport MacMoran di Papua (Irian Jaya), sejak 1967 menambang emas, perak, dan tembaga di provinsi Indonesia paling timur yang kaya raya dengan sumber daya alam itu. Kontrak Karya I diperbarui pada 1991 untuk masa setengah abad, sehingga Kontrak Karya II baru berakhir pada 2041. Bayangkan, tatkala generasi saya, Yudhoyono, Jusuf Kalla dan seanteronya sudah lama jadi almarhum, Freeport masih terus menguras habis kekayaan alam Papua.

Saya pernah mengemukakan bahwa korporasi Amerika itu melakukan beberapa kejahatan sekaligus. Pertama, kejahatan lingkungan: *tailings* atau buangan limbah yang setiap hari berjumlah 300 ribu ton telah menjadikan sistem sungai Aghawagon-Otomona-Ajkwia mengalami kerusakan total. Tidak ada lagi ikan dan tanda-tanda kehidupan lainnya di sana. WALHI sudah sejak lama menuntut agar Freeport, yang telah melakukan *ecocide* (pembunuhan lingkungan), segera ditutup dan dilakukan audit total. Ratusan km persegi hutan di sekeliling Grasberg kini sudah menjadi padang tandus tanpa kehidupan. Chalid Muhammad, Direktur Eksekutif WALHI,⁸⁹ mengatakan bahwa kematian sungai-sungai Ajkwia, Aghawagon dan Otomona, buangan tanah, batu-batuan dan *tailings* yang terus menumpuk serta kematian ekosistem di daerah sekitar

⁸⁹ WALHI telah membuat laporan menyeluruh tentang kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh Freeport-Rio Tinto. Siapa pun orang Indonesia yang membaca laporan para pakar internasional dalam dokumentasi WALHI itu, tidak bisa tidak pasti akan mengatakan kira-kira, "cukup sudah kehancuran lingkungan yang dilakukan Freeport-Rio Tinto". Penutupan Freeport adalah satu-satunya jalan untuk menghentikan penghinaan Freeport terhadap masyarakat Papua khususnya dan seluruh bangsa Indonesia pada umumnya. Laporan-laporan WALHI dapat diakses di www.eng.walhi.or.id

pertambangan Freeport berarti lenyapnya sebuah lingkungan hidup yang tidak dapat dikompensasi dengan cara apa saja.

Sebuah badan pemerintahan Amerikat Serikat yang mengikuti berbagai penyelewengan korporasi Amerika di luar negeri (*Overseas Private Investment Corporation*) mencabut asuransi Freeport pada Oktober 1995. Asuransi itu tidak dapat diperpanjang karena kejahatan lingkungan yang dilakukan Freeport. Beberapa tahun lalu sebuah Yayasan Pensiunan di Norwegia juga menarik sahamnya dari Freeport, karena tidak tega melihat kematian ekosistem di zona pertambangan Freeport. Dulu, Sony Keraf, ketika menjadi Menteri Lingkungan Hidup (2000), tatkala kerusakan ekologi di Papua belum separah seperti sekarang, sudah menggebrak Freeport supaya menghentikan kejahatan pembunuhan lingkungan. Tetapi Freeport, merasa lebih kuat dari pemerintah Indonesia, tidak menggubris. Nah, Pemerintahan Yudhoyono sekarang anehnya nampak lebih membela kepentingan Freeport daripada kepentingan bangsa. Demo besar-besaran yang dilakukan ribuan mahasiswa Papua di tahun 2006 untuk meninjau ulang keberadaan Freeport di Indonesia juga tidak diperhatikan. Mengapa?

Kedua, Freeport juga melakukan kejahatan perpajakan. Saya terlalu yakin dalam hal ini. Ketika pada pertengahan 1990-an saya menulis Freeport tidak membayar pajak seperti seharusnya karena hanya menjadi pembayar pajak terbesar nomor delapan atau sembilan, tiba-tiba setelah tulisan saya di harian Republika, pada tahun berikutnya Freeport menjadi pembayar pajak urutan pertama. Karena nampak ada sedikit itikad baik dari Freeport dalam urusan pajak waktu itu (sekali lagi, waktu itu), saya menulis dalam kolom resonansi dengan judul "*Thank You, Freeport*". Saya yakin kejahatan pajak Freeport kini kambuh lagi. Ini semua bisa di *check*, dilihat tahun per tahun bagaimana dan berapa pajak telah dibayar oleh Freeport.

Ketiga, kejahatan etika dan moral dilakukan oleh Freeport dengan memberi uang sogokan kepada oknum-oknum polisi dan militer dengan dalih *administrative costs*, *security costs* dan dalih-dalih lainnya. Harian New York Times 27 Desember 2005 menulis sangat panjang tentang berbagai hal negatif mengenai Freeport. Koran Amerika itu bahkan menyebut nama-nama perwira menengah dan tinggi TNI dan POLRI yang mendapat kucuran dolar dari Freeport. Di samping 35 juta dolar dikeluarkan Freeport untuk ikut membangun infrastruktur militer, 70 Land Rovers dan Land Cruisers diberikan pada para komandan. Di sinilah rasa nasionalisme kita terusik. Andaikata Kontrak Karya Freeport tidak diperpanjang dan tambang emas terbesar di dunia itu dikelola Indonesia sendiri, misalnya oleh PT Aneka Tambang, jangankan hanya 70, pengadaan 70 ribu Land Rover dan Land Cruisers bukanlah masalah besar. Sayangnya, ini hanya andaikata. Andaikata kita tidak bermental *inlander*.

Keempat, kejahatan kemanusiaan. Tujuh suku Papua yang punya hak ulayat digusur begitu saja dari tanah warisan turun-temurun dan di antara mereka meninggal karena peluru satgas Freeport. Chris Ballard, antropolog Australia yang pernah bekerja di Freeport dan Abigail Abrash, pembela hak asasi manusia dari Amerika, memperkirakan sekitar 160 orang terbunuh antara 1975-1997 di daerah pertambangan dan sekitarnya.⁹⁰

Kelima, dan yang terakhir ini cenderung dilupakan, kejahatan menguras kekayaan Indonesia lewat manipulasi administrasi dan menjadikan pusat pertambangan Freeport sebagai industri pertambangan misterius dan rahasia. Kekayaan Freeport sesungguhnya jauh lebih besar daripada kekayaan yang diungkap dalam laporan resminya. Kalau Freeport dapat mengakuisisi Philip Dodge Corp

⁹⁰ Endgame Profile of Freeport-McMoran, <http://www.endgame.org/freeport.html>

dengan membayar tunai 70% dari 25,6 milyar dolar, tentu kekayaan Freeport sesungguhnya jauh lebih besar dari pada apa yang dilaporkan ke Indonesia, sebagai pemilik dan pemangku kekayaan alam di Papua itu.⁹¹

Dengan modal mentalitas *inlander* itu kita mengiyakan terus langkah Freeport. Mentalitas budak memang sungguh aneh. Pertama, seorang budak siang malam harus menjaga perasaan tuannya. Tuannya jangan sampai tersinggung, apalagi marah. Kedua, selalu memenuhi secara berlebihan setiap permintaan tuannya.

Boleh saja Pemerintahan Yudhoyono beralih kita hanya melanjutkan Kontrak Karya masa lalu. Tetapi bagaimana dengan Blok Cepu, yang *lead operatorship*nya diberikan sepenuhnya kepada Exxon Mobil dengan KKS (Kontrak Kerja Sama) yang berlaku sampai 2036? Pada zaman Yudhoyono – Kalla? Dalam tulisan ini tidak mungkin dibahas segi-segi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemerintah, negativisme yang diperoleh bangsa dengan menjadikan Exxon-Mobil sebagai majikan dan Indonesia sebagai pelayan dan lain sebagainya.

Marwan Batubara dan kawan-kawan telah menerbitkan buku “Tragedi & Ironi Blok Cepu: Nasionalisme yang Tergadai (2006)”. Dalam buku setebal 288 ini Marwan Batubara dan sejumlah cendekiawan dan profesional kita membahas begitu jelas kebodohan kita (kebodohan sengaja) sehingga “Kabinet Indonesia Bersatu berpihak pada kepentingan Exxon Mobil”. Sesuatu yang merugikan kepentingan bangsa jangka panjang dikatakan sebagai sesuatu yang menguntungkan adalah sebuah bentuk pembodohan terhadap rakyat Indonesia.

⁹¹ Baca Lampiran 3.

Dradjad Wibowo menghitung seandainya Blok Cepu itu dikelola sendiri oleh Pertamina, sementara Exxon Mobil hanyalah semacam mitra junior (sesuatu yang realistis, masuk akal dan yang seharusnya),⁹² Pertamina akan memperoleh tambahan aset senilai 40 milyar dolar. Itu didasarkan asumsi harga minyak US\$50 per barel dan gas US\$3 per mmbtu. Cadangan minyak di Blok Cepu minimal 600 juta barel sedangkan cadangan *recoverable gas* paling sedikit 2 trilyun standar kaki kubik (TCF). Pertamina bisa mendapat dana segar, katakanlah US\$ 6 – 8 milyar untuk keperluan ekspansi usaha, dan segala macam kegiatan yang bermanfaat bagi bangsa.

Namun pikiran jernih di atas hanya dapat dilakukan oleh mereka yang bermental merdeka, berdaulat dan mandiri. Untuk orang yang belum sembuh dari kolonisasi mental dan lebih suka menghamba pada korporatokrasi internasional, tentu memilih yang mudah. Bahwa kita sudah merdeka 62 tahun dengan barisan geolog, teknisi dan profesional yang menguasai *managerial knowhow* buat pertambangan modern, semua itu dilupakan. Dalam buku Marwan dan kawan-kawan di atas dapat dilihat bagaimana pemerintahan kita tidak punya nyali berhadapan dengan Administrasi Bush yang ekspansif, agresif dan eksploitatif. Lagi-lagi kita hanya menjadi Pak Turut.

Ada dua komentar tajam yang dimuat dalam sampul belakang buku Marwan Batubara dan kawan-kawan tersebut. Kwik Kian Gie: “Jika setelah 60 tahun merdeka tidak ada orang Indonesia yang mampu mengeksploitasi Blok Cepu, maka kemungkinannya hanya ada dua: semuanya sudah disuap Exxon Mobil atau semuanya masih bermental budak/*inlander*.” Kwik melupakan kemungkinan ketiga, yaitu kombinasi keduanya. Karena mendapat suapan besar dari Exxon Mobil maka mereka suburkan mental *inlander* mereka.

⁹² Dradjad H. Wibowo, “Ironi Blok Cepu”, *TEMPO*, 27 Maret – 2 April 2006.

Sekedar bandingan, dalam *Kazakhgate*, Presiden Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev dan Menteri Minyak Nurlan Balgimbayev, disuap Exxon Mobil sebesar US\$ 78 juta, sehingga Exxon mendapat perlakuan dan konsesi istimewa untuk mengeksploitasi minyak di Kazakhstan, seperti diuraikan pada Bab terdahulu.

Komentar lain dari Dr. Warsito, Ketua Masyarakat Ilmuwan dan Teknologi Indonesia: “Kalau 90% lebih sumber energi kita dikuras oleh pihak asing, maka secara rasional berapa lama negara kita akan mampu bertahan secara ekonomi? Seberapa bebas keputusan politik bisa diambil oleh para pemimpinnya? Dan yang lebih memprihatinkan lagi seberapa mahal harga yang harus dibeli oleh rakyatnya, dari harga BBM, TDL, hingga tarif jalan tol?”

Dalam pada itu, impotensi elite kita nampak begitu mencolok dalam menghadapi pencurian pasir kita oleh puluhan *dredgers* atau kapal pengeruk pasir dari berbagai negara yang berdagang secara *illegal* dengan Singapura. Di seluruh dunia, sampai tahun 2003, diperkirakan ada sekitar 70 *dredgers*, 54 dari jumlah itu beroperasi di sekitar Riau, siang malam menyedot pasir laut Indonesia. Beberapa pulau kecil sudah runtuh dan hilang berpindah tempat diangkut oleh kapal pengeruk pasir dari Belgia, Belanda, Rusia dan Korea Selatan untuk reklamasi pantai Singapura.

Pada 1960, luas seluruh Singapura hanyalah 581,5 km persegi. Berkat reklamasi tanpa henti itu luas Singapura menjadi 650 km persegi pada awal 1980-an. Dus, ada tambahan sebanyak sekitar 70 km persegi. Rencananya, pada tahun 2010 untuk memenuhi kebutuhan perumahan, pertokoan, lapangan terbang, pusat hiburan dan perjudian, lewat reklamasi, luas Singapura akan menjadi 820 km persegi.

Darimana tambahan tanah/pasir sampai puluhan km persegi itu? Darimana lagi kalau bukan dari Indonesia, negara yang elite nasional dan elit daerahnya tega menjual tanah dan airnya “secara

harfiah” ke negara tetangganya? Pengerukan pasir dan pengerusan pulau-pulau di kepulauan Riau, bahkan di sekitar Batam dan Bintan, hakekatnya telah menghancurkan ekosistem secara telak. Sekitar 2 miliar meter kubik pasir setiap tahun diambil dari Indonesia untuk reklamasi Singapura.

Sulit dibantah bahwa Singapura, yang mengklaim dirinya sebagai *law-abiding country*, negara yang taat hukum, ternyata telah menjadi tukang tadah pencurian pasir Indonesia. Pada 2001, data resmi di Indonesia menunjukkan bahwa jumlah ekspor pasir kurang dari 75 juta meter kubik, sedangkan Singapura mengimpor pasir sebanyak 300 juta meter kubik. Di Asia Tenggara tidak ada negara yang serampangan dan tanpa pikir ulang dalam menjual aset pasir atau tanahnya ke negara lain, kecuali Indonesia. Selisih jumlah pasir berdasarkan data resmi itu berarti bahwa yang tidak termonitor berasal dari perdagangan pasir ilegal dengan pembeli tunggal, Singapura. Penjualnya adalah pemilik *dredger* dari berbagai bangsa seperti disebutkan di atas.

Volume uang yang berputar dalam perdagangan pasir, legal dan ilegal, memang meliputi belasan milyar dolar Amerika. Pada 2001 harga pasir legal per meter kubik hanyalah 65 sen dolar. Di tangan perusahaan konstruksi Singapura, lewat para *broker* internasional, menjadi sekitar 13 dolar atau lipat 20 kali. Kita tidak boleh lupa bahwa perdagangan pasir, baik legal maupun ilegal, dapat berlangsung karena di Jakarta ada sindikat yang mengamankan pasokan pasir ilegal ke Singapura. Sindikat ini begitu kuat karena melibatkan orang-orang “kuat” Indonesia. “Kuat” saya beri tanda petik, karena sejatinya mereka itu orang yang lemah moral, lemah akhlak, lemah daya juangnya, namun “kuat” nafsu serakahnya untuk menjual sebagian tanah air kepada negara lain.

Dalam kaitan jual-beli pasir atau curi-tadah pasir, masyarakat Malaysia menampakkan harga diri lebih tinggi. Ketika muncul

sindikatan pengeruk pasir yang mengambil pasir di teritori Malaysia dan dijual ke Singapura, tokoh-tokoh Malaysia tampil dengan tegas. Mereka menganggap para penjual pasir itu sebagai pengkhianat bangsa. Titik. Perdagangan pasir Malaysia kemudian berhenti segera.

Di Indonesia, masyarakat pada umumnya, pemerintah dan media massa seolah menganggap pencurian pasir Indonesia yang terjadi siang-malam sebagai biasa-biasa saja, seperti bukan kejahatan. Padahal kerusakan lingkungan yang diderita Indonesia cukup parah. Belum lagi penghinaan tak terucapkan yang sesungguhnya kita derita dari waktu ke waktu. Di sebelah itu kenyataannya dengan reklamasi terus menerus, batas garis pantai Singapura terus bergerak ke luar. Diperkirakan pulau Nipah, pulau milik Indonesia yang sangat dekat dengan garis pantai Singapura suatu ketika dapat dicaplok Singapura pelan-pelan.

Secara resmi kini pemerintah Indonesia sudah melarang perdagangan pasir dan pura-pura Singapura merasa terkejut. Saya katakan pura-pura karena langkah Indonesia itu diyakini tidak akan menghentikan pasokan pasir Indonesia ke Singapura. Sindikat pasir di Jakarta tentu segera berkoordinasi dengan sindikat pasir di Singapura untuk tidak menggubris larangan resmi pemerintah Indonesia itu.

Seorang teman pernah bercerita pada saya bahwa para pencoleng pasir Korea Selatan, Belgia, dan Rusia pernah sebentar tergentar dan waswas dengan larangan Indonesia tersebut. Akan tetapi para pemilik *dredgers* dan sekaligus pencoleng pasir dari Belanda meyakinkan rekan-rekannya kalau tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Katanya, kurang lebih: "Jangan khawatir Bung. Kami tahu persis Indonesia. Kami pernah lama menjajah Indonesia. Kita terus saja menambang pasir Indonesia, cuma kali ini

harus sedikit lebih hati-hati". Si maling pasir Belanda itu ternyata benar.

Ceritera tentang kapal *dredgers* yang sempat ditangkap Angkatan Laut Republik Indonesia cukup tipikal. Berapa pun dan kapan pun *dredgers* pencuri pasir itu ditangkap, selalu ada solusi dari Jakarta plus pemerintah daerah untuk menyelesaikan lewat jalur hukum (yang sudah ditekuk habis) atau lewat penyuaipan (ini yang lebih sering).

Di tahun 2002 misalnya, Angkatan Laut berhasil menangkap 7 kapal yang berlayar secara ilegal di perairan Indonesia. Pengadilan daerah menghukum para pemilik kapal dengan hukuman denda masing-masing sebesar 35 juta rupiah. Untuk membuat jera, Pemerintah Jakarta di zaman Megawati menetapkan supaya hukuman denda itu dinaikkan sepuluh ribu kali, menjadi 315 miliar rupiah. Namun mafia pasir cukup lihai dan ... tuntutan Jakarta itu menguap begitu saja.⁹³ Di tahun 2005, ada 6 *dredgers* ditangkap Angkatan Laut kita. Seingat saya KSAL Laksamana Madya B.K. Sondakh meminta kali ini para perampok pasir ilegal itu jangan dilepas. Namun ceritera selanjutnya bisa ditebak. Mafia pasir lebih perkasa dari seorang KSAL.

Pertanyaan sederhana yang perlu diajukan dalam kaitan ini adalah mengapa negara tetangga kita, Singapura, menganggap kita demikian remeh? Jawabannya tentu karena kita lemah. *Organized crime* dalam bentuk pencurian pasir sepanjang masa terus terjadi, tanpa kita bisa berbuat apa-apa. Ketika Goh Cok Tong berkunjung ke MPR-RI di tahun 2003, saya didampingi para wakil ketua MPR waktu itu, antara lain mengatakan seharusnya kapal-kapal keruk pasir yang melakukan pencurian di teritori Indonesia, ditembak dan ditenggelamkan saja. Tentu, setelah diberi

⁹³ Daily Shipping Newsletter, No. 087, Wednesday, 27-11-2002.

peringatan secukupnya. Mr. Goh nampak kaget, mungkin pendapat saya itu tidak pernah terlintas di benaknya. Masalahnya, apa ada cara lain yang lebih bermartabat bagi Indonesia?

Bukan saja Singapura yang melihat kita dengan sebelah mata. Malaysia, negeri serumpun, juga nampak meremehkan Indonesia. Sebab peremehan itu karena di mata Malaysia, Indonesia lemah dan tidak terlalu beresiko bila Malaysia mengganggu dan kalau perlu menekan Indonesia dalam banyak hal. Setelah mencaplok Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan lewat Mahkamah Internasional pada akhir 2002, Malaysia nampak ingin mengulangi kesuksesannya dengan mengklaim Blok Ambalat sebagai bagian dari Malaysia. Sebegitu jauh kita masih berhasil mengamankan Ambalat sebagai bagian integral wilayah Indonesia. Namun melihat Malaysia yang makin licin dan cenderung licik, Indonesia harus tetap hati-hati dan waspada.

Malaysia cenderung merusak hubungan dengan Indonesia lewat klaim yang sering dibuat oleh Malaysia yang di telinga dan mata Indonesia cukup mengagetkan. Misalnya, musik angklung, batik, reog, lagu rasa sayang hey, lagu Di Bawah Bulan Purnama, budaya Dayak dan lain-lain diklam sebagai berasal dari dan milik Malaysia. Keangkuhan Malaysia juga tampak bagaimana mereka menyebut TKI/TKW kita sebagai Indon dengan konotasi yang sinis. Yang menyakitkan lagi adalah bagaimana para TKI ilegal, setelah ditangkap, dicambuki dulu seperti binatang, sebelum dideportasi kembali ke Indonesia. Asal muasal rentetan kejadian itu begitu jelas, yakni karena Indonesia di mata Malaysia lemah. Ada semacam aksioma dalam hubungan internasional, setiap negara yang lemah, oleh tetangganya akan terus diremehkan dan bahkan diintervensi, dicampur-tangani.

Di atas diuraikan serba singkat bahwa sebuah negara dengan elite yang masih bermentalitas *inlander* memang sulit diharapkan

dapat membela kepentingan nasional (kepentingan bangsa) dengan tegas, bermanfaat dan proporsional. Sayang sekali, masih terlalu banyak elite Indonesia yang belum berhasil lepas dari kungkungan kolonisasi mental, penjajahan mental.

Setelah lebih dari 62 tahun merdeka semestinya para pemimpin (elite) Indonesia sudah berhasil secara relatif membawa Indonesia ke tahapan yang betul-betul merdeka. Alih-alih mencapai tujuan proklamasi yang mulia seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, banyak di antara elite kita yang cenderung menghamba pada kekuatan dan kepentingan asing, secara sadar atau tidak. Dengan kata lain, elite nasional kita justru menjadikan Indonesia sebagai bagian dari korporatokrasi internasional, di bagian paling bawah dalam struktur korporatokrasi itu.

Dalam kenyataan elite yang sedang diberi amanat rakyat justru membuka gerbang buat masuknya kekuatan korporatokrasi itu untuk mengacak-acak dan menjarah sumber daya alam kita, di daratan dan di lautan. Bahkan satelit Palapa kita di ruang angkasa telah dimiliki oleh Temasek ketika kepemilikan Indosat sudah beralih ke Singapura. Pemimpin puncak Indonesia sekarang tidak ubahnya dengan Amangkurat I dan Amangkurat II yang mempersilahkan kompeni Belanda untuk menguasai pulau Jawa. Memang, sejarah ternyata berulang, seperti kata pepatah. Sayang sekali.

Saya teringat pada Al-Qur'an (XVIII:103):

“Katakanlah: Pernahkah kami menceritakan padamu tentang orang yang paling merugi amal perbuatannya? Yaitu orang yang sesat jalan kehidupannya, tetapi merasa sedang berbuat kebajikan.”

Menggadaikan kekayaan alam kita sampai puluhan tahun bahkan setengah abad kepada korporasi asing lewat kontrak karya dan kontrak kerjasama yang merugikan bangsa sendiri adalah

langkah sesat. Mempersilahkan korporasi asing untuk memegang HPH sampai puluhan tahun adalah langkah sesat. Menyerahkan Blok Cepu yang kaya minyak dan gas kepada Exxon Mobil adalah langkah sesat. Membiarkan lebih dari 50% perbankan nasional di tangan asing adalah langkah sesat. Menjual Indosat dan dua tanker raksasa (vvlcc) milik Pertamina kepada pihak asing adalah langkah sesat. Membuat DCA (Persetujuan Pertahanan Bersama) yang sepenuhnya menguntungkan Singapura dan merugikan bangsa sendiri adalah langkah sesat. Menjadikan ibu pertiwi sebagai alas kaki kepentingan kapitalisme internasional adalah langkah teramat sesat. Menegakkan hukum secara tebang pilih dan begitu menggoyahkan rasa keadilan adalah langkah sesat. Namun, masalahnya menjadi tidak sederhana, ketika mereka yang melakukan langkah sesat itu merasa sedang berbuat kebajikan, seolah sedang berkhidmat pada bangsanya.

Sesungguhnya untuk mengetahui apakah sebuah kebijakan nasional yang diambil lurus atau sesat, bermanfaat atau berbahaya tidak terlalu sulit. Ajukan pertanyaan singkat dan mendasar: “siapakah yang akan diuntungkan bila sebuah kebijakan nasional akan diambil? Rakyatkah? Rakyat kecil seperti buruh, tani, nelayan dan keranikah? Konglomeratkah? Korporasi asingkah? Dan seterusnya”. Kalau pikiran kita sudah kena polusi kepentingan sehingga tidak bening lagi, masih ada sepotong nasehat Nabi Muhammad SAW yang berbunyi: “Mintalah fatwa pada hati nuranimu”. Orang bisa berbohong pada orang lain dan berbohong pada masyarakat luas, tetapi orang tidak pernah dapat berbohong pada nuraninya.

Alangkah baiknya kita camkan bersama kata-kata Mahatma Gandhi berikut ini:

“Ada 7 macam dosa di dunia: Kekayaan tanpa kerja, Kesenangan tanpa nurani, Pengetahuan tanpa watak, Perdagangan tanpa moralitas, Ilmu tanpa kemanusiaan, Ibadah tanpa pengorbanan, dan Politik tanpa prinsip”
(*There are seven sins in the world: Wealth without work, Pleasure without conscience, Knowledge without character, Commerce without morality, Science without humanity, Worship without sacrifice, and Politics without principle*).

Sekarang kita menuju Bab terakhir. Bagaimana kekuatan korporatokrasi berhasil mencengkeram Indonesia? Mengapa Indonesia seperti tidak berdaya menghadapi penjajahan ekonomi (sesungguhnya juga penjajahan politik) yang dilakukan oleh kekuatan korporatokrasi? Mari, kita lihat bersama-sama.

B A B V I

KORUPSI PALING BERBAHAYA: *STATE CAPTURE CORRUPTION*

A da banyak cara yang dilakukan oleh kekuatan korporatokrasi internasional untuk menaklukkan sebuah negara berkembang. Pertama, cara brutal lewat kekerasan dan kekuatan militer sehingga negara berkembang yang dijadikan sasaran bertekuk lutut. Negara yang sudah ditaklukkan itu kemudian dijajah secara fisik dan pemerintahan yang dibentuk hakekatnya adalah *puppet government* atau pemerintahan boneka. Afghanistan dan Iraq adalah dua negara yang termasuk dalam kategori pertama ini. Karena Iraq menyimpan cadangan minyak yang sangat besar, perhatian dan rangkaian aksi para *boss* korporatokrasi dipusatkan pada negeri seribu satu malam ini. Presiden Bush Jr. dijadikan ujung tombak untuk melancarkan kepentingan korporatokrat melalui berbagai dalih dan alasan.

Kedua, sebuah negara berkembang ditaklukkan bukan lewat pendudukan militer dan penjajahan fisik, tetapi lewat tekanan dan ancaman kekerasan. Di samping itu para *jackals* atau srigala-srigala korporatokrasi berkeliaran di negara-negara berkembang tersebut untuk memantau apakah rezim atau pemerintahan negara berkembang bersangkutan cukup patuh dan taat serta tunduk

pada kepentingan ekonomi, politik dan geostrategik korporasi-korporasi besar, atau mulai berbahaya karena mulai mencari jalan sendiri. Meksiko dan Columbia barangkali termasuk kelompok kedua. Gelombang politik di Amerika Latin yang menjauh dari Washington dan mengunggulkan kemandirian nasional masih sulit masuk ke dua negara ini.

Ketiga, cara halus dan sama sekali tidak memerlukan ancaman dan tekanan, apalagi kekerasan dan penjajahan fisik. Kalau sebuah negara berkembang sudah pandai mendudukkan diri menjadi negara pelayan atau negara komprador yang patuh, taat dan setia mengabdikan pada kepentingan korporatokrasi internasional, buat apa lagi ancaman, tekanan dan kekerasan? Saya bisa keliru, tetapi berdasarkan pantauan dan bukti-bukti telak yang saya observasi, Indonesia, negara dan negeri kita tercinta, cenderung masuk dalam kategori ketiga ini.

Tujuh elemen korporatokrasi dari luar seperti dibahas di atas tidak perlu mengirimkan *jackals* – untuk meminjam istilah John Perkins – ke negara kita, dan tentu tidak usah menggunakan kekuatan atau kekuasaan militer terhadap Indonesia. Cukup lewat kontrol jarak jauh atau *remote control*, kekuatan korporatokrasi internasional dapat mendiktekan kemauannya lewat para elite Indonesia yang bermental *inlander*, yang bermental jongos.

Pertanyaan berikutnya adalah lewat apa korporatokrasi internasional itu dapat menjarah sumber daya alam internasional kita di daratan, di lautan dan di angkasa Indonesia? Satelit Palapa adalah pulau Indonesia di angkasa yang kini sudah menjadi milik Temasek Singapura. Bagaimana kekuatan asing dapat menjajah ekonomi Indonesia di daratan, lautan dan angkasa Indonesia? Mereka menguasai ekonomi (tetapi sesungguhnya juga politik dan sampai batas tertentu pertahanan keamanan) kita lewat apa

yang dinamakan *state capture corruption* atau *state-hijacked corruption*, yakni korupsi yang menyandera negara.

Kekuasaan negara yang terdiri dari eksekutif, legislatif dan yudikatif secara sadar atau tidak, telah menghamba pada kepentingan asing dan melakukan korupsi yang paling besar dan paling berbahaya karena yang dipertaruhkan adalah kedaulatan ekonomi, kedaulatan politik, bahkan kedaulatan pertahanan keamanan bangsa Indonesia. Istilah *state capture corruption* sangat tepat dan mencakup elemen-elemen pokok kekuasaan sebuah negara. Jadi, bukan sekedar *executive capture*, atau *legislative capture* atau *judicative capture corruption*. Tetapi *state capture* atau *state hijacked corruption*!

Namun sebelum membahas secara singkat jenis korupsi yang paling buruk dan paling berbahaya ini, kita lihat dulu pengertian korupsi secara elementer dan jenis-jenis korupsi. Menurut Transparansi Internasional, korupsi adalah “perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka”.¹

Robert Klitgaard mengajukan rumus sederhana, yaitu:

$$\begin{aligned} C &= D + M - A \text{ atau} \\ \text{Corruption} &= \text{Discretion} + \text{Monopoly} - \text{Accountability}. \end{aligned}$$

Korupsi mengandung unsur-unsur: melawan hukum/melanggar hukum; menyalahgunakan kewenangan/kesempatan/sarana yang ada pada pelaku korupsi karena jabatan/kedudukannya (*abuse of power*); kerugian keuangan/kekayaan/perekonomian negara; dan memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi.²

¹ *Indonesia Corruption Watch*

² *Ibid.*

Secara hukum, definisi korupsi telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU No. 31 tahun 1999 *juncto* UU No. 20 tahun 2001. “Berdasarkan itu, korupsi dirumuskan dalam 30 bentuk, yang dikelompokkan ke dalam kerugian negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi”.³

Definisi korupsi cukup banyak dan masing-masing definisi memiliki perbedaan nuansa. Akan tetapi the *GOPAC Handbook on Controlling Corruption* barangkali dapat kita pakai. Dalam buku itu dikatakan,

korupsi dipandang sebagai penyalahgunaan kekuasaan (wewenang) publik untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok yang menjadi gantungan kesetiaan. Korupsi terjadi bila seorang pejabat publik menerima, meminta, atau meminta paksa bayaran, atau bila agen privat menawarkan sebuah bayaran untuk menerobos hukum demi keuntungan kompetitif atau keuntungan pribadi (*corruption as the abuse of public position for private, individual or group to whom one owes allegiance. It occurs when a public official accepts, solicits, or extorts payments, or when private agents offer a payment to circumvent the law for competitive or personal advantage*).⁴

Di atas adalah pengertian korupsi biasa, bukan korupsi yang menyandera negara yang dapat menyebabkan erosi kedaulatan ekonomi, politik, hukum dan bahkan pertahanan keamanan sebuah negara. Dalam korupsi biasa itu termasuk uang sogokan (*bribery*) dan uang pelicin (*grease payments*) dari tingkat jalanan (*street level*) sampai ke tingkat menengah. Dari sogokan yang diterima pegawai

³ Mufid A. Busyani, “Relevansi Survei Korupsi Dewan”, *Tempo Interaktif*, 25 Januari 2007.

⁴ *Strategy Brief – 2: Understanding Corruption*

kelurahan ketika seseorang mengurus KTP, atau di kantor imigrasi ketika seseorang ingin cepat memperoleh paspor, atau sogokan untuk calo yang mengurus SIM, sampai sogokan untuk memperoleh izin usaha di kantor kabupaten, walikota sampai gubernuran.

Termasuk dalam korupsi biasa adalah korupsi birokratik yang berupa pencurian kekayaan negara oleh birokrat yang menyalahgunakan wewenang. Bila yang melakukan birokrat rendah dan yang dicuri hanya “recehan” korupsi dengan skala kecil-kecilan itu disebut sebagai *petty corruption*, korupsi ecek-ecek. Sebaliknya bila yang melakukan pencurian uang negara itu birokrat tingkat tinggi dan uang yang dicuri itu berjumlah puluhan, ratusan juta, bahkan milyaran rupiah, korupsi itu dinamakan *grand corruption*, korupsi besar-besaran.⁵

Dari segi motivasi atau alasan korupsi, pada dasarnya ada dua macam, yakni yang bersifat *need based* dan *greed based*. Yang pertama adalah korupsi karena desakan kebutuhan atau demi *survival*, demi menyambung kehidupan. Di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya korupsi karena keterpaksaan itu cukup meluas. Yang kedua adalah korupsi karena dorongan keserakahan yang tidak mengenal batas atau limit. Si pelaku korupsi ingin “menelan” dunia. Padahal seperti kata Mahatma Gandhi, dunia diciptakan Tuhan dapat memenuhi kebutuhan manusia, tetapi tidak mungkin memenuhi keserakahan manusia. Manusia yang serakah, apalagi kalau ia menjadi pemimpin, hanya mengenal *satanism* atau ekonomi setan. Seluruh pikiran dan kegiatannya dipusatkan untuk menabrak hukum dan peraturan demi pengumpulan uang dan harta, sekali lagi, secara tanpa batas.

⁵ Wikipedia, the free encyclopedia

Beberapa jenis korupsi di atas tentu harus diberantas, sekali pun saya katakan sebagai korupsi biasa. Di mana pun dan kapan pun korupsi selalu meruntuhkan sendi-sendi moral, peremehan terhadap hukum, menusuk rasa keadilan dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi, dan pada gilirannya juga memperparah kemiskinan. Akan tetapi kita tidak boleh melupakan sedetik pun bahwa ada jenis korupsi yang super destruktif dan berskala negara, yaitu *state capture corruption*. Korupsi itu dilakukan oleh negara sendiri, karena oleh pemerintahan yang sedang berkuasa, negara digadaikan pada kekuatan korporasi asing. Inti dari korupsi subversif ini adalah akomodasi keserakahan korporat oleh sebuah negara yang para elitnya telah menghamba dan tunduk sepenuhnya pada kekuatan korporatokrasi.

Korupsi yang dilakukan oleh pemerintah yang sedang berkuasa yang tunduk dan setia pada kepentingan berbagai korporasi asing pada hakekatnya berkaitan erat dengan kejahatan korporasi (*corporate crime*). Dalam ilmu kriminologi, kejahatan korporasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh sebuah korporasi (misalnya entitas bisnis yang mempunyai hak-hak sebagaimana hak-hak personal)⁶ atau kejahatan yang dilakukan oleh perorangan yang diidentifikasi sebagai korporasi atau entitas bisnis.

Kejahatan korporasi dalam berbagai hal berimpit dengan kejahatan kerah putih (*white-collar crime*) dan kejahatan terorganisasi (*organized crime*). Kejahatan kerah putih atau kejahatan-kejahatan orang berdasi kebanyakan dilakukan oleh mereka yang mewakili kepentingan korporasi dan termasuk dalam *high class*. Sementara kejahatan terorganisir melakukan kejahatan lewat jaringan organisasi yang canggih dan rapih. Berbagai rintangan peraturan hukum dan UU dapat diatasi oleh kejahatan jenis ini. Kejahatan

⁶ *Ibid.*

yang rapih ini merupakan cabang bisnis besar dan menjadi sektor ilegal dari permodalan atau kapital.

Pada pertengahan 1990-an diperkirakan bahwa GCP (*gross criminal product*) kejahatan terorganisir merupakan organisasi terkaya nomor dua puluh di muka bumi, lebih kaya dari 150 negara berdaulat. Produk kriminal kotor (GCP) diperkirakan **membentuk** 20 persen perdagangan dunia.

Yang paling sering, kejahatan korporasi mengejawantah sebagai *state-corporate crime*. Kejahatan ini muncul ketika terjadi persekongkolan antara negara dan korporasi, di mana kekuatan korporasi menaklukkan kekuatan negara sehingga negara menjadi pelayan kepentingan korporasi.⁷

Dalam kaitan ini baik untuk diingat bahwa banyak negara berkembang (Indonesia termasuk di dalamnya) yang sekalipun sudah memperoleh kemerdekaan, masih saja dicekam oleh neokolonialisme korupsi. Negara-negara tersebut (sekali lagi, Indonesia termasuk di dalamnya) tetap berkuat dengan korupsi yang pada masa silam telah dilakukan oleh penguasa kolonial.

Sampai sekarang korupsi di negara berkembang dilihat oleh korporasi-korporasi besar sebagai hal lumrah. Kegiatan-kegiatan destruktif berbagai korporasi terhadap negara berkembang dianggap sebagai akibat kompetisi di pasar global. Secara demikian perusahaan-perusahaan besar menyogok pemerintah yang sedang berkuasa tidak lain agar bisnis mereka dapat meraup keuntungan sebesar-besarnya. Di samping itu negara-negara maju tidak berminat sama sekali menghukum perusahaan-perusahaan mereka yang mendorong korupsi di negara-negara berkembang.⁸

⁷ *Ibid.*

⁸ Strategy Brief – 2, *op.cit.*

Sampai sekarang Indonesia termasuk dalam kelompok sembilan negara terkorup di dunia bersama Haiti, Myanmar, Iraq, Guinea, Sudan, DR Congo, Chad dan Bangladesh. Sementara sepuluh negara dengan insiden korupsi paling kecil adalah Finland, Iceland, New Zealand, Denmark, Singapore, Swedia, Swiss, Norwegia, Australia, dan Belanda.⁹

Nah, di Indonesia, korupsi yang paling berbahaya, jahat dan bejat bukan korupsi biasa (korupsi administratif), tetapi korupsi yang dilakukan oleh pemerintah yang sedang berkuasa, pemerintah dalam arti luas yang melibatkan eksekutif, legislatif, judikatif dan sampai batas tertentu didukung oleh sebagian media massa (sebagian, tidak semuanya), lewat kolusi dengan korporasi-korporasi besar.

State capture corruption ternyata mengejauwanti dalam pembelian berbagai dekrit politik dan pembuatan undang-undang oleh sektor korporat dan penyalahgunaan wewenang dalam mendatangkan keuntungan-keuntungan ekonomi. Dengan kata lain, sebuah korporasi atau gabungan korporasi asing lewat pemerintah yang sedang berkuasa mampu membeli perundang-undangan, mendiktekan kontrak karya di bidang pertambangan, dan bidang-bidang lainnya seperti perbankan, pertanian, kehutanan, pendidikan, kesehatan, pengadaan air dan lain sebagainya. Akibatnya pemerintah itu sendiri hanya menjadi sekedar kepanjangan tangan kepentingan korporasi-korporasi besar.

Akibat korupsi yang sangat jarang diliput media massa dan juga jarang dibahas dalam berbagai seminar dan simposium ini, kekayaan negara, termasuk sumber daya alamnya, dijarah tanpa henti, siang-malam, pagi-petang, selama puluhan tahun oleh korporasi asing dengan bantuan legalisasi, rasionalisasi dan justifikasi

⁹ <http://www.worldbank.org/wbi/governance/data/2006>

pemerintah yang sudah begitu “krasan” menjadi pelayan kepentingan asing. Inilah yang sesungguhnya sudah dan sedang terjadi di Indonesia, dengan proses *crescendo*, proses yang makin parah dan makin parah. Oleh karena itu saya terlalu yakin, bahwa pemerintah yang lupa derita rakyat dan hanya berpikir, bermimpi, bernyanyi, dan bertindak sebagai komprador asing pada hakekatnya adalah pelaku korupsi terbesar.

Apa yang kita alami di negara kita persis seperti apa yang disinyalir oleh BEEPS (*Business Environment and Enterprise Performance Survey*) pada 1999. Setelah meneliti 3000 perusahaan di 20 negara, dikatakan:

Unbundling the measurement of governance and corruption empirically suggests the importance of grand corruption in some countries, manifested in state capture by corporate sector – through the “purchase” of decrees and legislation – and by graft in procurement.

Kata-kata *through the “purchase” of decrees and legislation*, melalui pembelian keputusan-keputusan politik, seperti peraturan presiden, misalnya, dan legislasi adalah cara yang paling efektif dan langsung cara korporasi-korporasi besar menguras kekayaan Indonesia. Ibaratnya, pemerintah membuatkan jalan tol yang mulus buat berbagai korporasi besar untuk membuat ludes kekayaan alam bangsa lewat keputusan-keputusan politik pemerintah dan UU hasil sekongkol dengan manusia-manusia Indonesia di DPR yang rapuh iman dan rapuh kebangsaannya.

Saya yakin seperti akan kita lihat di bawah, pemerintah kita secara sendirian, atau lewat kolusi dengan pihak legislatif, ternyata terlalu sering berfungsi sebagai fasilitator dan protektor penjarahan sumber daya alam Indonesia oleh korporasi-korporasi besar. Apakah pemerintah seperti ini sesungguhnya sedang melakukan pengabdian atau sebaliknya, pengkhianatan pada kepentingan bangsa, silahkan para pembaca memberikan penilaian sendiri.

Iniilah musibah politik yang dialami bangsa Indonesia justru di era reformasi. Musibah politik buatan anak-anak bangsa yang kekurangan gizi patriotisme dan nasionalisme serta menjungkirbalikkan pesan-pesan Pembukaan UUD 1945 ini sesungguhnya berdampak lebih panjang dan lebih parah daripada musibah alam tsunami atau gempa tektonik dan vulkanik yang pernah kita alami.

Supaya lebih meresap kesadaran kita pada bahaya korupsi yang paling berbahaya, tetapi tidak sering kita bicarakan, baiklah saya kutipkan salah satu paragraf penting dari sebuah risalah panjang yang ditulis oleh beberapa pakar yang disponsori oleh *European Bank of Reconstruction and Development* (EBRD) dan *World Bank* (WB). Dikatakan:

“penyanderaan negara oleh perusahaan-perusahaan besar itu berupa usaha-usaha berbagai perusahaan/korporasi untuk membentuk dan mempengaruhi aturan main (misalnya pembuatan UU, hukum, peraturan, dan keputusan) negara melalui pembayaran privat kepada pejabat-pejabat publik.”

Selanjutnya dikatakan:

“Kini sudah ada analisa yang menerangkan bagaimana perusahaan-perusahaan dalam ekonomi transisi memanfaatkan pengaruh politik mereka untuk mendistorsi baik kerangka hukum maupun proses pembuatan keputusan dalam upaya memperoleh rente (keuntungan haram) yang terus menggumpal dengan akibat kerusakan bagi ekonomi dan masyarakat pada umumnya”. (... “*state capture*”, that is, the efforts of firms to shape and influence the underlying rules of the game (i.e. legislation, law, rules, and decrees) through private payments to public officials: There has been analysis of how firms in the transition economies use their political influence to distort both the legal framework and the policy making process in an effort to gain concentrated rents with detrimental consequences for the economy and society at large).

Supaya kita bersikap *fair*, apa adanya dan jujur pada masa lalu kita, pemerintahan sebelum periode Yudhoyono pada dasarnya juga telah bertindak gegabah dalam menghadapi kekuatan asing. Hanya saja, proses cuci-pikiran yang dialami bangsa Indonesia oleh kekuatan neokon, neolib, sebagai pengejawantahan neo-imperialisme, dengan berjalannya waktu justru bertambah parah.

Pada zaman Orde Baru dapat dikatakan ekonomi Indonesia berada dalam supervisi dan pengarahannya kapitalisme Barat. Kemerdekaan kita telah kita gadaikan ke IGGI dan sudah menjadi rahasia umum bahwa para ekonom terkemuka kita yang tergabung dalam apa yang dinamakan mafia Berkerley, sangat tunduk dan setia pada IMF, Bank Dunia dan pengarahannya-pengarahannya Washington. Jadi, jauh sebelum Konsensus Washington dijadikan referensi globalisasi ekonomi, Indonesia sudah lebih dulu ikut kereta ekonomi Washington dan tidak pernah berani keluar dari resep-resep Washington. *Brainwashing* yang kita alami memang sudah berjalan puluhan tahun. Makin lama cenderung makin akut.

Zaman Habibie

Semasa pemerintahan Presiden Habibie diterbitkan UU No.10/1998 tentang Perbankan. Nama resminya UU No. 7/1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan UU No 10/1998. Undang-undang ini jauh lebih eksplisit di dalam mendorong salah satu agenda Konsensus Washington, yaitu liberalisasi sektor keuangan dan perdagangan. Lebih parah lagi, semangat liberalisasi ini dilakukan dengan kebablasan, tanpa penyiapan jaring pengaman dari liberalisasi, terutama manajemen resiko.

Bab Umum dari Penjelasan UU 10/1998 menyebutkan:

“Upaya liberalisasi di bidang perbankan dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat sekaligus meningkatkan kinerja

perbankan nasional. Oleh karena itu, perlu diberikan kesempatan yang lebih besar kepada pihak asing untuk berperan serta dalam memiliki bank nasional sehingga tetap terjadi kemitraan dengan pihak nasional.”

Jiwa liberalisasi ini lalu diterjemahkan ke dalam Pasal 22 ayat 1b yang membebaskan warga negara asing dan atau badan hukum asing untuk mendirikan Bank Umum secara kemitraan dengan warga negara atau badan hukum Indonesia. Lalu ditambah oleh Pasal 26 ayat 2 yang membebaskan warga negara asing dan atau badan hukum asing untuk membeli saham Bank Umum secara langsung dan atau melalui bursa efek.

Dengan aturan di atas, pihak asing bisa memiliki hingga 99% saham bank di Indonesia. Ini jauh lebih tinggi dari komitmen Indonesia di WTO yang pada awalnya adalah 49%, lalu dinaikkan menjadi 51%. Indonesia bahkan lebih liberal dari negara-negara Amerika Serikat, Australia, Kanada, Singapura dan sebagainya yang menerapkan pembatasan kepemilikan asing dalam sektor perbankannya. Juga paling “ngawur” di antara negara-negara Asia lainnya.

Sebagai dampak dari UU Perbankan yang sangat liberal ini, saat ini 6 dari 10 bank terbesar di Indonesia sudah dimiliki pihak asing dengan kepemilikan mayoritas. Hebatnya lagi, pihak asing bisa membeli bank-bank tersebut dengan harga hanya 8-12% dari total biaya rekapitalisasi dan restrukturisasi perbankan yang dikeluarkan oleh negara. Negara pun masih harus membayar bunga obligasi sekitar Rp 50-60 triliun setiap tahun hingga tahun 2030. Kenyataan ini merupakan sebuah demonstrasi kebodohan yang rada memuncak dan sulit dicerna dengan akal sehat. Selanjutnya, saat ini semakin banyak bank-bank kecil yang diakuisisi oleh pihak asing. Bukan itu saja, serbuan bankir asing ke Indonesia pun sudah pada tingkat yang memprihatinkan, tanpa ada regulasi yang

mencegahnya. Padahal, yang datang ke Indonesia adalah bankir asing “kelas rendah”, yang tidak jarang kalah mampu dibandingkan dengan bankir Indonesia.

Zaman Megawati

Pemerintahan di bawah Presiden Megawati Soekarnoputri menerbitkan UU No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Salah satu pilar agenda neoliberal dalam globalisasi ekonomi adalah privatisasi BUMN. Gelombang privatisasi secara besar-besaran dimulai oleh Inggris begitu Margaret Thatcher berkuasa pada akhir dekade 1970an. Semenjak itu negara-negara kreditor (terutama G-7) dan *International Financial Institutions* (IFIs) seperti IMF dan Bank Dunia perlahan-lahan mulai mendesak agenda privatisasi kepada negara-negara miskin seperti Indonesia, jika ingin memperoleh hutang dari mereka.

Dengan adanya krisis hutang yang melanda Amerika Latin pada dekade 1980an, negara-negara kreditor dan IFIs semakin memperberat persyaratan bagi pemberian hutang mereka. Pada tahun 1990 mereka mencapai kesepakatan yang kemudian dikenal sebagai Konsensus Washington. Di sini privatisasi menjadi salah satu prakondisi utama yang harus dilakukan oleh negara-negara yang meminta hutang, baik dalam situasi ekonomi normal maupun ketika mengalami krisis ekonomi. Prakondisi utama lainnya meliputi antara lain stabilisasi ekonomi makro (tanpa memerdulikan dampak sosial ekonominya bagi masyarakat), liberalisasi investasi dan perdagangan, serta liberalisasi sektor keuangan dan perbankan. Prakondisi ini dimasukkan dalam “IMF *preconditions*”, menjadi bahan evaluasi Paris Club (kelompok negara-negara kreditor).

Sebenarnya, jika dilakukan atas dasar filosofi yang benar sebagai negara berdaulat, dan dengan cara yang benar untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat, privatisasi (secara efektif) dapat mendatangkan banyak manfaat (Wibowo, 2003). Sayangnya, sejak zaman Presiden Soeharto hingga saat ini, siapa pun Presidennya, manajemen ekonomi selalu dipimpin oleh tim ekonomi yang jadi kawulo negara kreditor dan IFIs. Di tangan tim ekonomi yang “tunduk patuh sendiko dawuh” kepada kreditor tersebut, privatisasi menjadi kultus globalisasi yang sangat merusak kekuatan ekonomi negara, serta lebih menguntungkan investor dan pelaku keuangan asing. Kasus *listing* Telkom di NYSE, Semen Gresik, dan Indosat adalah contohnya.

UU 19/2003 tentang BUMN adalah UU yang pertama di Indonesia yang memberikan landasan hukum eksplisit terhadap pelaksanaan privatisasi. Namun sayangnya, yang masuk dalam UU tersebut adalah privatisasi dengan konsep dasar yang pro-Konsensus Washington, daripada yang ditujukan bagi kedaulatan dan kemakmuran rakyat banyak.

Berikut ini beberapa contohnya. Pertama, mari kita lihat Bab Umum dari Penjelasan UU BUMN tersebut. Bab ini memberikan landasan filosofis dan pemikiran terhadap Batang Tubuh dari sebuah Undang-Undang. Dalam Bab Umum, butir II, alinea pertama tercantum kalimat “BUMN juga merupakan salah satu sumber negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen dan hasil privatisasi”.

Dari sisi konsep anggaran, kalimat ini sebenarnya salah, karena hasil privatisasi itu bukan kategori penerimaan, tapi pembiayaan. Namun apapun kategorinya, dari sisi filosofis kalimat ini secara implisit mengakui bahwa privatisasi merupakan sumber pembiayaan untuk menutup defisit APBN. Hal ini merupakan perwujudan dari pilar Konsensus Washington, yaitu stabilisasi ekonomi makro, khususnya stabilisasi anggaran, yang dilakukan dengan jalan menjual BUMN untuk menutup defisit.

Kalimat di atas menjadi pembenaran bagi program “privatisasi untuk menutup defisit”. Padahal program seperti ini adalah mirip petani yang menjual sawahnya karena terlilit hutang. Akibatnya si petani menjadi semakin miskin karena kehilangan modal utamanya. Karena menjual dalam kondisi kepepet, seringkali harganya pun sangat murah, dan tidak jarang dibeli oleh rentenir. Hal yang sama terjadi pada BUMN yang diprivatisasi karena untuk menutup defisit, di mana rentenirnya adalah investor, kreditor dan pelaku keuangan asing.

Kedua, dalam Bab Umum butir III dan IV diuraikan mengenai kegagalan BUMN memenuhi tujuannya, bagaimana lingkungan global berubah dengan adanya globalisasi, privatisasi sebagai solusi, dan privatisasi tidak berarti hilangnya kedaulatan negara. Ini semua merupakan argumen Konsensus Washington tentang privatisasi. Yaitu, kepemilikan oleh negara-lah yang dianggap sebagai sumber dari kegagalan dan permasalahan BUMN. Karena itu, solusinya kepemilikan negara harus dikurangi atau dihapuskan.

Padaahal, penyebab utama lemahnya kinerja BUMN adalah intervensi dari elit kekuasaan, politik dan birokrat yang membuat tata kelola BUMN tidak sesuai dengan tata kelola korporasi yang semestinya. Jadi, bukan kepemilikan negara yang menjadi masalah, tapi justru pengelolaannya. Karena itu, semestinya solusinya adalah menghapus intervensi elit di atas, sehingga BUMN bisa dikelola secara profesional. Singapura melalui BUMN-nya (yaitu Temasek Holding) adalah bukti bahwa BUMN bisa menjadi pemain global yang sangat kompetitif.

Ketiga, kriteria BUMN yang dapat diprivatisasi seperti memberikan cek kosong kepada Komite Privatisasi, sehingga bisa dengan mudah disalahgunakan. Pasal 76 menyebutkan persero yang dapat diprivatisasi harus sekurang-kurangnya memenuhi kriteria: (a) industri/ sektor usahanya kompetitif, atau (b) industri/

sektor usaha yang unsur teknologinya cepat berubah. Dalam penjelasan Pasal 76 disebutkan yang dimaksud dengan industri/ sektor usaha kompetitif adalah yang pada dasarnya dapat diusahakan oleh siapa saja, baik BUMN maupun swasta.

Dengan kriteria ini, boleh dikatakan sebagian besar BUMN sudah masuk kriteria “dapat diprivatisasi”, tanpa batasan minimal tentang berapa persen saham pemerintah yang harus tetap dipertahankan, di mana setelah itu tidak boleh lagi ada penjualan saham pemerintah. Dengan kriteria di atas, BUMN yang tersisa seperti Pertamina, Telkom, Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, Garuda dan sebagainya dapat dijual 100%.

Keempat, mekanisme privatisasi pun dibuat dengan kontrol minimal dari DPR selaku lembaga yang mengemban fungsi pengawasan. Pasal 79 hingga 83 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada Komite Privatisasi yang terdiri dari Menko Perekonomian sebagai ketua, dengan anggota Menteri BUMN, Menkeu dan Menteri Teknis yang terkait. Keputusan Komite Privatisasi cukup “dikonsultasikan kepada DPR” (Pasal 82 ayat 2), bukan memerlukan “persetujuan DPR”.

Dengan konstruksi perundang-undangan seperti ini, praktis tidak ada hambatan legal bagi pemerintah untuk melakukan privatisasi besar-besaran. Dari sisi perundang-undangan, ini jelas kemenangan besar Konsensus Washington. Meski demikian, jika secara politik terjadi gelombang penolakan yang cukup kuat, diharapkan agenda di atas dapat dihentikan.

Tahun 2008 akan diwarnai proses penyesuaian ekonomi untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia yang sangat tinggi dan gejolak kredit perumahan yang memukul perekonomian Amerika Serikat. Dalam situasi penuh resiko seperti ini, pemerintahan Yudhoyono (yang notabene sangat pro Konsensus

Washington) diperkirakan akan sangat tergoda untuk menggenjot privatisasi, guna menutup defisit APBN.

Pada era Megawati ada korupsi yang bersifat *state-capture* atau *state hijack* dalam bentuk pemberian *release and discharge*, yaitu pelepasan dan pembebasan para obligor yang berhutang kepada negara dalam jumlah triliunan rupiah. Dilihat dari sisi lain, *R & D*, sebuah penyelesaian di luar hukum itu, hakekatnya merupakan penyan-deraan lembaga-lembaga pemerintahan oleh sejumlah konglomerat bermasalah.

Menteri Keuangan, Ketua BPPN, Menteri BUMN, Jaksa Agung dan para Menteri Koordinator dengan sepengetahuan Presiden, melakukan rekayasa di luar jalur hukum lewat persetujuan MSAA (*Master of Settlement and Acquisition Agreement*), dengan penyalahafsiran Tap. MPR No X/2002 dan Proenas untuk melayani kepentingan beberapa konglomerat jago kandang yang mendirikan bank jadi-jadian. Pada intinya skandal *R & D* itu adalah dilepas dan dibebaskannya para obligor yang melakukan pelanggaran *legal lending limit* atau batas maksimum pemberian kredit dan membuat *non-performing loans* atau katakanlah penilipan uang negara. Mereka membayar kembali kepada pemerintah lewat penyerahan aset berupa sejumlah perusahaan.

Akan tetapi para penilai terhadap aset yang diserahkan ke pemerintah itu mendongkrak harga aset itu jauh di luar kewajaran, sehingga negara dirugikan triliunan rupiah. Sebagai misal Group Salim mempunyai hutang sekitar 52 triliun rupiah, kemudian menyerahkan aset yang dinilai oleh penilai aset seharga sekitar 50 triliun rupiah. Nilai sesungguhnya aset itu hanya 29,5 triliun rupiah sehingga mengalami *marked-up* secara kelewatan. Dengan proses bim-salabim, Group Salim dihadiahi *Release and Discharge* (*R & D*). Bayangkan, “tengku” negara dipegang oleh para konglomerat bermasalah untuk melindungi korupsi mereka.

Agaknya kita akan menemui kesulitan besar untuk mengungkap skandal R & D ini, karena Gedung BI yang menyimpan dokumen-dokumen berkaitan dengan R & D itu terbakar atau dibakar. Data BLBI, skandal yang lebih besar lagi dikatakan juga ikut terbakar atau dibakar. Skandal BLBI dan R & D pada hakekatnya bersifat *state capture*, karena petinggi puncak dan para pembantunya menyerah kalah menghadapi siasat, tekanan dan tipu-tipu muslihat konglomerat bermasalah.

Korupsi yang diderita bangsa dan negara dengan R & D dan BLBI itu memang akhirnya meliputi ratusan triliun rupiah. Akan tetapi sebagai *state capture corruption*, skandal itu belum seberapa dibandingkan dengan jenis korupsi yang sama, namun melibatkan korporasi-korporasi besar internasional. Menghadapi Freeport McMoran, Exxon Mobil, Chevron, dan lain-lain, pemerintah kita makin tidak berkutik lagi.

Zaman Yudhoyono

Pemilu langsung untuk presiden dan wakil presiden (untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia) pada 2004 menghasilkan kepemimpinan nasional baru, duet Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Harapan rakyat pada presiden hasil pilihan langsung itu cukup besar. Diharapkan masalah kembar kemiskinan dan pengangguran mulai teratasi secara signifikan, korupsi sebagai musuh bersama ditanggulangi secara sungguh-sungguh tanpa basa-basi, kehadiran TNI dan POLRI yang kuat untuk melindungi NKRI, kemajuan iptek yang relatif pesat dan, tidak kalah penting, adalah mengembalikan kemandirian dan rasa percaya diri yang sudah mengalami erosi serta memulihkan kedaulatan ekonomi, politik, diplomatik, hukum dan pertahanan keamanan di tengah pusaran globalisasi.

Itulah yang saya yakini yang diharapkan rakyat Indonesia. Rakyat sudah lama rindu pada perubahan dan perbaikan nasib. Tetapi sayang, dengan sisa waktu kepemimpinan Yudhoyono yang tinggal 18 bulan lagi (ketika risalah ini naik cetak), harapan itu sebegitu jauh justru kandas. Sekitar 40 persen rakyat Indonesia di lapisan bawah belum beringsut dari nasibnya yang tetap subsisten, hidup dicekam kemiskinan dan seolah tanpa harapan masa depan.¹⁰ Padahal manusia yang tidak lagi memiliki harapan hakekatnya seperti halnya menghabiskan usia untuk kemudian ditelan oleh bumi dan zaman. Seolah muncul di punggung bumi yang luas hanya hidup untuk menderita, sampai kemudian Sang Maha Pencipta memanggil mereka kembali.

Sesungguhnya tidak terlalu sulit menjawab pertanyaan mengapa bangsa Indonesia tetap melarat, terutama jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain di Asia yang pada dasawarsa 1950-an dan 1960-an kurang lebih memiliki pertumbuhan ekonomi dan sosial sama dengan Indonesia. Jawabannya, kita melarat karena kita belum sepenuhnya bebas dari cengkeraman kekuatan asing di bidang ekonomi (ini yang paling utama) dan juga di bidang politik luar negeri, diplomasi dan bahkan di bidang pertahanan dan keamanan.

Sebuah kenyataan pahit begitu jelas di hadapan kita semua. Pertanyaan apa pun yang berkaitan dengan keinginan untuk melihat Indonesia yang kuat, bermartabat dan berdaulat, jawabannya hanya satu: "Indonesia tidak punya uang cukup untuk melaksanakan keinginan luhur itu". Mengapa pemerintah sampai tidak dapat memenuhi pasal 31 ayat 4 UUD 1945 yang berbunyi "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua

¹⁰ Menurut Mudrajat Kuncoro, sejak tahun 2005, pangsa 40 persen golongan masyarakat miskin penikmat pertumbuhan ekonomi justru semakin merosot. (*Kompas*, 19 Desember 2007). Masalahnya, mungkinkah suatu bangsa dapat tegak berdiri kalau hampir setengahnya hidup tak hendak mati tak mau, bagaikan kerakap hidup di atas batu?

puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional?”

Mengapa ketentuan yang demikian penting buat kemajuan pendidikan bangsa diabaikan oleh pemerintah? Secara konsisten selama 4 kali berturut-turut di era Yudhoyono, pemerintahan pilihan rakyat telah melanggar konstitusi. Bahkan dalam APBN 2008 anggaran pendidikan hanya 69,4 triliun rupiah dari jumlah seluruh APBN yang mencapai 854,7 triliun rupiah. Jadi hanya 8 sekian persen saja. Jawabannya karena negara tidak memiliki cukup uang untuk melaksanakan konstitusi tersebut. Tidak ada uang!

Mengapa jutaan hektar hutan yang sudah gundul tidak dihijaukan kembali? Karena tidak ada uang. Mengapa senjata dan peralatan militer kita sudah banyak yang usang dan tidak diperbaharui? Padahal TNI yang kuat dan tangguh dengan peralatan militer yang modern dan canggih mutlak diperlukan untuk mengawal keutuhan NKRI dari rongrongan eksternal maupun internal? Karena tidak ada uang. Mengapa anggaran untuk menanggulangi demam berdarah, flu burung dan epidemi lainnya tidak memadai? Karena tidak ada uang. Mengapa pencurian di lautan kita, kita biarkan makin merajalela? Mengapa kita tidak membeli kapal-kapal patroli yang dapat menemuk kapal para perompak itu? Karena tidak ada uang. Mengapa infrastruktur kita, jalan dan jembatan di Jawa dan Luar Jawa yang sudah demikian buruk tidak direkonstruksi? Demi kenyamanan rakyat dan demi kelancaran roda ekonomi? Karena tidak ada uang. Pendek kata, setiap keinginan luhur untuk memperbaiki Indonesia pasti terbentur satu masalah tunggal: tidak ada uang.

Jadi mengapa Indonesia menjadi negara melarat? Menjadi negara yang tidak punya uang cukup untuk membangun masa depannya? Sehingga menjadi negara sarat hutang (*debtor*) yang

sudah kecanduan? Bukan negara *gemah ripah loh jinawi, tata tentrem karta raharja*, seperti kata ki dalang? Atau negara kolam susu, negara di mana tongkat kayu dan batu jadi tanaman, udang dan ikan menghampiri dirimu, seperti nyanyian Koes Plus? ¹¹

Ya, tanah kita tanah surga, seperti nyanyian Koes Plus. Namun bangsa kita belum berhasil melepaskan diri dari kungkungan kemelaratan, pengangguran dan telah kehilangan harga diri. Bahkan cenderung kehilangan optimisme seperti diungkapkan Cak Nun. ¹² Sekalipun demikian saya setuju, betapapun optimisme harus dibangkitkan, dengan semangat ilir-ilir untuk membangun kembali negeri yang sudah lumayan berat kerusakannya. ¹³

Kita dapat membangun kembali Indonesia bila kita bersedia memahami duduk perkara permasalahannya. Masalah pokok bangsa kita adalah bahwa semangat kemerdekaan, kedaulatan, dan kemandirian kita sudah hilang untuk kurun waktu yang cukup lama, terlebih-lebih pada era sekarang ini. Indonesia telah tergadaikan ke pihak asing lewat proses *state capture corruption* atau

¹¹ Perhatikan bait-bait "Kolam Susu" Koes Plus:

Bukan lautan hanya kolam susu
Kail dan jala cukup menghidupimu
Tiada badai tiada topan kau temui
Ikan dan udang menghampiri dirimu
Orang bilang tanah kita tanah surga
Tongkat kayu dan batu jadi tanaman

¹² Bait-bait Cak Nun dalam salawatan Kyai Kanjeng cukup menggelitik:

Sayang, sayang, sayang
Kita nggak tahu ke mana pergi
Langkah kita mengabdikan pada nafsu sendiri
Yang bisa kita pandang hanya kepentingan sendiri
Loyang disangka emas
Emasnya dibuang-buang
Kita makin buta, mana utara, mana selatan
Yang kecil dibesarkan
Yang besar diremehkan
Yang penting disepelekan
Yang sepele diutamakan (*Youtube: Broadcast Yourself*)

¹³ Setelah kelompok Kyai Kanjeng menyanyikan Ilir-ilir, Cak Nun berkomentar singkat:

state hijacked corruption. Gara-gara sebagian-besar pemegang amanat rakyat tidak berhasil memerdekakan diri dari mentalitas *inlander*.

Sebelum era Yudhoyono, sudah lama dalam mengelola sumber daya alam kita, pemerintah yang sedang berkuasa bersikap demikian longgar dalam melindungi kekayaan alam dari “penjarahan legal” berbagai korporasi asing. UU No. 77 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sejak semula sudah mengandung kelemahan. Pertama, dalam UU ini tidak dimuat satu ketentuan pun yang menyebutkan bahwa Kontrak Karya sewaktu-waktu dapat diubah jika bertentangan dengan UU itu sendiri. Karena itu dapat ditafsirkan, sekali Kontrak Karya ditandatangani, kontrak itu berjalan terus sekalipun bertentangan dengan UU dan juga bertentangan dengan kepentingan nasional.

Kedua, Kontrak Karya dilakukan antar korporasi asing atau swasta lain dengan Pemerintah Indonesia secara langsung. Dalam praktek industri pertambangan di negara mana saja di dunia ini, tidak ada negara/pemerintah yang berkontrak langsung dengan penanam modal atau kontraktor asing. Pada umumnya negara-negara memakai:

- *Mining License*
- *Mining Permit*
- *Mining Concession*

... Mumpung provinsi ini belum dicaplok orang,
 provinsi itu belum diambil orang,
 provinsi yang sana belum diintervensi asing
 Mumpung kita masih menjadi satu
 Mumpung kita masih diberi Allah
 Kesempatan untuk kembali
 Menata semua ini menjadi
ilir-ilir... tak yo royo-royo di mana-mana
 Indonesia masih sangat kaya raya,
 tanah subur belum kita manfaatkan betul-betul.
 Kita masih sangat bisa membangun kembali
 (Youtube: Broadcast Yourself)

lewat Perusahaan Negara/BUMN. Lagi pula terbatas pada kegiatan eksploitasi saja, bukan penyelidikan umum dan eksplorasi. Secara implisit dimaksudkan bahwa kegiatan penyelidikan umum dan eksplorasi tidak termasuk dalam kontrak karya. Tetapi kata-kata yang digunakan dalam UU tersebut adalah “seyogyanya”. Karena tidak ada larangan eksplisit itulah korporasi-korporasi asing akhirnya lewat Kontrak Karya merambah ke kegiatan penyelidikan umum dan eksplorasi.

Masyarakat awam tidak mengetahui bahwa produksi minyak nasional sebesar sekitar satu juta barrel/hari sekarang ini sudah didominasi oleh korporasi asing. Dari sekitar satu juta barrel per hari itu Pertamina hanya memproduksi sekitar 109 ribu barrel, sedikit di atas Medco yang memproduksi sekitar 75 ribu barrel. Produksi besar adalah oleh *Chevron*, sekitar 450 ribu barrel per hari. Jangan pula dilupakan bahwa 90 persen dari 120 kontrak *production sharing* dikuasai oleh korporasi asing.¹⁴

Hendri Saparini dari Tim Indonesia Bangkit menilai bahwa UU No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi justru memunculkan pengelolaan migas yang amburadul. Saparini mengatakan bahwa UU Migas pada era Megawati telah diijonkan ke pihak asing untuk ditukar dengan hutang. Mulusnya UU yang sarat kepentingan asing itu menunjukkan bahwa “kepentingan korporat dunia dan kerakusan negara Barat telah diakomodasi dengan sangat baik lewat para komprador Mafia Berkerley yang sudah menguasai kebijakan ekonomi Indonesia sejak 40 tahun lalu”.

Sebagian elite kita saya lihat malah sudah lebih jauh lagi dibandingkan “mafioso” Berkerley itu karena mereka menjadikan

¹⁴ Hendri Saparini, “90% Migas Kita Dikuasai Asing”, <http://moslemgen.multiply.com/journal/item/443>

Konsensus Washington yang sudah kadaluwarsa itu menjadi semacam iman ekonominya. Di tangan mereka betul-betul Indonesia sudah diobral murah tanpa martabat, tanpa harga diri. Indonesia diusahakan masuk ke *clearance sale* atau obral internasional dengan slogan kira-kira siapa cepat dapat, dengan harga bantingan.

Kembali ke soal migas. Pemerintahan Yudhoyono kelihatannya tidak berminat untuk mengurangi kesemrawutan migas kita. Mudah-mudahan beberapa unsur dalam pemerintahannya tidak berusaha mengail ikan di air keruh. Kita kutip pendapat ekonom Saparini:

Sekarang ini tata niaga atau kegiatan ekspor-impor migas amat sangat ruwet. Pemerintah melakukan ekspor, tetapi juga mengimpor. Ekspor harus dipertahankan karena bisnis ini menguntungkan sekelompok orang. Ekspor juga mengakibatkan Indonesia harus impor minyak. Mengapa? Inilah yang tidak bisa dijelaskan secara rasional. Namun yang jelas, kegiatan impor migas telah menjadi salah satu dukungan dana bagi penguasa.¹⁵

Tidak kurang dari Kwik Kian Gie, ekonom tangguh yang pernah menjadi menteri keuangan dan Ketua Bapenas, tidak bisa memahami keanehan tata niaga minyak Indonesia. Menurut Kwik angka-angka yang berhubungan dengan minyak dalam APBN cukup membingungkan. Pemasukan minyak, setelah dikurangi pos "subsidi" dalam APBN, menurut Kwik, tidak pernah minus. Ketika BBM belum dinaikkan juga tidak pernah minus. Namun dikatakan pemerintah nombok.¹⁶

Kwik mengajukan pertanyaan teknis: "Apakah semua angka yang berhubungan dengan minyak ada dalam pembukuan PT

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Kwik Kian Gie, "Kemana Sumber Daya Alam dan Mineral Kita?", *Bisnis Indonesia*, 16 Januari 2006.

Pertamina? Ataukah Pertamina hanya boleh mengetahui sebagian saja, dan sisanya tercecer antara Departemen Keuangan, BP Migas, Petral di Singapura, dan beberapa instansi lainnya? ¹⁷ Kwik menceritakan tentang seorang temannya yang akuntan yang pernah bekerja di Arthur Young, salah satu perusahaan akuntan terbesar di dunia. Sang teman mengatakan Arthur Young yang kemudian menjadi Ernst & Young, pernah diminta mengaudit Pertamina. Namun ia angkat tangan, tidak sanggup, karena tidak tahu harus memulai dari mana, “saking kacaunya laporan yang harus diaudit”. ¹⁸

Mengenai Kontrak *Production Sharing* (KPS), masyarakat awam mengetahui bahwa rasio antara Indonesia dan kontraktor berbanding 85%:15%. Sekelebatan bagus. Tetapi nanti dulu! Kontraktor asing yang memegang *operatorship* eksploitasi migas kita itu harus menghitung lebih dulu *cost recovery*. Biaya produksi itu, harus dibayar dulu ke korporasi asing sebagai kontraktor, baru setelah itu hasil bersih dibagi dengan rasio Indonesia 85%, kontraktor 15%. Ketemunya, kata Kwik, Indonesia mendapat 58,98%, sedangkan kontraktor *production sharing* 41,02%. Harap diingat, korporasi asing sangat lihai dalam melakukan *mark-up cost recovery* itu. Kira-kira, lebih lihai dari Pertamina EP, sebuah anak perusahaan Pertamina yang juga berperan sebagai kontraktor.

Seorang ahli pertambangan internasional pernah mengatakan bahwa cuma Indonesia saja, di muka bumi ini, yang masih bertahan lewat KK dalam mengelola kekayaan mineral non-migas. Sementara dalam hal KKS, sepiantas pembagian hasil 85:15 itu sudah bagus dan adil. Tetapi dalam kenyataannya berubah sangat drastis setelah perhitungan *cost recovery*. Akhirnya negara pemangku dan pemilik sumber daya alam dengan 220 juta penduduk, memperoleh

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

hanya sedikit lebih besar dibandingkan korporasi asing yang mewakili beberapa gelintir manusia rakus. Alangkah kurang cerdasnya kita.

Perhitungan *cost recovery* memang menjadi biang kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar, terbukti dengan banyaknya temuan dan penyimpangan oleh BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan). Sebagai misal, Pertamina EP, kontraktor dalam negeri, anak perusahaan Pertamina, membebankan biaya depresiasi, sebagai *cost recovery*-nya atas asset milik PT Pertamina, selama 2004-2008 pada APBN kita sebesar Rp 21,85 triliun. Pembebanan *cost recovery* itu melalui *Work Program and Budget* (WP&B).

Biaya depresiasi 4 tahun sebelumnya sudah dibayar sebagai beban APBN TA 2004, 2005, 2006 dan 2007. Sisa yang dibebankan pada APBN TA 2008 adalah US\$333 juta. Untung, dalam perbincangan antara pemerintah dan para anggota DPR di paniria anggaran, ada seorang pendekar DPR yang menyadarkan kita semua bahwa telah terjadi kesalahan akuntansi yang fatal. Ada rekayasa akuntansi yang merugikan negara sebesar Rp 21,8 triliun selama 5 tahun.

Tidak mungkin di sini diuraikan mendetail kesalahan fatal akuntansi itu. Menurut sang pendekar wakil rakyat, Marwoto Mitrohardjono, akuntansi Pertamina EP menyalahi GAAP (*generally accepted accounting principle*) yang lazim berlaku di dunia modern. Dalam kontraknya dengan BP Migas, yang seharusnya dibayar sebagai *cost recovery* adalah yang berkaitan dengan peralatan yang dibeli setelah kontrak.

Namun menurut Marwoto, ada kebodohan yang sangat ironis. Depresiasi terhadap *fixed assets* milik negara, seperti tanah, sumur migas, bangunan dan lain-lain diwujudkan dalam tunai dan dibayarkan ke Pertamina EP.

Analogi yang dibuat Marwoto sangat sederhana dan jelas. Seseorang punya mobil taksi, kemudian ia membuat kontrak dengan seorang sopir untuk mengoperasikan taksi tersebut. Di samping upah sudah diberikan ke sopir plus harga sepatu, baju dan peralatan yang diperlukan, ia bayar lagi ke sopir itu ongkos penyusutan mobil per tahun secara tunai. Tentu hanya pemilik mobil yang super jahiliah (*super ignoramus*) yang melakukan kebodohan tersebut.¹⁹

Marwoto kemudian menyatakan dengan bahasa yang sangat halus, “tidak tertutup kemungkinan terjadinya penyimpangan akuntansi maupun legalitas dalam masalah klaim *cost recovery* oleh KPS-KPS lainnya selain PT Pertamina EP, yang potensial bisa merugikan negara. Untuk ini perlu dilakukan audit investigasi juga”.²⁰ Di atas saya sebutkan dalam goreng-menggoreng akuntansi, korporasi internasional pasti lebih “cerdas” dan *cunning* dibandingkan Pertamina EP. Kita bisa baca betapa canggih dan luasnya kejahatan korporasi atau kejahatan kerah putih (*white collar*) dalam banyak literatur tentang *state capture corruption*.

Maksud saya, satu KPS dengan PT Pertamina EP saja menyebabkan negara kebobolan sekitar 20 triliun, apalagi dengan lusinan KPS dan KK dengan berbagai korporasi asing yang mengidap patologi keuntungan yang sudah *built-in*, yakni memaksimalisasi profit dengan segala cara.

Karena UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas dianggap lebih menguntungkan pihak asing, sejumlah kalangan melakukan uji

¹⁹ Baca lampiran VI yang ditulis oleh Dr. Marwoto Mitrohardjono tentang terobosan yang ia lakukan dalam menyelamatkan uang negara sebesar, paling tidak, US\$333 juta. Wakil-wakil Departemen Keuangan, Departemen ESDM, BP Migas maupun PT Pertamina Persero sudah menyetujui dibatalkannya rencana pembayaran yang sungguh misterius dan tidak masuk akal itu.

²⁰ *Ibid.*

materiil UU itu ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2004. Namun berbeda dengan nasib UU No 20 tentang Ketenagalistrikan yang dicabut sama sekali karena dianggap bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945, UU Migas itu hanya direvisi atau diamandemen sebagian, yaitu menyangkut pasal 12 ayat (3), pasal 22 ayat (1) dan pasal 28 ayat (2).

Pasal 12 ayat (3) menyebutkan bahwa Menteri menetapkan badan usaha atau bentuk usaha tetap yang diberi wewenang melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pada wilayah kerja sebagaimana yang dimaksud ayat (2). Menurut Mahkamah Konstitusi kata-kata “diberi wewenang” bertentangan dengan UUD 1945. Pasal tersebut memberikan penafsiran bahwa kewenangan yang dimiliki pemerintah telah diserahkan sepenuhnya kepada badan usaha atau bentuk usaha tetap.

Sementara itu pasal 22 ayat (1) menjelaskan bahwa badan usaha atau bentuk usaha tetap wajib menyerahkan paling banyak 25 persen bagiannya dari hasil minyak dan/atau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Oleh Mahkamah Konstitusi kata “paling banyak” harus diganti menjadi “paling sedikit”. Sedangkan pasal 28 ayat (2) menyebutkan harga bahan bakar minyak dan harga gas bumi diserahkan kepada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. Pasal ini menurut Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945 karena dalam penetapan harga minyak dan gas tidak diserahkan mekanisme pasar, tetapi melalui kewenangan pemerintah.

Dengan demikian ketiga pasal tersebut menurut Mahkamah Konstitusi tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945. Mahkamah Konstitusi memerintahkan agar putusan tersebut dimuat dalam **berita** negara paling lambat 30 hari kerja sejak keputusan tersebut

dibacakan.²¹ Yang aneh adalah sampai buku ini ditulis (akhir 2007), keputusan MK itu tidak dihiraukan oleh pemerintah, sehingga nampaknya tidak akan ditaati.

Dalam pada itu, 8 orang anggota DPR-RI (Zaenal Arifin, Sony Keraf, Alvin Lie, Ismayatun, Hendarso Hadipurnomo, Bambang Wuryanto, Dradjad Wibowo, dan Tjatur Sapto Edy) mengajukan uji materiil pasal 11 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas ke MK. Mereka mengharap DPR-RI ikut dimintai persetujuan sebelum sebuah Kontrak Kerja Sama (KKS = Kontrak *Production Sharing*/KPS) ditandatangani oleh Pemerintah, supaya Pemerintah tidak akan sewenang-wenang lewat BP Migas membuat sebuah KKS/KPS dengan pihak asing.

Dalam pasal 11 ayat (2) itu disebutkan bahwa “setiap kontrak kerjasama yang sudah ditandatangani harus diberitahukan secara tertulis kepada DPR”. Dengan kata lain DPR hanya diberitahu barang yang sudah jadi. Menurut kuasa hukum para pemohon uji materiil itu, Januardi Haribowo SH, pasal 11 ayat (2) itu bertentangan dengan pasal-pasal 11 ayat (2), 20A ayat (1) serta 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945. Namun sayang sekali, permohonan tersebut ditolak oleh MK dengan alasan para pemohon tidak mempunyai *legal standing*.

Menurut Mahkamah Konstitusi ada semacam keanehan, para anggota DPR ingin membatalkan keputusan yang pernah dibuatnya sendiri. Namun ada dua hakim Mahkamah Konstitusi yang berbeda pendapat. Sesungguhnya DPR dapat terus melanjutkan pengawasannya terkait dengan pembuatan perjanjian dengan negara lain. Di samping itu kalau DPR hanya diberitahu, maka terjadi

²¹ *Tempo*interaktif, 21 Desember 2004; *Kompas*, 22 Desember 2004; dan sejumlah koran sekitar 21-22 Desember 2004.

bentuk pengingkaran keikutsertaan rakyat sebagai pemilik kolektif sumber daya alam.

Dengan demikian kita akan melihat proses pengurusan kekayaan alam kita tanpa henti oleh pihak asing lewat berbagai KKS/KPS yang diputuskan Pemerintah. Eksekutif, legislatif dan yudikatif secara sadar atau tidak telah menjadi pelaku *state capture corruption*. Bila media massa juga sampai cenderung membela atau tidak peduli pada penguasaan sumber daya alam oleh asing yang sudah mendapat payung hukum/UU itu, maka sulit dibayangkan masih ada cara untuk menghentikan baik KKS/KPS di sektor migas maupun KK di bidang mineral non-migas yang bersifat ugalkan.²²

Penguasaan asing atas Indonesia bukan saja dibidang pertambangan, tetapi juga di perairan nasional kita. Siswono Yudho Husodo mengemukakan bahwa perairan nasional kita sudah dikuasai asing: sekitar 46,8% muatan laut dalam negeri dikuasai oleh kapal berbendera asing; dan angkutan ekspor RI: hanya 5% kapal nasional.²³

Bila sumber daya alam kita sudah kita persembahkan ke haribaan asing, perairan nasional kita sudah didominasi asing, lebih dari 50% perbankan nasional dikuasai asing, telekomunikasi juga dipegang asing (Indosat dimiliki Temasek Singapura, di samping 35% saham Telkom dan 98% saham XL juga milik asing), industri

²² Untuk mengetahui lebih lanjut tentang super-kebodohan yang telah kita lakukan, baca lampiran Politik Migas dan Mineral dalam Angka dan Fakta oleh Tjatur Sapto Edy, terutama Tabel 1.5. Betul-betul sumber daya alam Indonesia sudah digadaikan untuk puluhan tahun dengan harga *flat*. Tidak peduli harga gas di pasaran internasional sudah lipat dua, atau berapa kali pun, pokoknya harga yang dibayar kontraktor sama sepanjang masa. Indonesia benar-benar sudah tersandera lewat *state capture corruption* yang dilakukan oleh para elite yang tidak bertanggung jawab.

²³ Butir-butir pemikiran Pak Siswono disampaikan pada acara Diskusi Roundtable PAN "Save the Nation", 13 Desember 2007, Jakarta.

otomotif juga dikuasai asing, bahkan Perjanjian Kerjasama Pertahanan (DCA) dengan Singapura juga telah merugikan kepentingan Pertahanan keamanan Indonesia, lantas apa yang perlu dilakukan supaya makin sempurna cengkeraman asing atas Indonesia? Buatlah UU penanaman modal yang pro asing dan merugikan bangsa sendiri!

Dan UU No. 25/2007 Tentang Penanaman Modal sudah diterbitkan adalah hasil kolusi eksekutif-legislatif kita. Undang-undang ini dapat dikatakan sebagai salah satu dari *final nails on the coffin*, sebagai paku-paku penutup terhadap kelengkapan agenda Konsensus Washington di Indonesia. Dari sisi ekonomi, harus diakui bahwa sejak krisis ekonomi 1997/1998, iklim usaha di Indonesia sangat tidak kompetitif jika dibandingkan dengan negara-negara sedang berkembang lainnya. Karena itu undang-undang yang dapat memberikan kemudahan dan fasilitas kepada penanam modal, khususnya investor domestik, jelas sangat diperlukan.

Namun semestinya kemudahan dan fasilitas investasi itu diarahkan untuk membangun kapasitas ekonomi dan kapasitas teknologi bangsa, dengan tujuan akhir menjamin kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan yang mulia tersebut ternyata justru dibengkokkan oleh para komprador Konsensus Washington yang sedang berkuasa di pemerintahan maupun DPR. Sayangnya, banyak legislator yang tidak memahami Konsensus Washington dan bahayanya, sehingga membiarkan begitu saja UU Penanaman Modal diisi oleh pasal-pasal pengamanan liberalisasi dan penguasaan asing di Indonesia.

Pasal-pasal pengamanan kepentingan asing ini terutama terlihat dalam Bab V "Perlakuan terhadap Penanaman Modal". Bab ini bahkan lebih liberal dari negara-negara maju, karena tidak disertai dengan *escape clause* sebagai langkah pengamanan kepentingan dalam negeri.

Pertama, dalam pasal 6 ayat 1 disebutkan “Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun... sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal ini merupakan penerapan dari prinsip “*non-discriminatory*” dalam putaran-putaran *World Trade Organization* (WTO). Dengan prinsip ini, suatu negara tidak boleh memberikan perlakuan istimewa kepada investor domestik, jika perlakuan tersebut tidak diberikan juga kepada investor asing. Antar investor asing yang berbeda negara pun tidak boleh ada perlakuan yang berbeda, kecuali dari negara yang sudah ada perjanjian bilateral atau multi-lateral tertentu. Sebagai contoh adalah melalui *free trade agreement*, *mutual recognition*, atau *regional trade agreement* seperti AFTA (*Asean Free Trade Agreement*). Perlakuan istimewa tersebut bisa dalam bentuk perpajakan, kontrol kualitas dan standarisasi, kepabeanan dan sebagainya.

Dengan adanya pasal di atas, negara bisa digugat oleh investor asing jika memberikan perlindungan terhadap pasar-pasar dan toko-toko tradisional yang diserbu oleh *hypermarket* asing. Gugatan juga bisa diajukan investor asing jika negara memberikan kemudahan kredit dan perpajakan bagi investor domestik yang ingin mengembangkan industri mobil nasional, industri baja, maupun manufaktur lainnya. Hal yang sama juga bisa terjadi kalau negara memberikan perlindungan lunak kepada sektor-sektor yang terancam oleh barang dan jasa impor, seperti sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, makanan, tekstil dan produk tekstil, sepatu dan sebagainya.

Padahal di negara-negara maju, prinsip *non-discriminatory* tersebut diterapkan dengan *escape clause* untuk melindungi kepentingan dalam negerinya. Bentuknya bermacam-macam, tapi biasanya terkait dengan lingkungan, kesehatan dan keselamatan konsumen. Uni

Eropa, misalnya, banyak menerapkan persyaratan ecolabel dan kesehatan terhadap produk-produk impor. AS menerapkan syarat keamanan konsumen terhadap produk mainan dari China. Langkah ini bahkan ditopang kampanye besar-besaran untuk menciptakan opini bahwa “produk mainan dari China tidak aman”. Anehnya, Indonesia justru sok gagah-gagahan menerapkan prinsip tersebut tanpa *escape clause*. Akibatnya, industri dan pelaku usaha nasional akan semakin sulit bertahan dari serbuan asing. Apalagi untuk menguasai teknologi. Mengapa kita harus “carmuk” atau cari muka ke Washington?

Kedua, Pasal 7 ayat 1 menyebutkan “pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak penanaman modal, kecuali dengan undang-undang”. Jika nasionalisasi dilakukan, pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar (pasal 7 ayat 2). Jika antara pemerintah dengan penanaman modal tidak tercapai kesepakatan, penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 7 ayat 2 disebutkan yang dimaksud “harga pasar” adalah harga yang ditentukan menurut cara yang digunakan secara internasional oleh penilai independen yang ditunjuk para pihak. Penjelasan Pasal 7 ayat 3 menyatakan, yang dimaksud dengan “arbitrase” adalah cara penyelesaian sesuatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 7 ini adalah salah satu pasal paling konyol dalam UU Penanaman Modal. Dengan pasal ini, pihak-pihak asing yang di masa lalu memperoleh hak penguasaan tambang dengan cara-cara zholim dan penuh KKN, menjadi hampir 100% terlindungi dari tuntutan kepemilikan oleh negara. Karena itu, saya menduga kuat pasal ini merupakan pesanan dari investor asing, terutama

yang bergerak di bidang pertambangan. Kekonyolan pasal ini antara lain dalam bentuk:

- a) Membuat nasionalisasi atau pengambil-alihan “hampir mustahil” dilakukan terhadap kontrak-kontrak bermasalah yang dimiliki pihak asing.
- b) Menyamakan negara dengan investor sebagai “sesama para pihak”. Ini merusak arti Indonesia sebagai “negara berdaulat”. Sebuah puncak kebodohan.
- c) Penggunaan harga pasar yang digunakan secara internasional, berdasarkan penilaian dari penilai independen. Dengan lemahnya jasa penilaian di Indonesia, bisa dipastikan penilai independen ini berasal dari perusahaan dunia seperti Ernst and Young, Lehman Brothers, Price Waterhouse dan sebagainya. Apakah belum cukup pengalaman buruk kita menggunakan para penilai asing dalam menghitung kewajiban BLBI, rekapitulasi perbankan dan penjualan aset eks BPPN? Di mana, akibatnya negara dirugikan ratusan triliun, sementara penilai asing tersebut sulit dimintai pertanggungjawaban hukumnya? Dengan pasal ini, kalau misalnya negara akan membeli kembali Indosat, harga Indosat bisa dibuat sangat mahal sekali oleh para penilai asing tersebut, sehingga di luar kemampuan keuangan negara.
- d) Penyelesaian melalui arbitrase semakin menambah sulit langkah nasionalisasi atau pengambil-alihan, karena negara harus bersepakat dengan investor asing. Mana mungkin investor asing yang sudah terlanjur menikmati keuntungan luar biasa besar dari aset-aset kekayaan alam Indonesia bersedia bersepakat dengan negara untuk diambil alih? Mungkin mereka baru akan bersepakat kalau aset atau kekayaan alam tersebut sudah hancur dan tidak bernilai,

malah memerlukan biaya yang besar untuk merehabilitasinya. Sehingga ketika dikembalikan, negara justru harus menanggung biaya rehabilitasi yang sangat besar.

Ketiga, dari sisi bidang usaha pun UU No 25/2007 sangat luar biasa liberalnya. Menurut Pasal 12, “semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan”. Padahal, dalam UU No 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing, bidang-bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak dinyatakan “tertutup untuk penanaman modal asing secara penguasaan penuh”. Bidang-bidang tersebut meliputi pelabuhan, produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum, telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, air minum, kereta api umum, pembangkit tenaga atom dan media massa.

UU No 25/2007 menghapus begitu saja pembatasan di atas tanpa ada kajian yang komprehensif tentang dampaknya bagi kepentingan nasional di bidang politik, strategis, pertahanan keamanan, ekonomi dan kesejahteraan sosial. Pembatasan porsi kepemilikan asing juga sama sekali tidak diatur oleh UU No 25/2007, padahal negara-negara maju pun mempunyai berbagai pembatasan.

Para pembuat UU No. 25/2007 mungkin berargumen, pemerintah bisa melakukan pembatasan tersebut dengan menerbitkan Peraturan Presiden, berdasarkan kriteria seperti kesehatan, moral, kebudayaan dan sebagainya seperti diatur Pasal 12 ayat (3), (4), dan (5). Namun dengan pemerintahan yang dikuasai komprador Konsensus Washington, bagaimana mungkin mengharapakan Peraturan Presiden seperti itu akan diterbitkan? Apalagi, kedudukan

Peraturan Presiden jauh di bawah UU dalam hirarki peraturan perundang-undangan kita.

Kekonyolan di atas masih ditambah dengan berbagai ketentuan tentang pertanahan dan tenaga kerja yang sangat longgar, seperti Hak Guna Usaha 95 tahun. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa UU No 25/2007 ini membuat Indonesia seperti *wild west* yang dengan suka rela menyerahkan dirinya dicaplok kapital besar, terutama pihak asing. Peraturan Presiden itu sudah diterbitkan, yaitu Peraturan Presiden No 76 Tahun 2007 tentang Kriteria Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 Tentang Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Kalau kita baca teliti Peraturan Presiden No 77/2007 itu kita akan tidak percaya dengan apa yang kita baca. Saya yakin memang Pemerintah kita sudah lupa, alpa, dan keliru untuk tidak mengatakan sudah "keblinger". Dalam bagian c. **Kepemilikan Modal** dalam Peraturan Presiden itu, Indonesia dijual habis-habisan. Sebagai misal Batas Kepemilikan Modal Asing di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, pihak asing diperbolehkan memiliki 95% (sembilan puluh lima persen) dalam bidang usaha: Pembangkit Tenaga Listrik; 95% Jasa Pengeboran Minyak dan Gas Bumi di Lepas Pantai Indonesia Bagian Timur; 95% Transmisi Tenaga Listrik; 95% Distribusi Tenaga Listrik; 95% Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir; 95% Jasa pengeboran Minyak dan Gas Bumi di Darat; 95% Pengembangan Tenaga Peralatan Penyediaan Listrik; dan lain sebagainya.

Di sektor Pekerjaan Umum, kepemilikan asing boleh sampai 95% untuk Pengusahaan Jalan Tol dan 95% Pengusahaan Air

Minum. Di sektor Pertanian, asalkan luas lahan melebihi 25Ha, kepemilikan asing boleh sampai 95% untuk bidang usaha Budi Daya Padi; 95% Budi Daya Jagung; 95% Budi Daya Ubi Kayu; Budi Daya tanaman pangan lainnya selain ubi kayu dan jagung; 95% pembenihan/pembibitan palawija; 95% usaha industri perbenihan; 95% usaha perkebunan dan/atau industri pengolahan hasil kelapa sawit; dan lain sebagainya. Bagaimana kita dapat membela petani kita, kalau sektor pertanian juga sudah kita persembahkan ke pihak asing?

Tidak kalah mengerikan adalah diperbolehkannya kepemilikan asing sampai 49% di bidang-bidang usaha Pendidikan Dasar dan Menengah; 49% Pendidikan Tinggi; dan 49% Pendidikan Non-Formal. Angka 49% kepemilikan asing di sektor pendidikan mengisyaratkan bahwa para pelajar dan mahasiswa kita nanti dapat lupa pada ke-Indonesia-annya. Keputusan politik pemerintah yang membuka pintu buat pihak asing untuk ikut berkiprah di dunia pendidikan Indonesia pada hakekatnya keputusan politik yang pendek akal dan cekak wawasan.

Pendidikan, sebuah upaya bangsa bukan saja untuk sekedar mencerdaskan anak didik, tetapi juga menanamkan rasa cinta terhadap tanah air, semangat membela dan berkorban untuk negara dan bangsa, telah dianggap sebagai komoditas ekonomi. Dus, perlu liberalisasi pendidikan. Silahkan pihak asing menanam modal untuk ikut mendidik anak-anak Indonesia. Saya setuju dengan Sofian Effendi, mantan Rektor UGM, pendidikan bukan sebatas hitungan untung-rugi. Di dalam pendidikan ada visi dan misi ideologi bangsa. Edy Suandi Hamid, Rektor UII Jogjakarta juga prihatin, karena pendidikan yang dikembangkan orang asing tentu otomatis sudah mengandung pandangan sosio-kultural bangsa bersangkutan. Pandangan yang tentunya berbeda dengan pan-

dangan, wawasan atau *worldview* bangsa Indonesia yang diwariskan oleh para pendahulu dari zaman ke zaman.

Mengundang pihak asing untuk ikut berkiperah di dunia pendidikan, yang sesungguhnya merupakan hak eksklusif konstitusional negara, menunjukkan secara telak bahwa mental *inlander* memang masih ada, wujud, eksis, betul-betul masih menancap dalam pikiran dan hati sebagian pengelola pemerintahan. Dunia pendidikan kita di masa datang akan menjadi belukar nilai, belukar *Weltanschauung*, dan belukar moral serta etika. Kalau liberalisasi pendidikan itu terbatas untuk perguruan tinggi, mungkin tidak terlalu gawat akibatnya. Akan tetapi pendidikan dasar dan menengah juga ikut diliberalisasi dengan alasan sesuai aturan WTO. Alangkah bebalnya kita sebagai bangsa. Tatkala bangsa-bangsa di segenap penjuru dunia sedang menggugat WTO sebagai alat imperialisme ekonomi Barat, sebagian anak bangsa masih memuja-memuji WTO. Luar biasa!

Dari apa yang telah diuraikan serba singkat di atas menjadi jelas bahwa negara kita sudah 62 tahun merdeka, tetapi masih saja miskin, terbelit hutang, citra internasionalnya lemah, dan cenderung berjalan di tempat, ditingkahi langkah ke belakang dan belum nampak cahaya terang di ujung terowongan yang relatif gelap. Dan yang lebih menyedihkan lagi adalah realitas di mana bangsa kita perlahan tapi pasti kehilangan kedaulatan ekonomi, politik, ekonomi dan telekomunikasi. Kita sudah dan sedang menjadi bangsa pelayan.

Selama kita terus saja merasa tidak ada yang salah dengan *state capture corruption* yang makin menggurita dengan berjalannya waktu, maka masa depan bangsa kita terus saja seperti sekarang ini. Rakyat makin tahan untuk hidup menderita dan lupa pada hak-haknya yang paling asasi, yaitu hidup layak dan terhormat sebagai bangsa berdaulat dan merdeka.

Di samping kita diingatkan oleh Ravi Batra bahwa korupsi kebijakan ekonomi adalah korupsi yang paling jahat dan bejat. Patrick Awuah, tokoh intelektual Ghana menyatakan hal yang lebih kurang sama. Awuah mengatakan:

”Para pemimpin dan manajer ekonomi Ghana membuat kebijakan-kebijakan buruk yang menyesakkan nafas yang membawa ekonomi kami ke tubir kehancuran” (*The leaders and managers of Ghanaian economy are making breath-takingly bad decision which brought our economy to the brink of collapse*).²⁴

Terus terang, dalam hal ini Indonesia mirip Ghana.

Tanpa basa basi saya harus mengatakan di sini bahwa para penguasa/ tokoh-tokoh pemerintahan di era Yudhoyono sekarang ini jelas telah membuat kebijakan pertambangan, pertanian, pendidikan, kesehatan, perbankan dan hampir semua bidang kehidupan nasional yang lainnya cenderung merugikan bangsa Indonesia sendiri. Akibat kebijakan yang mengikuti resep-resep neokon, neolib dan taat asas pada *Washington Consensus* yang makin usang, negara dan bangsa Indonesia telah dirugikan dalam jumlah bukan saja puluhan atau ratusan, tetapi ribuan triliun rupiah. Kebijakan ekonomi Yudhoyono lebih pro kepentingan korporasi asing. Hal ini sudah kelewat jelas.

Jika korupsi adalah penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok dan merugikan bangsa serta negara, maka pemerintah yang membuat kebijakan menggadaikan negara, adalah pelaku korupsi yang paling besar. Tidak bisa lain. Pemerintah adalah koruptor terbesar karena membuat kebijakan yang bersifat super-koruptif.

Bila kita baca teliti Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 itu ada keanehan yang mencolok. Lebih dari 60 jenis usaha ditulis

²⁴ Diakses dari Youtube, *Broadcast Yourself*

dalam bahasa Inggris tanpa ada padanannya dalam bahasa Indonesia, sehingga kesimpulannya, penulis draft Peraturan Presiden itu hanya menyontek peraturan negara lain, entah negara mana. Atau kemungkinan kedua memang ada tim korporasi asing yang menuliskan rancangan naskah Peraturan Presiden itu.

Campur tangan korporasi asing dalam membuat rancangan berbagai naskah UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan lain-lain merupakan cara yang paling canggih dan tidak nampak vulgar, karena jarang terdeteksi oleh publik atau media massa. Di atas telah diuraikan, cara paling efektif yang dilakukan korporasi-korporasi internasional untuk menjarah sumber daya alam, kekayaan hutan, perkebunan dan lain-lain adalah lewat “pembelian” legislasi. Sekali lagi, inilah yang dinamakan *state capture corruption*.

Revrisond Baswir benar ketika ia mengatakan bahwa banyak UU di negara kita merupakan pesanan kartel neokolonial.²⁵ Baswir mencatat bahwa Bung Karno dulu selalu mengingatkan bahwa imperialisme internasional sejatinya belum pernah surut dari panggung dunia. Kekuatan korporasi-korporasi besar bekerjasama dengan dan menggunakan World Bank, IMF, Asian Development Bank dan lain-lain untuk “menaklukkan” negara-negara berkembang yang bersedia ditaklukkan.

Kata Baswir²⁶:

“Undang-undang kita itu kebanyakan mereka yang membuat. Misalnya UU Migas, di situ jelas peran World Bank; UU BUMN di situ memainkan peranan Price Waterhouse Cooper; UU kelistrikan – di sini lagi-lagi ketemu peranan Asian Development Bank. Nah, mereka-mereka itulah yang bermain”.

²⁵ Banyak UU Pesanan Kartel Neo Kolonial, <http://achmad supardi.blogspot.com/2007/08>

²⁶ *Ibid.*

Kalau Pemerintah mengatakan lebih mengutamakan kepentingan rakyat kecil, kepentingan dan kehidupan kaum buruh, tani, nelayan dan pegawai-pegawai kecil, saya kira masyarakat sudah tidak percaya. Karena kenyataan riil berseberangan dengan pernyataan-pernyataan pemerintah. Dalam kaitan ini apa yang dikatakan oleh I.F.Stone, puluhan tahun silam masih relevan. Stone berwanti-wanti:

"All governments are run by liars and nothing they say should be believed" (semua pemerintahan dijalankan oleh para pembohong dan apa yang mereka katakan tidak perlu dipercaya).

Korupsi yang menyandera negara, korupsi massif berskala mega yang membuat Indonesia tidak kuasa bangkit, terus berjalan. Pemerintahan Yudhoyono tidak menampakkan upaya untuk keluar dari subordinasi korporatokrasi internasional. *What's to be done?* Apa yang perlu kita lakukan bersama?

Berikut ini butir-butir pemikiran sederhana untuk kita renungkan bersama. Saya sangat berbahagia bila tokoh-tokoh muda bangsa dari berbagai kalangan dan latar belakang bersedia berbagi pemikiran tentang apa yang saya sampaikan sejujurnya dan seadanya ini.

B A B V I I

KESIMPULAN DAN SARAN: Apa Yang Harus Kita Kerjakan?

Berkat kemajuan transportasi modern, perkembangan ilmu dan teknologi, termasuk percepatan komunikasi dan informasi internasional, dalam 20-30 tahun terakhir, proses globalisasi multi-dimensional melanda seluruh muka bumi tanpa kecuali. Seluruh negara di lima benua tidak bisa dan tidak mungkin menghindari proses globalisasi ekonomi, perdagangan, keuangan, politik, budaya, seni dan bahkan gaya kehidupan.

Akhir abad 20 dan awal 21 menyaksikan proses globalisasi dan perpindahan komoditas, manusia dan ideologi atau pemikiran yang berjalan cepat dalam dunia yang sudah tanpa batas. Peran utama negara bangsa (*nation states*) sebagai pemain terpenting dalam panggung internasional mulai disaingi, bahkan cenderung digeser oleh pendatang-pendatang baru.

Para pendatang baru itu yang paling menonjol adalah korporasi-korporasi besar yang bersifat multinasional yang memiliki jaringan politik, militer, perbankan, intelektual dan media massa yang demikian kuat. Korporasi-korporasi besar tersebut memiliki ideologi tunggal, yaitu menghimpun/mengakumulasi modal sebanyak-banyaknya untuk memperoleh keuntungan setinggi-tingginya. Ciri

yang sama dari seluruh korporasi besar adalah patologi keuntungan/profit dan keserakahan yang cenderung mengabaikan pagar hukum, moral, keadilan, kelestarian lingkungan dan kemanusiaan pada umumnya.

Globalisasi ekonomi dengan segala implikasi politik, ekologi, dan sosiologi direkayasa oleh kekuatan-kekuatan kapitalisme Barat dengan menjadikan IMF, World Bank dan WTO sebagai penggerak utama. Berbagai mantra globalisasi seperti perdagangan bebas, deregulasi pasar, privatisasi badan usaha milik negara, liberalisasi pasar modal, nilai tukar mengambang dan lain sebagainya tidak dapat menyembunyikan sebuah tujuan pokok.

Tujuan pokok itu adalah memelihara *status quo* yang berupa keunggulan ekonomi dan kemakmuran untuk negara-negara Barat serta pelestarian hegemoni atau dominasi ilmu pengetahuan dan teknologi, politik, dan militer mereka atas negara-negara berkembang. Bisa juga dikatakan tujuan pokok itu adalah memelihara dan mengawetkan keunggulan multi-dimensional negara-negara mantan kolonialis-imperialis atas negara-negara mantan jajahan.

Akan tetapi tidak semua negara-negara bekas jajahan begitu saja menuruti keinginan negara-negara bekas penjajah. Di antara negara-negara yang sukses memukul balik gelombang globalisasi dan politik itu adalah Iran, India, China, Malaysia, Argentina, Venezuela, Bolivia dan lain sebagainya. Negara-negara yang bermartabat ini berhasil menjadi tuan rumah di negeri sendiri, berkat sukses melakukan dekolonisasi mental dan sukses membangun sistem sosial, ekonomi dan politik yang lebih kurang mandiri, merdeka dan berdaulat.

Di akhir abad 20 dan awal abad 21, negara kapitalis yang tidak melepaskan sidrom imperialismenya adalah Amerika Serikat. Sebagian elite politik, militer, dan intelektual di sana tidak pernah melepaskan impian *Pax Americana*. Doktrin Bush yang berwatak

arogan, imperialistik dan kurang lebih *immoral* dilihat dari moral dan hukum internasional pada dasarnya merupakan pengejawantahan *Pax Americana* yang semakin tidak realistis. Kini ambisi itu menjadi *Pox Americana* atau *Pageblug* Amerika.

Pax Americana itu dalam kenyataan malah menimbulkan *pageblug* kebiadaban di Iraq dan Afghanistan, *pageblug* penjarahan sumber daya alam di berbagai negara berkembang di Asia, Afrika dan Amerika Latin, *pageblug* kehancuran ekologi di mana-mana, *pageblug* pelecehan hukum internasional dan *pageblug* anti-kemanusiaan dan genosida di Iraq, termasuk *pageblug* penyiksaan musuh-musuh Amerika di Guantanamo, Abu Gharib dan ratusan penjara rahasia di berbagai belahan dunia.

Kekuatan-kekuatan kapitalis dan demokrasi liberal Barat itu membangun sebuah jaringan ekonomi, keuangan, politik, militer, intelektual dan media massa yang dinamakan korporatokrasi. Dengan membonceng proses globalisasi, jaringan korporatokrasi ini berusaha menggenggam ekonomi dunia dan menaklukkan negara-negara berkembang dengan berbagai cara: cara kekerasan dan pendudukan militer; cara gertak dan ancaman; dan cara pengawasan jarak jauh yang tidak kalah efektif dibandingkan dua cara lainnya.

Saya berpendapat Indonesia yang kita cintai bersama, dewasa ini telah menjadi subordinat dari jaringan korporatokrasi internasional yang memang dahsyat itu. Berbeda dengan India, China, Malaysia dan lain-lain yang berhasil mengarungi gelombang globalisasi dan berhasil menghindari jeratan korporatokrasi internasional, Indonesia justru semakin dalam terpasung ke dalam pusaran globalisasi dan korporatokrasi.

Pemerintahan Yudhoyono sebagai hasil pilihan langsung rakyat Indonesia, sesungguhnya mempunyai legitimasi kuat untuk membebaskan Indonesia dari perangkat korporatokratik yang jelas-

jelas menguras habis-habisan kekayaan Indonesia. Juga diharapkan dapat merintis jalan baru buat tegaknya kedaulatan ekonomi, kedaulatan politik, dan kedaulatan pertahanan keamanan kita. Namun sayang, kedaulatan nasional kita justru tergadaikan ke berbagai korporasi asing.

Banyak *ibrah* atau pelajaran kehidupan yang sesungguhnya dapat kita ambil dari masa lalu kita. Di samping contoh buruk, lebih banyak lagi adalah keteladanan yang telah ditunjukkan oleh para pemimpin kita di masa lalu. Sejarah bangsa menunjukkan bagaimana Sultan Iskandar Muda dari Aceh dan tokoh-tokoh di tanah rencong itu mampu memukul armada Portugis, Belanda dan Inggris yang akan mengusik integritas Aceh. Atau raja-raja Sriwijaya yang menampilkan sosok kebesaran dan kemadirian pada zaman keemasan Sriwijaya. Atau keteladanan Mahapatih Gajah Mada yang berwawasan jauh dengan Sumpah Palapanya di zaman keemasan Majapahit.

Demikian juga keteladanan Sultan Agung Hanyakrakusuma yang berani mengirim dua kali ekspedisi ke Batavia untuk menghancurkan VOC. Memang ekspedisi itu tidak berhasil, tetapi keberanian, kebulatan tekad dan kemantapan itulah yang perlu kita contoh. Sultan Agung adalah patriot sejati. Beliau mendidik rakyatnya untuk mencintai tanah airnya (dalam konteks waktu itu, mencintai tanah Jawa). Beliau juga menanamkan semacam ideologi bahwa tidak ada tempat dan ruang bagi penjajahan asing di tanah Jawa. Di Sulawesi, kita kenal Sultan Hasanuddin yang mengajarkan kemandirian dan keberanian.

Namun tidak jauh dari kebenaran kalau saya simpulkan bahwa pemerintah Yudhoyono justru cenderung mewarisi sindrom Amangkurat I & II yang sangat lembek menghadapi VOC dan sangat kompromistis dalam melacurkan kekuasaan dan kewenangan kraton dengan pihak kompeni. Demikian juga, Pemerintahan

Yudhoyono tidak menunjukkan keberanian untuk mengatakan tidak pada tekanan-tekanan korporasi asing, kompeni-kompeni zaman sekarang.

Sulit dibayangkan, dalam tempo yang tinggal sekitar satu-setengah tahun lagi (ketika risalah ini naik cetak), Pemerintah Yudhoyono dapat mengubah orientasi kebijakan ekonomi, politik, hukum dan pertahanan keamanan yang sudah ditempuh selama ini. Yang mudah diperkirakan adalah kebijakan-kebijakan ekonominya hampir pasti makin lepas kendali dalam menjual aset BUMN ke pihak asing dan lebih kalap lagi dalam memberikan kemudahan tanpa batas bagi investor yang bergerak di bidang pertambangan, pertanian, perbankan, kehutanan, perkebunan, pembangunan infra struktur, dan lain sebagainya. Saya terlalu yakin bahwa sisa waktu yang tidak terlalu lama akan digunakan untuk menggenjot privatisasi aset negara secara habis-habisan. Semua itu akan menguntungkan korporasi asing dan merugikan bangsa sendiri.

Namun tidak *fair* dan adil kiranya kalau tidak disebutkan beberapa keberhasilan pemerintahan Yudhoyono. Pertama harus disebutkan, perdamaian mulai mantap di Aceh Nanggroe Darussalam. Sebuah keberhasilan yang harus kita syukuri bersama. Yang terpenting bagaimana memulihkan suasana damai dan rasa saling percaya sesama anak bangsa di Aceh.

Kepercayaan rakyat Aceh pada Republik yang pernah mengalami erosi besar harus dipulihkan dengan jalan menegakkan keadilan sosial, ekonomi, politik, hukum, dan penegakan HAM bagi rakyat Aceh dalam arti kata sebenarnya. Jangan kecewakan lagi rakyat Aceh dengan tipu-tipu lama maupun tipu-tipu baru.

Kedua, stabilitas politik nasional dapat dikatakan relatif mantap. Tidak ada gerakan-gerakan yang termasuk kategori “pemberontakan” terhadap NKRI. **Peranan sentral dan strategis TNI**

(AD-AL-AU) dalam menjaga dan melindungi keutuhan NKRI dalam hal ini tidak terbantahkan.

Ketiga, berkat kerja keras POLRI beberapa masalah besar bangsa mulai teratasi secara bertahap. Perang terhadap *illegal logging*, narkoba dan perjudian mulai menampakkan hasil awal yang cukup menjanjikan. Paling tidak banyak *illegal loggers* yang merasa tidak nyaman lagi dengan perbuatan durjananya. Beberapa pabrik ekstasi sudah ditutup dan pelaku-pelaku penting perdagangan narkoba mulai diringkus. Sementara itu bandar judi di berbagai lingkungan mulai merasakan ruangan yang makin sempit dalam menjalankan pekerjaan haram mereka.

Keempat, citra politik Indonesia sebagai negara yang cepat belajar dan melaksanakan demokrasi cukup bagus di panggung internasional. Perbaikan citra ini dimulai dari Presiden Habibie dan dilanjutkan oleh para penerusnya. Sekalipun Indonesia masih mempunyai reputasi buruk di panggung internasional sebagai salah satu negara paling korup di muka bumi dengan pengangguran dan kemiskinan yang merata, namun tetap harus kita syukuri bahwa kita sudah memasuki tahapan demokrasi yang makin mantap. Dengan kata lain, otoritarianisme ala Orde Lama dan Orde Baru sudah kita tinggalkan.

Kelima, pelaksanaan HAM di zaman Pemerintahan Yudhoyono relatif berjalan baik. Tidak ada lagi kebiasaan “petrus” atau menembakan misterius dan tidak ada lagi “main comot” terhadap orang-orang yang meminjam istilah zaman Orde Baru, termasuk ekstrim kanan, ekstrim kiri, kelompok subversif, dan dalih-dalih politik lainnya.

Secara *fair* beberapa segi positif di atas harus kita apresiasi dan harus terus dilanjutkan oleh Pemerintah pasca-Yudhoyono. Akan tetapi tanpa berkelok-kelok dan terus terang serta apa adanya harus saya katakan bahwa kelemahan fundamental yang diderita

oleh Pemerintah Yudhoyono adalah makin menjulangnya korupsi yang paling berbahaya, yaitu korupsi yang telah menyandera negara, akibat tekanan kekuatan korporatokrasi yang memang cukup dahsyat, yang disebut sebagai *state capture corruption*.

Gara-gara jenis korupsi yang paling gawat inilah, rapor biru Pemerintahan Yudhoyono untuk beberapa masalah penting bangsa ikut terbakar menjadi merah. Artinya, korupsi sandera negara itu melenyapkan harapan bangsa untuk dapat keluar dari lingkaran kemiskinan, pengangguran, dan keterbelakangan tanpa ujung.³

Pemerintah Indonesia telah menjadi pelayan kepentingan asing: banyak aset nasional seperti BUMN dan perbankan secara sistematis berpindah ke kepemilikan asing; sebagian hutan dan tanah disewakan ke korporasi asing sampai hampir 100 tahun; sementara kekayaan tambang kita, baik migas maupun non-migas, hampir seluruhnya, dikelola oleh korporasi asing. Penjajahan ekonomi Indonesia oleh kekuatan korporasi asing itu diberi payung hukum dengan perundang-undangan dan berbagai keputusan politik. Bahkan pendidikan mengalami liberalisasi, kolonialisasi dan asingisasi lewat sebuah Peraturan Presiden.

Pengurusan dan penjarahan aset nasional dan kekayaan bangsa di darat, laut dan udara (satelit Palapa) itu telah merugikan bangsa dan negara dalam jumlah ribuan triliun rupiah. Inilah sebab musabab mengapa kita terus saja mengalami kemelaratan “terprogram”, sistematis dan berjangka panjang. Inilah jenis korupsi terbesar di mana Pemerintah menjadi pelaku utamanya.

Rakyat Indonesia tidak pernah lupa pernyataan Yudhoyono bahwa jika terpilih menjadi presiden, ia sendiri yang akan memimpin pemberantasan korupsi. Juga ketika pejuang HAM, Munir, terbunuh, ia berjanji akan mengusut tuntas, karena kasus Munir adalah sebuah *test-case* buat penegakan hukum dan sejarah Indo-

nesia. Rakyat melihat bahwa kedua janji tersebut (sesungguhnya terlalu banyak janji yang sudah terlupakan) ternyata hampa esensi atau kosong substansi.

Mengapa demikian dapat diterangkan secara singkat dan sederhana sebagai berikut. Seperti pameo terkenal dari Lord Acton, kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan mutlak melakukan korupsi yang juga mutlak. Dalam sistem pemerintahan presidensial, jantung kekuasaan adalah di tangan presiden. Peran presiden sangat strategis dalam memberantas korupsi, dari jenis *street level*, korupsi jalanan, sampai korupsi yang menyandera negara. Masalahnya, sejauh ini Presiden Yudhoyono tidak menunjukkan kemauan dan komitmen politik untuk memberantas korupsi sungguh-sungguh.¹

Pertanyaan penting yang berkaitan dengan masa depan Indonesia adalah masih bisakah diharapkan Pemerintah Yudhoyono, dalam sisa waktu kepemimpinannya yang semakin terbatas, melawan korupsi yang menyandera negara, yang berarti melawan diri sendiri? Punyakah Yudhoyono keberanian moril (*moral courage*) untuk berani mengatakan **tidak** pada setiap keinginan asing yang merugikan kepentingan nasional, kepentingan bangsa sendiri? Bisakah ia segera menancapkan kembali kedaulatan ekonomi dan kedaulatan politik yang mengalami erosi parah pada masa kepemimpinannya?

¹ Denny Indrayana, pakar hukum dan intelektual UGM berpendapat bahwa sejauh ini pemberantasan korupsi tidak dapat menyentuh empat pusat (*episentram*) korupsi, yaitu istana, Cendana, pengusaha naga dan senjata/tentara. Dalam kaitan ini saya berpendapat, bila yang menghuni istana tidak pernah punya komitmen dan kemauan politik untuk memberantas korupsi – kecuali pada tahapan kosmetik dan basa-basi – bagaimana mungkin korupsi di tiga episentrum lainnya dapat tersentuh? Apalagi, seperti saya terangkan di muka, banyak konglomerat bermasalah yang menganggap istana sebagai bagian dari *playing fields* atau arena permainan mereka.

Karena itu mengharapkan Yudhoyono berani melawan *state capture corruption*, rasanya seperti mengharapkan hujan besar di musim kemarau. Dengan kata lain istana adalah bagian dari masalah, bukan bagian dari solusi korupsi.

Saya pikir jawabannya adalah **tidak**. Untuk mendapatkan jawaban **ya**, nampaknya diperlukan sebuah keajaiban atau *miracle*. Hanya sayangnya zaman keajaiban, apalagi mukjizat, sudah lama berlalu. Jadi? Jadi diperlukan sebuah penyegaran kepemimpinan nasional. Masalahnya bila kepemimpinan Yudhoyono, atau model kepemimpinan Yudhoyono diberi kesempatan memimpin Indonesia 5 tahun lagi sesudah 2009, negeri kita agaknya tidak lagi punya harapan untuk bangkit kembali.

Proses cuci-pikiran yang dialami bangsa oleh kekuatan korporatokrasi akan semakin sempurna dan kita lama-lama bangga, bahagia dan merasa nikmat menjadi bangsa pelayan atau bangsa jongos. Proses cuci-pikiran itu akhirnya bisa membawa kita menjadi bangsa yang tidak mampu lagi melihat kenyataan sebagai kenyataan. Barangkali seperti cerita tentang seorang Kaisar yang telanjang tanpa busana. Lewat *brain-washing* yang terus menerus, rakyat disuruh mengatakan bahwa sang kaisar sedang memakai busana yang sangat anggun dan indah.

Karena mayoritas rakyat takut dan tidak mau dikatakan bodoh, maka mereka mengatakan beramai-ramai bahwa kaisar memakai baju yang sangat indah. Dan kaisar yang telanjang itu manggut-manggut tersenyum karena ia juga yakin sedang memakai baju yang sangat indah. Analogi ini sekelebatan nampak terlalu jauh. Akan tetapi apa yang sedang kita alami sesungguhnya mirip dengan dongeng di atas. Kita sedang bekerja melayani kepentingan asing, namun yakin bahwa kita sedang menggerakkan pembangunan ekonomi untuk kepentingan bangsa. Atau seperti diingatkan Kitab Suci bahwa ada segolongan manusia yang sedang melakukan perbuatan sesat, tetapi merasa sedang berbuat kebajikan, seperti diterangkan di muka.

Tanda-tanda privatisasi BUMN di tahun 2008 secara kalap semakin terlihat nyata. Komite privatisasi Perusahaan BUMN

sudah membuat daftar 44 BUMN yang akan dijual, yang mencakup:²

Sektor Transportasi/Perhubungan:

1. Garuda Indonesia
2. Merpati Nusantara Airlines
3. Jakarta Lloyd
4. Bahtera Adiguna

Sektor Perbankan/Keuangan:

5. Bank Negara Indonesia
6. Bank Tabungan Negara
7. Asuransi Jasa Indonesia

Sektor Manufaktur:

8. Intirub
9. Kertas Blabak
10. Kertas Basuki Rahmat
11. Industri Gelas
12. Inti
13. Semen Batu Raja
14. Semen Kupang
15. Kertas Kraft Aceh
16. Atmindo

Sektor Engineering:

17. Rekayasa Industri

Sektor Jasa:

18. Sucofindo
19. Surveyor Indonesia
20. Pengerukan Indonesia
21. Prasadha

Sektor Konstruksi:

22. Adhi Karya
23. Biramaya Karya
24. Yodya Karya
25. Sarana Karya
26. Waskita Karya
27. Pembangunan Perumahan

² *Gatra*, 14-20 Februari 2008.

Sektor Perkebunan:

- 28. PTPN III
- 29. PTPN IV
- 30. PTPN VII

Sektor Industri Strategis:

- 31. Krakatau Steel
- 32. Inka
- 33. Dok Perkapalan Surabaya
- 34. Dok Perkapalan Koja Bahari
- 35. Industri Kapal Indonesia
- 36. Barata

Sektor Kawasan Industri:

- 37. Kawasan Berikat Nusantara
- 38. Kawasan Industri Medan
- 39. Kawasan Industri Makassar
- 40. Kawasan Industri Wijaya Kusuma
- 41. Surabaya Industri Estate Rungkut (SIER)

Sektor Tekstil:

- 42. Industri Sandang
- 43. Cambrics

Sektor Properti:

- 44. Jakarta Internasional Hotels Development (JIHD)

Kalaponomics atau ekonomi kalap yang habis-habisan menjual BUMN dengan dalih untuk *rightsizing*, untuk menambah modal dan untuk menambal bolong-bolong APBN sungguh sulit dipahami.³

Tidak bisakah kita mengambil pelajaran dari penjualan PT Indosat ke pihak asing? Setelah sadar dan kecewa bahwa penjualan Indosat ke pihak asing merugikan bangsa sendiri, pemerintah kemudian bicara tentang *buy back*, beli kembali Indosat. Apa yang mau dibeli kembali? Korporasi asing tidak cukup bodoh seperti kita sangka. Sekali mereka berhasil mencaplok aset nasional kita,

³ Buat orang awam seperti saya, ada perangai pemerintah yang sulit dipahami. Setiap BUMN yang terbuka mencetak keuntungan, justru paling berada di depan untuk dijual kepada investor strategis. Buat saya ada proses cuci pikiran yang ajaib. Seingat saya dulu PT Indosat mencetak laba per tahun sekitar 1,5 triliun.

sampai kapan pun mereka tidak mungkin melepaskan atau menjualnya kembali kepada kita.

Bukan mustahil tatkala Garuda, BNI 46, berbagai PTPN, pelabuhan-pelabuhan strategis, dan berbagai PT milik negara sudah dimiliki oleh korporasi-korporasi asing, kita kemudian merasa kecewa berat, ternyata laba yang dibukukan mengalir keluar. Kita hanya menerima pajak ala kadarnya dan keuntungan juga ala kadarnya, sebagai pemilik saham minoritas. Lantas kita bicara: Kita harus *buy back* BUMN yang sudah terlanjur kita jual. Saya khawatir para dirut korporasi asing itu geli melihat kita. Mereka mungkin melihat kita sebagai bangsa dengan pemerintahan yang paling tidak konsisten dan kurang cerdas di alam semesta.

UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal beserta Peraturan Presiden No. 76 dan 77 Tahun 2007 sebagaimana kita bahas singkat di atas sesungguhnya merupakan *coup de grace* atau pukulan telak dan mematikan bagi upaya penegakan kedaulatan ekonomi kita. Pemerintahan Yudhoyono telah membuatkan jalan tol nan mulus bagi korporasi-korporasi asing, besar dan kecil, untuk menguasai perekonomian Indonesia.

Sementara itu Perjanjian Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Singapura yang sudah ditandatangani Pemerintah Yudhoyono dan sedang menunggu ratifikasi DPR juga membuktikan bahwa kedaulatan pertahanan keamanan kita sudah tergadaikan ke

Dengan proses *sim-salabim*, PT Indosat dijual ke Temasek dengan harga sekitar 5 triliun atau sama dengan laba Indosat sekitar 3 tahun.

Keanehan yang sama terjadi dengan Garuda. Menurut direktur utama Garuda, sampai September 2007 Garuda membukukan keuntungan sebesar Rp 218 miliar. Padahal 3 tahun sebelumnya selalu merugi. Menurut sang dirut, penumpang Garuda diprediksikan naik 15%, sedang pendapatan tumbuh 20% sampai 22%. Di saat Garuda mulai mantap, *national flag carrier* yang jadi kebanggaan nasional itu justru ditawarkan ke "investor strategis". Dengan sigap Lion Air ingin membeli minimal 51% saham Garuda. Sang dirut Garuda mengatakan yang dijual baru 35%. (*Bisnis Indonesia*, 18 Desember 2007).

Singapura. Kalau masih ada sedikit harga dan martabat diri yang tersisa di dada kita, segera terlihat bahwa perjanjian DCA dengan Singapura itu merupakan perampasan kedaulatan sebagian wilayah Indonesia. Tokoh-tokoh TNI kita seperti Marsekal TNI Chappy Hakim, Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri, Letjen (Purn) Yogi Supardi, dan lain-lain telah mengingatkan segi-segi berbahaya DCA itu. Kita juga diingatkan bahwa “ada beberapa kolom ruang udara nasional kita yang hingga kini belum sepenuhnya di bawah kekuasaan dan kontrol otoritas penerbangan Indonesia”, karena telah puluhan tahun digunakan AU Singapura untuk latihan. Dapat dikatakan bahwa pagar pertahanan nasional kita, telah kita robohkan sendiri untuk memuluskan tercapainya kepentingan pertahanan Singapura.⁴

Dalam kaitan ini salah seorang menteri Kabinet Yudhoyono berkata bahwa DCA (*Defense Cooperation Agreement*) RI-Singapura itu “bagus”, karena Indonesia punya ruang, Singapura punya uang. Syahnakri mengingatkan seharusnya saat bernegosiasi dengan negara manapun yang menjadi faktor dominan dan determinan dalam “ruang berpikir” dan “ruang batin” adalah kepentingan nasional yang spektrumnya lebih luas daripada uang. Karena itu kita harus belajar bernegosiasi dengan penuh martabat. Walaupun kita masih miskin, kita tidak boleh menjual negara.⁵ Yogi Supardi juga mengatakan bahwa DCA itu telah mencederai atau mengkhianati harga diri bangsa.⁶

Beberapa hal sangat penting yang memprihatinkan dari Pemerintahan Yudhoyono adalah:

⁴ Chappy Hakim, “Kedaulatan Negara di Udara dan DCA”, *Kompas*, 1 Agustus 2007; Kiki Syahnakri, “Sekali Lagi Soal DCA RI-Singapura”, *Kompas*, 7 Agustus 2007. Yogi Supardi, “Perjanjian Kerjasama Pertahanan Indonesia-Singapura Mencederai Integritas Nasional dan Kedaulatan dan Integritas Teritorial dan Harga Diri Bangsa Indonesia”. Makalah disampaikan di Fraksi PAN, DPR RI, Juli 2007.

1. Disadari atau tidak, mentalitas *inlander* makin bercokol dan mengakar.
2. Rasa percaya diri dan kemandirian bangsa bukannya pulih secara perlahan, tetapi nampak semakin tipis dan nyaris hilang.
3. Telah terjadi erosi kedaulatan ekonomi, kedaulatan politik dan kedaulatan pertahanan-keamanan yang terus berproses secara cepat.
4. Deregulasi, privatisasi, fundamentalisme pasar, dan seluruh prinsip Konsensus Washington dijalankan tanpa daya kritis dan tanpa mengingat kepentingan ekonomi jangka panjang Indonesia.
5. *State capture corruption* tidak pernah dilawan atau diperangi: justru Pemerintah Yudhoyono menjadi pelaku korupsi jenis yang paling berbahaya ini, sehingga jumlah kerugian yang diderita bangsa dan negara tidak terperiikan.
6. Sektor pertanian tidak diprioritaskan sehingga pembangunan desa menjadi terbengkalai. Slogan ketahanan pangan ternyata hampa. Yang terjadi di dalam kenyataan adalah kecanduan impor beras dan dimungkinkannya kepemilikan asing sampai 95% dalam setiap usaha pertanian di atas tanah seluas 25 Ha ke atas yang meliputi tanaman padi, jagung, ubi kayu dan palawija lainnya. Tidak mengherankan bila akhirnya kaum petani kita mengalami deprivasi sosial dan ekonomi secara sistematis dan membuat kehidupan mereka makin sengsara.

⁵ Syahnakri, *Ibid.*

⁶ Supardi, *op.cit.*

7. Penegakan hukum cenderung tebang pilih. Belum terlihat komitmen dan kemauan politik yang kuat dari Presiden Yudhono untuk memberantas korupsi secara sungguh-sungguh. Setiap insiden korupsi yang langsung atau tidak langsung terkait dengan istana, pengusutannya menjadi tumpul dan pelan-pelan hilang dengan sendirinya. Kasus BLBI adalah salah satu contohnya.
8. Permainan politik di masa Orde Baru telah muncul kembali ke panggung nasional. Baju dan pemainnya berganti, tetapi pada dasarnya tipe dan isi permainan lebih kurang sama. Juga di tengah masyarakat ditengarai kemunculan kroni baru. Kroni yang berkerumun di sekitar pusat kekuasaan itu saling sokong dan saling bantu sehingga relatif sebagai pagar pengamanan jantung kekuasaan, mereka cukup kuat. Dapat dipastikan mereka cenderung korup, sesuai adagium *power tends to corrupt*.
9. Perkembangan negatif lainnya di era Yudhoyono adalah kemunculan oknum-oknum yang memegang kendali pos-pos penting pemerintahan yang mempunyai beberapa kepentingan berbeda bahkan konflikatif sekaligus. Dalam diri seorang tokoh publik dapat berhimpun 3 macam kepentingan yang berbeda-beda, yaitu kepentingan bisnis, kepentingan politik sempit partai, dan kepentingan bangsa atau rakyat yang jauh lebih luas. Mudah dimengerti bila terjadi konflik di antara jenis kepentingan itu, maka oknum pejabat itu akan mengunggulkan kepentingan bisnis dan keluarganya. Dus, kepentingan publik atau kepentingan rakyat menjadi terkorbankan. Para tokoh pemerintahan yang menggenggam fungsi dobel atau triple itu menolak prinsip *my loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins*, yang terjemahan bebasnya kira-kira “begitu aku

menjadi pejabat pemerintah, aku tanggalkan kesetiaan sempitku, karena kesetiaanku adalah pada negeriku, bangsa dan rakyatku". Mereka menolak prinsip itu. Mereka merasa menjadi *super persons*.

10. Memasuki tahun keempat Pemerintah Yudhoyono semakin nyata bahwa masalah kemiskinan dan pengangguran hanya sedikit saja beringsut, hampir tidak ada perbaikan. Wacana revolusi sosial makin sering kita dengar di berbagai lapisan masyarakat. Saya khawatir kalau sampai terjadi revolusi sosial di Indonesia, akibatnya bisa sangat jauh. Tingkat anarki dan konflik sosial antara lapisan masyarakat bisa jadi lebih gawat dibandingkan akibat peristiwa G-30-S PKI yang hampir-hampir merontokkan sendi-sendi negara dan memakan ongkos nyawa manusia yang tidak terperiikan.

Daftar negativisme yang kita peroleh selama lebih dari 3 tahun terakhir ini tentu bisa dibuat lebih panjang lagi. Akan tetapi dari 10 hal di atas kiranya sudah cukup kuat buat kita untuk mengambil satu kesimpulan penting. Kesimpulan itu adalah bila model, gaya, orientasi, arah atau direksi dan terutama esensi kepemimpinan Yudhoyono-Kalla diberi kesempatan untuk membawa Indonesia 5 tahun lagi setelah 2009 (sampai 2014), saya pikir kondisi multi-dimensional Indonesia makin terpuruk.

Dengan kondisi yang kita alami sekarang ini, Indonesia memang belum sampai pada tahapan *failed state* atau negara gagal. Akan tetapi Pemerintahan Yudhoyono pada dasarnya telah menjadi *broken government*, pemerintahan yang kocar-kacir, pecah koordinasi dan kepentingan rakyat banyak tidak terlayani. Sebagian besar rakyat tetap dirundung sengsara dan tidak/belum dapat melihat masa depan dengan penuh harapan.

Bukti-bukti *broken government* itu demikian meyakinkan. Hampir di semua kota sering terlihat antrian panjang minyak tanah yang

mengingatkan kita pada Indonesia di tahun-tahun 1960-an. Jutaan rakyat yang didera kemiskinan terpaksa makan nasi aking dan raskin (beras untuk orang miskin). Sementara istilah "raskin" itu sendiri sangat tidak senonoh, karena menghina bangsa sendiri. Demikian juga giliran listrik mati di Jawa dan luar Jawa membawa kita kembali ke Indonesia 40-45 tahun yang lalu.

Ketika harga BBM dinaikkan sampai lebih dari 100%, cara pemerintah menanggulangi dampak negatif kenaikan ugal-ugalan itu terasa kurang lebih idiotik. Salah satu randa seorang idiot adalah melakukan langkah tergesa tanpa mempertimbangkan akibatnya. Selain btl (bantuan tunai langsung) yang berupa bagi-bagi 300 ribu rupiah pada warga ekonomi lemah per tiga bulan hanya berjalan beberapa kali, btl itu sempat membuat konflik sosial yang tajam antara sesama warga di desa dan di kota. Setiap kali btl akan dilakukan, banyak ketua RT, ketua RW, dan lurah yang tidak berani pulang ke rumah, karena btl itu mengakibatkan rasa saling curiga, saling umpat dan saling ancam di antara sesama warga secara meluas.

Lihatlah juga bagaimana infrastruktur kita, terutama jalan antar-kabupaten, jalan antar-provinsi dan jalan trans-Kalimantan, trans-Sumatera, jalan Pantura di Jawa dan berbagai jalan lain di seluruh Indonesia yang telah mengalami kerusakan berat. Hampir seluruh infrastruktur ekonomi yang berupa jalan, banyak berlubang dan tidak jarang terdapat lubang besar seperti kubangan yang dapat membuat sebuah truk besar tergelimpang. Kondisi parah berbagai jalan di Indonesia ini menjadi bukti adanya *broken government* itu.

Bagi kebanyakan rakyat, kehidupan mereka pada umumnya memang belum mengalami perbaikan. Kebutuhan pendidikan dan kesehatan mereka praktis tidak terlayani. Saya seringkali masuk ke perkampungan yang rata-rata kumuh di kebanyakan kota di Indonesia. Pemandangan di sebagian besar perkampungan itu

hampir sama saja: banyak terlihat wajah yang pucat karena kurang gizi; sekumpulan pemuda yang bengong, menganggur, duduk-duduk di mulut gang; ibu muda yang sedang hamil menggandeng satu-dua anak kecil yang pucat dan kurus; rumah-rumah kecil yang saling berhimpitan dan jauh di bawah standar kelayakan; air bersih merupakan barang mewah; diperkirakan jumlah tikus di kampung bersangkutan lebih banyak dari jumlah penduduk, dan berbagai fenomena menyedihkan lainnya.

Yang kita miliki sekarang mungkin bukan saja *broken government*, melainkan juga *confused government* (pemerintahan yang bingung). Sekeping contoh, Pemerintah Yudhoyono menerbitkan PP No. 2 Tahun 2008 yang menabrak UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 38 ayat 4 UU itu melarang melakukan pertambangan di kawasan hutan lindung. Tetapi karena cenderung lupa dan bingung, PP di atas membolehkan perusahaan tambang mengubah kawasan hutan lindung dan hutan produksi menjadi kawasan tambang skala besar hanya dengan membayar Rp 1,8 juta-Rp 3 juta per hektar.

Kapankah kita berhenti menjadi bangsa yang bodoh? Satu meter persegi hutan lindung dan hutan produksi dihargai lebih murah dari sepotong pisang goreng, hanya sekitar 300 rupiah?⁷ "Sangat picik kalau menganggap nilai ekonomi lebih besar daripada jasa lingkungan. Apa arti semua ini bila dikaitkan dengan Indonesia sebagai tuan rumah Konferensi PBB untuk perubahan Iklim."⁸ Kaitannya jelas, yaitu mempermalukan Indonesia di mata dunia internasional. Lagi-lagi PP (Peraturan Pemerintah) aneh itu menunjukkan cara pendekatan idiotik terhadap masalah yang demikian besar.

⁷ Siti Maemunah, "Hutan Lindung dan Masyarakat", *Kompas*, 21 Februari 2008. 1

Dua hal akan terjadi bila tidak ada *leadership change* pada 2009, yaitu: pertama, penjajahan ekonomi asing semakin luas dan mendalam, sehingga sulit dibayangkan bagaimana kita dapat keluar dari cengkeraman ekonomi asing itu; dan kedua, jenis korupsi yang paling gawat, yaitu korupsi sandera-negara atau *state capture corruption/ state hijacked corruption* menjadi makin sistemik, *institutionalized* (melembaga), *deep rooted* (mengakar makin dalam), destruktif dan korosif.

Bila hal-hal yang kita khawatirkan itu sampai terjadi, situasi bangsa akan sangat memprihatinkan. Para pemimpin dan anak bangsa masih komat-kamit menghafal Pancasila, tetapi perbuatannya jauh dari nilai-nilai ideologi, falsafah, dan kesepakatan adiluhung bangsa tersebut.

Sadar atau tidak mereka akan menjadikan Keuangan sangat berkuasa dengan Kemanusiaan yang agak zalim dan tidak begitu beradab. Perpecahan Indonesia menjadi makin riil, sementara Kerakyatan yang diterapkan dipimpin oleh kepentingan konglomerat dan korporatokrat. Tentu, dengan kondisi seperti ini yang kita panen adalah Ketidakadilan sosial bagi kebanyakan rakyat Indonesia.

Berikut ini adalah beberapa saran yang dapat diperdebatkan secara jernih dan bertanggung jawab demi masa depan kita yang lebih memberikan harapan dan perbaikan. Sekali lagi, saya merasa bergembira bila banyak tokoh muda yang bersedia *sharing* dengan beberapa gagasan sederhana ini. Siapa tahu beberapa gagasan itu dapat bergulir dan makin utuh untuk menyegarkan suasana pertukaran pikiran di kalangan anak-anak bangsa.

⁸ Sony Keraf, *Ibid.*

- Secepat dan secermat mungkin kita persiapkan kepemimpinan nasional alternatif. Kepemimpinan alternatif itu perlu memiliki mentalitas yang bebas, merdeka, dan mandiri. Jangan sampai kepemimpinan pasca 2009 masih bermentalitas *inlander*, kepemimpinan yang tidak berani mengangkat kepala berhadapan dengan lingkaran kepentingan korporatokrasi yang kapitalistik dan eksploitatif.
- Kepemimpinan alternatif itu harus diupayakan sebanyak mungkin diisi oleh tokoh-tokoh muda usia yang berwawasan nasional dan internasional. Kepemimpinan alternatif itu sekaligus bersifat kepemimpinan kolektif yang mencerminkan berbagai elemen penting bangsa, bersifat lintas suku, lintas profesi, lintas agama, lintas partai politik, dan lintas pengalaman maupun latar belakang sosial ekonomi.
- Unsur-unsur yang mengisi kepemimpinan alternatif harus memahami bahwa kekuasaan adalah amanat rakyat yang harus ditunaikan dengan kejujuran dan kerja keras. Kekuasaan tidak boleh dijadikan sebagai wacana dan sarana untuk memperkaya diri dan melakukan korupsi, baik yang terselubung maupun yang terang-terangan.
- Kepemimpinan baru yang merupakan kepemimpinan alternatif itu harus segera mengkampanyekan pentingnya menancapkan kembali kemandirian nasional. Seluruh elemen bangsa harus disadarkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka dan berdaulat penuh. Setelah merdeka lebih dari 6 dasawarsa, bangsa Indonesia harus mampu mengurus dirinya sendiri. Kedaulatan ekonomi, kedaulatan politik, kedaulatan hukum, kedaulatan pertahanan keamanan, dan kedaulatan pendidikan harus sepenuhnya berada di tangan bangsa Indonesia sendiri.

- Bahwa kita harus membuka diri dan bekerjasama dengan negara-negara lain, tentu merupakan keniscayaan yang tidak terhindarkan dalam pergaulan antar-bangsa dan antar-negara dewasa ini. Akan tetapi semua itu kita lakukan dalam kesetaraan, kesederajatan, kesejajaran, dan dibangun atas dasar saling menguntungkan. Bangsa Indonesia tidak boleh lagi sekedar menjadi bangsa pelayan yang melayani kepentingan korporasi-korporasi besar yang bertindak sebagai majikan.
- Kepemimpinan baru (kepemimpinan alternatif) itu harus segera berhenti menjadi bagian tidak terpisahkan dari korupsi-sandera-negara (*state capture corruption*), yang nyata-nyata telah mengantarkan dan menjerumuskan Indonesia ke lembah kemiskinan, pengangguran meluas dan keterbelakangan multi-dimensi. *State capture corruption* adalah *the crux of the Indonesian problems*. Bila yang menghuni istana tidak berani melawan jenis korupsi paling berbahaya ini, pemberantasan korupsi model apa pun pada hakekatnya hanya menyentuh lapisan luar atau kulit. *State-hijacked corruption* adalah kanker terminal bangsa. Kita harus berani mengamputasi korupsi itu dengan segala resiko yang harus kita pikirkan.
- *State capture corruption* adalah sebab utama keterbelakangan bangsa. Kepemimpinan nasional alternatif kita harapkan jangan berlagak pilon atau malah tidak mau tahu persoalan mendasar bangsa. Jangan seperti seseorang yang mencari cincinnya yang hilang sepanjang pagi, siang dan petang di halaman rumahnya. Ketika ditanya para tetangganya di mana kira-kira cincin itu hilang, maka dijawab cincin itu hilang di dalam rumah. Mengapa dicari di halaman, katanya, karena di halaman cukup terang, sementara di

dalam rumah agak gelap. Letak korupsi yang paling ganas itu cukup jelas. Janganlah kita berpura-pura tidak tahu.

- Sangat diperlukan beberapa ekonom tangguh ke dalam keanggotaan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di masa datang. Mereka diperlukan karena mempunyai “penciuman” yang tajam terhadap setiap potensi kejahatan ekonomi (*economic crimes*). KPK yang dinilai oleh masyarakat banyak sudah lumayan, sampai sekarang belum atau tidak pernah mengejar kejahatan ekonomi yang hakekatnya merupakan korupsi berskala mega lewat berbagai legislasi dan keputusan-keputusan politik. KPK benar-benar akan punya pamor dan otoritas serta wibawa besar bila mulai berani mengusut kejahatan ekonomi yang paling bertanggungjawab dalam menyengsarakan rakyat Indonesia.
- Seluruh KKS (Kontrak Kerja Sama)/KPS (Kontrak *Production Sharing*) di bidang migas dan KK (Kontrak Karya) di bidang non-migas harus dipelajari dan ditelaah lagi secara jujur dan rasional. Renegosiasi atau perjanjian/perundingan ulang terhadap semua KKS/KPS dan KK yang jelas-jelas merugikan kepentingan bangsa harus segera dilakukan.
- *Pacta sunt servanda* memang harus kita hormati, tetapi klausul *rebus sic stantibus* tidak boleh kita lupakan. Kepentingan bangsa sendiri adalah nomor satu dan paling utama. Kepentingan korporasi asing tidak pernah boleh mengungguli kepentingan nasional.
- Dengan alasan memelihara kelestarian lingkungan, seharusnya Indonesia dapat menghentikan secara sepihak kegiatan korporasi asing yang nyata-nyata telah melakukan *ecocida* atau pembunuhan lingkungan selama menambang

sumber daya alam Indonesia. Dengan merusak lingkungan secara sangat destruktif, korporasi-korporasi asing itu mempunyai *ecological debt* atau hutang atas perusakan lingkungan hidup itu kepada Indonesia. Seluruh pajak, royalti dan pembagian keuntungan yang diperoleh Indonesia lewat industri pertambangan asing itu, kalau semuanya digunakan untuk membangun kembali lingkungan yang rusak total itu niscaya tidak mencukupi. Bagaimana menangani kasus ini merupakan salah satu agenda mendesak bagi kepemimpinan nasional mendatang.

- Kepemimpinan alternatif harus berani membuat badan arbitrase nasional khusus untuk menyelesaikan setiap pertikaian atau konflik kepentingan yang terjadi antara Indonesia dan berbagai korporasi asing. Bukan seperti sekarang ini, kalau ada konflik di bidang pengelolaan pertambangan dengan korporasi asing, dibawa ke badan arbitrase internasional. Bagaimana mungkin Indonesia dapat memenangkan kasus konflik itu kalau badan arbitrase yang memutuskan, secara utuh pasti membela kepentingan korporasi? China telah membukukan bahwa konflik kepentingan dengan korporasi asing dapat diajukan ke badan arbitrase yang dibuat oleh Pemerintah China. Kalau China bisa dan berani, mengapa Indonesia tidak?
- Revisi atau peninjauan ulang terhadap semua HPH tidak bisa ditunda. Para pemegang HPH itu dalam kenyataan merasa punya hak penggundulan hutan dan hak perusakan hutan sesuai kepentingan keserakahan ekonomi mereka. Mereka bermental hedonis dan sangat tidak bertanggung jawab. Mereka babat habis hutan tropis kita tanpa sedikit pun disertai program reboisasi. Kasus Adelin Lis adalah contoh yang sempat mencuat di media massa.

Adelin Lis, tersangka pembalakan hutan di Riau yang merugikan negara sebesar sekitar 220 triliun rupiah dilepas begitu saja. Alasannya, dia lewat dua perusahaannya membabat habis hutan di wilayah HPH yang dimilikinya.

- Seluruh pemegang HPH yang telah menghancurkan hutan harus diberi sanksi tegas dan lugas. Dicabut izin HPH-nya dan pelanggaran yang telah dilakukan diproses dengan hukum secara benar. Bila ada menteri kabinet yang mencoba melindungi, sang menteri juga harus diproses secara hukum. Bahkan andaikata seorang presiden ikut terlibat dalam *illegal logging*, presiden tersebut harus dimintai pertanggungjawaban, seusai menyelesaikan jabatan kepresidenannya. Tidak boleh ada seorang warga negara Indonesia berdiri di atas hukum.
- Para pemegang HPH ugal-ugalan itu hakekatnya telah menghina dengan penghinaan sangat berat terhadap rakyat Indonesia. Hutan tropis yang kaya raya mereka perkosa dan eksploitasi sampai ludes tanpa sedikit pun tanggung jawab. Saya yakin ada belasan, mungkin puluhan, Adelin Lis lainnya yang bergentayangan dari Papua/Irian Jaya sampai Aceh yang siang malam, pagi-petang, menghabiskan hutan kita. Mereka harus terus dikejar sampai ujung bumi. Tidak ada pilihan lain.
- Pencurian pasir laut milik Indonesia oleh *dredgers* asing yang menjual hasil curian itu ke Singapura juga harus dihentikan, sekali dan untuk selamanya. Menjual pasir laut tidak ubahnya dengan menjual sebagian tanah air Indonesia ke pihak lain. Menjual sebagian tanah air, dengan alasan apa pun, merupakan pekerjaan terkutuk yang tidak dapat dimaafkan. Tanah air adalah milik bangsa Indone-

sia secara turun temurun, bukan dijual-belikan secara nista dan hina.

- Menghilangkan penyakit kecanduan utang (*debt-addict*) termasuk agenda yang cukup mendesak. Kecanduan utang ini sudah menjadi penyakit menahun atau penyakit kronis yang tidak mudah diatasi. Dalam kaitan ini perlu diupayakan pembuatan APBN dengan *built-in deficit* seminimal mungkin. Kalau defisit yang ditetapkan merupakan akibat keterpaksaan, mungkin masih dapat dipahami. Akan tetapi bila defisit sampai puluhan triliun rupiah itu merupakan bentuk kecanduan utang dan sikap mempergampang utang, maka secara bertahap kebiasaan membuat APBN dengan defisit tinggi harus diakhiri.
- Kepemimpinan alternatif pasca 2009 harus berhenti menyanyikan lagu-lagu palsu tentang nasib petani kita. Harus segera diakui bahwa selama ini nasib petani Indonesia sudah ditelantarkan terlalu lama oleh semua pemerintahan yang pernah berkuasa di Indonesia. Tidak ada program jangka panjang yang pernah dibuat oleh pemerintah untuk melindungi petani sebagai mayoritas rakyat. Sebuah negara agraris yang konsisten menjadi pengimpor beras, kedelai, dan palawija lainnya menunjukkan betapa pemerintah Indonesia dari masa ke masa belum pernah sungguh-sungguh melindungi dan memperbaiki kehidupan petaninya. Akibatnya, ketahanan pangan menjadi sangat rawan dan setiap kali muncul masalah besar di sektor pertanian (termasuk peternakan), pemecahannya selalu bersifat instan, berjangka sangat pendek, dan serba *ad hoc*.

- Seluruh undang-undang yang bersifat strategis untuk bangsa Indonesia harus dikaji ulang. Setiap UU di bidang pertambangan, penanaman modal, BUMN, pertanian, perkebunan, kelistrikan, keairan, kehutanan, dan lain sebagainya yang begitu jelas merugikan bangsa sendiri perlu dikaji ulang dan diganti dengan UU yang lebih menjamin tercapainya kepentingan bangsa.
- Dengan asumsi bahwa perbedaan antara UU yang lebih menguntungkan bangsa sendiri dan UU yang lebih menguntungkan pihak asing (otomatis merugikan kepentingan Indonesia) adalah sangat jelas, maka diharapkan DPR di masa depan harus memiliki motivasi dan orientasi tunggal, yaitu membela dan mengunggulkan kepentingan bangsa sendiri. Godaan *u.f.e (unidentified flying envelopes)* atau amplop tebal berterbangan berisi *cheque* atau uang yang melemahkan, bahkan menghancurkan niat tulus para wakil rakyat harus ditepis dengan tegas.
- Alangkah baiknya, media massa sebagai *the fourth estate* sekaligus sebagai *watch dog* selalu siap mengambil-alih peran DPR sebagai kontrol sosial bila DPR terlalu lemah untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Musibah lengkap akan dialami oleh demokrasi bilamana media massa berperan mewakili suara korporasi dan bukan mewakili suara rakyat. Saya masih berharap media massa kita tidak akan meniru media massa di negara-negara kapitalis.
- Perlu diulangi lagi bahwa konspirasi eksekutif-legislatif terlihat dalam membuat legislasi dan keputusan-keputusan politik yang merupakan pesanan korporasi asing. Konspirasi jahat itu dijalankan lewat berbagai lembaga finansial internasional semisal IMF, Bank Dunia, *Asian Development Bank*, *economic hit men* (tukang pukul ekonomi) dan

economic jackals (srigala-srigala ekonomi) internasional. Mereka adalah musuh besar bangsa. Jangan pernah dilupakan adanya pejabat tinggi, politisi dan intelektual jongsos yang hidup-matinya telah diserahkan untuk membela kepentingan korporasi asing. Di sinilah kita rasakan kebenaran kata-kata Bung Karno: “Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri”.

- Renegosiasi terhadap pembayaran hutang luar negeri harus dilakukan dengan pertimbangan selain sebagian dari utang luar negeri itu merupakan hutang najis, juga bila dihitung kembali, seluruh cicilan yang telah dibayar selama ini sudah jauh melampaui jumlah hutang yang pernah diambil. Nigeria dan Pakistan adalah contoh dua negara yang berhasil meminta *hair cut* terhadap hutang luar negeri mereka. Selain itu dilakukan juga revisi atas komitmen Indonesia yang berlebihan dalam fora internasional, khususnya WTO.
- Kepemimpinan nasional alternatif pasca-2009 harus berani merombak total kebijakan ekonomi Indonesia: dari kebijakan sekarang yang memuja kreditor asing dan mengeluelukan investor asing (asingisasi secara kalap) menjadi kebijakan ekonomi yang pro-rakyat dan pro-pelaku usaha dalam negeri. Termasuk langkah mendesak adalah memprioritaskan pemanfaatan bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam untuk rakyat sendiri, termasuk untuk para pelaku usaha bangsa sendiri. Pasal 33 UUD 1945 sampai kapan pun harus menjadi pedoman dasar dalam pembangunan ekonomi Indonesia.
- Kepemimpinan nasional alternatif yang terbentuk lewat pemilu 2009 mengemban tugas yang sudah lama terbengkalai dan menjadi salah satu agenda reformasi,

yaitu penegakan hukum tanpa diskriminasi atau tebang pilih. Saya yakin rakyat mulai memahami, mengapa setiap penegakan hukum atau lebih tegas lagi, usaha pemberantasan korupsi, tiba-tiba menjadi mandul, tumpul dan membuat frustrasi bila sebuah korupsi atau kejahatan mempunyai kaitan dengan istana sebagai jantung kekuasaan.

Kasus hukum Pak Harto adalah contoh paling spektakuler. Kasus itu melayang-layang selama sepuluh tahun, dan empat presiden setelah Pak Harto, yaitu Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati dan Yudhoyono gagal menyelesaikannya.

Sementara itu ada fenomena aneh. Jika mantan presiden Orde Baru itu relatif sehat, para penegak hukum dan para ahli hukum diam dua ribu bahasa seolah ingin melupakan kasus hukum itu. Tetapi begitu Pak Harto nampak kritis kesehatannya, media massa sangat meriah memberitakan “pahlawan-pahlawan” hukum yang menguraikan teori dan metodologi hukum bagaimana memecahkan kasus hukum Pak Harto. Akhirnya sampai Pak Harto meninggal, tidak ada penyelesaian hukum setelah 10 tahun!

- Tentu untuk membuat *blue print* atau cetak biru baru untuk pembangunan ekonomi Indonesia secara elaboratif dapat dikerjakan oleh anak-anak bangsa yang memiliki kecakapan akademis dan pragmatis demi perbaikan nasib dan masa depan bangsa Indonesia. Yang disebutkan di atas adalah sebagian agenda mendesak yang tidak boleh ditunda terlalu lama, sebelum proses subordinasi Indonesia di bawah telapak kaki kepentingan korporasi internasional menjadi terlalu terlambat.

Akhirnya perlu kita ingat selalu, bahwa pada dasarnya ada 6 rujukan fundamental buat bangsa Indonesia, tanpa kecuali, dalam membangun masa depannya. Enam rujukan dasar itu diuraikan singkat di bawah ini.

Satu, lagu kebangsaan (*national anthem*) kita. Bait-bait lagu kebangsaan kita itu laksana sumber inspirasi untuk terus-menerus bersatu dan bersama membangun Indonesia yang merdeka, yang bangun jiwa dan badannya, yang selalu berdinamika menuju Indonesia Raya.

Dua, sang saka merah putih. Bendera Sang Dwi-warna kita itu mengatasi seluruh bendera partai, kelompok, golongan, dan setiap komponen bangsa. Bendera berbagai kumpulan anak bangsa boleh berbeda-beda, tetapi semuanya berada dalam naungan Sang Saka Merah Putih.

Tiga, bahasa Indonesia, bahasa pemersatu kita. Lewat bahasa Indonesia, ratusan *lingua franca* (bahasa daerah) yang ada di seluruh Nusantara dapat dijembatani. Sulit membayangkan keutuhan bangsa Indonesia yang demikian majemuk tanpa adanya bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Empat, semboyan nasional kita, *Bhinneka Tunggal Ika*, Keberagaman dalam Persatuan. Pergaulan antar enam agama yang resmi diakui pemerintah, ditambah beratus-ratus suku bangsa, adat istiadat dan keragaman budaya menjadi demikian lancar, mudah, dan egaliter karena motto nasional *Bhinneka Tunggal Ika*. Tidak boleh ada anak bangsa yang merasa superior, tetapi juga tidak boleh ada yang merasa inferior satu sama lain. Semua anak bangsa bersaudara dalam pangkuan *Bhinneka Tunggal Ika*.

Lima, TNI dan POLRI kita. TNI dan POLRI kita yang berdiri di atas segala kelompok dan golongan niscaya menjadi salah satu perekat nasional yang sangat kuat. Sumpah Sapta Marga setiap

prajurit TNI dan Sumpah Tribrata POLRI telah menjamin pengabdian yang lebih luas, pengabdian pada nusa dan bangsa, bukan pengabdian sempit pada suatu golongan atau kelompok bangsa.

Angkatan Darat dengan semboyan Kartika Eka Paksi, Angkatan Udara dengan Swabhawana Paksa, Angkatan Laut dengan Jalesveva Jayamahe dan POLRI dengan Rastra Sewakottama, semua bekerja dan berjuang untuk membangun kejayaan nusa dan bangsa.

Enam, Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara kita. Pancasila terbukti telah berhasil menjadi konsensus dan perjanjian adiluhung bangsa Indonesia pada masa lalu, masa sekarang, dan insya Allah masa depan. Tidak bisa dipungkiri Pancasila telah menjadi semen dan perekat paling kuat bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Dengan enam rujukan fundamental tersebut, berdasarkan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah SWT sebagai sumber kekuatan hakiki, rasanya bangsa Indonesia tetap sanggup mengatasi berbagai halangan, tantangan, gangguan, dan rintangan apa saja.

Bung Karno pernah mengajarkan, *for a fighting nation, there is no journey's end*. Bagi bangsa pejuang tidak ada stasiun akhir. Ajaran Kitab Suci bahkan lebih jelas lagi: "Apabila engkau sudah usai menunaikan sebuah tugas, hendaknya engkau bangkit kembali (menunaikan tugas lainnya). Dan hendaknya kepada Tuhanmu, engkau sandarkan semua harapan" (Qur'an: 94: 7-9).

LAMPIRAN

- ◆ SURAT KETUA LIPI
- ◆ BERANIKAH INDONESIA MENGHENTIKAN PENJAJAHAN FREEPORT? TIDAK
- ◆ Kata pengantar pada buku: *Freeport: Bagaimana Pertambangan Emas dan Tembaga Raksasa “Menjajah” Indonesia*, Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)
- ◆ ANALISIS KONTRAK KARYA II FREEPORT
- ◆ BEBERAPA KETENTUAN DALAM KONTRAK BAGI HASIL YANG CENDERUNG PRO-ASING
- ◆ *COST RECOVERY* PT PERTAMINA EP

Lampiran 1

SURAT KETUA LIPI

Yth. Bp.Prof. Dr. M. Amien Rais MA

Assalamu'alaikum wa Rahmatullahi wa barakatuh,

Perkenankanlah kami menyampaikan beberapa catatan, sebagai tambahan masukan untuk Pak Amien.

1. KEBANGKITAN NEGARA DUNIA KETIGA SEBAGAI SUMBER ILMU

Dalam *the 2nd World Science Forum* di Budapest, 10-12 November 2005 yang lalu, Dr. Mohammed Hassan (Direktur dari *the Academy of Sciences of Developing World*) menyatakan bahwa kemajuan substansial dalam bidang pengembangan sains dan teknologi, telah dibuat oleh tiga negara berkembang, yaitu: Cina, Brazil dan India. Ketiga negara ini, ditambah dengan Korea Selatan (yang telah maju lebih dulu), merupakan “pusat-pusat keunggulan ilmu pengetahuan baru di dunia ini”, sejajar dengan negara-negara Amerika Serikat, Eropa dan Jepang.

Secara detail dijelaskan sebagai berikut. Di bidang bioteknologi, kemajuan telah dibuat secara nyata oleh Cina, Brazil, India, Mesir, Kuba, Korea Selatan, Afrika Selatan dan Iran. Di bidang teknologi informatika dan komunikasi, kemajuan telah dibuat oleh India, Cina dan Pakistan. Dalam bidang aerospace engineering (teknologi antarika), kemajuan telah dibuat oleh Cina, India, Brazil, Pakistan dan Iran, dan di bidang nanoteknologi, maka negara-negara Cina, Brazil,

India dan Afrika Selatan, merupakan pusat keunggulan baru. Dengan demikian negara-negara yang akan menyusul Cina, Brazil, dan India adalah: Pakistan, Iran, Afrika Selatan, Mesir dan Kuba. Negara seperti Cile, Thailand dan Nigeria akan menyusulnya kemudian.

Dalam jurnal bergensi: *Nature Biotechnology* 2004, telah pula dideklarasikan bahwa 7 Negara Dunia Ketiga telah menguasai bioteknologi-kesehatan/kedokteran (*health biotechnology*) setingkat dengan negara-negara maju adalah: Cina, India, Brazil, Mesir, Kuba, Korea Selatan dan Afrika Selatan. Dan pada tahun 2007 ini, Iran telah masuk dalam jajaran ke-7 negara tersebut; utamanya dalam keberhasilan riset *stem cell* untuk leukemia.

Sayang dalam *the 2nd World Science Forum 2005* maupun di beberapa Jurnal Ilmiah Internasional, keberhasilan Indonesia tidak pernah muncul !!!

II. GAMBARAN ANGGARAN RESEARCH & DEVELOPMENT (R&D) BERBAGAI NEGARA

Berikut adalah gambaran data prosentase R&D per GDP, baik dari negara-negara maju, maupun dari beberapa negara Asia, termasuk Indonesia, yang diambil dari *R&D Magazine, Batelle, OECD, World Bank*; 2005.

Dari data tersebut terlihat, bahwa untuk negara-negara maju prosentase R&D/GDP adalah antara 2-4%, atau rata-rata antara 2,3-3,5%. Kita juga melihat 'kebangkitan' negara-negara Asia dalam alokasi dana untuk R&D, utamanya terlihat untuk *Korea Selatan, Singapura, Cina, dan India*. Nampaknya akan menyusul *Turki dan Malaysia*, sedang Indonesia masih jauh ketinggalan.

Memang menarik kalau kita lihat "kebangkitan Asia dalam bidang *Science*" ini. Dalam *the 2nd World Science Forum 2005* di Budapest, Hongaria, UNESCO telah menyatakan munculnya tiga negara berkembang yang telah masuk kedalam negara-negara produksi atau sumber *science* dan teknologi. Ke tiga negara itu adalah *Cina, India dan Brazil*. Negara-negara berkembang lainnya akan segera menyusul, seperti *Pakistan, Afrika Selatan, Mesir, Iran dan Kuba*. Nama

Indonesia sama sekali tidak disinggung. Perlu dicatat di sini, alokasi dana R&D Filipina, maksud saya adalah *research expenditure* saja, masih lebih besar 10x dari Indonesia.

Prosentase R&D per GDP, 2005

No	Nama Negara	Kategori Negara, (Benua)	%R&D per GDP
1	ISRAEL	- (Asia)	4,5
2	SWEDIA	Maju (Eropa)	3,9
3	FINLANDIA	Maju (Eropa)	3,5
4	JEPANG	Maju (Asia)	3,2
5	AMERIKA SERIKAT	Maju (Amerika)	2,6
6	KOREA SELATAN	Maju (Asia)	2,6
7	SWIS	Maju (Eropa)	2,6
8	JERMAN	Maju (Eropa)	2,5
9	AUSTRIA	Maju (Eropa)	2,3
10	TAIWAN	Maju (Asia)	2,2
11	SINGAPURA	Berkembang (Asia)	2,2
12	PERANCIS	Maju (Eropa)	2,2
13	INGGRIS	Maju (Eropa)	1,9
14	CINA (RRC)	Berkembang (Asia)	1,4
15	RUSIA	Maju (Eropa)	1,3
16	INDIA	Berkembang (Asia)	1,0
17	TURKI	Berkembang (Ero-Asia)	0,7
18	MALAYSIA	Berkembang (Asia)	0,7
19	INDONESIA ^{*)}	Berkembang (Asia)	0,1 ^{**)}

^{*)} Indonesia tidak tercatat dalam Laporan diatas. Data ini saya ambil dari Indikator IPTEK LIPI.

^{**) Data tahun 2004}

III. BEBERAPA CATATAN TENTANG "NEGARA BERKEMBANG MAJU"

1) INDIA

Di kalangan masyarakat ilmuwan dunia, India dikenal sebagai *developing country but it is a developed country as far as its intellectual infrastructure concern*. Hal ini tidak terlepas dari peran Presiden India (2002-2007): Dr. APJ Abdul Kalam, yang merupakan juga Bapak Teknologi

Rudal Balistik dan Teknologi Bom Hidrogen India. Beliau selalu mengingatkan masyarakat India dengan kata-kata: “*Jika bisa buat mengapa harus beli*”. Prinsip ini jelas mengacu kepada prinsip *Swadhesi* dari Mahatma Gandhi. Di samping itu, India membuat *policy* yang dikenal sebagai *brain gain policy*. *Brain gain policy* adalah membuat jaringan dengan ilmuwan India yang tersebar di luar negeri, utamanya yang di Eropa dan AS, dan memanfaatkannya untuk kepentingan kemajuan India. Jadi, kebijakan India adalah mengubah *brain drain* (tersebar nya ilmuwan India di luar negeri) menjadi *brain gain*, untuk kemajuan India. India percaya bahwa pada era global ini, tentu akan ada *brain circulation*; artinya ilmuwan yang *outstanding* di mana pun atau dari macam ras apapun akan selalu mencari tempat, dimana dia bisa melakukan penelitiannya dengan baik. India menghadapi masalah *brain drain* para ilmuwan unggulnya yang pergi ke negara-negara maju. Mereka masuk ke dalam *brain circulation* ini. Nah Pemerintah India mengambil kebijakan *brain gain policy* tersebut dan ternyata berhasil. *Policy* ini diikuti oleh baik Cina maupun Malaysia.

2) PAKISTAN

Keberhasilan Pakistan dalam mengejar ketertinggalan dari India, diceritakan secara rinci oleh Prof. Dr. Rode (Assisten Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, Austria) kepada saya. Juga cerita ini berkembang di *2nd World Science Forum* di Budapest, Hungaria. Ceritanya begini: Pada tahun 2000, Presiden Pervez Musharaf mengundang ilmuwan Kimia terkemuka Pakistan, Prof. Dr. Atthaur Rahman, beliau diminta kesediaannya untuk menjadi Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Pakistan. Apa jawab Atthaur Rahman? Dia menjawab: *Are you serious on science Mr. President?* Musharaf menjawab: *Of course I'm serious!* Atthaur Rahman kemudian mengatakan: “*If you are serious on science, then follow my policy!*”. Musharaf kaget mendengar kata Atthaur Rahman itu dan minta penjelasan apa *policy* Atthaur Rahman sebagai menteri nantinya. Atthaur Rahman mengatakan: “*First, government must increase higher*

education budget this year by 100%, then followed by 50% every years to come until 5 years. Secondly, Government must increase research expenditure by 6000%, and lastly, government must pay Pakistani outstanding scientists four time higher than cabinet ministers!. If you agree with my policy, I'm ready to be your minister?' Pervez Musharaf setuju dengan *policy* ini. Dan setelah 5 tahun, kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan industri di Pakistan sekarang sudah mendekati India. Yth. Pak Amien, cerita tentang Atthaur Rahman ini disampaikan berkali-kali oleh kalangan internasional, baik pada sidang *2nd World Science Forum* maupun sidang-sidang di UNESCO. Memang diperlukan *a man of visionary, principle and integrity*; tidak hanya "manusia mohon petunjuk dan arahan saja". Kemajuan Pakistan juga tidak terlepas dari peranan PM Pakistan, Shaukat Aziz.

3) IRAN

Peranan Pemerintah lagi-lagi sangat menentukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di negara berkembang. Contoh lain adalah Iran. Iran melihat ilmu pengetahuan sebagai sumber kebanggaan. Pimpinan Spiritual Tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamanei menegaskan bahwa riset *stem cells* (sel induk) merupakan usaha yang mulia yang selaras dengan tujuan Iran untuk menjadi '*Pemimpin Ilmu Pengetahuan di Dunia Muslim*'. Riset di bidang bioteknologi kedokteran, telah membuatnya *leading* di bidang ini, utamanya dalam pengobatan leukemia. *Policy* Iran mirip dengan India, yaitu melakukan *brain gain policy*. Ali Khamanei menegaskan kembali kepada seluruh masyarakat Iran agar *bekerja keras untuk mengembalikan status historic Iran sebagai "Ibu Ilmu" di Dunia ini*. Kebanggaan akan kemajuan ilmu pengetahuan ditunjukkan oleh para pemimpin Iran, dari pemimpin spiritualnya sampai dengan pimpinan negara. Kemampuan di bidang pengembangan *aerospace engineering* dan *nuclear technology*, adalah bukti kerja keras dan kemandirian Iran. Mengapa kita tidak bisa mencontoh kemandirian ini?

Demikianlah Pak Amien, semoga dapat menjadi tambahan dalam menyusun monograf. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh

Jakarta, Desember 2007

Umar Anggara Jenie

L a m p i r a n 2

BERANIKAH INDONESIA MENGHENTIKAN PENJAJAHAN FREEPORT? TIDAK¹

M. Amien Rais

Saya gembira seminar dan launching buku tentang *Freeport* yang telah menjajah Indonesia dilakukan di Gedung Nusantara V MPR/DPR RI di Senayan. Paling tidak secara simbolik seminar kita ini dapat mengingatkan para wakil rakyat, untuk kesekian kalinya, bahwa telah terjadi penjajahan dan kezaliman Freeport terhadap bangsa Indonesia.

Buku *Freeport: Bagaimana Pertambangan Emas dan Tembaga Raksasa “Menjajah” Indonesia* ini mengungkapkan betapa PT Freeport McMoran Indonesia telah melakukan kejahatan multi-dimensional. Kejahatan lingkungan, kejahatan kemanusiaan, kejahatan ekonomi, kejahatan hukum dan kejahatan politik dilakukan serentak oleh perusahaan pertambangan yang termasuk dalam kategori industri hitam ini.

Dalam berbagai kesempatan WALHI dan JATAM telah berulang kali meniup peluit peringatan agar Pemerintah Indonesia segera melakukan langkah kongkrit untuk menghentikan kejahatan serba aspek itu demi menegakkan kedaulatan ekonomi, hukum dan politik Indonesia. Namun hasilnya sebegitu jauh sungguh mengecewakan. Bahkan kesan yang kita peroleh adalah protes dan jeritan anak-anak bangsa di Papua dan di tempat lain seperti Jakarta

¹ Disampaikan pada acara Seminar dan Louncing Buku “Beranikah Indonesia Menghentikan Penjajahan Freeport”. Rabu, 28 Maret 2007. Gedung Nusantara V MPR/DPR RI.

dianggap oleh Pemerintah yang berkuasa saat ini sebagai gangguan dan ribut-ribut belaka tanpa makna. Kesan cukup kuat menunjukkan Pemerintah melindungi berbagai kejahatan Freeport itu sambil seolah mengatakan: "Jangan khawatir Freeport, terus saja silahkan mengurus SDA kami di Papua, kami akan tetap melindungi Anda".

Di rumah rakyat Indonesia siang ini, kita mencoba meniup peluit (*whistle-blowing*) sekeras-kerasnya dengan harapan para anggota DPR RI dan Pemerintah Susilo mendengar peringatan dan "teriakan" kita bahwa telah terjadi penjajahan ekonomi dan politik oleh Freeport terhadap Indonesia. Penjajahan yang begitu telak dan kasat mata itu seharusnya segera dihentikan. Namun ada kemungkinan, sekeras-kerasnya peluit dibunyikan, jika yang kita hadapi adalah orang-orang pekak dan tuli, maka si meniup peluit bisa-bisa lelah sendiri.

Kasus Freeport bukanlah satu-satunya. Ada berlusin-lusin kontrak karya pertambangan lainnya antara Indonesia dengan berbagai korporasi asing yang tidak masuk akal sehat. Mengapa? Karena hampir semua kontrak karya pertambangan itu merupakan pengulangan praktik penjajahan. Korporasi asing mendapat keuntungan yang terlalu besar, sementara pihak Indonesia hanya mendapat royalti ala kadarnya dan memikul beban dan destruksi lingkungan yang mustahil dapat dipulihkan. Mungkinkah kita mengembalikan sebuah gunung kecil yang sudah lenyap dihajar Freeport dan berubah jadi "danau" buruk dan melelehkan salju di puncak Gunung Jaya Wijaya yang merupakan salah satu keajaiban alam? Keajaiban alam itu kini tinggal kenangan.

Keserakahan Freeport adalah tipikal korporasi internasional yang bergerak di bidang pertambangan. Exxon mobil adalah penjarah SDA negara-negara berkembang yang tidak kalah serakah. Kita mengetahui, Pemerintah Susilo telah memberikan *operatorship* minyak Blok Cepu sepenuhnya kepada Exxon. Juga Exxon diberi hak untuk mengeksploitasi minyak kita sampai tahun 2036. Di salah satu gedung di kompleks MPR/DPR RI ini Persatuan Ahli Geologi Indonesia pernah memprotes keras keputusan Pemerintah itu karena mereka

merasa terhina, dianggap tidak mampu mengeksploitasi SDA milik kita sendiri. Sayang, protes itu dianggap angin lalu.

Tidak kalah gila adalah bagaimana Indonesia mendapat 0% takkalah Exxon menguras gas alam kita di Natuna. Pertambangan gas alam yang dikerjakan Exxon di wilayah Natuna itu sangat ganjil. Produksi gas alam itu dibawa ke wilayah Singapura lewat pipa bawah laut, dijual oleh agen-agen Exxon di negara Singa itu, tanpa sedikitpun kita pernah tahu, berapa volume gas alam kita yang dijarah dan berapa nilai kerugian kita untuk masa puluhan tahun.

Menurut Paul Krugman, Exxon adalah musuh planet bumi. Dimana-mana Exxon menghancurkan lingkungan hidup demi maksimalisasi profit yang dikejar. Exxon menjadi musuh planet bumi karena telah menyogok para ilmuwan yang meragukan adanya *global warming*. Implikasinya adalah bahwa Exxon dengan jaringan pertambangannya yang terbesar di muka bumi tidak punya andil dalam *global warming*. Krugman menunjukkan bahwa bukan hanya Exxon sebagai korporasi yang serakah, tetapi juga para direksinya. Lee Raymond, mantan CEO Exxon, selama bekerja 13 tahun mendapat gaji \$ 686 juta atau sekitar 6 trilyun dan 174 milyar rupiah. Lumayan bukan?

Kembali ke Freeport. Freeport melanjutkan penjajahan dan penghinaannya pada Indonesia ketika Freeport mengakuisisi Phelps Dodge Corp., perusahaan pertambangan emas saingannya senilai \$ 25,9 milyar. Bayangkan, hampir 26 milyar dolar. Dari jumlah pembayaran yang senilai sekitar 234 trilyun rupiah itu, yang 70% dibayar tunai dan sisanya diselesaikan lewat pinjaman Bank.² Saya diberitahu seorang *lobbyist* Partai Demokrat Amerika, sesungguhnya tindakan Freeport itu keliru karena cadangan SDA kita di perut bumi Papua dijadikan kolateral atau jaminan kredit bank. Harusnya, kata dia, Indonesia merasa terhina karena tidak dilibatkan sama sekali dalam akuisisi Phelps Dodge tersebut. Saya katakan bagaimana Indonesia merasa terhina, *wong* faham saja tidak. Tetapi saya yakin

² Lihat *The Wall Street Journal* dan Media Indonesia, 21 November 2006.

Presiden Yudhoyono (mantan menteri pertambangan RI) dan Menteri Purnomo tentu **faham** dan sangat **faham** dengan apa yang terjadi.

Sikap Indonesia terhadap korporasi asing agaknya memang berbeda dibandingkan dengan negara-negara lain. Saya yakin negara-negara *petro-dollar* di Timur Tengah menjadi kaya karena pemerintah di Kawasan itu tidak bodoh-bodoh amat. Bahwa korporasi minyak dan pertambangan dari Amerika, Inggris, Belanda, Prancis, dll diundang untuk melakukan kegiatan pertambangan itu sudah pasti. Akan tetapi dalam *production-sharing* dan *profit-sharing*, negara-negara Timur Tengah itu cukup cerdas dan berani meminta bagian yang lebih masuk akal, dibanding Indonesia. Indonesia nampak selalu tunduk, merunduk, bahkan tiarap berhadapan dengan korporasi asing yang dalam 24 jam sehari – semalam ideologi mereka adalah maksimalisasi keuntungan dengan segala cara.

Pemerintah Yudhoyono tidak boleh lupa bila keserakahan dan keganasan berbagai korporasi asing seperti Freeport tersebut dibiarkan, apalagi dilindungi, hakekatnya Pemerintah Susilo sudah melakukan kejahatan terhadap rakyatnya sendiri. Dengan kata lain, Pemerintah telah melakukan *State-Corporate Crime*, yakni kejahatan korporasi yang dibiarkan atau bahkan difasilitasi oleh negara.

Kebijakan ekonomi dan kebijakan pertambangan Pemerintah Yudhoyono nampaknya belum berubah dari kebijakan-kebijakan sebelum reformasi. Malah dalam kasus Blok Cepu, kebijakan yang diambil hanyalah meneruskan kebiasaan buruk masa lalu, yakni mensubordinasikan kepentingan bangsa sendiri dibawah kepentingan korporasi asing. Tentu pernyataan saya ini akan dibantah, tetapi fakta selalu berbicara tentang dirinya sendiri. Bayangkan, kontrak karya II antara Indonesia dengan Freeport baru berakhir pada 2041. Di tahun itu angkatan saya, Jusuf Kalla, Susilo B. Yudhoyono, dan seanteronya sudah berpindah ke alam baka. Bisakah kita tenang di alam baka jika generasi cucu kita merasa kecewa berat karena kita biarkan terus kekuatan korporatokrasi menguras ludes SDA kita di daratan, lautan dan perut bumi Indonesia? Sehingga

kita mewariskan kemelaratan, kekecewaan dan kehancuran ekologi pada cucu dan cicit kita?

Saya tetap yakin bangsa Indonesia bisa jadi bangsa besar di masa datang. Tetapi proyeksi Indonesia menjadi salah satu dari 5 raksasa ekonomi dunia di tahun 2030 dengan dasar keadaan kita sekarang yang makin terpuruk, kiranya masih jauh panggang dari api. Di samping itu tentu dapat meninabobokkan bangsa yang sedang resah dan gelisah menghadapi kehidupan yang tetap saja sulit. Kemerosotan dalam banyak hal adalah prestasi Pemerintahan Yudhoyono.

Kiranya peringatan seorang ekonom terkenal, Ravi Brata, bagus untuk dicamkan oleh Pemerintah Susilo dan para anggota DPR kita yang mudah lupa diri. Professor Brata mengatakan:

“Setiap jenis korupsi adalah buruk, tetapi korupsi kebijakan ekonomi mungkin adalah yang paling bejat. Kejahatan seperti itu terjadi bilamana para anggota DPR bukan saja memperkaya diri sendiri, tetapi juga menolak perbaikan hidup bagi masyarakat yang tertindas, yakni bagi mereka yang memiliki kekuatan tawar yang kecil dan merupakan bagian terlemah dalam masyarakat”

*(Any kind of corruption is bad; but the corruption of economic policy is perhaps the worst. Such malfeasance occurs when law-makers not only enrich themselves but also deny just rewards to the downtrodden, that is, to those who have little bargaining power and are the weakest sections of society)*³

Kalau saya boleh menambahkan, DPR RI kita sekarang ini telah, sedang dan akan meloloskan bersama pembuatan berbagai Undang-Undang di bidang kehutanan, pelayaran, penanaman modal asing, pengolahan air, energi dan listrik, yang sebenarnya, sekali lagi, semuanya lebih menguntungkan pihak asing daripada rakyat sendiri. Luar biasa.

³ Ravi Brata. 2007. *The New Golden Age*.

Kemarin kita dikagetkan dengan kemungkinan lolosnya RUU Penanaman Modal yang kental kepentingan asing.⁴ Memang sulit membuktikan bahwa ada tekanan – rayuan – sogokan dari korporasi asing pada sementara anggota DPR kita. Namun dengan adanya penolakan terhadap usulan penanganan dugaan kejahatan korporasi dari DPR RI itu tidak berlebihan bila dikatakan bahwa Eksekutif dan Legislatif kita hakikatnya telah menjadikan *Indonesia for Sale*.

Bayangkan, para pemodal asing dibolehkan memiliki hak guna usaha sampai 70, 80, dan 95 tahun. Indonesia seperti negara yang kesurupan atau kesetanan. Tanah, sebagai aset termahal, dapat diserahkan ke kapitalis asing sampai mendekati satu abad. Demikian juga hutan-hutan kita juga sedang dipindah tangankan ke pemodal asing untuk kurun waktu 75 tahun sampai satu abad. *Indonesia for Sale!!*.

Kita perlu belajar dari negara-negara lain seperti Venezuela dan Bolivia. Kedua negara ini berhasil keluar dari cengkeraman korporatokrasi internasional. Mereka berhasil melakukan negosiasi ulang atas seluruh perjanjian pertambangan dengan pihak asing yang semula merugikan bangsa sendiri. Rakyat Venezuela mulai menikmati hasil SDA nya secara lebih besar sejak sekitar 4 tahun lalu, sedangkan rakyat Bolivia merasakan hal yang sama sejak akhir tahun 2006. Ternyata keduanya berhasil melakukan negosiasi seluruh kontrak pertambangan dengan korporasi asing. Tidak betul bahwa renegotiasi kontrak pertambangan adalah tabu.

Malaysia dan Iran, bahkan negara-negara penghasil minyak, gas dan mineral di Timur Tengah pada umumnya tidak menjadi bangsa pecundang. Setahu saya, sulit dicari sebuah bangsa yang lupa diri dan lupa harga, martabat dan kehormatan diri seperti halnya bangsa Indonesia. Yang kita alami sesungguhnya adalah sebuah malapetaka kebodohan, rasa rendah diri yang berlebihan (*inferiority complex*) dan sekaligus **rasa tidak percaya diri**.

⁴ *Kompas*, 27 Maret 2007.

Namun masih ada secercah harapan, asalkan beberapa hal di bawah ini dapat dipenuhi. Pertama, pimpinan nasional atau pemerintah hendaknya berjiwa pemberani, memiliki *moral courage* untuk membela kepentingan bangsa sendiri berhadapan dengan kepentingan korporasi internasional. Indonesia harus berdiri sejajar dan sama tinggi dengan negara mana pun juga. Indonesia adalah negara merdeka berdaulat penuh. Kini makin terbukti, negara-negara yang menjauhi AS dan berusaha menegakkan kemandirian justru semakin berhasil dan mengalami kemajuan cepat. Akhirnya, Indonesia di bawah Presiden Susilo semakin merapatkan diri dengan Paman Sam.

Kedua, diperlukan kekompakan antara Eksekutif dan Legislatif untuk memukul balik setiap usaha hegemoni korporasi asing dalam menguasai Indonesia. Yang terlihat sekarang kedua lembaga demokrasi kita justru semakin mendekat dan mengunggulkan kepentingan korporasi asing daripada kepentingan bangsa sendiri.

Ketiga, komponen-komponen bangsa seperti TNI, Polri, kaum intelektual, media massa, tokoh-tokoh muda dan tokoh-tokoh informal seharusnya memadukan kekuatan untuk mempertahankan kedaulatan kita dalam arti luas dari penerobosan kepentingan korporasi asing. Sayang sampai sekarang belum terlihat penggalangan visi dan penyamaan posisi dalam menghadapi invasi politik, ekonomi dan budaya sebagai akibat proses globalisasi yang tidak terelakkan. Yang terlihat adalah baik DPR maupun Pemerintah berlomba membuka pintu rekolonisasi ekonomi Indonesia.

Dengan stock kepemimpinan nasional yang sedang berkuasa sekarang ini dan dengan gaya dan semangat kerja seperti sekarang, jawaban atas pertanyaan Beranikah Indonesia Menghentikan "Penjajahan" Freeport? barangkali sudah jelas. Jawaban itu adalah tidak berani. Sama sekali tidak berani. Namun, saya harap saya keliru. *Wallahu a'lam.*

Catatan:

Harian *The New York Times* edisi 27 Desember 2005 pernah memuat laporan panjang, 3 halaman penuh tentang kegiatan

Freeport dengan Judul “*Below a Mountain of Wealth, a River of Waste*”. Di situ digambarkan betapa sementara perwira tinggi TNI dan Polri telah masuk dalam daftar penerima honorarium khusus. Juga untuk biaya pengadaan infrastruktur militer telah dikeluarkan dana sebanyak 35 juta dollar. Termasuk 70 Land Rover dan Land Cruiser yang diperbaharui setiap tahun. Seorang tokoh CIA dan dua mantan perwira militer AS juga digunakan. Melihat jaringan *intelligence*, polisi dan militer antara AS dan Indonesia di Freeport, agaknya tidak mudah untuk me-ngatakan NO pada Freeport.

Lampiran 3

KATA PENGANTAR⁵

M. Amien Rais

Jiwa dan rasa kebangsaan saya menggelegak ketika pada 1997 saya menyaksikan praktik pertambangan PT Freeport Indonesia. Berapa tidak! Sejauh mata memandang tampak kerusakan ekologi yang demikian parah. Puluhan truk raksasa membawa bongkahan batu, tanah, pasir dan reruntuhan gunung Jaya Wijaya yang dihancurkan lewat dinamis, ke *milling machine*, ke mesin penggerusan.

Setiap hari ribuan ton bongkahan dari gunung-gunung Jaya Wijaya itu diambil konsentrat emas, perak dan tembaga, sedangkan ampasnya, *tailingnya*, atau limbahnya, dilemparkan ke lembah sekitar dan terutama ke sungai Ajkwa, sehingga menghancurkan tanah sekitar 250 km² di sekitar daerah pertambangan.

Konsentrat emas, perak dan tembaga itu kemudian lewat pipa besar sepanjang sekitar 70 km digelontorkan ke pantai laut Arafura. Di sana kapal-kapal besar telah menunggu berton-ton konsentrat yang telah dijarah oleh PT Freeport Mc Moran itu.

Kapal-kapal besar itu kemudian mengirim ribuan ton konsentrat ke berbagai *smelter* di luar negeri untuk kemudian diolah menjadi batangan emas, perak dan tembaga. Yang menakutkan adalah bahwa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak dapat melakukan

⁵ Kata pengantar pada buku *Freeport: Bagaimana Pertambangan Emas dan Tembaga Raksasa "Menjahaj" Indonesia*, Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), 2006.

supervisi, bahkan sekedar monitoring, berapa volume konsentrat emas dll itu yang telah digotong Freeport ke luar negeri.

Luar biasa. Memang luar biasa karena ada semacam negara dalam negara. Pada 1997 itu, ketika saya membaca bahwa Freeport hanya menjadi pembayar pajak di nomor urut belasan, saya langsung menulis di koran bahwa pasti telah terjadi penggelapan pajak oleh perusahaan Amerika yang arogan dan bereputasi buruk itu. Mungkin karena sentilan itu, pada tahun berikutnya Freeport menjadi pembayar pajak nomor satu. Entah sekarang.

Sesungguhnya Freeport telah melakukan berbagai kejahatan. Kejahatan pertama adalah pembunuhan terhadap lingkungan (*ecocide*) secara sistematis, terus menerus, dan sengaja. Menurut harian The New York Times 27 Desember 2005, volume buangan limbah Freeport sudah dua kali lebih besar dibandingkan kedukan terusan Panama. Atau menurut buku ini limbah Freeport mampu menutupi kota Jakarta, Depok dan Bekasi setinggi 5 meter Lumpur beracun.

Kedua, kejahatan pelanggaran pembayaran pajak. Saya yakin bila ada audit pajak independen terhadap PT Freeport Indonesia niscaya akan ketahuan betapa perusahaan yang arogan ini telah mengemplang pajak. Ketika saya di sana beberapa insinyur Indonesia mengatakan bahwa alat-alat berat sampai alat-alat elektronik rumah tangga di Tembagapura masuk begitu saja lewat jalur khusus tanpa membayar pajak. Belum lagi “pembukuan” *cash-in* dan *cash-out* Freeport yang nampaknya tidak mungkin dapat diketahui oleh pihak Indonesia.

Dalam sebuah diskusi dengan tokoh-tokoh senior pertambangan, antara lain Prof. Subroto dan Prof. Sadli, saya diberi tahu bahwa dalam kontrak karya I Indonesia–Freeport, ada sejumlah paragraf rahasia yang tidak boleh diketahui oleh pihak luar, bahkan oleh DPR-RI. Bukankah ini sebuah penghinaan terhadap kedaulatan bangsa? Bagaimana mungkin rakyat Indonesia tidak boleh mengetahui urusan yang menyangkut nasibnya?

Ketiga, telah terjadi kejahatan kemanusiaan yang berupa penyalahgunaan hak hidup, hak ekonomi, sosial dan budaya sebagian warga masyarakat yang telah dilakukan oleh Freeport. Ironisnya, sebagian oknum militer dan polisi telah berperan sebagai pelindung berbagai kejahatan kemanusiaan tersebut seperti dipaparkan dalam buku ini.

Sudah sangat tinggi saatnya Indonesia mengakhiri penjajahan dan penghinaan yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia itu. Bayangkan, dana pensiun pemerintah Norwegia saja, mencabut investasinya di *Freeport Mc Moran Copper and Gold Inc.* senilai US\$ 240 juta atau sekitar Rp 2,16 triliun. Alasannya, Freeport telah menghancurkan ekologi Papua. Nah, Pemerintah Norwegia yang belasan ribu km jauhnya dari Indonesia, merasa berdosa kalau ikut menghancurkan lingkungan Papua, sementara kita begitu tenang dan merasa tidak bersalah sama sekali. *What kind of nation are we? What kind of government do we have?* Bangsa dan pemerintah macam apa kita ini?

Dalam berbagai kesempatan saya katakan bahwa pertambangan PT Freeport Indonesia adalah sebuah pertambangan babon. Dan jangan lupa, izin pertambangannya baru berakhir pada 2041, takkala angkatan saya, termasuk Presiden Susilo dan Wapres Kalla, kira-kira sudah berada di alam baka. Saya yakin pada saat Freeport meninggalkan Papua, selain *reserve* tembaga, emas dan perak di sana sudah ludes, lingkungan alamnya di sana juga sudah hancur lebur menyernakan.

Setelah membaca buku yang diterbitkan oleh JATAM (jaringan Advokasi Tambang) ini, sudah tidak perlu lagi kita menanyakan bukti kejahatan multi-dimensional yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia. Maaf, hanya manusia idiot atau embisil saja yang masih menanyakan bukti pelanggaran atau kejahatan Freeport.

Semoga buku yang ditulis oleh 7 patriot bangsa ini menyadarkan kita semua, terutama Pemerintah untuk segera melakukan langkah-langkah rasional terhadap Freeport demi kepentingan bangsa Indonesia, bangsa yang sudah demikian lama terhina.

Lampiran 4

Masukan Tjatur Sapto Edy:

ANALISIS KONTRAK KARYA II FREEPORT

Beberapa ketentuan dalam Kontrak Karya II Freeport yang ditandatangani pada Desember 1991 yang tidak adil dan merugikan kepentingan Indonesia (khususnya secara ekonomi) di antaranya adalah:

I. Menyangkut ketentuan Royalti atau iuran eksploitasi/produksi (Pasal 13):

- Bahwa sistim royalti dalam kontrak Freeport tidak didasarkan atas prosentase dari penerimaan penjualan kotor (*gross revenue*), tetapi dari prosentase penjualan bersih, yaitu penjualan kotor setelah dikurangi dengan biaya peleburan (*smelting*), biaya pengolahan (*refining*), dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan Freeport dalam penjualan konsentrat.

Bahwa dalam hal besaran, prosentase royalti (yang didasarkan atas prosentase penerimaan penjualan bersih tersebut) juga tergolong sangat kecil. Yaitu 1% - 3,5% tergantung pada harga untuk konsentrat Tembaga, dan 1% *flat/fixed* untuk logam mulia (Emas dan Perak).

Meskipun dalam praktik industri pertambangan di dunia tidak ada suatu metode dan besaran yang baku menyangkut sistim dan prosentase yang diterapkan, tetapi royalti 1% untuk emas dan perak, dan 1% - 3,5% yang keduanya didasarkan atas penjualan bersih tersebut dapat dikatakan tergolong sangat rendah.

- Negara-negara Afrika seperti Botswana, Ghana, Namibia, dan Tanzania menerapkan royalti emas dalam rentang 3% - 12% dari penjualan kotor, dan masih dapat dinegosiasikan/disesuaikan dengan harga yang berlaku. Sedangkan untuk tembaga, negara-negara tersebut menerapkan 3%-8% royalti yang juga didasarkan atas penjualan kotor. Di Australia, royalti untuk tembaga berkisar antara 4% - 18% yang didasarkan atas penjualan bersih, sedangkan yang didasarkan atas penjualan kotor berkisar antara 2,7% - 5%. Hal yang sama juga diterapkan untuk emas. Di negara-negara Amerika Latin seperti Argentina, Bolivia, Republik Dominika dan Venezuela, royalti untuk emas bervariasi antara 3% - 7% di mana prosentase tersebut pada umumnya (kecuali Argentina) juga didasarkan atas penjualan kotor. Hal yang sama diterapkan untuk tembaga, dengan besaran royalti bervariasi antara 1% - 5%. (Otto, James, et al. 2006. *Mining Royalties: A Global Study of Their Impact on Investors, Government, and Civil Society*).

II. Menyangkut ketentuan iuran tetap untuk suatu wilayah pertambangan atau *Deadrent* (Pasal 13)

Di dalam kontrak Freeport (Lampiran D), besarnya iuran tetap untuk wilayah pertambangan yang dibayarkan berkisar antara 0,025 – 0,05 US dolar per hektar per tahun untuk kegiatan Penyelidikan Umum (*General Survey*), 0,1 – 0,35 US dolar per hektar per tahun untuk kegiatan Eksplorasi, 0,5 US dolar per hektar per tahun untuk kegiatan Studi Kelayakan dan Konstruksi, dan 1,5 – 3 US dolar per hektar per tahun untuk kegiatan Operasi Eksploitasi/Produksi.

Tarif iuran tersebut, di seluruh tahapan kegiatan, dapat dikatakan sangat sangat kecil dan bahkan sangat sulit diterima akal sehat. Dengan kurs 1 US dolar = Rp. 9.000,00, maka besaran iuran itu hanya berkisar antara Rp. 225,00 – Rp. 27.000,00 per hektar per tahun.

Sangat jauh lebih rendah dibandingkan dengan sewa lahan sawah oleh petani penggarap yang murah sekalipun, katakanlah Rp 300.000

hektar per tahun. Hal ini tentu saja sangat tidak adil, dan sekali lagi sangat sulit diterima akal sehat, mengingat potensi ekonomi yang terkandung di dalam wilayah pertambangan Freeport sangat jauh melebihi potensi ekonomi dari suatu lahan sawah.

III. Menyangkut kontrol/pengawasan atas kandungan bijih mineral yang dihasilkan

Dalam kontrak Freeport tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan secara eksplisit bahwa seluruh operasi dan fasilitas pemurnian dan peleburan harus seluruhnya dilakukan di Indonesia dan dalam pengawasan pemerintah Indonesia. Pasal 10 poin 4 dan 5 memang mengatur tentang operasi dan fasilitas peleburan dan pemurnian tersebut, yang secara implisit ditekankan perlunya untuk dilakukan di wilayah Indonesia, tetapi tidak secara tegas dan eksplisit bahwa hal tersebut seluruhnya (100%) harus dilakukan/berada di wilayah Indonesia. Sehingga hingga saat ini, hanya 29% saja dari produksi konsentrat yang dimurnikan dan diolah di dalam negeri. Sisanya (71%) dikirimkan ke luar negeri, di luar pengawasan langsung dari pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia hanya mendapatkan laporan saja dari Freeport. Dengan demikian berapa jumlah sebenarnya emas, perak, tembaga, atau kandungan mineral lainnya yang diproduksi oleh Freeport dapat dikatakan pada dasarnya tidak diketahui secara pasti oleh pemerintah Indonesia.

IV. Menyangkut terminasi dan/atau perpanjangan kontrak

Di dalam Kontrak Freeport tidak ada satu pasal pun yang secara eksplisit mengatur bahwa pemerintah Indonesia dapat sewaktu-waktu mengakhiri kontrak Freeport, pun jika Freeport dinilai melakukan pelanggaran-pelanggaran atau tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak. Sebaliknya, pihak Freeport dapat sewaktu-waktu mengakhiri kontrak tersebut jika mereka menilai **pengusahaan pertambangan di wilayah kontrak pertambangannya**

sudah tidak menguntungkan lagi secara ekonomis (Pasal 22 poin 1). Ketentuan ini sangat sepihak dan jelas sangat merugikan Indonesia ditinjau dari segi apa pun (hukum, politik, ekonomi). Kedudukan dan posisi hukum pemerintah Indonesia sangat lemah dan dapat dikatakan berada di bawah Freeport.

Dalam hal perpanjangan kontrak, pihak Freeport berhak mengajukan perpanjangan kontrak untuk dua kali masa perpanjangan yang masing-masing berdurasi 10 tahun di mana pemerintah Indonesia tidak berhak untuk tidak mengabulkan permohonan perpanjangan tersebut secara tidak wajar (Pasal 31 poin 2). Ketentuan ini juga sangat sepihak dan karenanya sangat merugikan kepentingan nasional Indonesia karena posisi pemerintah Indonesia secara hukum dalam kontrak ini menjadi sangat-sangat lemah.

L a m p i r a n 5
Masukan Tjatur Sapto Edy:

**BEBERAPA KETENTUAN DALAM KONTRAK BAGI
HASIL YANG CENDERUNG PRO-ASING**

1. Diberlakukannya *cost recovery* 100% dan bahkan 120% untuk lapangan marginal.
2. Dimasukkannya pembayaran bunga ke dalam *cost recovery*.
3. Diberlakukannya *Domestic Market Obligation Holiday* terhadap produksi migas (kontraktor tidak wajib menjual bagian hasil produksinya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dalam hal ini hingga 60 bulan).
4. Diharuskannya Indonesia membeli minyak produksi KKKS yang merupakan dalam bagian dari minyak DMO dengan harga pasar sejak tahun 1976/1977. Padahal sebelum itu minyak tersebut dapat dibeli dengan harga 25% saja dari harga pasar.
5. Diubah-ubahnya porsi bagi hasil migas, dengan kecenderungan bagian pemerintah semakin lama semakin kecil. Contoh: diberikannya porsi bagi hasil sebelum pajak 0% bagi pemerintah Indonesia dan 100% bagi kontraktor dalam kontrak pengusahaan gas alam di Natuna Blok D Alpha.

Tabel 1. Perkembangan Insentif dalam Sistem Kontrak
Bagi Hasil Migas Indonesia

	PSC Sebelum 1974 (I)	PSC 1974- 1976/77 (II)	PSC 1976/77- 1988 (III)	PSC 1988 - 2000 (IV)		PSC setelah 2000 (V)
				Insentif 1989	Insentif 1992	Insentif 1993
1	COST RECOVERY (CR)					
Batasan Cost Recovery	40%	40%-50%	100%	100%	100%	100% - 120%
Interest payment	Tidak dihitung sebagai CR	Tidak dihitung sebagai CR	Dihitung sebagai CR	Dihitung sebagai CR	Dihitung sebagai CR	Dihitung sebagai CR
Depresiasi Kapital	Tidak dihitung sebagai CR	Tidak dihitung sebagai CR	Dihitung sebagai CR	Dihitung sebagai CR	Dihitung sebagai CR	Dihitung sebagai CR
2	DOMESTIC MARKET OBLIGATION (DMO)					
Kuantitas DMO	Old oil dan New Oil: 25% x 35% x produksi	Old oil dan New Oil: 25% x 35% x produksi	Old oil: 25% x 15% x produksi New Oil: holiday selama 60 bulan	Old oil: 25% x 15% x produksi New Oil: holiday selama 60 bulan	Old oil: 25% x 15% x produksi New Oil: holiday selama 60 bulan	Old oil: 25% x 15% x produksi New Oil: holiday selama 60 bulan
Fee DMD	Old oil dan New Oil: 0,2 USD/barrel	Old oil dan New Oil: 0,2 USD/barrel	Old Oil: 0,2 USD/barrel New Oil: 100% dari harga CR	Old Oil: 10% - 25% dari harga CR New Oil: 100% dari harga CR	Old Oil: 10% - 25% dari harga CR New Oil: 100% dari harga CR	Old Oil: 10% - 25% dari harga CR New Oil: 100% dari harga CR
3	PROSENTASE BAGI HASIL					
Minyak	85% : 35%	85% : 35%	85% : 15%	Bervarias 85% : 15%, 80% : 20%, 75% : 25%	Bervarias 85% : 15%, 80% : 20%, 75% : 25%	Bervarias 85% : 15%, 80% : 20%, 75% : 25%
Gas	85% : 35%	85% : 35%	65% : 35%	Bervarias 70% : 30%, 80% : 40%, 55% : 45%	Bervarias 70% : 30%, 80% : 40%, 55% : 45%	Bervarias 70% : 30%, 80% : 40%, 55% : 45%
PAJAK	56%	56%	56%	48%	48%	44%
INVESTMENT CREDIT	Tidak ada	Tidak Ada	17% - 20%	17% - 20%	17% - 20%	17% - 20%

Sumber: Penelitian LP3ES dari berbagai sumber

Lampiran 6

Masukan Marwoto Mitrohardjono:

COST RECOVERY PT PERTAMINA EP

I. PENDAHULUAN

Sebagai anggota F-PAN yang baru 2 bulan duduk di panitia anggaran DPR RI, ketika rapat panitia kerja (panja) asumsi panggar yang membahas *cost recovery* PT Pertamina EP sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero), saya mempersoalkan adanya kegagalan akuntansi dalam kasus ini yang menurut saya merupakan kesalahan akuntansi yang fatal dengan kecenderungan sebagai rekayasa akuntansi yang merugikan negara sebesar Rp 21,85 triliun.

II. IDENTIFIKASI MASALAH

PT Pertamina EP atas dasar kontrak-kontrak yang berlaku menurut PT Pertamina EP dan Keputusan Menteri Keuangan no.454/KMK.06/2005 tanggal 21 September 2005, mengajukan pembebanan *cost recovery* melalui *Work Program and Budget* (WP&B) yang berupa *cost recovery* atas aset milik PT Pertamina (Persero) yang dipakai untuk kegiatan hulu migas yang dibebankan/ dialokasikan sebagai *operating cost* melalui depresiasi selama 5 tahun secara *straight line method* (Ref.PPC exhibit C article III.3.2 dan Kontrak Migas Pertamina exhibit C article III.3.2) dengan total *cost recovery* dari tahun 2004 sampai dengan 2008 sebesar Rp 21,85 triliun. Adapun besarnya pembebanan biaya depresiasi untuk WP&B 2008 yang diajukan

akan menjadi beban APBN TA 2008 adalah sebesar US\$ 333 juta yang merupakan tahun terakhir (tahun kelima) pembebanan ke *operating cost*.

Jadi untuk biaya depresiasi empat tahun sebelumnya yaitu tahun 2004, 2005, 2006, dan 2007 telah direalisasikan pembayarannya sebagai beban APBN TA 2004, 2005, 2006, dan 2007.

Masalah tersebut saya persoalkan karena dari sisi akuntansi terjadi kesalahan fatal dan karenanya tidak dapat dipertanggung jawabkan secara akuntansi sehingga menurut saya klaim *cost recovery* PT Pertamina EP tersebut merugikan negara sebesar Rp. 21,85 triliun.

Dan ternyata setelah saya dalam lebih lanjut, klaim *cost recovery* PT Pertamina EP tersebut bukan hanya salah fatal dari sisi akuntansinya tetapi juga secara legalitas tidak dapat dipertanggung jawabkan validitasnya.

III. ANALISIS

A. Dari sisi akuntansi

Saya berpendapat bahwa telah terjadi kesalahan akuntansi yang fatal yang menjurus sebagai suatu manipulasi akuntansi terkait dengan masalah claim *cost recovery* PT Pertamina EP. Untuk itu terlebih dahulu marilah kita cermati bersama-sama suatu hal yang sangat fundamental atau sangat prinsip secara akuntansi yaitu mengenai masalah wajar atau tidaknya depresiasi atas aset Pertamina yang digunakan untuk sektor hulu itu merupakan bagian dari *cost recovery* PT Pertamina EP (yang dalam konteks ini adalah *cost recovery* PT Pertamina EP sebagai kontraktor kontrak karya). Sesuai dengan penjelasan dari BP migas pada waktu rapat di panja Panitia Anggaran DPR RI tentang prinsip-prinsip kontrak *production sharing* yang di antaranya adalah: "Penerimaan dari penjualan produksi migas setelah dikurangi *cost recovery* akan dibagihasilkan antara kontraktor dan pemerintah." Kalau memang salah satu prinsipnya seperti itu maka pemerintah sebelum memberikan persetujuan atas permohonan

pengajuan *cost recovery* harus terlebih dahulu meneliti secara cermat kebenaran klaim *cost recovery* dari siapa pun kontraktornya termasuk dari PT Pertamina EP. Dari hasil pendalaman yang saya lakukan menunjukkan bahwa klaim *cost recovery* oleh PT Pertamina EP telah merugikan negara/merugikan APBN kita karena salah secara akuntansi dan karenanya tidak dapat dipertanggung jawabkan. Untuk membuktikannya maka mari kita bedah bersama dari sistem akunransinya sebagai berikut:

1. Pengertian depresiasi

Prinsip akuntansi yang lazim digunakan dalam dunia akuntansi di negara mana pun yang sifatnya sudah merupakan *international accounting* adalah *Generally Accepted Accounting Principle* (GAAP). Menurut GAAP, depresiasi merupakan metode alokasi biaya (*cost allocation* bukan *expense allocation*) yang sistematis dan rasional untuk periode-periode akuntansi (*accounting period*) yang menerima manfaat dari aktiva tetap (*fixed assets*) dimaksud. Tujuan utama depresiasi adalah membentuk cadangan depresiasi / *allowance for depretiation* yang maksudnya adalah untuk menghitung potensi yang susut karena pemakaian atau karena turunnya nilai potensi dari aset yang bersangkutan sebagai *periodic charge*. Jadi dalam akuntansi penyusutan, tekanan diberikan kepada proses *matching* antara *cost* dan *revenue*.

2. Metode depresiasi

Banyak metode depresiasi yang bisa diterapkan antara lain: *double declining balance method*, *inventory method*, *straight line method*, dan sebagainya. Dari sisi metode tidak ada masalah, yang penting adalah penerapan konsep depresiasinya dapat memberikan penyajian yang layak (*fair presentation*) dan dilakukan secara taat asas (konsisten).

3. Accounting treatment dari depresiasi

Pembentukan cadangan depresiasi adalah merupakan *non cash transaction*. Dalam konteks kontrak migas antara BP Migas dengan PT Pertamina EP, depresiasi hanya dibatasi untuk aset yang berupa “peralatan” (lihat kontrak migas **pertamina** antara BP Migas dan

PT Pertamina EP pasal XI). Adapun jurnal untuk depresiasi yang semestinya adalah:

Debet: Depresiasi / *Depreciation*

18

Kredit: Cadangan Depresiasi / *Allowance for Depreciation*

Pos depresiasi itu termasuk *nominal account* yaitu kelompok rekening Rugi/Laba, karena depresiasi itu merupakan *cost* yang di-alokasikan menjadi beban *accounting period* yang bersangkutan. Sedangkan cadangan depresiasi / *allowance for depreciation* itu merupakan *evaluation account* atau *offsetting account* yaitu sebagai rekening pengurang neraca di mana dalam penyajiannya selalu nampak di *balance sheet* sebagai pengurang harga perolehan aset yang merupakan *real account* di neraca.

Jadi secara akuntansi, pembentukan cadangan depresiasi melalui pembebanan depresiasi itu bukanlah transaksi kas (*non cash transaction*). Jadi tujuannya hanyalah untuk *matching cost against revenue*.

Dalam konteks klaim *cost recovery* PT Pertamina EP di sini dimasukkan sebagai *cash transaction* oleh pemerintah dengan jurnal:

Debet: Depresiasi

Kredit: Kas/APBN

Jadi *accounting treatment* ini menyalahi prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum (GAAP).

Masalahnya adalah telah terjadi penyimpangan dari GAAP, yaitu pembentukan cadangan depresiasi yang merupakan *non cash transaction* diperlakukan oleh pemerintah dalam *accounting treatment* nya sebagai *cash transaction* sehingga kesalahan akuntansi ini (apakah ini disengaja atau tidak wallahu alam bisawab) merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar. Data-data menunjukkan bahwa aktiva tetap hulu migas yang didepresiasi oleh PT Pertamina EP meliputi total Rp 21,850 triliun terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Tanah	Rp 3,757 t
Bangunan	Rp 0,802 t
Mesin	Rp 8,536 t
Sumur migas	Rp 8,445 t
Rig equipment	Rp 0,257 t
Kendaraan & sistem telek	Rp 0,052 t
<hr/>	
Total	Rp 21,850 t

Terlihat jelas dari rincian angka-angka di atas bahwa aset yang didepresiasi oleh PT Pertamina EP dan depresiasi dimaksud dibebankan sebagai *operating cost* yang dimintakan *cost recovery*-nya kepada pemerintah melalui WP&B adalah termasuk aktiva-aktiva tetap berupa tanah, bangunan dan sumur migas. Padahal menurut kontrak antara BP Migas dan PT Pertamina EP (berdasarkan PPC Sect.VIII dan Kontrak Migas Pertamina Pasal XI) hanya dibatasi pada:

- a. Peralatan yang dibeli, terdaftar dan dioperasikan sebelum kontrak.
- b. Peralatan yg dibeli setelah kontrak.

Dari sini sudah jelas menyalahi kontrak di samping menyalahi prinsip-prinsip akuntansi. Sebagaimana kita ketahui bahwa sumur minyak dan gas itu adalah milik negara kita sebagai *fixed assets* negara kita.

Pertanyaan yang muncul adalah apakah wajar kita membentuk cadangan depresiasi itu untuk *replacement* secara *cash* diberikan kepada PT Pertamina EP sebagai pengganti atas sumur-sumur migas sebagai aset negara yang karena pemakaiannya atau karena kita sedot isinya sehingga ketika nilai asetnya sudah menjadi semakin turun karena habis masa manfaatnya (habis *useful life*-nya) sehingga *residual value* atau book value-nya tinggal Rp 1,- atau Rp 0,-

Sumur-sumur minyak dan gas milik negara kita yang dieksplorasi itu tidak akan pernah bisa digantikan oleh PT Pertamina EP yang menerima *cost recovery* itu. Ini suatu kebodohan yang sangat ironis

Dengan *cost recovery* dalam bentuk *cash transaction* yang diberikan oleh pemerintah kepada PT Pertamina EP ini adalah sangat menyimpang dari prinsip akuntansi. Mereka bukan pemilik *fixed assets* dimaksud tersebut tetapi mereka mendapat *cost recovery* secara tunai.

Di satu sisi kita sudah memberi keuntungan berupa bagi hasil penerimaan dari penjualan produksi migas, di sisi lain kita masih memberikan *cost recovery* secara tunai kepada PT Pertamina EP sebagai kontraktor atas *fixed assets* milik kita sendiri berupa sumur migas yang nilai manfaatnya / nilai bukunya / *residual value*-nya semakin ke arah Rp 0,-

Dari analisis saya ini sangat jelas bahwa *klaim cost recovery* yang diberikan kepada PT Pertamina EP itu secara akuntansi tidak bisa dipertanggungjawabkan alias salah fatal.

Sebagai analogi: kita mempunyai mobil yang kita operasikan sebagai taksi, untuk itu kita membuat kontrak karya dengan sopir sebagai operatornya. Sopir mendapat keuntungan berupa hasil di atas setoran kepada kita, lantas di luar penghasilan itu kita masih memberi *cost recovery* secara tunai kepada sopir yang notabene bukan pemilik mobil. *Cost recovery* mobil dimaksud adalah berupa cadangan depresiasi mobil melalui depresiasi setiap tahunnya sebagai pengganti karena mobil kita semakin usang, semakin menurun nilainya, semakin menurun potensinya. Masalahnya si sopir menerima *cost recovery* secara tunai, apakah memangnya si sopir yang akan melakukan *re-placement* atas mobil kita? Jawabannya pasti tidak.

B. Dasar hukum

Dasar hukum atas klaim *cost recovery* PT Pertamina EP tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan beberapa alasan sebagai berikut:

1. Klaim PT Pertamina EP yang merujuk pada Pertamina *Petroleum Contract* (PPC) **tidak dapat diterima** karena PPC tersebut tidak bisa dijadikan dasar hukum dengan alasan bahwa PPC tersebut merupakan perjanjian kerja antara PT Pertamina (Persero) dengan pemerintah yang diwakili BP Migas di mana status badan hukum PT Pertamina (Persero) berbeda dengan status badan hukum PT Pertamina EP. Sehingga PPC hanya berlaku untuk PT Pertamina (Persero) dan tidak berlaku untuk PT Pertamina EP.

PPC *section VIII* yang dipakai oleh PT Pertamina EP sebagai rujukan tidak dapat diterima sebagai dasar hukum untuk pengajuan *cost recovery* karena:

- a. Kontrak ini hanya mengikat antara BP Migas dengan PT Pertamina (Persero).
- b. Klaim *cost recovery* hanya terbatas untuk *equipment* yang dibeli oleh PT Pertamina (Persero) tidak termasuk tanah, bangunan, dan sumur migas.

2. Klaim *cost recovery* PT Pertamina EP yang merujuk pada kontrak migas Pertamina antara BP Migas dan PT Pertamina EP untuk wilayah kerja Pertamina EP pasal XI **tidak dapat diterima** sebagai dasar hukum untuk pengajuan *cost recovery*-nya karena pasal XI ayat 11.1, 11.2, dan 11.3 semuanya hanya mengatur tentang pengertian peralatan (tidak termasuk aktiva tetap seperti tanah, bangunan dan sumur migas).

3. Klaim *cost recovery* PT Pertamina EP yang merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan No.454/KMK.06/2005 tanggal 21 September 2005 **tidak dapat diterima** sebagai dasar hukum untuk pengajuan *cost recovery* PT Pertamina EP karena KMK tersebut merupakan Keputusan Menteri Keuangan yang menyangkut tentang Penetapan Neraca Pembukaan Sementara Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina, di mana nilai aktiva tetap PT Pertamina (Persero) yang dalam KMK tersebut ditetapkan nilai aktiva per posisi tanggal 17 September 2003 yang

belum diaudit (*unaudited*) sebesar Rp 89,268,148,702,441 dengan rincian sebagai berikut:

Dari rincian angka diatas terlihat nilai aktiva tetap Hulu Migas PT Pertamina (Persero) untuk Entitas Ex DOH/*Geothermal*/ KP Hulu sebesar Rp.23,600,555,371,182 terinci sebagai berikut:

Entitas	Nilai Aktiva Tetap
Ex DOH/ <i>Geothermal</i> /K	23,600,555,371,182
Ex UP	47,803,262,798,112
Ex UPMS/Dit. Hilir	14,196,777,429,822
Ex. DOK/PKK	92,536,815,860
Ex. Kantor Pusat	3,276,304,714,465
Ex. Pwk Tokyo	298,711,573,000
Total	89,268,148,702,441

Dari rincian nilai aktiva tetap Hulu Migas PT Pertamina (Persero) tersebut sebesar Rp 23,600,555,371,182 tersebut diatas terlihat bahwa di dalamnya termasuk angka Rp 21,850,255,266,215

DOH/Lokasi	Tanah	Bangunan	Mesin
Geothermal	35,275,202,000	30,034,625,467	361,509,809,800
EP	3,757,370,856,060	802,642,405,096	8,536,110,553,659
Trading	8,237,205,000	-	1,237,837,180,000,00
Total	3,800,883,263,060	832,677,030,563	10,135,457,543,459

Sumur	Rig equipment	Kendaraan & Sistem Telek	Total
77,406,082,700	-	-	504,225,719,967
8,445,406,275,450	257,214,463,450	51,510,712,500	21,850,255,266,215
-	-	-	1,246,074,385,000
8,522,812,356,150	257,214,463,450	51,510,712,500	23,800,555,371,182

(Rp21,85 triliun) yang diklaim oleh PT Pertamina EP sebagai beban *cost recovery*. Padahal aktiva tersebut seluruhnya adalah milik negara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai aktiva tetap hulu migas dalam Neraca Pembukaan Sementara

PT Pertamina (Persero) sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan No.454/KMK.06/2005 tanggal 21 September 2005. Jadi angka *cost recovery* yang diklaim oleh PT Pertamina EP melalui WP&B sebesar Rp 21,85 triliun tersebut bukanlah depresiasi atas aktiva yang dibeli sendiri oleh PT Pertamina EP sebelum kontrak sebagaimana aturan main yang diatur dalam kontrak dimaksud melainkan merupakan nilai aktiva tetap hulu migas PT Pertamina (Persero) sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan No.454/KMK.06/2005.

IV. KESIMPULAN

Dari analisis saya sebagaimana tersebut di atas maka dapat saya simpulkan sebagai berikut:

1. Klaim *cost recovery* oleh PT Pertamina EP sebesar Rp 21,85 triliun untuk tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 tidak dapat dipertanggung jawabkan baik secara akuntansi maupun secara legalitasnya, sehingga merugikan negara sebesar Rp 21,85 triliun. Temuan saya tentang kesalahan akuntansi ini telah diakui baik oleh wakil-wakil dari Departemen Keuangan, Departemen ESDM, BP Migas maupun PT Pertamina (Persero) dalam rapat Panitia Anggaran pada waktu itu.
2. Klaim *cost recovery* yang diajukan sebagai pembebanan biaya depresiasi melalui WP&B 2008 sebesar US\$ 333 juta yang merupakan tahun terakhir pembebanan *operating cost* harus dihentikan. Atas temuan saya ini maka sebagai usulan saya adalah agar permintaan *cost recovery* sebesar US\$ 333 juta untuk tahun 2008 tersebut ditolak. Hal ini telah disetujui dalam rapat panggar.
3. *Cost recovery* yang telah dibayarkan melalui APBN tahun anggaran 2004, 2005, 2006 dan 2007 dengan perhitungan sejak penetapan aktiva PT Pertamina (Persero) perposisi tanggal 17 September 2003 yang belum diaudit / *unaudited* sampai dengan 31 Desember 2007 mencapai sebesar US\$ 2,327 juta (dua milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta dolar). Terkait dengan masalah

ini, sebagai usulan saya adalah agar *cost recovery* yang telah telanjur dibayarkan sebesar US\$2,327 juta tersebut segera ditarik kembali ke APBN se-cepatnya. Tetapi usulan saya ini tidak mendapat persetujuan sepenuhnya dalam rapat panggar. Usulan saya diterima dengan toleransi waktu di mana keputusan panggar pada waktu itu adalah kepada pihak-pihak yang bersangkutan diberi waktu untuk melakukan hitung-hitungan kembali selama enam bulan dimulai dari bulan September 2007.

4. Saya mengusulkan agar segera dilakukan audit investigasi oleh BPK mengenai masalah ini untuk mengusut siapa-siapa yang harus bertanggung jawab atas kasus ini serta mengusut ke mana uang itu mengalir. Untuk ini telah diputuskan oleh panggar agar BPK melakukan audit untuk tujuan tertentu terkait dengan masalah ini.
5. Tidak tertutup kemungkinan terjadinya penyimpangan akuntansi maupun legalitas dalam masalah klaim *cost recovery* oleh KPS-KPS yang lainnya selain PT Pertamina EP ini yang potensial bisa merugikan Negara. Untuk ini perlu dilakukan audit investigasi juga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi

- Ayyittey, George B.N. 2005. *Africa Uncabined: The Blueprint for Africa's Future*, New York: Palgrave Macmillan.
- Batubara, Marwan dkk. *Tragedi dan Ironi Blok Cepu, Nasionalisme yang Tergadai*, Jakarta: Bening Citra.
- Baylis, John dan Steve Smith. 2006. *The Globalization of World Politics*, New York: Oxford University Press.
- Brata, Ravi. 2007. *The New Golden Age*, New York: Palgrave Mac Millan.
- Brzenzinski, Zbigniew. 2007. *Second Chance*, New York: Basic Books.
- Chomsky, Noam. 2002. *Media Control: the Spectacular Achievement of Propaganda*, New York: Seven Stories Press.
- Chossoudousky, Michael. 2007. *America's War on Terrorism*, KL: Thinker's Library SDN.BHD.
- Engardio, Pete. 2007. *Chindia: How China and India Are Revolutioning Global Business*, USA: McGraw-Hill.
- Foster, John B. dan Robert W McChesney. 2004. *Pox Americana: Exposing the American Empire*, London: Pluto Press.
- Friedman, Thomas L. 2006. *The World is Flat* , London: Penguin Books.
- Garrison, Jim. 2004. *America as Empire : Global Leader or Rogue Power?*, San Francisco : BK Publishers, Inc.

- Herman, Edward S. and Noam Chomsky. 1988. *Manufacturing Consent: The Political and Economy of Mass Media*, New York: Pantheon Books.
- Hiatt, Steven, ed. 2007. *A Game As Old As Empire*, San Fransisco: Berret-Koehler Publishers.
- Korten, David. 1995. "Buying Out Democracy" dalam *When Corporations Rule the World*, Kumarian Press.
- Lederer, William J. 1961. *A Nation of Sheep*, Greenwich: Fawcett.
- Mac Gillivray, Alex. 2006. *Globalization*, London : Constable & Robinson.
- Maimunah, Siti (ed). 2006. *Freeport*, Jakarta: WALHI dan JATAM.
- Mills, C. Wright. 1956. *The Power Elite*, Oxford Press.
- Muhammad, Chalid et -al. 2005. *Tambang dan Kemiskinan: Catatan Kecil Kasus Pertambangan di Indonesia 2001-2993*, Jakarta: JATAM.
- Muhammad, Chalid dan Siti Maimunah. 2006. *Tambang dan Penghancuran Lingkungan*, Jakarta: JATAM.
- Nace, Ted. 2004. *Gangs of America, The Rise of Corporate Power and The Disabling Democracy*, Berkeley: Ted Nace.
- Palast, Greg. 2006. *Armed Madhouse*, New York: Penguin Group (USA) Inc.
- Perkins, John. 2006. *Confessions of an Economic Hit Man*, London: Penguin Books Ltd.
- _____. 2007. *The Secret History of the American Empire*, New York: Penguin Group (USA) Inc.
- Said, Edward. 1994. *Representations of the Intellectuals*, New York: Vintage.
- Saul, John Ralston. 2005. *The Collapse of Globalism And The Reinvention of The World*, New York: The Overlook Press, Peter Mayer Publisher Inc.
- Stiglitz, Joseph E. 2002. *Globalization and Its Discontents*, Work. New York: W. W. Norton & Company.
- _____. 2003. *The Roaring Nineties: Seeds of Destruction*, New York: W. W. Norton & Company.

- _____. 2006. *Making Globalization Work*, New York: W. W. Norton & Company.
- Soros, George. 2004. *The Bubble of American Supremacy*, London : Phoenix
- Vidal, Gore. 2004. *Imperial America: Reflection on the United States of Amnesia*, New York: Nation Books.

Artikel dan Jurnal

- "Anatomy of Corporate Takeover", http://www.unesco.org/courier/2001_11/uk/dossll.htm
- "Corporate Crime Reporter", <http://www.corporatecrimereporter.com/top100.html>
- "Deforestation puts Indonesia as 3rd largest greenhouse gas emitter" <http://asia.news.yahoo.com/0703/23/kyodo/d8023ef80.html>
- "Development and Globalization as Imperialism", <http://laberinto.uma.es>, January 30, 2005
- "Endgame Profile of Freeport-McMoran", <http://www.endgame.org/freeport.html>
- "Globalization : Threat or Opportunity?", <http://www.imf.org/external/np/exr/ib/2000/041200.html>
- "Indonesian Fastest Forest Destroyer", http://www.treehugger.com/files/2007/05/indonesia_fastest.php
- "Intellectual in Politics", <http://www.prospect-magazine.co.uk/article-details.php?id=3979>
- "Pacifism: The Ultimate Immorality", <http://www.freerepublic.com/focus/f-news/1671688/posts>
- "Rainforest Deforestation- Indonesia Matters", <http://www.indonesiamatters.com/1252/rainforest-deforestation>
- "UU Pesanan Kartel Neo Kolonial", <http://achmad.supardi.blogspot.com/2007/08>

- Attiyyey, George, "Testimony Before the Senate Foreign Relations Committee", 28 September 2004.
- BEI News Edisi 29 Tahun V, Januari – Februari 2006.
- Birns, Larry, dan Nicholas Birns, "The Reverberations of American Populism", *Harvard International Review*, 27 Juni 2007.
- Bisnis Indonesia*, 18 Desember 2007.
- Borst, William, "Mindszenty Report", Yayasan Kardinal Mindszenty, Vol. XLV –No.1, Januari 2003.
- Brecher, Jeremy, and Brendan Smith, "Bush War Crimes", <http://www.counterpunch.org/brecher/12062005.html>
- Buchanan, Patrick, "Whose war?", <http://www.amconmag.com/3-24-03/cover.html>
- CBS/KCBS, 3 Agustus 2007.
- Christian Science Monitor*, 12 Juli 2007.
- Cohen, Elliot, <http://www.truthdig.com/interview/print/20070802>
last days of democracy
- Congressional Research Service January 2007, Order Code RL33604
- Daily Shipping Newsletter, No. 087, Wednesday, 27-11-2002.
- Demint, www.iadb.org/ethics
- East Beats West, *The Spectator*, 18 Maret 2000.
- Edwards, David, "*The Wound Outside*", http://www.thirdworldtraveler.com/Media_control_propaganda/Wound_Outside_BAI.html
- Engelhardt, Tom, "*Empire of Stupidity*", <http://hnn.us/roundup/entries/42584.html>
- Free and Fair Trade, "*Global Agenda 2006*".
- Fuad Bawazier, "Kepemilikan asing di Indonesia", *Republika ONLINE*
- Galbraith, James K., "A Perfect Cronie : Inequality in the Age of Globalization", *Daedalus*, Winter 2002.
- Gatra*, 14-20 Februari 2008.
- Gie, Kwik Kian, "Kemana Sumber Daya Alam dan Mineral Kita?", *Bisnis*, 16 Januari 2006.

Hakim, Chappy, "Kedaulatan Negara di Udara dan DCA", *Kompas*, 1 Agustus 2007.

Hindustan Times, October 15, 2006.

<http://www.brill.nl/uploadedFiles/170.pdf>

<http://en.wikipedia.org/wiki/Dutch-East-India-Company>

<http://en.wikipedia.org/wiki/Dutch-East-India-Company>

http://faculty.Virginia.edu/mesp/Fatton_Globalization_Terror.pdf

<http://www.sahistory.org.za/pages/special/projects/VOC/VOC.html>

http://Encarta.msn.com/text_1741588347_0/Globalization.html

<http://www.britannica.com/eb/article-22811/Indonesia>

http://en.wikipedia.org/wiki/Washington_Consensus

<http://speakingoffaith.publicradio.org/programs/neihbuhr-rediscovered/edu-adult-union-shtml>

<http://www.brainyquote.com/quotes/authors/a/arnold-j-toynbee.html>

<http://www.worldbank.org/wbi/governance/data/2006>

<http://en.Wikipedia.org/wiki/Paul-Tilliich>

http://en.wikipedia.org/wiki/criticism_of_the_WTO

<http://freepress.org/departments/display/20/2006/2085>

<http://rightweb.ire-online.org/profile/1571>

<http://www.12manage.com/description-lap-dog-theory.html>

<http://www.ahram.org.eg/print/2006/783/bo66.htm>

http://www.brainyquote.com/quotes/author/l/lord_action.html

<http://www.drmaglio.com/articles/culturewar/internet.php>

<http://www.famoustexans.com/georgewbush.html>

<http://www.infed.org/biblio/defining-globalization.html>

<http://www.wanttoknow.info/massmedia>

http://www12manage.com/description_watchdog-model.html

<http://www12manage.com/description-tichenor-guard-dog-theory.html>

Interview Chomsky dengan Sameer Dossani, <http://www.50years.org/cms/update/story/383>

Jaman, Ian, *Assosiated Press*, 23 September 2007.

James Gibb Stuart, <http://www.prosperityuk.com/prosperity/articles/jgsl.html>

Kingsnorth, Paul, <http://www.arlindo-correia.com/041006.html>

Klein, Naomi, "*Latin America's Shock Resistance*", <http://www.alternet.org/story/67745>

Kompas, 13 Agustus 2007.

Kompas, 22 Desember 2004.

Kompas, 29 November 2007.

Livinstone, "Baffour Ankomah", I Presume, [http://www.swans.com/library/art 9/ankomah 8](http://www.swans.com/library/art%209/ankomah%208)

Maass, Alan, *Socialist Worker Online*, 12 Februari 2002.

Mudrajad Kuncoro, *Kompas*, 19 Desember 2007.

Mufid A. Busyani, "Relevansi Survei Korupsi Dewan", *Tempo Interaktif*, 25 Januari 2007.

Phillilps, Kevin, "*America Petrocracy*", *The American Conservative*, 17 Juli 2006.

Pitt, Willian Rivers, "*Of Gods and Mortals and Empire*", [http://www.truthout.org/docs 02/022203 A.p.html](http://www.truthout.org/docs%2002/022203.A.p.html)

Ponzini, Raymond, "*American Caligula*", the peoplesvoice.org, [http://liberty. Hypermart.net/voices/2004/American Caligula.html](http://liberty.hypermart.net/voices/2004/American%20Caligula.html)

Robert Weissman, "*Old Warriors*", <http://www.counterpunch.org/weissmann09192007.html>

Ryn, Claes G., "*The Ideology of American Empire*", *Orbis*, Summer 2003.

Saparini, Hendri, "90% Migas Kita Dikuasai Asing", [http://moslemgen.multiply com/ journal/item/443](http://moslemgen.multiply.com/journal/item/443)

Scheer, Robert, *Ike was Right*, http://www.truthdig.com/report/print/20061226_robert_scheer_ike

Seputar Indonesia, 15 Agustus 2007.

- Shariati, Ali, "a brief biography", <http://www.geocities.com/CapitolHill/Lobby/2554/Shariati.html>
- Siswono, Makalah Diskusi Roundtable PAN "Save the Nation", 13 Desember 2007, Jakarta.
- South Bulletin* 124, 15 Mei 2006.
- Stiglitz, Joseph. "Globalism's Discontents", *The American Prospect*, Winter 2002
- Stockbaer, Bette, <http://antiwar.com/orig/stockbauer1.html>
- Sunday Business* (London), July 30, 2006.
- Supardi, Yogi, "Perjanjian Kerjasama Pertahanan Indonesia-Singapura Mencederai Integritas Nasional dan Kedaulatan dan Integritas Teritorial dan Harga Diri Bangsa Indonesia", Makalah disampaikan di Fraksi PAN, DPR RI, Juli 2007.
- Syahnakri, Kiki, "Sekali Lagi Soal DCA RI-Singapura", *Kompas*, 7 Agustus 2007.
- Tempo*, 26 Agustus 2007.
- Tempointeraktif*, 21 Desember 2004.
- The IMF, The World Bank, and the Glohal Economy, <http://socialistalternative.org/publications/imtwb/introduction>
- The Independent*, Juni 2003.
- The World Bank Group, "Globalization", http://www1.worldbank.org/economic_policy/globalization/ag_01.html
- Time*, 24 Juli 2001.
- Walden Bello, "Globalization in Retreat", <http://www.fpip.org/fpifxt/3826>
- Washington Post*, 10 Sepet 2007.
- Watch, Source, http://sourcewatch.org/index/php?title=Military-industrial_co...
- Weisbrot, Mark, *International Business Times*, 15 Juni 2007.
- Wibowo, Dradjad H., "Ironi Blok Cepu", *Tempo*, 27 Maret – 2 April 2006.
- Wikipedia, "Embedded Journalist", the free encyclopedia

_____, “Evo Marales”, the free enemyclopedia

_____, “*Fourth Estate*”, the free encyclopedia, [http://
en.wikipedia.org/wiki/Fourth-estate](http://en.wikipedia.org/wiki/Fourth-estate)

_____, [http://en. Wikipedia.org/ wiki/Neocolonialism](http://en.Wikipedia.org/wiki/Neocolonialism)

_____, [http://en.wikipedia.org/wiki/Military_budget_of_the
US](http://en.wikipedia.org/wiki/Military_budget_of_the_US)

INDEKS

A

Abraham Lincoln, 84
 Abu Gharib, 67
 Adolf Hitler, 128
 Afghanistan, 67, 73
 AFSC (*American Friends Service Committee*), 120
 AFTA, 206
 agenda reformasi, 244
 Ahmadinejad, Presiden Iran, 146
 Al-Qur'an, 128, 130, 171, 246
 Alan Greenspan, 93
 Albert Wohlstetter, 60
 Alberto Gonzales, 68
 Alejandro Schtulmann, 36
 Alex Mac Gillivray, 11
 Ali Shariati, 52, 128
 Amerika Latin, 101, 142, 146
 Andrew Marshall, 60
 anggota Kongres, 85, 107
 Anoop Singh, 102
 Anthony Giddens, 14
 APBN, 155, 194, 198, 200
 arbitrase nasional, 239
 Arbusto Energy, 92
 Argentina, 103
 aristokrasi, 82
 Arnold J. Toynbee, 78
 Arthur Andersen, 85

ASEAN, 153
 Asia Timur, 43

B

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 95, 155, 187, 221, 223:
 kinerja, 189
 penjualan, 188
 bangsa pelayan, 237
 Bank Dunia (*World Bank*), 13, 32, 57, 95-98, 105, 184, 185, 218
 Bank untuk Selatan, 100
 PBB, 59:
 DK PBB, 19
 Sekjen PBB, 98
 SU PBB, 147, 154
 Bhinneka Tunggal Ika, 245
 BI, 159
 Bill Clinton, 59, 61
 Biro Riset Info Bank, 159
 birokrasi kekuasaan, 120
 BLBI, 158
 Blok Cepu, 51, 164
 Bolivia, 45, 103, 144
 Botswana, 44
 brain-washing, 139, 159, 185, 225
 Bretton Woods, 57, 94
 broken government, 233

bubble economy, 39

Budiman Sudjatmiko, 157

Bung Karno, 19, 20, 139, 214,
243, 246

Bush, 26, 59, 68, 69, 92

C

C. Wright Mills, 106, 114, 129

Caligula, 69

capital flight, 152

Charles Olke Van der Plas, 7

Chevron, 91, 197

China, 35, 38, 43, 47, 104, 148,
149, 150, 219

*China International Economic and
Trade Arbitration*, 104

Chindia, 148

Chomsky, 119, 120

circus dogs, 126

ciri imperialisme dan
kolonialisme, 20

Claes C. Ryn, 26

CLSA, 149

Condoleezza Rice, 91

confused government, 234

Cornelius Tacitus, 77

corporate crime, 88

CPD (*Committee on the Present
Danger*), 26

crime of omission, 157

criminal recidivist company, 87

D

Dante Alighieri, 136

Dave Boylan, 118

David Korten, 83, 89

David Swanson, 122

DCA (Persetujuan Pertahanan
Bersama), 172

DDA (*Doha Development Agenda*),
57

debt-free governments, 18

defisit, 188:

 anggaran, 76

APBN, 155

 neraca dagang, 76

defisit demokrasi, 31

dekolonisasi mental, 144

Dick Cheney, 26, 60, 62, 91

doktrin Bush, 27, 66, 70-74, 219

doktrin *pacta sunt servanda*, 46,
49

Dominick Maglio, 107

Donald Rumsfeld, 26, 67

donasi korporasi, 133

DPG, 60

DPR, 91, 145, 155, 183, 190, 200,
203, 205, 242

Dradjad Wibowo, 165, 203

E

ecocida, 239

Edmund Burke, 115

Edward Herman, 116

Edward Said, 134

Edy Suandi Hamid, 211

Eisenhower, 109, 111

ekonomi Amerika rapuh, 76

elite nasional, 8, 9, 153, 158

Elliot Cohen, 123

Enron, 38, 85

era reformasi, 155

*European Bank of Reconstruction
and Development*, 184

Evo Morales, Presiden Bolivia,
45, 143

Exxon Mobil, 51, 87, 164

Ezra Pound, 153

F

FBI, 129

FDI (investasi asing langsung),
13, 104

Fox News, 123

Freeport MacMoran, 52, 161

Fuad Bawazier, 160

fundamentalisme agama, 27

fundamentalisme pasar, 27, 44,
72, 230

G

Gadjah Mada, 220
GATT, 57
gelombang merah jambu, 101
genocida, 4, 66
geografi sosial, 14
George Attiyyei, 152
George Bernard Shaw, 3
George Orwell, 126
George Santayana, 2
George Soros, 27, 140
George W. Bush (lihat juga
Bush), 25, 69
globalisasi, 11, 22, 29:
 definisi, 13
 doktrin, 25
 ekonomi, 218
 eksploitatif, 23
 euphoria, 17
 impian, 18
 janji, 17
 model, 40
 privatisasi, 189
 proses, 217
 pusaran, 219
 pusat studi, 105
Goh Cok Tong, 169
Gore Vidal, 59
Greenpeace, 156
Greenspan, 37
Guantanamo, 67
guard dog, 125

H

Halliburton, 91, 111
HAM, 222
Harken Energy, 92
Harry Magdoff, 79
hegemoni Amerika, 39, 56
Hendri Saparini, 197
Henry Kissinger, 93

Henry Veltmeyer, 24
Herakleitos, 97
Hitler, 68
HPH, 156, 240
Hugo Chavez, Presiden Venezu-
ela, 45, 99, 103, 142
hutang, 76, 243

I

I. Lewis Libby, 60
I.F.Stone, 215
IBRD, 57
ICSID, (*International Center for
Settlement of Inv.*) 102
Ideologi pasar, 20
Ideologi rasialis, 128
IGGI, 154, 185
illegal logging, 157
IMF, 12, 30, 31, 33, 57, 95-98,
105, 140, 145, 185, 218
imperialisme:
 Amerika, 25
 ekonomi, 29
India, 38, 43, 47, 148, 219
informasi asimetris pelaku pasar,
30
intelektual:
 bayaran, 137
 "netral", 131
 pasifis, 131
 penentang perubahan, 131
 pengabdikan kekuasaan, 137
 pengabdikan kebenaran, 130
investasi pendidikan, 47
investasi asing, 13
Iraq, 67, 73, 92
Irving Kristol, 26

J

J.B. Foster, 79
J.B. Van Heutsz, 7
James Gibb Stuart, 141
James Giffen, 51
James K. Galbraith, 23

Jan Aart Scholte, 13
 Jan Pieterzoon Coen, 4
 Jane Akre, 118
 Jeffrey Sachs, 98
 Jesse Jackson, 96
 Jim Garrison, 27
 John Perkins, 29, 81, 176
 John Ralston Saul, 17
 John Williamson, 15
 Joseph Arthur Comte de
 Gobineau, 128
 Joseph Stiglitz, 20, 29, 40, 52

K

kapitalisme internasional, 151
 kaum:
 inlander, 53
 intelektual, 7
 neo-liberal, 40
 necons, 59, 62, 66
kazakhgate, 51
 keadilan sosial, 39
 kecanduan hutang, 155
 kejahatan korporasi, 87, 180
 kekayaan tambang, 45
 kekuatan korporatokrasi
 internasional, 2, 175
 kekuatan militer, 175
 kelemahan kunci, 40
 kemandirian nasional, 236
 kemiskinan, 232
 Kenichi Ohmae, 18
 kepemilikan:
 asing, 158
 modal, 210
 kepemimpinan:
 kolektif, 236
 Yudhoyono-Kalla, 232
 kesenjangan ekonomi, 21
 keuntungan pertambangan, 44,
 45
 KK (Kontrak Karya), 144, 164,
 171, 182, 196, 238

KKS (Kontrak Kerja Sama), 204,
 238
klausul rebus sic stantibus, 46
klausula rebus sic stantibus, 49
 kleptokrasi, 82
 Kontrak Karya Freeport, 163
 kontrak karya pertambangan,
 46, 47
 Kofi Annan, 98
 komite privatisasi, 190
 kompleks militer-industrial, 110,
 113, 114, 122 (lihat *military*
 industrial complex)
 komprador, 197, 205
 Koninlijke Brill, 6
 Konsensus Washington, 16, 185,
 187, 90, 198, 205, 230, 240 (lihat
 Washington Consensus)
 korporasi:
 residivis kriminal, 87
 Amerika, 90, 161
 asing, 45, 48
 besar, 217
 skandal, 85
 korporatokrasi, 80, 81, 82, 219
 korupsi, 177, 178, 213:
 birokratik, 179
 ecek-ecek, 179, 182
 jalanan, 178
 sandera negara (*state-capture*),
 191, 215, 223, 235, 237
 subversif, 180
 paling berbahaya, 223
 KPK, 238
 KPS (kontrak *production sharing*),
 50, 144, 199, 238
 krisis ekonomi, 38, 141
 krisis hutang, 33
 kutukan kekayaan alam/SDA,
 41, 43
 Kwik Kian Gie, 165, 198
Kyoto Protocol, 71

L

lagu kebangsaan, 245
land reform, 47
lapdog, 126
leadership change, 235
 liberalisasi:
 perbankan, 185
 pasar modal, 47
 pendidikan, 211
 Likudnis Washington, 62
 Lord Acton, 79, 224

M

mafia Berkerley, 185
 Mahapatih Gadjah Mada, 220
 Mahathir Mohammad, 18, 20, 139
 Mahatma Gandhi, 173
 Mahkamah Konstitusi, 202, 203
 Mahmoud Ahmadinejad, 19, 147
 Majapahit, 220
 Malaysia, 43, 44, 167, 170, 219
 Margaret Thatcher, 16
 Mark Fishman, 120
 Martin Khor, 34
 Marwan Batubara, 164
 Marwoto Mitrohardjono, 200
 media massa, 6, 115, 116, 242
mentalitas inlander, 9, 139,
 150, 156, 154, 161, 164, 176,
 230, 236
mentalitas terjajah, 150
 Michael Camdessus, 28
 Michael Chassudovsky, 105
 Michael Klare, 114
military-industrial-congressional
complex, 110, 113
military industrial congressional
media complex, 122
military-industrial complex, 108
 militer pelayan, 115
 MIMC (*Military Industrial Media*
Complex), 122
 Montesquieu, 115

Movimiento al Socialismo (MAS),
 143
 MPR-RI, 169
 MSAA (*Master of Settlement and*
Acquisition Ag.), 191

N

Nabi Muhammad SAW, 3, 172
 NAFTA, 37, 90
 Narman Hsu, 89
 nasionalisasi, 48
nation-building, 24
nation of frogs, 108
nation of sheep, 107
 NATO, 63
 NCC (*National Council of the*
Churches of Christ), 121
 negara komprador, 138, 160, 176
 negara terkorup, 182
 negosiasi ulang, 47, 48
 neokolonialisme, 19, 181
 neoliberalisme, 25
new military industrial complex,
 113
 NKRI, 192, 222
 Noam Chomsky, 22, 77, 100,
 116
 non-discriminatory, 206
 NSS, 64
 NSS 2002, 66, 70-73
 NSS 2006, 72-74, 113
 nuklir Iran, 19
 Nurlan Balgimbayev, 51

O

Orde Baru, 231
 Organisasi Perdagangan Dunia
 (lihat WTO), 105
 Osama bin Laden, 27

P

pacta sunt servanda 238
 pak Harto 28, 244

- Pancasila, 235, 246
paradox of plenty, 41
 pasar saham, 6
 pasca Perang Dingin, 56
 Pat Buchanan, 62
 patologi keuntungan, 218
 Patrick Awuah, 213
 Patrick Graham, 68
 patriot sejati, 220
 Paul Craig Robert, 68
 Paul Sweezy, 79
 Paul Tillich, 129
 Paul Wolfowitz, 26, 60, 62, 98, 112
 Pax Americana, 59, 219
 pemangku kekayaan alam, 164
 pembelian keputusan politik, 183
 pembunuhan lingkungan, 239
 pemerintah:
 Belanda, 3, 4
 Clinton, 86, 89
 Mexico, 90
 Yudhoyono, 198, 230
 Bush, 91
 pemerintahan Yudhoyono, 164, 215, 220, 221
 pemimpin tipe *inlander*, 153
 penegakan hukum, 231
 pencurian pasir, 166, 241
 pengangguran, 232
 penjajahan ekonomi asing, 235
 penjara mental, 146
 penjarahan aset nasional, 223
 penyakit:
 bawaan, 33, 38
 debt-addicted, 154, 241
 inlander, 53
 mencari untung (*pathology of profit*), 84
 penyanderaan negara, 184
 penyogokan gelap, 51
 Perang:
 Dingin, 55, 58
 Dunia II, 55, 58
 Dunia III, 55
 Iraq, 74
 Vietnam, 58
 perekat nasional, 246
 Perjanjian Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Singapura (DCA), 145, 229
 Pertamina, 197, 199
 pesanan korporasi asing, 243
pink tide, 142
 PLO, 153
 plutokrasi, 82
 politik imperialisme, 60
 Pox Americana, 137, 219
 PP No. 76/2007, 210, 228
 PP No. 77/2007, 210, 213
 PP No. 2 /2008, 234
 Presiden Bolivia, 143
 Presiden Bush, 9, 19
 Presiden Ecuador, 144
 Presiden Eisenhower, 108
 Presiden Habibie, 185, 222
 Presiden Megawati, 187
 Presiden Nestor Kirchner, 145
 Presiden Nursultan Nazarbayev, 51
 Presiden Republik Ceko, 135
 Presiden Sukarno, 19
 Presiden Susilo Yudhoyono, 19, 156
 Presiden Truman, 24
 Presiden Venezuela, 142
 privatisasi, 32, 187:
 BUMN, 187
 menutup defisit, 189
 produksi minyak nasional, 197
 program ODA, 24
Project for the New American Century, PNAC, 62
 Propenas, 191
 Pusat Studi Globalisasi, 105
 Putaran Uruguay, 37, 57

R

- R.W. Johnson, 151
 RAD (*Rebuilding America's Defenses*), 62, 63
 Rafael Correa, Presiden Ecuador, 99
 Ravi Batra, 213
 Raymond Ponzini, 69
rebus sic stantibus, 238
 reformasi struktural, 25
 Reinhold Neibuhr, 129
release and discharge, 191
 Resolusi DK PBB, 19
resource curse, 41
 revolusi sosial, 232
 Revrisond Baswir, 214
 Richard Perle, 26, 60
 Robert Kagan, 62
 Robert Klitgaard, 177
 Robert Reich, 18
 Ronald Reagan, 16
 Rosihan Anwar, 53
 Rumsfeld, 62, 91
 Russia, 43
 R.W. Mc Chesney, 79

S

- Saddam, 68
 sang saka merah putih, 245
 SAP, 95, 140
 Saparini, 198
 SBI (Setifikat Bank Indonesia), 159
 serdadu sewaan, 111
 Shaikh Abdullah Bakhsh, 92
 Singapura, 167
 sistem:
 informasi, 123
 korporatokrasi, 85
 elekomunikasi, 123
 Siswono Yudho Husodo, 204
 skandal:
 korporasi, 38, 86
 moral, 98

- Snouck Hurgronje, 7
 Soekarno dan Hatta, 1
 Sofian Effendi, 211
 Sony Kerat, 162
 Sriwijaya, 220
 stabilitas politik, 32, 222
state capture corruption, 177, 182, 192, 195, 204, 212, 230, 237
state hijacked corruption, 177, 196
state-corporate crime, 181
 Steve Wilson, 118
 Steven Hiatt, 82
 Stiglitz, 20, 30, 32, 34, 36, 38, 40-45, 47, 48, 72, 74 (lihat Joseph Stiglitz)
subservient and stupid dog, 127
 Sultan Agung, 220
 Sultan Hasanuddin, 220
 Sultan Iskandar Muda, 220
 Susilo B. Yudhoyono, 9, 192, 194, 224
 Syahnakri, 229

T

- Tap. MPR No X/2002, 191
 Tata Dunia Baru, 59, 105
 teori komplotan (*conspiracy theories*), 62
The International Rights Covenant on Civil and Pol., 49
The National Security of the United States of Am., 64
 Thomas Carlyle, 116
 Thomas L. Friedman, 23
 Timothy Garton-Ash, 136
 TINA, 16
 Tjatur Sapto Edy, 203
 tokoh neokom, 26, 64
 Tom Engelhardt, 64

U

UNCTAD, 26
 undang-undang yang bersifat strategis, 242
United Nations, 57 (lihat PBB)
United States of Amnesia, 59
Universal Declaration of Human Rights, 50
 Universitas Toronto, 133
 US Treasury Department, 15
 UU, 242
 UU No. 10/1988, 185
 UU No. 19/2003, 187, 188
 UU No. 20, 202
 UU No. 20/2001, 178
 UU No. 22 /2001, 197, 201
 UU No. 25 /2007, 205, 209, 228
 UU No. 31 /1999, 178
 UU No. 41 /1999, 234
 UU No. 77 /1967, 196
 UU NO. 77/2007, 228
 UU Penanaman Modal, 207
 UU Perbankan, 186
 UUD 1945, 50, 171, 184, 193, 202, 244

V

Vaclav Havel, Presiden Republik Ceko, 135
 Venezuela, 45, 103
 VOC, 3, 83, 221

W

WALHI, 161
 Warsito, 166
Washington Consensus, 15, 71, 96
watchdog, 125
 Wen Jiabao, Perdana Menteri China, 148
 William Elkins, 84
 William J. Lederer, 107
 William Kristol, 26, 62

World Bank (WB), lihat Bank Dunia

World Com, 38, 86

WTO (*World Trade Organization*), 34, 37, 57, 186, 206, 212, 218

Y

Yudhoyono, lihat Susilo B. Yudhoyono

Z

Zalmay Khalilzad, 60

Zapata Oil, 92

Zbigniew Brzezinski, 65

Zionisme Israel, 60